



Keadilan bagi Semua

Satuan Tugas
Keadilan

Laporan terakhir
www.justice.sdg16.plus



Laporan Akhir ini terdaftar pada Lisensi Internasional Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0) <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>. Berdasarkan lisensi Creative Commons Attribution, Anda bebas untuk menyalin, mendistribusikan, mengirim, dan membuat adaptasi atas Laporan Akhir ini, termasuk untuk tujuan komersial, selama Anda menyebutkan dan menunjukkan perubahan-perubahan yang Anda lakukan.

Mohon untuk mengutip Laporan Akhir ini sebagai: Satuan Tugas Keadilan, *Keadilan bagi Semua - Laporan Satuan Tugas Keadilan*. (New York: Center on International Cooperation, 2019), tersedia di <https://www.justice.sdg16.plus/>

Fotografi: Bart Hoogveld

Keadilan bagi Semua

Satuan Tugas Keadilan

Daftar Isi

Satuan Tugas Keadilan	6
Ucapan Terima Kasih	11
Singkatan	12
Definisi	13
Kata Pengantar	14
Ikhtisar	16
Bagian 1: Mengapa Kita Membutuhkan Keadilan bagi Semua	28
Bab 1: Kesenjangan Keadilan	30
Keadilan bagi semua?	31
Mengumpulkan Data Keadilan yang Berpusat pada Rakyat	32
Kesejangan Keadilan dengan Tiga Dimensi	34
<i>Rakyat hidup dalam kondisi ketidakadilan yang ekstrem · Rakyat yang tidak dapat menyelesaikan masalah-masalah keadilan mereka · Rakyat yang terpinggirkan dari peluang yang disediakan oleh hukum</i>	
Hambatan Mewujudkan Keadilan bagi Semua	43
Bab 2: Bukti dan Argumen untuk Aksi	48
Investasi dalam Keadilan bagi Semua	49
Biaya Ketidakadilan	50
<i>Ketidakadilan mahal bagi rakyat dan masyarakat · Biaya keadilan membebani masyarakat dan ekonomi</i>	
Manfaat Investasi Keadilan	54
<i>Mengurangi risiko konflik dan ketidakstabilan · Peningkatan kapasitas untuk mencegah dan menyelesaikan masalah keadilan sehari-hari · Membebaskan potensi ekonomi masyarakat yang lebih adil</i>	
Pembiayaan Keadilan bagi Semua	59
<i>Biaya keadilan bagi semua · Apakah keadilan bagi semua akan terjangkau? · Strategi apa yang dapat meningkatkan keterjangkauan?</i>	
Sorotan 1: Mencapai yang terjauh di belakang terlebih dahulu	66
Bagian 2: Membangun Masyarakat yang Adil	68
Bab 3: Memecahkan Masalah-masalah Keadilan	70
Mentransformasi Keadilan	71
Memahami Masalah-masalah Keadilan	72
Masalah-masalah keadilan yang paling umum	74
Perjalanan Keadilan yang Lebih Baik	76
<i>Memberdayakan rakyat dan komunitas · Akses untuk mendapatkan layanan keadilan yang berpusat pada rakyat · Hasil yang adil</i>	

Bab 4: Mencegah Ketidakadilan	86
Pergeseran ke Pencegahan.....	87
Mengapa Pencegahan?.....	88
Pencegahan Seperti Apa?.....	89
<i>Mencegah dan mengurangi eskalasi perselisihan · Mencegah kekerasan · Mencegah konflik dan ketidakstabilan · Mempromosikan inklusi dan melindungi hak-hak</i>	
Membuat Pergeseran ke Pencegahan.....	99
<i>Meningkatkan kepercayaan terhadap sistem peradilan · Mengatasi akar penyebab ketidakadilan · Menggunakan hukum untuk mengurangi risiko</i>	
Sorotan 2: Menanggapi pelanggaran massal atas hak asasi manusia	102

Bagian 3: Pemandu Keadilan 104

Bab 5: Mengarahkan Perubahan	106
Menuju Keadilan bagi Semua.....	107
Jalan Menuju Keadilan bagi Semua.....	108
<i>Model-model perubahan · Hambatan dan peluang untuk reformasi · Momentum global untuk keadilan</i>	
Tuas Reformasi Keadilan.....	113
<i>Menggunakan data dan bukti untuk mengarahkan reformasi · Membuka kekuatan transformatif inovasi · Menerapkan strategi-strategi untuk pembiayaan keadilan yang lebih cerdas · Membangun sistem peradilan yang lebih koheren dan inklusif</i>	
Bab 6: Agenda Aksi	120
Visi Baru Keadilan bagi Semua.....	121
Agenda Aksi Nasional.....	122
<i>Menyelesaikan masalah-masalah keadilan yang paling berarti bagi rakyat · Mencegah masalah-masalah keadilan dan menciptakan peluang-peluang bagi rakyat untuk berperan serta sepenuhnya di dalam masyarakat dan perekonomian mereka · Investasi dalam sistem-sistem dan lembaga-lembaga peradilan yang bekerja untuk masyarakat dan yang dilengkapi untuk mampu menanggapi kebutuhan-kebutuhan mereka akan keadilan</i>	
Agenda Aksi Internasional.....	123
Seruan untuk bertindak.....	124
Sorotan 3: Orang-orang yang menyediakan keadilan	126
Lampiran 1: Metodologi	128
Catatan Akhir	132

Apa Yang Berhasil di Seluruh Dunia.....

<p>Afrika Selatan </p> <hr/> <p>Petugas penasihat komunitas 57</p> <p>Kontrak visual untuk pemetik buah 90</p> <p>Tindakan pengendalian senjata api 94</p>	<p>Amerika Serikat </p> <hr/> <p>Bantuan hukum untuk menghindari pengusuran 57</p> <p>Uang jaminan berdasarkan risiko pelanggaran ulang 85</p> <p>Kolaborasi antar-lembaga untuk bantuan hukum 117</p>	<p>Argentina </p> <hr/> <p>Pusat akses keadilan 83, 97</p> <p>Data keadilan terbuka 114</p> <p>Justicia 2020 114</p>
<p>Australia </p> <hr/> <p>Kurangi pelanggaran ulang dan penggunaan narkoba 58</p> <p>Pusat hukum komunitas 83</p> <p>Memahami masalah keadilan rakyat 97</p>	<p>Bahama </p> <hr/> <p>Keadilan yang cepat 109</p>	<p>Bangladesh </p> <hr/> <p>Akses ke pengadilan desa 57</p>
<p>Belanda </p> <hr/> <p>Kolaborasi untuk pencegahan kejahatan 118</p>	<p>Brasil </p> <hr/> <p>Penyederhanaan pajak bagi pengusaha 59</p>	<p>Britania Raya </p> <hr/> <p>Layanan pemberian nasihat kepada warga 57</p> <p>Tindakan layanan hukum 110</p>
<p>Burundi </p> <hr/> <p>Pusat penyintas kekerasan berbasis gender 83</p>	<p>Ekuador </p> <hr/> <p>Bantuan hukum dan kekerasan dalam rumah tangga 81</p>	<p>Filipina </p> <hr/> <p>Inisiatif transparansi industri ekstraktif 96</p>
<p>Georgia </p> <hr/> <p>Kantor polisi berding kaca 98</p>	<p>Guatemala </p> <hr/> <p>Komisi internasional melawan impunitas 55</p>	<p>India </p> <hr/> <p>Mediasi di pengadilan keluarga Kolkata 77</p>
<p>Indonesia </p> <hr/> <p>Pengakuan nasional atas paralegal 109</p>	<p>Kanada </p> <hr/> <p>Tujuan pembangunan keadilan 109</p>	<p>Kenya </p> <hr/> <p>Reformasi konstitusi dan pemeriksaan 98</p>



Kenya, Rwanda, Uganda



Platform informasi online untuk pedagang 90

Libanon



Pemolisian berorientasi komunitas 93

Liberia



Mediasi di pondok perdamaian 63, 96

Paralegal mengendarai sepeda motor 81

Mali



Kolaborasi dalam rantai peradilan pidana 118

Mexico



Dukungan hukum untuk narapidana 75

Tanggapan sektor swasta terhadap kekerasan 112

Mozambik



Pendanaan paralegal oleh sektor kesehatan 117

Pakistan



Sistem identitas biometrik 98

Peru



Mediasi oleh ombudsman 96

Rwanda



Mediasi berbasis komunitas 83

Pendaftaran tanah yang tanggap gender 99,110

Pemberdayaan hukum perempuan 83

Sierra Leone



Dewan kemitraan polisi lokal 95

Tanzania



Hak atas tanah bagi perempuan 58

Tunisia



Reformasi peradilan 53

Ukraina



Strategi pencegahan terintegrasi 93

Uni Emirat Arab



Prosedur klaim kecil 109

Inovasi di kementerian hukum 115

Satuan Tugas Keadilan

Satuan Tugas Keadilan merupakan inisiatif the Pathfinders for Peaceful, Just and Inclusive Societies - kemitraan multi-pemangku kepentingan yang menyatukan negara-negara anggota PBB, organisasi internasional, masyarakat sipil, dan sektor swasta untuk mempercepat pencapaian target-target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) untuk perdamaian, keadilan dan inklusi.

Ketua Bersama



Germán Carlos Garavano, Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Argentina



Sigrid Kaag, Menteri Perdagangan Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan, Belanda



Priscilla Schwartz, Jaksa Agung dan Menteri Kehakiman, Sierra Leone



Hina Jilani, seorang Elder.

Anggota



Alejandro Alvarez, Direktur, Rule of Law Unit, Kantor Eksekutif Sekretaris Jenderal, PBB



Donny Ardyanto, Penasihat Program Pemberdayaan Hukum dan Akses terhadap Keadilan, Yayasan TIFA, Indonesia



James Goldston, Direktur Eksekutif, Open Society Justice Initiative



Pablo de Greiff, Senior Fellow dan Adjunct Professor of Law, NYU, dan mantan Pelapor Khusus tentang promosi kebenaran, keadilan, reparasi, dan jaminan tidak terulang, OHCHR



Sara Hossain, Pengacara, Mahkamah Agung Bangladesh



Kalthoum Kennou, Hakim di Pengadilan Kasasi Tunisia



Vivek Maru, Chief Executive Officer, Namati



Allyson Maynard-Gibson QC, Pengacara, mantan Jaksa Agung dan Menteri Urusan Hukum Bahama



Athaliah Molokomme, Duta Besar dan Perwakilan Tetap Botswana untuk Kantor PBB di Jenewa, mantan Jaksa Agung, Botswana



Owen Pell, Mitra, White & Case LLP



Marta Santos Pais, Mantan Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal untuk Kekerasan terhadap Anak

Sherpa untuk Ketua Bersama



María Fernanda Rodríguez, Wakil Menteri Kehakiman, Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Argentina



Jelte van Wieren, Direktur Departemen Stabilisasi dan Bantuan Kemanusiaan, Belanda



Shahid Korjie, Acting Penjabat Koordinator Sektor Kehakiman, Kementerian Kehakiman, Sierra Leone



Mitra Keadilan





Sekretariat Satuan Tugas Keadilan

Center on International Cooperation (CIC) Universitas New York berfungsi sebagai sekretariat Satuan Tugas Keadilan. CIC turut mendirikan dan menjadi tuan rumah the Pathfinders for Peaceful, Just and Inclusive Societies.

David Steven, Senior Fellow dan Associate Director; **Maaïke de Langen**, Kepala Riset untuk Satuan Tugas Keadilan; **Karina Gerlach**, Penasihat Program Senior; **Alisa Jimenez**, Asisten Program.

Mark Weston, penulis dan konsultan; **Jane Frewer**, editorial dan manajemen program; and **Lewis Broadway**, desain.

Penasihat Senior untuk Satuan Tugas

Sam Muller, CChief Executive Officer, Hague Institute for Innovation of Law (HiiL); **Anthony Triolo**, Pejabat Senior Hubungan Eksternal, University of South Carolina Rule of Law Collaborative.

Alur Kerja Satuan Tugas

Kelompok Kerja Kesenjangan Keadilan dipimpin oleh World Justice Project, bersama dengan Hague Institute for Innovation of Law (HiiL), Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Argentina, Center on International Cooperation (CIC) Universitas New York, the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Open Society Justice Initiative (OSJI), United Nations Development Programme (UNDP), University College London, United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), UNODC-INEGI Center of Excellence, White & Case LLP, dan Bank Dunia.

Bukti dan Argumen untuk Investasi menyertakan hasil penelitian dari Overseas Development Institute, Canadian Forum on Civil Justice, the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), dan Bank Dunia.

Kelompok Tingkat Tinggi tentang Keadilan untuk Perempuan yang diselenggarakan oleh UN Women, International Development Law Organization (IDLO), dan the World Bank Group, bersama Abubacarr Marie Tamberou, Menteri Kehakiman Gambia; Catherine Harrington, Manajer Kampanye, Global Campaign for Equal Nationality Rights; Dubravka Simonovic, Pelapor Khusus PBB untuk Kekerasan terhadap Perempuan; Frida Angelica Gomez Perez, Director-General, Noticias Tiemposmodernos, and National Councilor for the Evaluation and Monitoring of Public Policies on Youth, Mexican Youth Institute; Hilary Gbedemah, Ketua, The Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) Committee; María Fernanda Rodríguez, Wakil Menteri Kehakiman, Argentina; Nana Darkoa Sekyiamah, Direktur Informasi, Komunikasi dan Media, The Association for Women's Rights in

Development (AWID); Nathalie G. Drouin, Wakil Menteri Kehakiman dan Wakil Jaksa Agung, Kanada; Nursyahbani Katjasungkana Ketua, Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan, Indonesia; Patricia Scotland, Sekretaris Jenderal Persemakmuran; dan Rangita de Silva de Alwis, Wakil Dekan, Universitas Pennsylvania.

Kelompok Kerja Inovasi dipimpin oleh Sam Muller, Chief Executive Officer, HiIL, dengan Abdulla Al-Majid, Inovasi Pengadilan, Kepala Pejabat Inovasi, Kementerian Kehakiman, UEA; Allyson Maynard-Gibson QC, Pengacara dan mantan Jaksa Agung dan Menteri Urusan Hukum, Bahama; Eddie Hartman, salah satu pendiri, LegalZoom; Gerald Abila, pendiri, Barefoot Law & mSME Garage; Gillian Hadfield, Universitas Toronto; Mark Beer OBE, Presiden, The International Association for Court Administration; Michelle Arevalo-Carpenter, salah seorang pendiri, IMPAQTO; Michiel Scheltema, Penasihat Khusus Keadilan untuk pemerintah, Belanda; Luis Franceschi, Dekan, Sekolah Hukum Strathmore; Robert Kraybill, Managing Director, Impact Investment Exchange; Sandra Elena, Kepala, Program Keadilan Terbuka, Kementerian Kehakiman, Argentina; Janet McIntyre, Wakil Direktur Jenderal, Divisi Antar Pemerintah dan Hubungan Eksternal, Kementerian Kehakiman, Kanada.

Kelompok Kerja Transisi Keadilan dipimpin oleh the International Center for Transitional Justice (ICTJ), Bersama dengan Kementerian Kehakiman, Argentina; Asia Justice and Rights (AJAR); Dejusticia; Kementerian Kehakiman, Gambia; Kantor Luar Negeri Federal, Jerman; Impunity Watch; International Bar Association; Institute for Integrated Transitions; Kementerian Luar Negeri, Belanda; Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia; Kantor Pelapor Khusus PBB untuk mempromosikan kebenaran, keadilan, reparasi, dan jaminan ketidakberulangan; Open Society Justice Initiative (OSJI); Redress; Badan Kerjasama Pembangunan Internasional, Swedia; Departemen Luar Negeri Federal, Swiss; Swisspeace; Pengadilan Kasasi, Tunisia; Program Pembangunan PBB (UNDP); Kantor Dukungan Perdamaian PBB; dan UN Women.

Kelompok Kerja Teknis Keadilan untuk Anak dipimpin oleh CELCIS- Inspiring Children's Futures di Universitas Strathclyde, Bersama dengan Kantor Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal tentang Kekerasan terhadap Anak-anak, dan the Child Justice Advocacy Group, dikoordinasikan oleh Terre des hommes dan Defence for Children International.

Acara Konsultasi

16+ Showcase, Freetown, 7-10 Oktober 2018

The Big Think on Justice, Den Haag, 15 November 2018

Innovating Justice Forum, Den Haag, 5-6 Februari 2019

Justice Partners Forum, Den Haag, 7 Februari 2019

Think Justice, konsultasi daring, September-Desember 2018

Laporan Hasil Penugasan

World Justice Project, "Mengukur Kesenjangan Keadilan: Penilaian yang Berpusat pada Rakyat tentang Kebutuhan Keadilan yang Belum Terpenuhi di Seluruh Dunia" (Satuan Tugas Keadilan, makalah latar belakang, April 2019)

Marcus Manuel, Clare Manuel dan Harsh Desai, *Akses universal ke keadilan dasar: perhitungan biaya TPB 16.3 Kertas Kerja ODI 554*. (London: Overseas Development Institute, 2019). Makalah disiapkan untuk Satuan Tugas Keadilan

Trevor Farrow dan Lisa Moore, "Perhitungan Biaya Kesenjangan Keadilan, Hasil Investasi untuk Layanan Keadilan yang Disediakan oleh Organisasi Masyarakat Sipil," (Satuan Tugas Keadilan, makalah latar belakang, 2019)

Kelompok Tingkat Tinggi tentang *Keadilan untuk Perempuan, Keadilan untuk Perempuan - Laporan Kelompok Tingkat Tinggi*. (New York: UN Women, IDLO, Bank Dunia dan Satuan Tugas Keadilan, 2019)

Kelompok Kerja Inovasi, "Inovasi keadilan: dibutuhkan dan mungkin," (Satuan Tugas Keadilan, makalah latar belakang, Januari 2019)

Kelompok Kerja Transisi Keadilan, "Laporan Transisi Keadilan dan SDG16+," (Satuan Tugas Keadilan, makalah latar belakang, Maret 2019)

Stephen Golub, "Kontribusi Masyarakat Sipil terhadap Keadilan: Vital, Efektif, dan Bernilai Rendah, Benih Perubahan: Aksi Lokal Berkontribusi pada Reformasi Hukum dan Kebijakan," dan "Keadilan Akar Rumput: Peran dan Dampak Paralegal," (Satuan Tugas Keadilan, kertas kerja, 2019)

Center on International Cooperation, *Makalah tantangan: Keadilan sebagai Pencegahan*. (Satuan Tugas Keadilan, makalah latar belakang, Desember 2018)

Kelompok Kerja Teknis Keadilan untuk Anak, "Makalah Tantangan Keadilan untuk Anak," (Satuan Tugas Keadilan, makalah latar belakang, yang akan datang)

White & Case LLP, "Tata Kelola NSO untuk Data Keadilan yang Lebih Baik," (memo disiapkan untuk Satuan Tugas Keadilan, bersama dengan serangkaian masukan dan memo penelitian terpisah)

Masukan Penting Lainnya

The Elders, *Akses terhadap Keadilan - Makalah Posisi*. (London: The Elders Foundation, 2019)

HiiL, *Memahami Kebutuhan Keadilan - Gajah di Ruang Sidang*. (Den Haag: HiiL, 2018)

Vivek Maru dan Varun Gauri (eds), *Paralegal Komunitas dan Upaya Mencari Keadilan*. (Cambridge: Cambridge University Press, 2018)

OECD, *Menempatkan rakyat sebagai pusat: Akses layanan keadilan yang setara untuk kesejahteraan ekonomi dan sosial*. (Paris: OECD, 2019)

OECD dan Open Society Justice Initiative, *Survei Kebutuhan Hukum, dan Akses Keadilan - peluncuran salinannya*. (Paris dan New York: OECD/OSF, 2019)

OECD dan World Justice Project, "Membangun Bukti dan Argumen Bisnis untuk Akses Keadilan - Buku Putih OECD bekerja sama dengan World Justice Project: Draft awal," 2019

Satuan Tugas Keadilan menerima bantuan dukungan keuangan dari Kementerian Luar Negeri Belanda dan Yayasan Charles Stewart Mott; dan dukungan dalam bentuk barang dari Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Argentina, pemerintah Sierra Leone, pemerintah Kanada, White & Case LLP, Kota Den Haag, dan Komisi Tinggi Inggris di Sierra Leone. Pendanaan untuk Pathfinders for Peaceful, Just and Inclusive Societies juga disediakan oleh Badan Pembangunan dan Kerjasama Swiss dan Kementerian Luar Negeri Swedia. Semua mitra keadilan yang tercantum di halaman 7 juga memberikan kontribusi dalam bentuk barang.

Ucapan Terima Kasih

Dukungan dari Center on International Cooperation Universitas New York

Satuan Tugas Keadilan diawasi oleh Sarah Cliffe, Direktur, Center on International Cooperation NYU, Paige Arthur, Wakil Direktur, dan Hanny Megally, Senior Fellow, bergabung dengan tim peninjau internal. Masukan dan dukungan diberikan oleh para anggota tim Pathfinders lainnya: Harshani Dharmadasa, Rachel Locke, Soomin Lee, Paul von Chamier, Bojan Francuz, dan Justine Brouillaud; serta rekan-rekan CIC lainnya, Sarah Groves, Noah Gall, Jonathan Connors, Kayla Lewis-Hue, Said Sabir, Camilo Lopez Delgado, Céline Monnier, Leah Zamore, Shavon Bell, dan Nendirmwa Parradang.

Satuan Tugas Keadilan mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada mereka yang disebutkan di bawah ini atas kontribusi mereka terhadap kerja-kerja Satuan Tugas

Abdoulaye Mar Dieye, Abigail Moy, Adrian di Giovanni, Adriana De La Espriella (in memoria), Aidan Harris, Alan George, Alejandro Ponce, Alyson MacLean, Andrew Goudie, Anna Mutaveti, Annette Lyth, Aparna Basynat, Arthur van Buitenen, Åsa Wallton, Aurelie Roche-Mair, Bader Kaba, Beatrice Duncan, Ben Oppenheim, Benoit Van Keirsbilck, Betsy Andersen, Betsy Apple, Bonian Golmohammadi, Boroto Ntakobajira, Bridget Osho, Briony Jones, Caitlin Sislin, Carolina Moreno Diaz, Chantal Joubert, Chloe Lelievre, Christi Sletten, Christina Koulias, Chrysula Winegar, Clare Manuel, Clifford Msiska, Coco Lammers, Cornelius Williams, David Nussbaum, Debbie Wetzel, Dena Motevalian, Denise Torres, Diana Isabel Güiza Gómez, Elisabeth Baumgartner, Elizabeth Cousens, Ellen Swedenmark, Emily Kenney, Enrico Bisogno, Erin Kitchell, Erwin Tuijl, Evelien van Hoeve, Fabián Salvioli, Fahad Saher, Fernando Marani, Fernando Travesi, Francesca Daverio, Galuh Wandita, Gedeon Behiguim, Georgia Harley, Gustavo Maurino, Habib Nassar, Harsh Desai, Heather Grady, Hector Chayer, Hibak Muse, Ibrahimia Koreissi, Ilaria Bottigliero, Isabel Durán, Jago Russell, Janet McIntyre, Jean-Jacques Hible, Jeni Klugman, Jennifer Davidson, Jennifer Tsai, Jenny Yates, Joe Foti, Joe Powell, Joel Samuels, Juan Carlos Botero, Judith van Niekerk, Julia Raue, Justin Haccius, Kady Sylla, Karen Fisher, Karen Wallace, Karina Carpintero, Kate Orlovsky, Katy Thompson, Kaysie Brown, Kelly Dale, Kirsten di Martino, Koen Davidse, Kristen Hope, Kristine Allen, Leoni Cuelenaere, Lex Gerts, Lisa Denney, Lisa Ott, Lorenzo Wakefield, Lotta Teale, Luisa Sanchez, Luke Upchurch, Marcel Ruitter, Marcel Stoessel, Marcia Mersky, Marcus Bonturi, Marcus Lenzen, Marcus Manuel, Margaret Williams, Mariana Otoya, Mariana Pena, Marianne Peters, Marieke Vreeken, Marieke Wierda, Marije van Kempen, Mark Freeman, Mark Madden, Marlies Stappers, Marlon Manuel, Martijn Quinn, Martin Boehmer, Martin Forst, Martin Gramatikov, Martyna Wanat, Mary Okumu, Mary Robinson, Mascha Matthews, Mat Tromme, Matthew Bannon, Matthew Burnett, Maurits Barendrecht, McKinley Charles, Megan Manion, Megan Price, Messina Manirakiza, Michael Warren, Michala Mackay, Minh-Thu Pham, Minke van der Sar, Mô Bleeker, Murray Hunt, Nancy Ward, Nicole Janisiewicz, Olivier Kambala wa Kambala, Pascoe Pleasance, Patricia van Nispen tot Sevenaer, Patrick Burgess, Paul Prettitore, Pema Doornenbal, Pete Chapman, Pilar Domingo, Rea Chiongson, Rebecca Kourlis, Rhodri Williams, Rob Schuurmans, Rodrigo Uprimny Yepes, Roger Duthie, Ross Maclaren, Rupert Skilbeck, Sabrina Büchler, Sabrina Mahtani, Salome Flores, Sander Werrie, Sandra Elena, Sandra Pellegroni, Sandra van der Pal, Santa Falasca, Sarah Long, Saskia Bruines, Sebastiaan Verelst, Serge Rumin, Sharon Johnson, Simon Moss, Stacey Cram, Stephen Zimmerman, Steven Lanting, Steven Malby, Sumaiya Islam, Susan McDonald, Sylvia Hazenbroek, Tatyana Teplova, Teresa Jennings, Teresa Mugadza, Tobijn de Grauw, Tom Gordon, Tonu Basu, Tony Reilly, Tymon Kiepe, Ulysses Smith, Vivek Trivedi, Wilma van Esch, Wim Jansen, Yorokamu Bamwine, Zaza Namoradze.

Satuan Tugas Keadilan mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada organisasi-organisasi sebagaimana disebutkan di bawah ini atas kontribusi mereka dalam kerja-kerja Satuan Tugas

Forum 16+, ABA Rule of Law Initiative, British Council, Commonwealth Secretariat, Department for International Development, European Commission's Directorate-General for Justice and Consumers, Fair Trials International, Georgetown Institute for Women, Peace and Security, Global Alliance for Reporting Progress on Peaceful, Just and Inclusive Societies, Global Citizen, Impunity Watch, LexisNexis, Kementerian Kehakiman Kanada, Kementerian Kehakiman Belanda, National Alliance for the Development of Community Advice Offices, Paralegal Advisory Service Institute, Permanent Mission of Argentina to the United Nations, Permanent Mission of the Netherlands to the United Nations, Permanent Mission of Sierra Leone to the United Nations, Responsive Law, SDG Philanthropy Platform, The New Now, UN Foundation, UN Global Compact, UNHCR, UNICEF, United Nations Office of Rule of Law and Security Institutions.



Singkatan

CALDH	Pusat Aksi Hukum Hak Asasi Manusia
CIC	Pusat Kerjasama Internasional Universitas New York
CRVS	Registrasi Sipil dan Statistik Vital
Wilayah ECA	Wilayah Eropa dan Asia Tengah
PDB	Produk Domestik Bruto
GLEN	Jaringan Pemberdayaan Hukum Global
GPS	Sistem Pemosisian Global
Hiil	Institut Hague untuk Inovasi Hukum
HLPF	Forum Politik Tingkat Tinggi PBB tentang Pembangunan Berkelanjutan
ILO	Organisasi Perburuhan Internasional
IMF	Dana Moneter Internasional
JGWC	Kelompok Kerja Kesenjangan Keadilan
LGBTI+	Orang-orang Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender/Transeksual dan Interseks
MDGs	Tujuan-tujuan Pembangunan Milenium
NSOs	Kantor Statistik Nasional
NYU	Universitas New York
OECD	Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan
ODI	Lembaga Pengembangan Luar Negeri
OSF	Yayasan Masyarakat Terbuka
OSJI	Prakarsa Keadilan Masyarakat Terbuka
SDGs	Tujuan-tujuan Pembangunan Berkelanjutan
PBB	Perserikatan Bangsa-Bangsa
UNDP	Program Pembangunan PBB
UNODC	Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan
UNODC/INEGI	Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan / Pusat Keunggulan dalam Informasi Statistik tentang Pemerintah, Kejahatan, Viktimisasi dan Keadilan
WHO	Organisasi Kesehatan Dunia
WJP	Proyek Keadilan Dunia



Definisi

2030 Agenda	Agenda 2030 PBB untuk Pembangunan Berkelanjutan, diluncurkan pada tahun 2015.
Deklarasi Alma-Ata	Tonggak sejarah utama abad ke-20 di bidang kesehatan masyarakat, yang mengidentifikasi layanan kesehatan primer sebagai kunci pencapaian tujuan Kesehatan untuk Semua.
Arab Spring	Serangkaian protes anti-pemerintah, pemberontakan, dan pemberontakan bersenjata yang menyebar di seluruh Timur Tengah pada akhir tahun 2010.
Layanan keadilan dasar	Layanan tingkat lokal yang memenuhi kebutuhan keadilan sehari-hari masyarakat, melalui mekanisme formal dan informal oleh berbagai pelaku.
Kelompok Tingkat Tinggi tentang Keadilan untuk Perempuan	Sebuah kelompok yang dibentuk sebagai bagian dari alur kerja Satuan Tugas Keadilan, untuk fokus pada kesenjangan keadilan bagi perempuan, bukti dan argumen untuk investasi, dan apa yang dapat berfungsi untuk meningkatkan keadilan bagi perempuan.
High-level Political Forum on Sustainable Development	Platform utama PBB tentang pembangunan berkelanjutan, yang memberikan kepemimpinan politik, pembinaan dan rekomendasi. Forum ini mengadakan pertemuan setiap tahun di New York di bawah naungan Dewan Ekonomi dan Sosial dan setiap empat tahun di bawah naungan Majelis Umum. Forum melakukan tinjauan atas implementasi Agenda 2030.
Kampanye Keadilan bagi Semua	Kampanye global untuk memastikan akses yang sama untuk Keadilan tersedia bagi semua pada tahun 2030 dengan mengadvokasi pendanaan dan perlindungan bagi para pembela keadilan akar rumput.
Kesenjangan keadilan	Kesenjangan antara keadilan yang diinginkan dan dibutuhkan oleh rakyat dengan keadilan yang mereka terima. Lihat bab 1.
Sistem keadilan	Sistem perundangan, kelembagaan dan organisasi dan aktor-aktor yang ada di masyarakat yang menyelesaikan dan mencegah masalah keadilan masyarakat.
Gerakan #MeToo	Sebuah gerakan menentang pelecehan seksual dan kekerasan seksual, dibentuk pada tahun 2017 sebagai tagar di media sosial.
Paralegal	Non-pengacara yang telah menerima pelatihan tentang aspek-aspek hukum dan yang membantu orang lain untuk dapat memanfaatkan hukum.
Pro bono	Layanan gratis yang disediakan oleh para pengacara dan mahasiswa hukum bagi mereka yang tidak mampu membayar.
TPB16.3	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 16.3: Mempromosikan aturan hukum di tingkat nasional dan internasional dan memastikan akses yang sama untuk Keadilan bagi semua.
SDG16+	SDG16 bersama dengan 36 target dari Tujuan-tujuan Pembangunan Berkelanjutan lainnya, yang secara langsung mengukur aspek perdamaian, inklusi, atau akses keadilan.
TPB	17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah cetak biru PBB untuk mencapai masa depan yang lebih baik dan lebih berkelanjutan bagi semua. Tujuan-tujuan ini adalah sebagai jawaban terhadap tantangan global, termasuk yang terkait dengan kemiskinan, ketimpangan, iklim, degradasi lingkungan, kemakmuran, perdamaian, dan keadilan.
SDG Summit	Pertemuan tingkat tinggi PBB pertama tentang SDG sejak ditetapkannya Agenda tahun 2030 pada bulan September 2015. Para Presiden dan Perdana Menteri diminta untuk hadir untuk "memobilisasi tindakan-tindakan lebih lanjut untuk mempercepat implementasinya." Acara ini akan diadakan pada bulan September 2019 sebagai Forum Politik Tingkat Tinggi yang diadakan di bawah Sidang Majelis Umum ke-74.
Kerjasama Selatan-Selatan	Kerangka kerja yang luas untuk kolaborasi di antara negara-negara Selatan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, dan teknis. Melibatkan dua atau lebih negara-negara berkembang, dapat dilangsungkan atas dasar hubungan bilateral, regional, subregional atau antarregional.
Satuan Tugas	Satuan Tugas Keadilan, suatu prakarsa the Pathfinders for Peaceful, Just and Inclusive Societies.

Kecuali dinyatakan lain, semua nilai moneter dinyatakan dalam USD \$

Kata Pengantar

Agenda 2030 tentang Pembangunan Berkelanjutan didasarkan pada visi “dunia yang adil, merata, toleran, terbuka, dan inklusif secara sosial di mana kebutuhan-kebutuhan rakyat yang paling rentan dapat terpenuhi.” Melalui agenda tersebut, semua negara telah berkomitmen untuk membangun masyarakat yang damai, adil dan inklusif yang memberikan akses yang sama untuk keadilan bagi semua dan didasarkan pada penghormatan terhadap hak asasi manusia yang fundamental.

Sebagaimana telah disampaikan oleh Martin Luther King, “Ketidakadilan di suatu tempat adalah ancaman bagi keadilan di semua tempat .” Tanpa keadilan, kita tidak bisa memenuhi janji Agenda 2030 untuk memberantas kemiskinan dalam segala bentuknya, mengatasi ketidaksetaraan dan meningkatkan kesejahteraan bersama, dan melindungi planet ini dari degradasi. Keadilan menopang pemberdayaan gender dan membantu kita terlebih dahulu mencapai mereka yang berada terjauh di belakang.

Laporan ini adalah hasil dari upaya-upaya bersama yang dilakukan oleh para mitra keadilan dunia untuk memetakan jalur menuju akses yang sama untuk keadilan bagi semua. Melalui Satuan Tugas Keadilan, kita telah bekerja bersama untuk mengumpulkan data mengenai skala kesenjangan keadilan dan bukti yang diperlukan untuk mendukung implementasinya. Kami berkomitmen untuk mendukung percepatan tindakan di semua negara dan untuk menunjukkan kemajuan yang terukur karena, pada tahun 2020, kita memasuki dekade baru untuk pencapaian Tujuan-tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Kami menyerukan ke semua negara dan para mitra dari semua sektor untuk bergabung dengan kita dalam memperjuangkan keadilan. Kita sekarang harus bekerja bersama untuk mencegah dan menyelesaikan masalah-masalah keadilan, dengan menggunakan sistem peradilan untuk membantu rakyat, komunitas, dan masyarakat untuk memenuhi potensi mereka. Mari kita bersatu untuk mewujudkan janji keadilan bagi semua menjadi kenyataan.

Satuan Tugas Keadilan



Germán Carlos Garavano



Sigrid Kaag



Priscilla Schwartz



Hina Jilani



Alejandro Alvarez



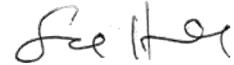
Donny Ardyanto



James Goldston



Pablo de Greiff



Sara Hossain



Kalthoum Kennou QC



Vivek Maru



Allyson Maynard-Gibson



Athaliah Molokomme



Owen Pell

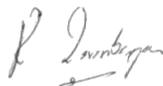


Marta Santos Pais

Mitra Keadilan



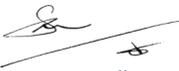
Murray Hunt
Director, Bingham Centre for the Rule of Law



Kees Zevenbergen
Chief Executive Officer, Cordaid



Mary Robinson
Chair, The Elders



Sam Muller
Chief Executive Officer, HiIL



Fernando Travesi
Executive Director, International Center for Transitional Justice



Irene Khan
Director General, International Development Law Organization



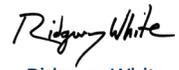
Agneta Johansson
Executive Director, International Legal Assistance Consortium



Megan Price
Head of Office, Knowledge Platform Security & Rule of Law



Patricia van Nispen tot Sevenaer
Director, Microjustice4All



Ridgway White
President and Chief Executive Officer, Charles Stewart Mott Foundation



Sara Pantuliano
Acting Executive Director, Overseas Development Institute



Elizabeth Andersen
Executive Director, World Justice Project



Sanjay Pradhan
Chief Executive Officer, Open Government Partnership



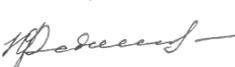
Patrick Gaspard
Executive Director, Open Society Foundations



Joel Samuels
Director, Rule of Law Collaborative, University of South Carolina



Achim Steiner
Administrator, United Nations Development Programme



Yury Fedotov
Executive Director, United Nations Office on Drugs and Crime



Phumzile Mlambo-Ngcuka
Executive Director, UN Women

Ikhtisar

*dari keadilan untuk
segelintir orang menjadi
keadilan bagi semua*

Keadilan bagi semua

Pada jantung Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan terletak visi “dunia yang adil, setara, toleran, terbuka dan inklusif secara sosial di mana kebutuhan-kebutuhan mereka yang paling rentan dapat terpenuhi.”

Keadilan adalah benang merah yang merajut seluruh 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Tanpa peningkatan keadilan, dunia tidak akan bisa mengakhiri kemiskinan, mengurangi ketimpangan, menjangkau terlebih dahulu yang terjauh tertinggal di belakang, menciptakan kondisi untuk kemakmuran bersama dan berkelanjutan, atau mempromosikan perdamaian dan inklusi.

TPB16.3 menetapkan janji untuk memastikan tersedianya akses yang sama terhadap keadilan bagi semua pada tahun 2030. Sasaran-sasaran lainnya mencakup identitas hukum, ketidakadilan seperti korupsi dan aliran keuangan gelap, dan promosi hak-hak dan kesetaraan gender.

Satuan Tugas Keadilan – sebuah prakarsa The Pathfinders for Peaceful, Just and Inclusive Societies– telah melakukan eksplorasi untuk dapat tercapainya sasaran-sasaran ini di dunia di mana miliaran orang belum dapat memperoleh keadilan.

Menyampaikan penelitian yang dilaksanakan oleh organisasi-organisasi dan para pakar keadilan terkemuka dunia, laporan ini memberikan prakiraan awal mengenai kesenjangan keadilan global. Ini akan menjadi bukti dan argumen untuk bergeser dari model yang memberikan keadilan hanya untuk segelintir orang, ke model yang memberikan perbaikan terukur atas keadilan bagi semua.

Di masa lalu, reformasi peradilan sering berfokus pada institusi-institusi, berjarak dengan masyarakat dan gagal memenuhi kebutuhan mereka. Satuan Tugas mengusulkan pendekatan yang berbeda, mendudukkan rakyat sebagai pusat sistem peradilan, dan menempatkan keadilan di jantung pembangunan berkelanjutan.

Pendekatan keadilan yang berpusat pada rakyat dimulai dengan pemahaman akan kebutuhan keadilan masyarakat dan merancang solusi-solusi untuk menanggapi kebutuhan tersebut. Pendekatan ini dilakukan dengan sistem peradilan yang terbuka dan inklusif, dan yang bekerja dalam kolaborasi dengan sektor-sektor lain seperti kesehatan, pendidikan, perumahan, dan pekerjaan.

Untuk mengatasi kesenjangan keadilan dibutuhkan transformasi ambisi – sebuah upaya berkelanjutan untuk memberikan akses keadilan bagi miliaran orang lagi.

Untuk memberikan keadilan bagi semua, negara harus menyelesaikan masalah-masalah keadilan rakyat, mencegah terjadinya ketidakadilan baik besar maupun kecil, dan menciptakan peluang- peluang bagi rakyat untuk berpartisipasi sepenuhnya dalam masyarakat dan perekonomian mereka.

Kesenjangan keadilan global

Sampai saat ini, kurangnya data keadilan mengaburkan skala kegagalan untuk memenuhi kebutuhan keadilan masyarakat, tetapi kini tersedia semakin banyak data yang lebih baik. Survei kebutuhan hukum, survei viktimisasi, dan survei spesialis kini mencakup semakin banyak negara.

Kesenjangan keadilan global memiliki tiga dimensi:

- **Setidaknya 253 juta orang hidup dalam kondisi ketidakadilan yang ekstrem**

Empat puluh juta orang hidup dalam perbudakan modern, 12 juta tidak memiliki kewarganegaraan, dan lebih dari 200 juta tinggal di negara atau masyarakat di mana tingkat ketidakamanan yang tinggi membuat mereka tidak mungkin mencari keadilan.

- **1,5 miliar orang memiliki masalah keadilan yang tidak bisa mereka selesaikan**

Orang-orang dalam kelompok ini adalah korban kekerasan atau kejahatan yang tidak dilaporkan. Atau mereka memiliki masalah keadilan perdata atau administrasi yang tidak dapat mereka selesaikan, seperti sengketa tanah atau penolakan layanan publik. Hampir 60 persen masalah keadilan saat ini tidak terselesaikan.

- **4,5 miliar orang berada di luar peluang yang disediakan oleh undang-undang**

Lebih dari 1 miliar orang tidak memiliki identitas hukum. Lebih dari 2 miliar bekerja di sektor informal dan jumlah yang sama tidak memiliki bukti kepemilikan rumah atau tanah. Ini membuat mereka rentan terhadap pelecehan dan eksploitasi dan kurang mampu mengakses peluang ekonomi dan layanan publik.

Secara total, 5,1 miliar orang – yang berarti dua pertiga dari populasi dunia – tidak memiliki akses yang berarti terhadap keadilan. Saat rakyat di semua negara terpengaruh, beban ketidakadilan ini tidak didistribusikan secara acak di antara mereka.

Kesenjangan keadilan merupakan cerminan dari ketidaksetaraan struktural dan merupakan kontributor atas kondisi ketidaksetaraan ini.

Perempuan dan anak-anak paling kesulitan untuk mengakses keadilan. Satu miliar anak adalah korban kekerasan, misalnya. Setengah dari perempuan percaya bahwa tidak ada gunanya melaporkan kasus pelecehan seksual kepada polisi.

Orang miskin, penyandang cacat, dan orang-orang dari komunitas etnis minoritas ada di antara kelompok-kelompok rentan yang juga paling kesulitan untuk mengakses keadilan. Ketidakadilan yang mereka alami meningkatkan kemungkinan bahwa mereka akan terus tertinggal.



Biaya ketidakadilan

Pada 2010, seorang penjual buah Tunisia berusia 26 tahun bernama Mohamed Bouazizi membakar dirinya di luar sebuah gedung pemerintah sebagai protes atas pelecehan oleh kepolisian yang terus menerus dia alami. Kematianannya memicu protes yang menyebar pertama kali melalui Tunisia dan kemudian di seluruh dunia Arab.

Kasus Bouazizi melibatkan masalah keadilan terkait dengan dokumentasi (dia tidak memiliki izin untuk kios buahnya, tetapi masih belum jelas apakah izin itu diperlukan atau tidak), penyalahgunaan wewenang oleh aktor keadilan, dan ketidakmampuan untuk menyampaikan keluhan. Bagi orang seperti Bouazizi, ketidakadilan menyebabkan hilangnya pendapatan dan tingkat stres yang tinggi. Orang dengan masalah keadilan rata-rata mengalami kehilangan senilai satu bulan upah. Banyak dari mereka yang kemudian menjadi pengangguran. Hal ini selanjutnya memiliki dampak kesehatan yang juga serius. Sekitar sepertiga orang dengan masalah keadilan cenderung mengalami masalah kesehatan fisik atau mental.

Bagi masyarakat, keadilan seringkali merupakan mata rantai yang hilang dalam strategi pembangunan nasional. Ekonomi dapat berkinerja kuat, serta kesehatan dan pendidikan mengalami peningkatan. Tetapi tanpa keadilan, rakyat akan gagal mencapai potensi penuh mereka dan pembangunan akan menjadi tidak menentu. Ketidakadilan mendorong pengucilan dan memicu tumbuhnya ketidakpuasan, sehingga ketidakadilan juga meningkatkan risiko ketidakstabilan politik dan – sebagaimana yang kita lihat pada periode sebelum peristiwa Arab Spring – terjadilah konflik kekerasan.

Kegagalan untuk memberikan keadilan sangat merugikan.

- Pada tingkat global, konflik dunia menciptakan kehancuran dengan nilai sekitar \$2.000 per orang setiap tahun, sementara negara mungkin kehilangan hingga seperlima dari PDB mereka ketika tingkat kekerasan non-konflik sangat tinggi.
- Ada tiga jenis dampak yang timbul dari masalah-masalah keadilan – kehilangan pendapatan, rusaknya kesehatan, dan biaya mendapatkan ganti rugi – membawa kerugian pada negara-negara OECD antara 0,5 - 3 persen dari PDB tahunan mereka.
- Masalah-masalah keadilan sehari-hari menelan biaya lebih dari 2 persen dari PDB di sebagian besar negara berpenghasilan rendah.

Manfaat investasi keadilan

Semakin banyak bukti menunjukkan bahwa pengeluaran untuk keadilan yang berpusat pada rakyat dapat memberikan hasil investasi dengan tingkat pengembalian yang tinggi. Meningkatnya keadilan mengurangi risiko konflik dan ketidakstabilan. Setiap dolar yang diinvestasikan untuk keadilan kemungkinan akan memberikan hasil dengan pengembalian setidaknya senilai \$ 16 berupa manfaat-manfaat dari pengurangan risiko konflik. Di Guatemala, upaya membangun kembali sistem peradilan untuk memerangi kekebalan hukum dan mengatasi korupsi berdampak pada penurunan angka pembunuhan sebesar 5 persen.

Menangani masalah-masalah keadilan sehari-hari juga memberikan manfaat sebagai berikut:

- Pengadilan khusus seperti pengadilan narkoba mengurangi pengulangan pelanggaran, membuat penghematan sistem peradilan pidana senilai ribuan dolar per kasus.
- Pendekatan keadilan restoratif sangat hemat biaya dan menghasilkan kepuasan yang lebih tinggi bagi para korban dan mengurangi pelanggaran.
- Di Inggris dan Wales, layanan Citizens Advice membantu lebih dari dua juta orang setiap tahun mengatasi masalah-masalah keadilan yang mereka hadapi. Untuk setiap dolar yang diinvestasikan, layanan ini menghasilkan \$ 2,40 dalam bentuk penghematan untuk pemerintah dan \$ 14,50 berupa manfaat sosial dan ekonomi yang lebih luas.

Hukum dapat digunakan untuk membebaskan potensi ekonomi dan sosial masyarakat secara hemat biaya. Identitas hukum akan meningkatkan capaian kesehatan yang secara bersamaan memungkinkan pemerintah menyesuaikan bentuk layanan sesuai dengan mereka yang membutuhkannya, menasar transfer tunai dan program perlindungan sosial lainnya secara lebih efektif, mengumpulkan pajak, membasmi korupsi sampai akarnya, dan mengevaluasi dampak-dampak kebijakan.

Program-program yang mengklarifikasi dan memperkuat hak atas tanah akan mencegah konflik dan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam perekonomian. Kaum perempuan Tanzania melipatgandakan empat kali lipat penghasilan mereka ketika mereka tinggal dalam komunitas yang memungkinkan mereka memiliki hak atas tanah.

Pendanaan keadilan bagi semua

Berapa biaya untuk mengatasi masalah kesenjangan keadilan – untuk memenuhi kebutuhan keadilan sehari-hari masyarakat dengan cara yang mudah diakses dan terjangkau?

Untuk menjawab pertanyaan ini, laporan ini menyajikan prakiraan awal biaya untuk menyediakan akses universal dalam mendapatkan keadilan dasar. Sektor kesehatan dan pendidikan telah lama memiliki tolok ukur investasi, dan metodologi yang digunakan mengacu pada pengalaman di sektor-sektor tersebut.

Prakiraan ini mencakup nasihat hukum, pemberdayaan hukum di komunitas, lembaga peradilan formal yang memainkan peran di garis depan dalam penyelesaian konflik dan perselisihan, dan mekanisme alternatif untuk menyelesaikan masalah-masalah keadilan. Mekanisme akuntabilitas juga disertakan di sini.

Di negara-negara berpenghasilan rendah, biayanya adalah sebesar \$ 20 untuk memberikan setiap orang akses untuk mendapatkan layanan keadilan dasar. Di negara-negara berpenghasilan menengah, biayanya adalah sebesar \$ 64 per orang per tahun, dan di negara-negara berpenghasilan tinggi sebesar \$ 190.

Untuk memasukkan angka-angka ini ke dalam konteksnya, biaya penyediaan pendidikan dasar dan menengah universal di negara-negara berpenghasilan rendah adalah sebesar \$ 41 per orang per tahun, sementara untuk memberikan perawatan kesehatan esensial universal setidaknya sebesar \$ 76.

Negara-negara berpenghasilan tinggi dengan mudah mampu membayar pengeluaran ini, tetapi bagi negara-negara berpenghasilan menengah dan rendah akan lebih sulit. Secara keseluruhan, dua miliar orang tinggal di negara-negara yang bahkan tidak mampu membayar setengah dari biaya untuk menyediakan akses universal ke keadilan dasar tanpa mengganggu pengeluaran di sektor-sektor lainnya.

Untuk meningkatkan keterjangkauan, negara-negara membutuhkan ketersediaan data yang lebih baik tentang alokasi sumber daya yang ada saat ini untuk kemudian mengalihkan pengeluaran dari pendekatan-pendekatan yang tidak efektif agar digantikan pada kebutuhan-kebutuhan keadilan yang paling mendesak.

Sumber-sumber daya yang ada dapat diarahkan ke pendekatan-pendekatan berbiaya rendah dengan potensi untuk mewujudkan keadilan secara besar-besaran, dengan pemberdayaan hukum dan pendekatan non-formal yang secara relatif terjangkau di semua negara.

Sumber-sumber pendanaan perlu didiversifikasi. Investasi donor di sektor keadilan mengalami penurunan sebesar 40 persen selama empat tahun terakhir. Di negara-negara yang rapuh dan terkena dampak konflik, hanya 1,5 persen dari bantuan pembangunan resmi yang dibelanjakan untuk keadilan. Para filantropis, investor dampak, dan perusahaan swasta, semuanya dapat memainkan peran dalam membuat keadilan bagi semua lebih terjangkau dengan meningkatkan investasi mereka pada pendekatan-pendekatan yang berpusat pada rakyat.

Memecahkan masalah-masalah keadilan

Enam area utama di mana sebagian besar masalah keadilan terjadi: kekerasan dan kejahatan; perselisihan yang melibatkan tanah, perumahan atau tetangga; perselisihan keluarga yang tidak terselesaikan; masalah yang berkaitan dengan uang, utang atau masalah konsumen; masalah yang terkait dengan akses ke layanan publik; dan kebutuhan hukum yang terkait dengan pekerjaan atau bisnis.

Masing-masing masalah ini sama-sama bersifat struktural – misalnya, peristiwa tanah milik masyarakat yang disita tanpa kompensasi, undang-undang warisan yang lebih memberikan preferensi pada anak laki-laki daripada anak perempuan atau istri, atau kaum minoritas yang tidak diberi akses untuk mendapatkan layanan publik.

Para pencari keadilan mendapat manfaat dari pendekatan-pendekatan yang disesuaikan dengan masing-masing kategori masalah, tetapi tema-tema umum selalu muncul ketika mereka ditanya bagaimana mereka ingin masalah mereka diselesaikan. Para korban kekerasan dan rakyat yang terlibat dalam perselisihan hukum seringkali kurang tertarik pada putusan pengadilan dan hukuman, dibandingkan dengan didengarkan dan menemukan suatu penyelesaian atau pemulihan yang membuat mereka dapat melanjutkan kehidupannya.

Dengan menjadikan masalah-masalah keadilan sebagai titik awal, negara-negara dapat merancang rute perjalanan yang lebih baik dari masalah itu menuju suatu solusi. Yang penting adalah baik tujuannya (apakah rakyat memperoleh penyelesaian yang memuaskan?) maupun perjalanan itu sendiri (apakah rakyat diperlakukan dengan adil di sepanjang prosesnya?).

Perjalanan keadilan memiliki tiga tahap:

1. Memberdayakan rakyat dan masyarakat

Rakyat diberdayakan sehingga mereka dapat mengambil tindakan ketika muncul kebutuhan hukum. Mereka dibantu untuk memahami hukum dan mencari solusi, dengan menyediakan bantuan hukum bagi mereka yang paling rentan.

2. Akses ke layanan keadilan yang berpusat pada rakyat

Rakyat memiliki akses ke layanan keadilan yang responsif terhadap kebutuhan mereka dan menawarkan alternatif serta jalur yang lebih damai. Layanan satu atap yang menyediakan berbagai layanan di satu tempat, ditambah dengan layanan spesialis yang dapat membantu mengatasi masalah yang lebih kompleks.

3. Hasil-hasil yang adil

Rakyat memperoleh penyelesaian untuk masalah mereka secara adil dan memenuhi standar hak asasi manusia. Pemulihan yang diperoleh juga sesuai dan mendorong rekonsiliasi. Data

digunakan untuk menilai apakah rakyat menerima penyelesaian yang memuaskan. Mekanisme pengaduan tersedia untuk mendengarkan dan menanggapi mereka yang merasa diperlakukan dengan buruk.

Mencegah ketidakadilan

Sistem keadilan harus mencegah timbulnya masalah-masalah, serta bekerja untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sudah terjadi.

Pencegahan mengurangi kerugian yang diderita rakyat dengan berfokus pada akar penyebab ketidakadilan. Ketika ada lebih sedikit perselisihan, tingkat kekerasan yang lebih rendah, dan rakyat memiliki perlindungan hukum yang tepat, maka masyarakat akan lebih cenderung menjadi damai dan makmur.

Pencegahan menjadi masuk akal karena empat alasan. Pertama, kesenjangan keadilan terlalu luas untuk dijabatani dengan pendekatan-pendekatan dan alat-alat tradisional. Kedua, keadilan diperlukan untuk komunitas dan masyarakat, bukan hanya untuk individu. Ketiga, sistem keadilan dapat meningkatkan ketahanan, dengan membantu rakyat melindungi hak-hak mereka atau dengan menyediakan ruang untuk kontestasi damai. Akhirnya, pencegahan menjadi efektif secara biaya, baik untuk rakyat, untuk masyarakat, dan untuk sistem keadilan itu sendiri.

Pencegahan membutuhkan aktor keadilan untuk beralih dari hanya mempertimbangkan masalah keadilan individu untuk mempengaruhi bagaimana suatu populasi mengalami ketidakadilan dan keadilan.

Karena berwawasan ke depan, pencegahan memerlukan transformasi dalam sistem keadilan, di mana sistem keadilan harus bekerja sama dengan sektor-sektor lainnya untuk mengatasi akar penyebab perselisihan dan mencegah kekerasan, konflik, dan pelanggaran hak asasi manusia.

Strategi-strategi pencegahan yang efektif:

- **Memperkuat kepercayaan terhadap sistem peradilan**

Strategi ini berupa memberi rakyat harapan yang proporsional bahwa hak-hak mereka dilindungi, perselisihan mereka dikelola secara damai, dan bahwa mereka terlindungi dari penyalahgunaan kekuasaan.

- **Mengatasi akar penyebab ketidakadilan**

Strategi ini berupa pemberian identitas hukum dan dokumentasi hukum lainnya, serta memberdayakan masyarakat dan kelompok-kelompok yang terpinggirkan untuk mewujudkan hak-hak mereka dan mengatasi ketidakadilan.

- **Menggunakan hukum untuk mengurangi risiko**

Strategi ini berupa penguatan kerangka kerja legislatif untuk pencegahan kekerasan dan menerapkan undang-undang dan peraturan yang memperkecil kemungkinan timbul atau meningkatnya perselisihan.

Jalan menuju Keadilan bagi Semua

Tidak ada resep tunggal untuk mencapai terwujudnya keadilan bagi semua. Semua negara harus meningkatkan akses keadilan berdasarkan konteks dan prioritas mereka sendiri, sejalan dengan standar hak asasi manusia dan komitmen mereka untuk mencapai Agenda 2030.

Namun rakyat di seluruh dunia memiliki banyak aspirasi yang sama saat mencari keadilan. Negara-negara bergulat dengan tantangan yang sama ketika mereka bekerja untuk memenuhi aspirasi ini.

Reformasi keadilan dapat sangat menantang. Para elit selama ini menikmati manfaat dari status quo dan para profesional keadilan mungkin merasa terancam jika sistem menjadi terbuka untuk ide-ide baru, pendekatan-pendekatan baru, dan penyedia baru. Menteri Kehakiman sering harus berjuang untuk bersaing memperebutkan sumber daya dengan sektor-sektor lain yang lebih kuat.

Untuk mengatasi kesenjangan keadilan dibutuhkan transformasi ambisi – upaya-upaya berkelanjutan untuk menyediakan keadilan bagi miliaran orang lagi. Upaya-upaya ini akan menghadapi hambatan politik untuk mengubah dan membangun kepercayaan di antara para pemimpin di sektor keadilan sehingga dengan kebijakan dan investasi yang tepat, mereka dapat mencapai peningkatan secara substansial di bidang keadilan.

Namun saat ini ada momentum yang tumbuh yang membantu para pemimpin dalam membangun dukungan untuk perubahan. Sistem keadilan dari seluruh dunia sedang mengeksplorasi cara-cara baru untuk mengutamakan rakyat dan kebutuhan mereka. Kesadaran tumbuh dari manfaat-manfaat yang didapatkan dari investasi keadilan, sementara itu muncul gerakan-gerakan di tingkat lokal dan global mengkampanyekan keadilan bagi semua. Para pengacara, hakim, dan aktivis yang terlibat sering kali adalah para advokat yang memiliki kemauan kuat untuk melakukan reformasi, sementara dari sektor swasta menyediakan insentif untuk mobilisasi perbaikan di lingkungan hukum.

Empat pengungkit yang dapat membantu para reformis nasional saat mereka bekerja mencapai keadilan bagi semua.

- Data dan bukti menciptakan kesadaran tentang skala permasalahan, yang sekaligus menunjukkan bagaimana solusi-solusi dapat menjadi efektif secara biaya.
- Inovasi membawa para pemain baru ke sektor keadilan dan dapat mengembangkan pendekatan-pendekatan yang bisa menciptakan keadilan pada skala besar.
- Strategi pembiayaan yang lebih cerdas akan mengalihkan sumber-sumber daya dari pendekatan-pendekatan yang tidak efektif ke pendekatan-pendekatan yang sukses mencapai hasil. Strategi itu juga dapat menarik bagi adanya pembiayaan dari sektor-sektor lain dan dari para investor non-tradisional.

- Model-model tata kelola baru dan standar-standar bersama meningkatkan koherensi dalam sistem keadilan, memungkinkan keragaman mitra yang lebih besar untuk bekerjasama mencapai hasil yang diharapkan bersama.

Agenda aksi

Di tingkat nasional, Satuan Tugas Keadilan membuat tiga kumpulan rekomendasi:

- **Menyelesaikan masalah-masalah keadilan yang paling berarti bagi rakyat**
memahami masalah-masalah keadilan melalui survei secara teratur • mengakui, mendukung pembiayaan, dan melindungi para pembela keadilan • menyediakan akses layanan keadilan yang berpusat pada rakyat • menggunakan alternatif-alternatif biaya yang efektif untuk dapat membantu rakyat menyelesaikan perselisihan dan mendapatkan ganti rugi.
- **Mencegah masalah-masalah keadilan dan menciptakan peluang bagi rakyat untuk dapat berpartisipasi sepenuhnya di masyarakat dan perekonomian mereka**
menerapkan strategi-strategi pencegahan multi-sektoral • meningkatkan kemandirian, memerangi korupsi, dan memastikan pengawasan independen • mengatasi ketidakadilan struktural, menyediakan akses universal untuk dapat memperoleh dokumen-dokumen hukum, dan membantu rakyat agar mampu membuat perjanjian/kontrak yang lebih baik • memperkuat undang-undang dan peraturan yang mengurangi risiko kekerasan dan jumlah perselisihan.
- **Melakukan investasi sistem dan institusi peradilan yang bekerja untuk rakyat, dan yang diperlengkapi sedemikian rupa sehingga memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka akan keadilan**
menyediakan akses data keadilan yang terbuka • menciptakan lingkungan peraturan yang mendukung inovasi • mengembangkan peta jalan nasional untuk pembiayaan keadilan bagi semua • meningkatkan keterwakilan dalam sistem keadilan dan menerapkan model tata kelola baru.

Komitmen Agenda 2030 terhadap keadilan bagi semua membutuhkan kerja sama internasional yang intensif dan kemitraan yang direvitalisasi untuk keadilan. Rekomendasi untuk aksi internasional meliputi:

- **Mendukung implementasi nasional**
Membentuk negara-negara pemandu, mendaftarkan komitmen-komitmen sukarela untuk mengimplementasikan TPB16.3, dan membantu pemerintah dalam mengembangkan strategi yang kredibel, realistis, dan didanai untuk mengimplementasikan komitmen-komitmen ini.

- **Meningkatkan kepemimpinan keadilan**

Mengadakan pertemuan dua tahunan para Menteri Kehakiman, Jaksa Agung, dan para pemimpin keadilan lainnya sebagai platform bagi negara-negara untuk berbagi pengalaman, mengeksplorasi rekomendasi-rekomendasi, dan memperkuat kerja sama untuk keadilan.

- **Mengukur proses kemajuan**

Mencapai kesepakatan mengenai indikator baru TPB16.3 untuk mengukur kemajuan di bidang peradilan perdata guna melengkapinya indikator-indikator peradilan pidana yang ada, dengan uji coba skala nasional secara sukarela sebelum diintegrasikan ke dalam kerangka indikator global.

- **Mengintensifkan kerja sama**

Membentuk aliansi mitra keadilan internasional dan regional untuk memberikan dukungan yang lebih koheren untuk mencapai keadilan bagi semua, dan para pemberi dana yang kolaboratif untuk meningkatkan proporsi keuangan internasional yang mengalir ke sektor peradilan.

- **Membangun gerakan**

Memperkuat tuntutan untuk perubahan melalui gerakan-gerakan di tingkat global, nasional, dan lokal yang mengkampanyekan keadilan bagi semua.

Seruan untuk bertindak

Untuk percepatan kemajuan, Satuan Tugas menyerukan kepada semua mitra untuk bersatu dalam upaya global dan berkelanjutan untuk mencapai terwujudnya keadilan bagi semua pada tahun 2030.

- **Pemerintah** harus mengembangkan strategi-strategi, mengalokasikan sumber-sumber daya, dan kemitraan-kemitraan yang dibutuhkan untuk mencapai terwujudnya keadilan bagi semua.
- **Para profesional keadilan** harus bekerja sama dengan pemerintah dalam mengarahkan perubahan menuju keadilan yang berpusat pada rakyat.
- **Sektor-sektor lain** harus berperan lebih aktif dalam penyediaan keadilan.
- **Masyarakat sipil** dapat berbuat lebih banyak untuk memberdayakan para pencari keadilan dan membantu mencapai yang jauh di belakang terlebih dahulu, jika diberi ruang untuk melakukannya.

- **Sektor swasta** dapat membantu mengembangkan cara-cara baru untuk memenuhi kebutuhan keadilan masyarakat dengan biaya rendah.
- **Organisasi-organisasi internasional dan regional** harus memberikan dukungan yang lebih koheren dan meningkatkan pembiayaan untuk implementasi target-target TPB untuk keadilan.
- **Yayasan-yayasan dan filantropis** harus mendukung pendekatan-pendekatan dan prioritas-prioritas yang berpusat pada rakyat, seperti halnya peran keadilan dalam upaya pencegahan.

Akhirnya, seruan untuk bertindak dari Satuan Tugas ditujukan kepada rakyat itu sendiri, sebagai pencari keadilan, sukarelawan, dan pendukung sistem keadilan. Mereka harus diberdayakan untuk memainkan peran sentral dalam penciptaan dunia yang lebih adil.



Mengapa Kita Membutuhkan Keadilan bagi Semua

Untuk mencapai target-target TPB yang menjanjikan keadilan bagi semua, kita harus memahami ukuran kesenjangan keadilan dan mengumpulkan bukti dan argumentasi mengenai perlunya investasi untuk mengatasinya.



Bab 1

Kesenjangan Keadilan

Untuk mencapai terwujudnya keadilan bagi semua, kita harus memahami realitas keadilan dalam kehidupan masyarakat.

Berapa banyak orang yang dihadapkan pada masalah-masalah keadilan? Apa yang mereka butuhkan dan inginkan ketika mereka mencari keadilan? Dan keadilan macam apa yang mereka terima?

Kami memperkirakan bahwa ada seperempat miliar orang yang hidup dalam kondisi ketidakadilan yang ekstrem, dan tidak memiliki perlindungan hukum yang berarti.

Saat ini, ada 1,5 miliar orang yang memiliki masalah keadilan yang tidak dapat mereka selesaikan.

4,5 miliar orang terpinggirkan dari peluang-peluang sosial, ekonomi, dan politik yang disediakan oleh hukum.

Banyak orang menderita karena masalah-masalah keadilan yang tumpang tindih. Secara total, ada lebih dari 5 miliar orang yang tidak mendapatkan keadilan. Kami menyebutnya sebagai kesenjangan keadilan global.

Keadilan bagi Semua?

Pada jantung Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan terletak visi “dunia yang adil, setara, toleran, terbuka dan inklusif secara sosial di mana kebutuhan-kebutuhan mereka yang paling rentan dapat terpenuhi.”¹

Keadilan adalah benang merah yang merajut 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Tanpa peningkatan keadilan, para pemimpin dunia tidak akan mampu mengakhiri kemiskinan, mengurangi ketimpangan. Dan mereka juga tidak akan mampu menjangkau yang terjauh tertinggal di belakang, menciptakan kondisi-kondisi untuk kemakmuran bersama dan berkelanjutan, atau memajukan perdamaian dan inklusi.

TPB16.3 bertujuan untuk memastikan tersedianya akses yang sama untuk mendapatkan keadilan bagi semua pada tahun 2030. Target-target SDG lainnya mengatasi pengabaian identitas hukum, bentuk-bentuk utama ketidakadilan seperti korupsi dan aliran keuangan gelap, dan memajukan hak-hak asasi manusia serta pemberdayaan gender.

Target-target ini memberikan peluang unik untuk mempercepat kemajuan menuju terwujudnya keadilan bagi semua.

Namun untuk mencapai kemajuan tersebut, pertama-tama kita perlu memahami skala tugas ke depan.

Mengumpulkan Data Keadilan yang Berpusat pada Rakyat

Sampai saat ini, tidak tersedianya data yang cukup telah mengaburkan ukuran kegagalan dunia dalam mencapai terwujudnya keadilan bagi semua.

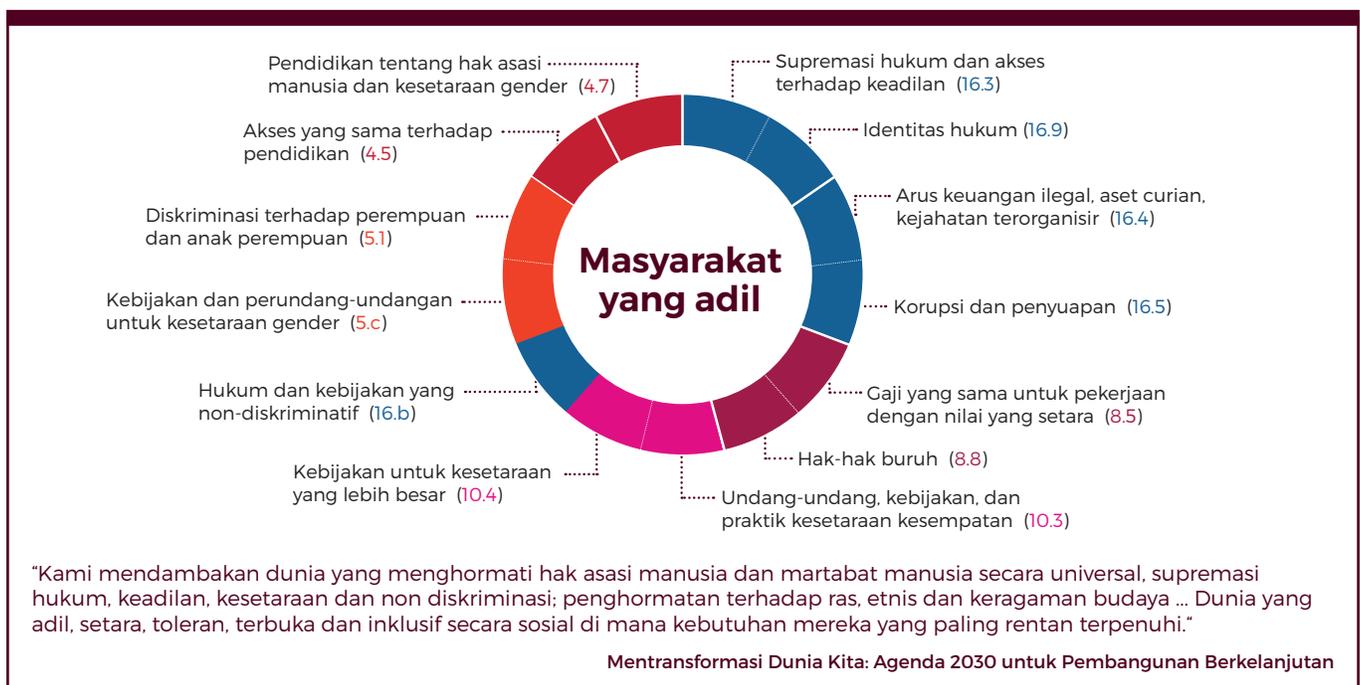
Banyak negara telah mengumpulkan informasi tentang kinerja lembaga-lembaga peradilan mereka, termasuk jumlah kejahatan yang dilaporkan kepada polisi, jumlah kasus di pengadilan, atau berapa lama waktu yang diperlukan sampai didapatkannya keputusan. Tetapi statistik ini tidak banyak memberi tahu kita tentang pengalaman keadilan rakyat. Sebagian besar korban kekerasan dan kejahatan tidak melaporkannya ke pihak berwenang. Hanya sedikit perselisihan hukum yang dibawa ke pengadilan. Banyak orang menghadapi hambatan yang menakutkan untuk mendapatkan keadilan sehingga masalah-masalah tersebut tidak terlihat oleh lembaga peradilan formal mana pun. Bahkan lebih jauh lagi, sekalipun mereka secara aktif mencari bantuan, bisa jadi sejumlah besar orang menemukan bahwa kebutuhan hukum mereka tetap tidak terpenuhi karena buruknya kualitas layanan peradilan atau karena hambatan struktural dan kegagalan kelembagaan, yang membuat mustahil bagi mereka untuk dapat melindungi hak-haknya.

Data keadilan yang berpusat pada rakyat bukanlah hal baru. Pada tahun 1933, Association of American Law Schools memutuskan untuk meninjau keadaan keadilan di negara ini. Mereka tertarik pada

> Kelompok Kerja Kesenjangan Keadilan

Analisis dilakukan oleh World Justice Project, bekerja sama dengan:

- Hague Institute for Innovation of Law (HiIL)
- Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Argentina
- Center on International Cooperation – Universitas New York
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)
- Open Society Justice Initiative (OSJI)
- United Nations Development Programme
- University College London
- United Nations Office on Drugs and Crime
- UNODC-INEGI Center of Excellence
- White & Case LLP
- Bank Dunia



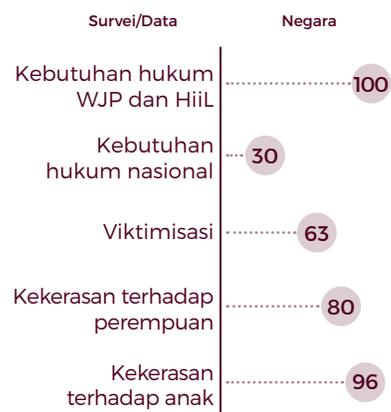
“kesejahteraan pengacara,” tetapi mereka juga ingin tahu apakah rakyat menerima “layanan hukum yang memadai dan kompeten yang relevan dengan masyarakat modern.”² Mereka merancang survei yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada anggota masyarakat golongan rendah dan menengah serta pemilik usaha kecil, apakah mereka mampu menyelesaikan masalah-masalah keadilan yang mereka hadapi.

Setelah memeriksa hasil-hasilnya, Asosiasi tersebut menyimpulkan bahwa sistem telah gagal. Kebanyakan rakyat yang memiliki masalah tidak mencari nasihat hukum, sementara para pengacara yang melayani orang-orang biasa tersebut perlu berjuang untuk mencari nafkah. “Publik telah melepaskan diri dari urusan hukum,” demikian kesimpulan laporan tersebut. “Para pengacara memiliki waktu luang.”

Butuh bertahun-tahun untuk membangun wawasan yang inovatif ini, karena negara-negara masih terus mengandalkan data tentang sistem dan institusi, bukan tentang manusia. Hanya setelah empat decade, data mulai fokus untuk lebih konsisten pada kebutuhan rakyat akan keadilan:

- Pada 1970-an, survei viktimisasi mulai mengajukan pertanyaan kepada orang-orang tentang pengalaman kejahatan yang mereka alami, tentang seberapa aman perasaan mereka di tengah komunitas mereka, dan tentang pengalaman mereka dengan polisi dan lembaga peradilan pidana lainnya.³
- Sejak 1990-an dan seterusnya, survei-survei kebutuhan hukum mengeksplorasi berbagai masalah peradilan yang lebih luas, mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada orang-orang tentang tindakan yang mereka ambil untuk menyelesaikan masalah-masalah ini, dan apakah mereka puas dengan cara mereka diperlakukan dan hasil-hasil yang mereka dapatkan.⁴
- Juga ada semakin banyak survei yang dilakukan oleh para spesialis yang memberikan wawasan tentang kebutuhan keadilan yang dihadapi oleh kaum perempuan, anak-anak, dan kelompok rentan lainnya.

Data keadilan yang berpusat pada rakyat sekarang tersedia di semakin banyak negara. Satuan Tugas Keadilan telah bekerja dengan organisasi-organisasi data keadilan yang terkemuka di dunia untuk mengkompilasi semua survei yang tersedia dan mengintegrasikannya dengan jenis-jenis data lainnya yang membantu kita memahami bagaimana beban ketidakadilan ditanggung oleh berbagai kelompok dalam masyarakat. Untuk beberapa negara, kita memiliki data dari kantor-kantor statistik nasional (lihat kotak di akhir bab) dan sumber-sumber resmi lainnya. Untuk yang lainnya, kami telah mengambil informasi dari survei-survei lintas negara maupun independen. Tetapi dalam semua hal, data tersebut mencerminkan sampel representatif dari orang-orang yang menceritakan



Survei kebutuhan hukum, viktimisasi, dan survei spesialis telah jauh lebih banyak tersedia dan sekarang mencakup banyak negara.⁵

pengalaman mereka, bukan mengenai pendapat para ahli atau laporan dari lembaga-lembaga peradilan.

Sebagian besar dari data ini masih baru, dan belum pernah diambil sebelumnya. Terima kasih sebesar-besarnya atas upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Kelompok Kerja Kesenjangan, sehingga kami untuk pertama kalinya dapat menyajikan sintesis mengenai skala dan sifat kesenjangan keadilan secara global (lihat lampiran 1).

Kesejangan Keadilan dalam Tiga Dimensi

“Let there be justice for all. Let there be peace for all. Let there be work, bread, water and salt for all.”⁶ Ini adalah kata-kata Nelson Mandela ketika dia dilantik sebagai Presiden Afrika Selatan yang terpilih secara demokratis.

Bagi Mandela, keadilan bagi masyarakat sama mendasarnya dengan kedamaian atau kebutuhan ekonomi untuk hidup. Dia dipenjara selama 27 tahun oleh sistem hukum yang tidak hanya gagal memberikan kesamaan di muka hukum, tetapi yang juga dia kecam karena membiarkan “orang yang tidak adil untuk mengadili dan menuntut pembalasan terhadap yang adil.”⁷

Sebelum dia dipenjara, perjuangan Mandela melawan apartheid dibentuk oleh pengalamannya sebagai pengacara. Setelah mengetahui bahwa orang kulit hitam Afrika Selatan pada umumnya ditagih bayaran lebih tinggi untuk mendapatkan nasihat hukum daripada elit kulit putih, ia membentuk sebuah perusahaan hukum bersama Oliver Tambo. Mandela dan Tambo kewalahan menerima klien yang tidak punya tempat lain untuk meminta bantuan. “Bagi rakyat Afrika, kami adalah firma hukum pilihan pertama dan pilihan terakhir,” kenangannya. “Setiap hari kami mendengar dan melihat ribuan penghinaan yang dihadapi rakyat Afrika biasa dalam kehidupan sehari-hari mereka.”⁸

Ketika akhirnya dibebaskan dari penjara, Mandela mencalonkan diri dalam pemilihan dan memiliki platform yang melihat bahwa reformasi sistem keadilan adalah dasar untuk mewujudkan Afrika Selatan yang demokratis.⁹ Lembaga peradilan yang mudah diakses, terjangkau, dan memiliki legitimasi diperlukan untuk mencegah kekerasan dan ketidakamanan, memberdayakan rakyat sebagai warga negara, dan menciptakan kondisi untuk mampu mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan. Keadilan juga akan memainkan peran dalam transisi negara, membantu Afrika Selatan “menangani penyalahgunaan dan kerusakan yang melanda sebagian besar komunitas kita.”¹⁰

“Lebih dari lima miliar orang mengalami setidaknya satu bentuk ketidakadilan (dan banyak yang mengalami ketidakadilan dalam berbagai bentuk). Mayoritas signifikan populasi dunia ditolak aksesnya untuk mendapatkan keadilan.”

Dalam penilaian kami tentang skala kesenjangan keadilan global, Satuan Tugas telah menyoroti tiga dimensi yang selaras dengan pengalaman Mandela.

Pertama, kami telah membuat prakiraan jumlah orang yang hidup dalam kondisi ketidakadilan yang paling ekstrem. Mereka tinggal di negara-negara di mana sistem keadilan tidak mampu melindungi hak-hak dasar dan kebebasan atau, seperti tahun-tahun masa apartheid di Afrika Selatan, negara di mana keadilan secara aktif diabaikan.

Kedua, kami telah memeriksa data yang menunjukkan berapa banyak orang yang mencoba dan gagal menyelesaikan masalah-masalah yang memiliki dimensi hukum. Sebagaimana disadari oleh Mandela, kita hanya bisa memperkuat sistem keadilan jika kita mulai dari pemahaman tentang bagaimana rakyat mengalami ketidakadilan dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Ketiga, kami telah membuat prakiraan jumlah orang yang tidak memiliki perlindungan hukum yang memungkinkan mereka untuk mengklaim hak mereka, memenuhi potensi mereka, dan berpartisipasi dalam membentuk masa depan negara mereka. Ini menyoroti pentingnya keadilan sebagai landasan bagi masyarakat yang damai dan inklusif, dan sebagai pendukung pembangunan berkelanjutan.

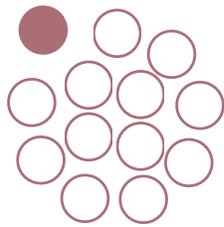
Angka-angka yang kami sajikan sengaja konservatif, namun gambaran keseluruhannya cukup mengkhawatirkan. Secara total, 5,1 miliar orang masuk dalam setidaknya satu dari tiga kelompok ini. Banyak yang mengalami berbagai bentuk ketidakadilan. Dengan kata lain, mayoritas yang signifikan dari 7,7 miliar orang di dunia ditolak aksesnya untuk mendapatkan keadilan secara berarti.

Kesenjangan Keadilan Global

5,1 miliar terampas keadilannya

4,5 miliar

dikecualikan dari peluang sosial, ekonomi, dan politik yang disediakan undang-undang



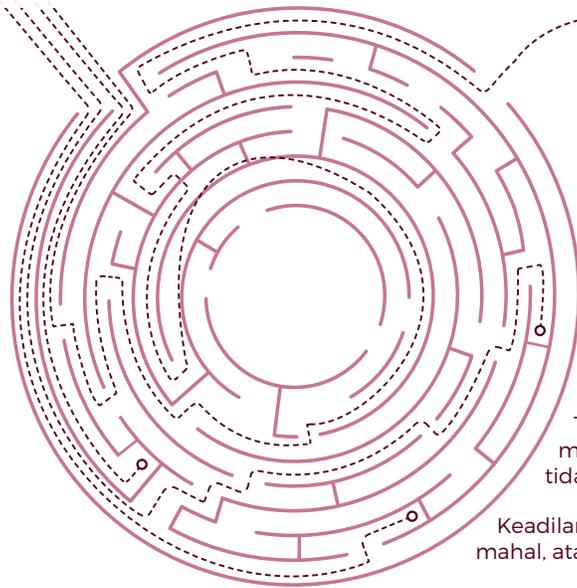
Tidak ada bukti kepemilikan rumah atau lahan

Bekerja di sektor ekonomi informal

Tidak memiliki identitas hukum

1,5 miliar

memiliki masalah pidana, perdata atau administrasi yang tidak dapat mereka selesaikan



Tidak tahu di mana mencari keadilan atau tidak menerima bantuan

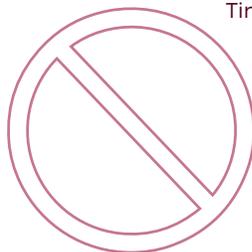
Keadilan terlalu lambat, mahal, atau tidak adil

Masalah keadilan tidak terselesaikan

Tinggal di negara tanpa aturan hukum

Hidup dalam perbudakan modern

Tidak memiliki kewarganegaraan



253 juta

hidup dalam kondisi ketidakadilan yang ekstrim, tanpa perlindungan hukum yang berarti

Orang yang hidup dalam kondisi ketidakadilan yang ekstrem

Setidaknya 253 juta orang hidup dalam kondisi ketidakadilan yang ekstrem.

Kami membandingkan konsep ini dengan kemiskinan ekstrem atau absolut, yang diberikan definisinya pada KTT Dunia 1995 untuk Pembangunan Sosial sebagai “suatu kondisi yang ditandai dengan perampasan yang parah atas kebutuhan dasar manusia.”¹¹ Dengan cara yang sama, mereka yang mengalami ketidakadilan yang ekstrem ditolak hak-hak asasi manusia mereka yang sifatnya paling dasar dan tidak memiliki peluang berarti untuk dapat memenuhi potensi mereka.

Agenda 2030 mengidentifikasi penghapusan kemiskinan dalam segala bentuk dan dimensi sebagai “tantangan global terbesar”, dan berjanji untuk “memberantas kemiskinan ekstrem bagi semua orang di mana pun” pada tahun 2030.¹² Perampasan keadilan yang parah adalah suatu dimensi kemiskinan ekstrem. Menyediakan bagi semua orang setidaknya tingkat keamanan dan keadilan minimum, harus menjadi prioritas untuk setiap strategi pemberantasan kemiskinan.

Setidaknya 203 juta orang tinggal di negara-negara di mana tidak ada aturan hukum dan di mana tingkat ketidakamanan sangat tinggi. Mereka memiliki risiko tertinggi mengalami kekerasan dan perampasan hak mereka lainnya, tetapi tidak memiliki akses yang memadai ke lembaga-lembaga peradilan yang benar-benar berfungsi. Alih-alih menerima perlindungan, mereka sering menjadi sasaran kekerasan di tangan para aktor negara. Pemerintah mereka memiliki kontrol terbatas atas wilayah mereka dan tidak dapat (atau tidak mau) memenuhi tugas mendasar mereka untuk memelihara supremasi hukum.¹³

Di banyak negara seperti itu, para aktor non-negara – ekstremis brutal, geng atau kelompok bersenjata lainnya – masuk ke dalam kekosongan tersebut dan membentuk “pemerintahan bayangan.”¹⁴ Di beberapa negara, pemerintah – yang juga merupakan pihak-pihak yang terlibat konflik – menetapkan sistem-sistem pengadilan alternatif yang beroperasi tanpa pengawasan atau akuntabilitas, dan bertindak melanggar hukum internasional.¹⁵

Orang-orang tanpa kewarganegaraan, yang ditolak perlindungannya berdasarkan hukum yang disediakan berdasarkan kewarganegaraan, juga termasuk dalam kategori ini.¹⁶ Sekitar 12 juta orang di seluruh dunia tidak memiliki kewarganegaraan, meskipun sebagian besar darinya tidak dapat dimasukkan dalam statistik resmi karena kegagalan pemerintah untuk mengakui keberadaan mereka.¹⁷

Open Society Justice Initiative telah mendokumentasikan “krisis kewarganegaraan kontemporer” yang memiliki tiga dimensi: “penolakan akses untuk mendapatkan kewarganegaraan, perampasan kewarganegaraan secara sewenang-wenang... dan situasi-situasi suksesi negara yang secara efektif mengecualikan kelompok-kelompok etnis, menjadikan mereka tidak memiliki kewarganegaraan.”¹⁸ Dengan tidak memiliki status formal, orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan sangat rentan terhadap pelanggaran hak asasi, seringkali oleh otoritas di negara tempat mereka tinggal, sementara kemampuan mereka untuk mencari perlindungan hukum sangat dibatasi. Orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan seringkali mengalami kesulitan untuk dapat bekerja secara legal, memiliki properti, menikah, mendapatkan pendidikan, atau mendaftarkan kelahiran anak-anak mereka.

Perbudakan adalah suatu bentuk perampasan lainnya yang membuat orang tidak bisa mengakses keadilan. Di seluruh dunia, terdapat lebih dari 40 juta orang yang hidup dalam perbudakan modern.¹⁹ Dari jumlah ini, 25 juta terlibat dalam kerja paksa dan 15 juta dipaksa menikah bukan atas keinginan mereka. Banyak yang diperbudak selama beberapa dekade, hak-hak dasar mereka dilanggar setiap hari. Lebih dari dua dari setiap tiga budak modern adalah perempuan, dan dua dari lima adalah anak-anak. Beberapa dari mereka yang ada dalam perbudakan mengalami eksploitasi seksual secara paksa, dan beberapa di antaranya menjalani kerja paksa oleh otoritas negara. Sementara yang lainnya berada dalam kondisi rentan karena lemahnya sistem keadilan yang semestinya melindungi mereka.²⁰ Sementara itu, penelitian terbaru telah mengungkapkan tingkat perbudakan modern yang lebih tinggi di negara-negara maju daripada yang diperkirakan sebelumnya, ini menunjukkan bahwa kantong-kantong ketidakadilan ekstrem tetap masih ada di semua bagian dunia.²¹

Dalam prakiraan awal mengenai rakyat yang hidup dalam kondisi ketidakadilan yang ekstrem ini, kami hanya memasukkan rakyat dari negara-negara di mana sistem keadilan benar-benar hancur atau yang menjadi bagian dari kelompok yang mengalami perampasan absolut atas hak-hak mereka atas kebebasan dan kesetaraan di hadapan hukum.

Penelitian di masa depan mungkin akan menjangkau cakupan lebih luas untuk melihat, misalnya, di negara-negara di mana sistem keadilan hampir tidak berfungsi atau di mana aturan hukum tidak hadir di sebagian besar wilayah tersebut. Kelompok-kelompok lain dapat dimasukkan seperti mereka yang tidak memiliki kewarganegaraan atau mereka yang hidup dalam perbudakan, seperti para pengungsi dan orang-orang tanpa kewarganegaraan



yang berada di lokasi-lokasi yang tidak aman, kaum perempuan yang menghadapi bentuk-bentuk diskriminasi hukum paling parah, mereka yang hidup di bawah sistem yang mirip dengan apartheid, atau mereka yang dirampas kebebasannya yang bertentangan dengan standar hak asasi manusia. Dengan cara ini, kita dapat terus fokus pada mereka yang berada terjauh di belakang – mereka yang mengalami situasi di mana keadilan sepenuhnya berada di luar jangkauan.

Orang yang tidak bisa menyelesaikan masalah-masalah keadilan mereka

Setiap saat ada 1,5 miliar orang yang tidak bisa menyelesaikan masalah-masalah keadilan yang mereka hadapi.

Mereka mungkin adalah para korban kekerasan atau kejahatan yang tidak melapor. Mereka mungkin memiliki masalah peradilan perdata atau administrasi yang tidak dapat mereka selesaikan. Mereka mungkin terlibat dalam perselisihan hukum – atas tanah, misalnya, atau dengan majikan atau pemilik tanah – yang tidak dapat mereka bawa ke forum penyelesaian yang memuaskan. Atau mereka mungkin tidak dapat memperoleh akses yang memuaskan ke layanan publik yang seharusnya disediakan untuk mereka.

Orang-orang dalam kelompok ini tidak selalu menyadari bahwa mereka memiliki masalah keadilan.²² Oleh karena itu analisis kita bergantung pada bukti yang dikumpulkan dalam survei yang menggunakan bahasa sehari-hari untuk membantu orang mengingat kembali peristiwa-peristiwa yang memiliki aspek atau dimensi hukum.²³ Survei ini hanya mencakup masalah-masalah keadilan yang memiliki dampak signifikan pada kehidupan masyarakat. Masalah-masalah sepele atau kecil telah disaring.

Survei-survei yang kami periksa mengajukan pertanyaan kepada orang-orang tentang berbagai cara yang telah mereka tempuh untuk menyelesaikan masalah-masalah keadilan; ini tidak mengasumsikan bahwa tersedianya layanan hukum yang lebih besar adalah jawaban satu-satunya - atau yang terbaik.²⁴ Masalah-masalah yang belum terselesaikan termasuk masalah di mana tidak ada solusi yang tersedia, dan masalah di mana para pencari keadilan mendapati bahwa proses yang harus dilalui sangat panjang, mahal, atau tidak adil.²⁵

Satuan Tugas memperkirakan bahwa, rata-rata, hampir 60 persen orang tidak dapat menyelesaikan masalah-masalah keadilan mereka.

Banyak orang enggan mengambil tindakan untuk menyelesaikan masalah-masalah mereka. Sebagian besar kejahatan, misalnya, tidak dilaporkan:

“Rakyat yang memiliki masalah keadilan yang belum terselesaikan adalah para korban kekerasan atau kejahatan yang tidak lapor, atau mereka yang terlibat dalam perselisihan perdata atau administratif namun tidak dapat membawanya ke forum penyelesaian yang memuaskan.”

- Di 30 negara, rata-rata tingkat pelaporan untuk lima kejahatan properti tanpa kekerasan berada di bawah 50 persen. Di tujuh kota di negara-negara berkembang, angkanya di bawah 20 persen.²⁶
- Kejahatan dengan kekerasan bahkan lebih tidak terlihat oleh sistem peradilan pidana. Dalam kelompok negara yang sama, hanya sekitar sepertiga dari penyerangan dan satu dari sepuluh pelecehan seksual yang dilaporkan.
- Kelompok-kelompok rentan memiliki perlindungan paling rendah terhadap kekerasan. Sebuah penelitian di sembilan negara pasca konflik menemukan bahwa hanya 10 persen anak perempuan dan 5 persen anak laki-laki yang mencari layanan setelah menjadi korban kekerasan seksual.²⁷

Ada banyak alasan bagi korban untuk tidak melaporkan kejahatan. Korban mungkin tidak tahu bahwa perilaku tersebut melanggar hukum atau merasa telah cukup menderita. Tekanan atau stigma sosial mencegah banyak orang mencari keadilan.

Tetapi survei-survei juga menunjukkan bahwa ada banyak korban yang tidak berdaya karena kurangnya kepercayaan mereka terhadap sistem peradilan pidana. Di Inggris, setengah dari rakyat tidak melaporkan kejahatan karena mereka yakin polisi tidak akan tertarik, tidak akan dapat membantu mereka, atau karena mereka memiliki pengalaman buruk dengan polisi di masa lalu.²⁸ Ketika kaum perempuan ditanya dalam sebuah internasional survei mengapa mereka tidak melaporkan pengalaman mereka mendapatkan pelecehan seksual, setengah dari mereka mengatakan tidak ada gunanya membuat laporan kepada polisi, dan seperempatnya mengatakan mereka tidak berpikir bahwa sistem hukum akan cukup memahaminya.²⁹

Ketika insiden ketidakadilan dilaporkan, responsnya seringkali tidak memadai. Sejumlah data menunjukkan adanya tingkat impunitas yang tinggi untuk masalah kekerasan dan kejahatan. Di AS, misalnya, hampir 40 persen kasus pembunuhan gagal menangkap atau mengidentifikasi tersangka.³⁰ Di Meksiko, hanya 5 persen dari kasus pembunuhan dapat diselesaikan.³¹ Untuk beberapa kejahatan angka penuntutan hanya sedikit di atas nol.

Kami memperkirakan bahwa di seluruh dunia, kurang dari 1 persen kaum perempuan yang mengalami perkosaan mendapatkan keadilan.³³

Gambaran serupa muncul ketika kita melihat kebutuhan-kebutuhan peradilan perdata dan administrasi. Perselisihan antar orang, antara orang dengan pemerintah, dan antara orang dengan bisnis adalah hal biasa dalam kehidupan sehari-hari. Sementara prevalensi kekerasan mungkin terlihat kecil dalam hasil-hasil survei, orang memiliki kemungkinan mengalami masalah



peradilan perdata atau administrasi sembilan kali lipat lebih besar daripada masalah peradilan pidana.³⁴

Banyak masalah yang dihadapi orang dalam kehidupan mereka memiliki dimensi hukum. Masalah-masalah itu juga saling berhubungan. Perceraian dapat memicu perselisihan tentang tanah dan properti. Masalah peradilan perdata dan administrasi yang tidak terpecahkan dapat menyebabkan timbulnya kekerasan. Batas-batas antara berbagai bentuk ketidakadilan ini sering tidak berarti banyak dalam kehidupan sehari-hari.

Masalah-masalah keadilan sehari-hari semacam itu memiliki beberapa ciri umum:

- Banyak orang tidak mengambil tindakan ketika mereka memiliki masalah peradilan perdata atau administrasi.³⁵ Mereka juga tidak menyadari bahwa hukum seharusnya dapat membantu mereka, tidak tahu ke mana harus mencari bantuan, atau mereka tidak memiliki keyakinan akan mendapatkan penyelesaian yang adil. Biaya adalah masalah, tetapi hambatan-hambatan lain tampak besar sebelum orang memutuskan apakah mereka mampu mencari keadilan.
- Perselisihan sebagian besar diselesaikan di luar sistem peradilan formal. Di sebagian besar negara, “perespons pertama” bukanlah pengacara dan pengadilan.³⁶ Orang-orang lebih memilih datang ke orang yang mereka percaya dalam keluarga dan komunitas mereka. Atau mereka datang ke berbagai organisasi dan sumber informasi – negara dan non-negara, formal dan informal, baik yang memang khusus untuk isu keadilan atau dari sektor lainnya – untuk mendapatkan saran dan bantuan.³⁷
- Rakyat yang paling membutuhkan keadilan adalah mereka yang paling kecil kemungkinannya untuk mendapatkannya. Masalah-masalah mereka lebih kompleks dan saling berhubungan. Di Australia, misalnya, 9 persen rakyat mengalami lebih dari 60 persen dari semua masalah keadilan.³⁸ Mereka kemungkinan besar akan memperoleh diskriminasi aktif dari sistem peradilan. Dan mereka sering dihadapkan dengan kekuasaan yang tidak seimbang dan tak dapat diatasi, karena mereka menghadapi orang lain yang memiliki sumber daya untuk menggunakan hukum demi keuntungan mereka.

Rakyat yang terpinggirkan dari peluang yang disediakan oleh hukum

Mewujudkan keadilan bukan hanya tentang menanggapi masalah dan perselisihan. Mewujudkan keadilan juga mencakup memberikan kontribusi positif untuk pembangunan berkelanjutan dan bertindak sebagai portal untuk hak-hak lainnya.

Oleh karena itu kami menghitung jumlah orang yang tidak memiliki akses ke “infrastruktur hukum”, sebuah dasar yang mendukung pertumbuhan inklusif, pengurangan kemiskinan, dan inklusi sosial.³⁹ Analisis Satuan Tugas dibangun di atas hasil kerja terobosan Commission on Legal Empowerment of the Poor, yang pada 2008 menemukan bahwa empat miliar orang “tidak mampu memperbaiki kehidupan mereka dan tidak dapat keluar dari kemiskinan” karena mereka tidak memiliki akses untuk dapat memperoleh dokumentasi dasar dan perlindungan hukum lainnya.⁴⁰

Kami memperkirakan bahwa saat ini setidaknya ada 4,5 miliar orang yang terpinggirkan dari peluang yang disediakan oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Perkiraan ini memiliki tiga komponen:

- Orang-orang yang tidak memiliki identitas hukum yang memadai.
- Orang-orang yang tidak memiliki cukup bukti kepemilikan rumah atau tanah.
- Orang-orang yang bekerja di sektor ekonomi informal.

Di seluruh dunia, 1,1 miliar orang tidak memiliki identitas hukum yang memadai. Satu dari tiga anak di bawah usia lima tahun, tidak memiliki identitas hukum karena kelahiran mereka tidak didaftarkan.⁴¹ Banyak dari mereka yang tidak pernah berhasil memperbaikinya, bahkan ketika mereka mencapai usai dewasa.⁴² Tidak dimilikinya identitas hukum yang mencukupi membuat mereka kesulitan untuk mengakses hak-hak seperti perawatan kesehatan dan pendidikan yang tersedia bagi publik, untuk menikah, atau untuk membeli properti, untuk mendapatkan pekerjaan atau mendirikan usaha. Masalah ini juga menghambat akses ke lembaga-lembaga yang dimaksudkan untuk melindungi dan menegakkan hak-hak, seperti pengadilan dan polisi. Masyarakat dan negara-negara termiskin adalah yang paling tidak mendapatkan manfaat dari pencatatan kelahiran. Sementara kaum perempuan lebih kecil kemungkinannya untuk didaftarkan daripada laki-laki, di mana di negara-negara berpenghasilan rendah, 45 persen dari kuintil termiskin tidak memiliki identitas hukum yang mencukupi, demikian juga 45 persen perempuan dari semua kelompok pendapatan.⁴³

Ada beberapa kemajuan dalam bidang ini dalam beberapa tahun terakhir. Jumlah orang yang tidak terdaftar telah menurun seperempat sejak tahun 2016. Sebagian dari selisih jumlah ini mungkin karena data yang lebih baik, di mana hal ini juga mencerminkan telah dijalankannya program identitas hukum secara cepat di negara-negara seperti India.⁴⁴

Diperkirakan 2,3 miliar orang tidak memiliki bukti kepemilikan rumah atau tanah yang mencukupi. Tidak adanya dokumen yang



berkaitan dengan properti atau tanah meningkatkan rasa tidak aman masyarakat, dan mempersulit mereka untuk mengakses pinjaman, atau untuk merealisasikan nilai penuh penjualan harta mereka.⁴⁵ Masyarakat juga membutuhkan pengakuan atas hak-hak tanah mereka, untuk mencegah perampasan tanah, melindungi mata pencaharian mereka, dan memerangi degradasi lingkungan. Kaum perempuan pada khususnya berisiko memiliki hak kepemilikan yang tidak aman, seperti halnya masyarakat adat, dan komunitas yang kurang beruntung lainnya.⁴⁶

Pertumbuhan populasi, perubahan demografis, dan pertumbuhan ekonomi akan terus meningkatkan tekanan di negara-negara dan masyarakat yang memiliki hak tanah dan properti yang lemah. Dengan tambahan 1,1 miliar orang yang diperkirakan akan tinggal di kota-kota besar dan kecil pada tahun 2030, urbanisasi dapat menyebabkan peningkatan perselisihan karena orang-orang memperebutkan tanah dan lahan yang langka.⁴⁷

Juga ada kesenjangan keadilan yang nyata di tempat kerja. Di seluruh dunia, 2,1 miliar orang bekerja di sektor informal. Sebagian besar dari para pekerja ini tidak memiliki kontrak formal dan oleh karenanya beroperasi di luar payung undang-undang ketenagakerjaan.⁴⁸ Kondisi ini membatasi kemampuan mereka untuk melawan eksploitasi dan pelecehan. Banyak dari mereka yang bekerja di sektor informal bekerja dengan jam kerja terlalu lama dan dengan upah rendah, serta dalam kondisi yang tidak aman atau tidak nyaman. Sementara itu, pekerja sektor wiraswasta informal juga menghadapi kesulitan mengakses keuangan dan menegakkan ketentuan-ketentuan yang ada dalam kontrak, dan mereka mungkin juga menghadapi ancaman keamanan fisik, termasuk dari pihak berwenang. Di negara-negara berkembang, kaum perempuan lebih cenderung dipekerjakan secara informal daripada laki-laki. Hanya 5 persen kaum perempuan di Asia Selatan bekerja di sektor formal, dan di Sub-Sahara Afrika hanya 11 persen.⁴⁹

“Ketidakadilan dan ketimpangan berjalan seiring. Anggota masyarakat yang paling rentan kemungkinan besar mengalami ketidakadilan, sementara para elit sering dapat menggunakan sistem peradilan untuk melindungi kepentingan mereka dan mempertahankan hak istimewa mereka.”

Hambatan Mewujudkan Keadilan bagi Semua

Analisis kami di Satuan Tugas memberikan gambaran wajah kesenjangan keadilan manusia. Kami menyoroti rakyat yang terpinggirkan dari akses mendapatkan keadilan. Kami menyoroti kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh rakyat yang tidak dapat menyelesaikan perselisihan atau mendapatkan keadilan ketika mereka menjadi korban kekerasan dan kejahatan. Dan kami telah menunjukkan betapa banyak orang yang ditolak dan tidak mendapatkan peluang yang disediakan oleh hukum.

Tetapi walaupun penting untuk memulai dengan rakyat dan pengalaman mereka, jelas bahwa banyak masalah keadilan yang telah kita diskusikan bersifat kolektif maupun individual.⁵⁰ Jika sejumlah besar perempuan dan anak-anak menjadi korban kekerasan, ini mencerminkan kegagalan yang lebih luas dalam upaya pembelaan atas hak-hak mereka. Jika suatu komunitas tidak dapat melindungi tanahnya atau jika anggota masyarakat termiskin dapat diusir dari rumah mereka tanpa bantuan hukum, hal itu mencerminkan kegagalan yang lebih luas dari sistem peradilan untuk merespon ketimpangan kekuasaan.

Ketidakadilan dan ketimpangan berjalan seiring. Anggota masyarakat yang paling rentan kemungkinan besar akan mengalami ketidakadilan, dan mereka akan menerima dampak terbesar jika terjadi (lihat spotlight 1). Namun, mereka juga adalah pihak yang paling kecil memiliki akses ke sistem peradilan yang memenuhi kebutuhan mereka. Komunitas termiskin juga paling mungkin untuk mengalami ketidakadilan struktural seperti perampasan tanah, perusakan lingkungan, atau pelanggaran hak oleh lembaga negara atau oleh perusahaan. Komunitas-komunitas ini juga seringkali mengalami kesulitan untuk mendapatkan ganti rugi melalui sistem peradilan.

Sementara beberapa kelompok menderita karena perlakuan tidak proporsional dari ketidakadilan struktural, yang lainnya diuntungkan. Para elit sering dapat menggunakan sistem peradilan untuk melindungi kepentingan mereka dan mempertahankan hak istimewa mereka. Praktik impunitas telah memungkinkan banyak pelaku ketidakadilan dapat meloloskan diri dari tanggung jawab atas kejahatan mereka. Perlakuan yang tidak adil semacam itu merusak sistem peradilan, yang mengarah pada kekerasan, korupsi, dan ketidakamanan lebih lanjut.⁵¹

Rakyat yang mencari penyelesaian atas masalah-masalah keadilan mereka dihadapkan pada banyak hambatan. Ada ketidakcocokan antara apa yang dibutuhkan rakyat dan apa yang disediakan oleh sistem peradilan.

- Keadilan seringkali terlalu lambat dan memakan waktu, terlalu mahal, dan banyak menimbulkan tekanan yang tidak perlu bagi mereka yang membutuhkan bantuan. Bagi banyak orang, lembaga-lembaga peradilan secara fisik pun bahkan tidak dapat diakses, atau dianggap tidak dapat dijangkau, atau tidak efisien karena adanya hambatan-hambatan linguistik atau budaya. Keterlambatan ini menyebabkan masalah-masalah keadilan menjadi lebih serius, membebankan biaya dan tekanan yang lebih besar pada para pengguna dan pada lembaga-lembaga peradilan itu sendiri.

- Sistem peradilan dapat membuat perselisihan malah makin meningkat atau menambah trauma pada korban melalui sifat permusuhannya (adversarial). Prosedur tidak dirancang untuk mengurangi konflik atau mendorong orang untuk menyelesaikan masalah secara konstruktif. Dalam kebanyakan kasus, sektor peradilan tidak dibentuk untuk belajar dari kasus-kasus individual, dan tidak menggunakan bukti ini untuk mencegah masalah keadilan untuk terjadi ataupun untuk membatasi tingkat keparahan dan dampaknya.
- Korupsi di dalam sistem peradilan dan kurangnya independensi para aktor peradilan merupakan hambatan lebih lanjut. Di banyak negara, polisi dan peradilan termasuk di antara lembaga yang paling tidak dipercaya. Banyak orang awam yang berpikir bahwa mereka harus membayar suap ketika mereka mencari keadilan. Bahkan lebih banyak diketahui bahwa mereka tidak akan bermain di medan permainan yang sama dan setara ketika menghadapi lawan yang memiliki lebih banyak sumber daya dan koneksi yang lebih baik.

Hambatan-hambatan ini mencerminkan kurangnya kerja sama antar lembaga peradilan. Kesenjangan keadilan tidak dapat dijabatani hanya oleh satu organisasi atau kementerian. Sistem-sistem peradilan harus berpusat pada rakyat dan kebutuhan mereka, yang memungkinkan lembaga-lembaga untuk bekerja sama untuk menanggapi “kelaparan” masyarakat akan keadilan. Hal ini merupakan dasar analisis dan rekomendasi yang disajikan dalam laporan kami.

Agenda 2030 menjanjikan akses yang sama untuk mendapatkan keadilan bagi semua pada tahun 2030, namun kita hidup di dunia di mana sistem-sistem peradilan hanya memberikan keadilan bagi segelintir orang. Untuk mampu mengatasi kesenjangan keadilan ini dibutuhkan visi baru, transformasi ambisi, dan strategi-strategi yang menganggap serius besaran masalah yang ada.

Sektor-sektor lain – sebagian terinspirasi oleh Millennium Development Goals – telah mulai melakukan perubahan ini. Pendidikan dulunya hanya terbatas pada minoritas yang memiliki hak istimewa, tetapi semua negara sekarang berkomitmen untuk menyediakan pendidikan bagi setiap anak hingga setidaknya tingkat menengah, dan negara-negara diwajibkan untuk membuat pendidikan tinggi dapat diakses oleh semua.⁵² Setengah dari populasi dunia masih kekurangan akses untuk dapat memperoleh perawatan kesehatan yang layak, tetapi pada tahun-tahun terakhir telah terlihat gerak pertumbuhan cakupan layanan kesehatan universal di semua negara, baik negara kaya maupun miskin.⁵³

Kita sekarang harus memiliki bukti dan argumentasi yang sama kuatnya di sektor keadilan. Upaya menyediakan akses untuk mendapatkan keadilan bagi miliaran orang lagi ini bukan hanya merupakan suatu hal yang benar untuk dilakukan; ini juga akan memberikan manfaat besar bagi rakyat, komunitas, dan masyarakat. Dengan menempatkan rakyat di pusat sistem-sistem peradilan, kita dapat membantu membuka penghalang jalan menuju pola pembangunan yang lebih berkelanjutan.

Menuju data keadilan yang lebih baik: peran Kantor Statistik Nasional

Gambaran yang kita miliki tentang kesenjangan keadilan masih bersifat sebagian, tetapi memberikan titik awal untuk membangun pendekatan yang lebih strategis untuk mencapai target-target TPB untuk keadilan bagi semua dan untuk membangun sistem peradilan yang menempatkan rakyat sebagai pusat.

Upaya-upaya melakukan pengukuran dan melaporkan kemajuan mengenai indikator-indikator yang ada pada saat ini untuk TPB16.3 menciptakan tantangan yang signifikan bagi negara-negara dan Kantor Statistik Nasional mereka. Tuntutan untuk tersedianya data keadilan yang lebih baik kemungkinan akan meningkat lebih lanjut jika indikator global untuk mengukur akses ke peradilan perdata dan administrasi telah disepakati.

Kantor Statistik Nasional (KSN) akan perlu sistem yang lebih mandiri dan transparan jika ingin dapat mengumpulkan data yang berpusat pada rakyat secara kuat dan komprehensif, yang dapat digunakan untuk menilai kemajuan nasional menuju TPB16.3. Penguatan standar tata kelola akan membantu memastikan bahwa data terkait keadilan dapat dikumpulkan tanpa ada pengaruh pemerintah dan pengaruh dari luar, yang akan mengurangi potensi bias, meningkatkan kredibilitas data, dan berbagi data tersebut secara lebih luas dengan para mitra pemerintah dan non-pemerintah.

Eurostat Code of Practice memberikan kerangka kerja bagi setiap Kantor Statistik Nasional di Eropa untuk mengembangkan pendekatannya sendiri untuk menjamin independensi, akuntabilitas, dan transparansi. Di masa depan, standar regional atau global baru tentang tata kelola Kantor Statistik Nasional dapat memperkuat kapasitas nasional dalam pengumpulan data peradilan yang independen. Ini akan bermanfaat bukan hanya untuk keperluan penyediaan data dan pelaporan keadilan, tetapi juga untuk pelaporan mengenai semua bagian dari Agenda 2030.

Kotak ini diambil dari NSO Governance for Better Justice Data, sebuah memo yang disiapkan untuk Satuan Tugas Keadilan oleh White & Case LLP.

Bab 2

Bukti dan Argumentasi untuk Aksi

Biaya yang muncul karena kurang tersedianya akses keadilan adalah tinggi.

Bagi individu-individu, ketidakadilan menyebabkan hilangnya pendapatan dan masalah kesehatan mental dan fisik.

Bagi masyarakat, ketidakadilan akan berujung pada kemiskinan, kerusakan ekonomi, dan meningkatkan risiko ketidakstabilan, kekerasan, dan konflik.

Investasi keadilan akan menuai hasil yang besar. Ini akan mengubah kehidupan, memperkuat masyarakat, dan meningkatkan ekonomi, memberikan tingkat pengembalian investasi secara substansial.

Di negara-negara termiskin, ini akan menelan biaya sebesar \$ 20 per orang per tahun untuk menyediakan akses tingkat dasar untuk mendapatkan keadilan. Di negara-negara berpenghasilan menengah akan menelan biaya sebesar \$ 64, dan di negara-negara berpenghasilan tinggi akan menelan biaya sebesar \$ 190.

Layanan keadilan dasar akan terjangkau dengan pembiayaan yang lebih cerdas, kenaikan bantuan internasional untuk negara-negara miskin, dan penggunaan yang lebih luas atas solusi-solusi yang berbiaya rendah namun bernilai uang tinggi.

Investasi Keadilan bagi Semua

Akses untuk mendapatkan keadilan adalah hak asasi manusia yang sifatnya mendasar.⁵⁴ Hak keadilan juga membantu rakyat untuk merealisasikan hak-hak lainnya dan untuk mendapatkan penggantian ketika hak-hak tersebut dilanggar. Melalui Agenda 2030, para pemimpin dunia mengakui keterkaitan ini. Sebagai bagian dari visi mereka tentang dunia di mana terdapat penghormatan universal terhadap hak asasi manusia dan martabat manusia, mereka berjanji untuk membangun masyarakat yang menyediakan keadilan bagi semua.

Namun di samping dasar argumentasi moral ini, ada alasan-alasan pragmatis untuk melakukan investasi keadilan bagi semua. Ketidakadilan adalah mahal. Rakyat, komunitas, dan masyarakat menderita kerugian yang signifikan ketika sistem peradilan gagal melindungi mereka dari kekerasan, atau membantu mereka menyelesaikan perselisihan, atau memenuhi potensi ekonomi mereka.

Manfaat investasi dalam keadilan sangat jelas. Dibutuhkan peningkatan pendanaan peradilan secara substansial. Sumber-sumber daya yang ada juga harus dialihkan dari pendekatan-pendekatan yang tidak efektif menuju strategi-strategi, kebijakan-kebijakan, dan program-program yang terbukti berhasil. Biaya untuk mencapai terwujudnya keadilan bisa terjangkau, tetapi tetap akan membutuhkan mekanisme pembiayaan yang inovatif dan perluasan jumlah pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembiayaan sektor ini.

Biaya Ketidakadilan

Pada 17 Desember 2010, seorang penjual buah Tunisia berusia 26 tahun bernama Mohamed Bouazizi membakar dirinya di luar sebuah gedung pemerintah di kota asalnya, Sidi Bouzid.

Bouazizi berpenghasilan kurang dari \$ 10 sehari dari menjual buah dengan gerobaknya. Dia adalah pencari nafkah utama keluarganya. Pagi itu, polisi kota menyita alat timbangannya karena dia tidak memiliki izin untuk melakukan pekerjaannya. Ini adalah insiden terbaru dari serangkaian insiden yang telah dilakukan oleh para pihak berwenang, mulai dari membalikkan gerobaknya, menyita barang-barang dagangannya, atau meminta suap sebagai imbalan untuk membiarkannya tetap berdagang. Ketika seorang polisi perempuan menampar wajahnya, dia merasa tidak tahan lagi.

Mohamed Bouazizi pergi ke kantor gubernur provinsi untuk mengeluh tentang bagaimana dia diperlakukan. Ketika gubernur melarang dia memasuki gedung, ia membeli sekaleng bensin dari pompa bensin terdekat dan membakar dirinya sendiri di jalan. Dia meninggal karena lukanya dua minggu kemudian.

Kematian Bouazizi memicu protes yang pada awalnya menyebar di seluruh Tunisia – mengakibatkan jatuhnya diktator lama negara itu, Zine el Abedine Ben Ali – dan kemudian menyebar di seluruh dunia Arab. Sementara Tunisia menjalani transisi yang sebagian besar damai, kekerasan yang timbul dalam peristiwa Arab Spring menjadi salah satu pendorong utama meningkatnya konflik yang mematikan di seluruh dunia pada tahun-tahun berikutnya.⁵⁵

Bouazizi berjuang untuk menghidupi dirinya dan keluarganya. Namun, bukan kemiskinan yang membuatnya putus asa, tetapi ketidakadilan.

Dari sudut pandang ekonomi, Tunisia tergolong sukses. Penghasilan per kapita di Tunisia meningkat hampir dua kali lipat sepanjang dekade sebelum 2010. Tingkat kemiskinan telah turun seperlima.⁵⁶ Negara ini juga lebih responsive terhadap aspirasi-aspirasi rakyatnya. Laporan Pembangunan Manusia pada tahun itu, yang diterbitkan hanya sebulan sebelum Bouazizi meninggal, memberikan pujian pada Tunisia sebagai “kisah sukses” atas kemajuannya yang luar biasa dalam Indeks Pembangunan Manusia.⁵⁷ Tetapi laporan ini juga memperingatkan masalah defisit demokrasi, kebebasan politik makin mundur, dan kegagalan untuk melindungi demokrasi dan supremasi hukum.

Bouazizi tinggal di sebuah negara dengan sistem peradilan yang secara luas dianggap korup dan tidak adil, memihak orang kaya dan membiarkan pelecehan terhadap orang miskin. Bahkan hari ini, sebagian besar masalah keadilan tidak terselesaikan dan

“Bukan kemiskinan yang mendorong Mohamed Bouazizi putus asa, tetapi ketidakadilan.”

hanya sedikit rakyat Tunisia yang puas dengan kinerja lembaga peradilan.⁵⁸ Kasus Bouazizi melibatkan masalah dokumentasi yang tidak jelas (masih diperdebatkan apakah ia memerlukan izin atau tidak), para aktor keadilan yang kejam, dan ketidakmampuan untuk mengutarakan keluhan, apalagi untuk melakukan penyelidikan atau tindak lanjut atas keluhan itu. Seperti yang dikatakan ibu Bouazizi beberapa minggu kemudian: "Kami adalah rakyat miskin di Sidi Bouzid. Kami tidak punya uang, tetapi kami memiliki martabat, dan martabatnya telah direnggut dengan tamparan itu."⁵⁹

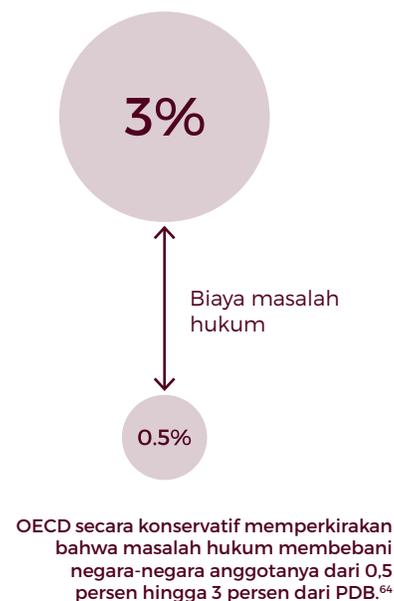
Kasus ini menunjukkan secara nyata tentang bagaimana ketidakadilan dapat menjadi mata rantai yang hilang dalam strategi pembangunan nasional. Ekonomi dapat berkinerja baik, dan kesehatan serta pendidikan dapat meningkat. Tetapi tanpa keadilan, pembangunan akan berada dalam situasi genting, dan dampak sosial, ekonomi, dan politik dari ketidakadilan akan mengganggu kemajuan yang telah dicapai di bidang-bidang lainnya.

Ketidakadilan mahal bagi rakyat dan masyarakat

Biaya ketidakadilan akan ditanggung pertama-tama oleh individu-individu dan komunitas mereka. Kita baru mulai mengukur besarnya, tetapi dari bukti-bukti yang terkumpul didapatkan bahwa biayanya akan jauh lebih besar daripada yang diperkirakan sebelumnya. Banyak bukti-bukti ini diperoleh dari negara-negara kaya – tetapi karena masalah-masalah keadilan situasinya lebih serius di negara-negara dengan penduduk miskin, biaya yang dikeluarkan hampir bisa dipastikan lebih tinggi.⁶⁰

Biaya langsung ketidakadilan akan ditanggung oleh orang-orang yang terlibat.⁶¹ Orang mungkin menderita kerugian langsung sebagai akibat dari properti yang rusak atau dicuri (atau disita), dari biaya harus membayar pengacara atau biaya pengadilan, bepergian jauh ke pengadilan, atau kehilangan pekerjaan karena harus menghadiri sidang pengadilan. OECD memperkirakan bahwa orang-orang dengan masalah hukum rata-rata kehilangan upah satu bulan.⁶² Untuk keperluan penyelesaian masalah hukum, rumah tangga di Kanada menghabiskan biaya hampir sebanyak pengeluaran tahunan mereka untuk makanan.⁶³

Biaya-biaya lain yang harus ditanggung oleh individu-individu bersifat kurang langsung. Masalah-masalah keadilan yang melibatkan kekerasan dan konflik memiliki dampak seumur hidup yang melampaui kematian dan cedera.⁶⁵ Para korban kekerasan memiliki risiko lebih besar dengan masalah kesehatan



mental, bunuh diri, dan penyalahgunaan obat, dan menjadi lebih berpeluang untuk menderita penyakit kronis seperti kanker dan penyakit jantung. Anak-anak yang menjadi korban kekerasan mengalami “kerusakan menetap pada tingkat dasar sistem saraf, endokrin, dan kekebalan tubuh,”⁶⁶ dan akan memiliki kemungkinan lebih kecil untuk mendapatkan pekerjaan ketika mereka dewasa dibandingkan dengan rekan-rekan mereka yang lain.⁶⁷ Kaum perempuan yang menjadi korban kekerasan oleh pasangan dekat mereka memiliki risiko dua kali lipat daripada perempuan lainnya untuk mengalami masalah depresi.⁶⁸ Mereka juga menghadapi dampak negatif secara ekonomi. Perempuan Tanzania yang menjadi korban pelecehan parah di tangan pasangan intim mereka, mengalami penurunan penghasilan sebesar 60 persen.⁶⁹

Masalah-masalah peradilan perdata dan administrasi juga menyebabkan kerusakan berlanjut. Perselisihan properti dan tanah mengurangi pendapatan rumah tangga, dengan dampak yang tidak proporsional pada perempuan dan rakyat miskin.⁷⁰ Prosedur atau persyaratan birokrasi yang kompleks membuat rakyat gagal membangun wirausaha mereka. Perselisihan ketenagakerjaan mengurangi pendapatan pekerja, sementara kehilangan atau penolakan layanan publik berdampak negatif pada kesejahteraan. Tiga belas persen warga Kenya yang menghadapi masalah keadilan dalam empat tahun sebelumnya melaporkan bahwa mereka kehilangan pekerjaan.⁷¹

Dampak-dampak yang ditimbulkan terhadap kesehatan bisa serius dan berkelanjutan. Masalah-masalah yang berkaitan dengan hutang telah terbukti memperburuk penyakit mental.⁷² Konflik dalam keluarga dapat menyebabkan kerusakan seumur hidup pada kesejahteraan fisik dan mental orang dewasa dan anak-anak.⁷³ Dua dari lima warga Kanada membutuhkan konsultasi dengan penyedia layanan kesehatan karena stres atau gangguan emosional yang disebabkan oleh masalah hukum.⁷⁴ Hampir satu dari tiga orang Nigeria menderita penyakit yang berkaitan dengan stres sebagai akibat dari perjuangan mereka menghadapi masalah hukum.⁷⁵

Ketidakadilan juga merusak dan mengisolasi masyarakat. Dalam hal ini mengurangi kepercayaan warga negara, merusak ekonomi lokal, dan mengikis ketahanan. Kerusakan akan lebih memburuk ketika orang tidak dapat meminta bantuan dari lembaga-lembaga peradilan. Ketika sistem peradilan gagal atau ada penyalahgunaan wewenang, hal itu akan memperbesar persepsi ketidakadilan yang muncul dari sebab-sebab lainnya. Hal ini dapat mengubah persepsi masyarakat untuk saling melawan satu sama lain atau melawan otoritas.⁷⁶

Biaya keadilan membebani masyarakat dan ekonomi

Mengingat besarnya kesenjangan keadilan, tidak mengejutkan jika dampaknya di tingkat lokal dapat menjalar dan merugikan seluruh masyarakat.

Dengan mendorong pengecualian dan memicu tumbuhnya keluhan-keluhan yang semakin membesar, ketidakadilan meningkatkan risiko ketidakstabilan politik dan, seperti dalam peristiwa Arab Spring, menimbulkan konflik kekerasan.⁷⁷ Krisis-krisis semacam ini memiliki dampak dramatis pada prospek-prospek jangka panjang suatu negara, memutar balik pembangunan sosial dan ekonomi dan meningkatkan risiko ketidakstabilan lebih lanjut. Negara-negara yang memiliki sejarah pelanggaran hak asasi manusia jauh lebih mungkin mengalami konflik kekerasan.⁷⁸ Those that have one civil war are more likely to experience a second.⁷⁹

Kekerasan menghalangi investasi dan pertumbuhan.⁸¹ Setelah menikmati masa pertumbuhan yang baik setiap tahun selama lima tahun sebelumnya, ekonomi Tunisia mengalami penyusutan dalam dua tahun setelah kematian Mohamed Bouazizi.⁸² Meksiko kehilangan seperlima dari PDB karena kekerasan, dengan nilai kerugian yang mungkin sebanding di negara-negara lain dengan tingkat kekerasan yang serupa.⁸³ Pada tingkat global, Institute for Economics & Peace memperkirakan bahwa konflik-konflik telah merugikan dunia sebesar 12,4 persen dari PDB tahunannya, atau \$ 1.988 per orang per tahun.⁸⁴

Berkembangnya ketidakadilan terhadap perempuan dan anak-anak memiliki dampak yang lebih luas. Di negara-negara di mana kaum perempuan menghadapi eksklusi, rasa tidak aman dan ketidakadilan yang tinggi, pembangunan manusia akan terhambat, pendapatan per kapita lebih rendah, dan daya saing nasional lebih lemah.⁸⁵

Bilamana hak perempuan atas tanah tidak dilindungi, mata pencaharian mereka dan keluarganya akan rusak.⁸⁶ Perkawinan anak merugikan ekonomi global hingga miliaran dolar per tahun melalui dampaknya pada pertumbuhan penduduk saja.⁸⁷ Ketidakadilan yang dihadapi oleh kaum perempuan dan anak-anak juga menyebabkan hasil-hasil yang lebih buruk dari pendidikan dan investasi publik lainnya dalam hal modal manusia.⁸⁸ Pelanggaran hak-hak lainnya juga mahal harganya. Perbudakan modern – yang disebut sebagai dimensi ketidakadilan yang ekstrem pada Bab 1 – sangat merugikan perekonomian global sebesar \$ 4,4-5,7 miliar per tahun.⁸⁹

> Di negara-negara di mana kaum perempuan menghadapi masalah eksklusi, rasa tidak aman dan ketidakadilan yang tinggi, pembangunan manusia akan terhambat, pendapatan per kapita lebih rendah, dan daya saing nasional lebih lemah.⁸⁰

Kami memiliki beberapa bukti untuk menghitung agregat biaya dari masalah keadilan sehari-hari. Di Kanada, masalah-masalah perdata dan administrasi membuat negara harus mengeluarkan tambahan biaya sebesar \$ 74 juta untuk pengeluaran perawatan kesehatan, \$ 248 juta untuk penyediaan bantuan sosial, dan \$ 450 juta untuk bantuan pekerjaan tambahan.⁹⁰

Di lima dari tujuh negara berpenghasilan rendah yang disurvei oleh World Justice Project, total biaya masalah keadilan mencapai sedikitnya 2 persen dari PDB, di mana kehilangan pekerjaan dan penghasilan sebagai penyebab utamanya. OECD, berdasarkan data dari survei kebutuhan hukum dan berfokus pada mereka yang melapor, menemukan bahwa mereka telah menghabiskan banyak uang untuk menyelesaikan masalah keadilan, dan mereka juga mengalami gangguan kesehatan, atau harus meninggalkan atau kehilangan pekerjaan.⁹¹ Perhitungan ini mendapati bahwa biaya rata-rata untuk ketiga kategori dampak ini melebihi 1 persen dari PDB di 17 negara OECD yang diteliti.⁹²

Ketidakadilan lainnya juga berdampak negatif pada potensi suatu negara. Ketika rakyat miskin tidak memiliki akses untuk mendapatkan properti, hak atas pekerjaan atau usaha, maka tidak mungkin bagi mereka untuk keluar dari kemiskinan.⁹³ Ketika mereka harus mengeluarkan biaya tinggi atau menyuap pejabat untuk mendapatkan identitas dan dokumen-dokumen lainnya, maka kemiskinan akan semakin dalam.⁹⁴ Tingkat kemiskinan di antara mereka yang bekerja di sektor informal lebih tinggi daripada di antara mereka yang bekerja di sektor formal.⁹⁵ Negara-negara yang situasinya lebih sulit dalam membuat dan menegakkan perjanjian/kontrak memiliki kondisi perekonomian yang lebih lemah, pasar kredit yang kurang berkembang, dan lebih jarang ada perusahaan kecil.⁹⁶

“Ketika rakyat miskin tidak memiliki akses untuk mendapatkan properti, hak atas pekerjaan atau usaha, tidak mungkin bagi mereka untuk keluar dari kemiskinan.”

Manfaat Investasi Keadilan

Semakin banyak bukti menunjukkan bahwa pengeluaran untuk keadilan yang berpusat pada rakyat dapat memberikan tingkat pengembalian investasi yang tinggi.

Investasi keadilan memberikan sejumlah manfaat, termasuk pengurangan risiko konflik dan ketidakstabilan, peningkatan kapasitas untuk mencegah dan memecahkan masalah keadilan sehari-hari, dan peluang yang lebih besar untuk pertumbuhan dan kesejahteraan.

Dividen lebih lanjut dapat diperoleh dari pengalihan pengeluaran keadilan yang tidak efektif ke intervensi-intervensi yang benar-benar terbukti telah berhasil.

Mengurangi risiko konflik dan ketidakstabilan

Sistem peradilan yang adil dan efektif memainkan peran penting dalam mengurangi risiko konflik kekerasan.

Laporan utama PBB dan Bank Dunia Pathways for Peace menekankan pentingnya upaya-upaya mencegah konflik sebagai “strategi rasional dan berbiaya efektif untuk negara-negara yang berisiko kekerasan, dan untuk masyarakat internasional.”⁹⁷

Tidaklah mungkin untuk mengukur secara terpisah dampak keadilan terhadap berkurangnya risiko konflik (dan mengingat perlunya strategi-strategi pencegahan konflik terpadu, disagregasi semacam itu tidak akan berguna). Tetapi kita berharap bahwa dengan peningkatan kapasitas suatu negara untuk menjalankan fungsi-fungsi keadilan inti dan menyediakan akses yang terus ditingkatkan untuk mendapatkan keadilan, maka akan menuai hasil yang serupa dengan yang dilakukan untuk pencegahan secara keseluruhan. Di bawah skenario konservatif laporan Pathways to Peace, nilai pengembaliannya adalah sebesar \$ 16 untuk setiap dolar yang diinvestasikan.⁹⁹

Kami juga dapat mengukur dampak-dampaknya dalam hal penyelamatan jiwa. International Commission against Impunity di Guatemala dibentuk untuk memerangi impunitas pasukan keamanan ilegal dan organisasi-organisasi keamanan bawah tanah. Hal ini juga membantu mengatasi masalah korupsi dan membangun kembali kapasitas sistem peradilan. International Crisis Group memperkirakan bahwa hasil kerja Komisi Internasional tersebut telah membawa penurunan insiden pembunuhan sebesar 5 persen, dibandingkan dengan negara-negara tetangga (sebagai kelompok kontrol), dan menyelamatkan hampir 5.000 jiwa dalam sepuluh tahun.¹⁰⁰ Reformasi kelembagaan, peningkatan teknik investigasi, kemitraan yang lebih kuat di antara para aktor keamanan dan keadilan, dan meningkatnya kepercayaan terhadap sistem yang melibatkan semua unsur, telah berkontribusi pada peningkatan keselamatan ini.

Bukan hanya pemerintah yang akan mendapat manfaat dari investasi di sistem peradilan. Mengingat sifat rantai pasokan modern yang terhubung secara global, terdapat bukti dan argumen bagi pentingnya investasi sektor swasta, terutama ketika mereka berisiko menjadi pihak dalam pelanggaran hak asasi manusia. Banyak perusahaan multinasional yang rusak parah reputasinya ketika, misalnya, diketahui bahwa di dalam rantai pasokan mereka melibatkan perbudakan modern.¹⁰¹ Ada pula yang kehilangan pelanggan dan harga sahamnya jatuh setelah terungkapnya kegagalan mereka melindungi para pekerja, atau terlibat dalam eksploitasi sumber daya alam di negara-negara yang memiliki aturan hukum yang lemah.¹⁰²

> Sistem yang efektif untuk mencegah konflik kekerasan akan menyelamatkan ekonomi global sebanyak \$ 70 miliar per tahun.⁹⁸

Ada manfaat yang lebih luas di samping risiko-risiko yang harus dihindari di atas. Menurut sebuah kajian baru-baru ini, bisnis-bisnis yang mencakup investasi dalam bidang hak-hak sosial dan tenaga kerja “cenderung lebih sukses dan memiliki tingkat produktivitas dan inovasi yang lebih besar, pasokan barang dan jasa yang lebih dapat diprediksi, retensi dan motivasi yang lebih baik, dan memiliki uji kelayakan dan sistem pemantauan yang lebih sehat.”¹⁰³

Peningkatan kapasitas untuk mencegah dan menyelesaikan masalah keadilan sehari-hari

Menangani masalah keadilan sehari-hari juga memberikan manfaat.

Langkah pertama adalah mengalihkan investasi-investasi dari kebijakan-kebijakan yang tidak efektif atau kontraproduktif. Banyak pendekatan populer yang dimaksudkan untuk “tegas terhadap kejahatan” namun malah terbukti memicu peningkatan kejahatan. Program-program “Scared straight”, misalnya, yang ditujukan bagi anak-anak muda yang dianggap berisiko dengan membawa mereka mengunjungi penjara dengan maksud menakut-nakuti agar timbul efek jera, telah terbukti malah meningkatkan tingkat pelanggaran.¹⁰⁴ Pendekatan yang kemudian menimbulkan ledakan jumlah pemenjaraan, juga terbukti malah lebih banyak merugikan daripada membawa kebaikan. Lebih dari sepuluh juta orang ditahan di penjara secara global, dengan hampir 30 persen di antaranya menunggu persidangan.¹⁰⁵ Namun, hanya ada sedikit bukti bahwa hukuman penjara yang lama benar-benar memiliki efek jera.¹⁰⁶ Kebijakan-kebijakan semacam itu paling keras menghantam kaum muda. Menurut beberapa penelitian, lebih dari satu juta anak telah terampas kebebasan mereka.¹⁰⁷ Dalam banyak hal, kebijakan ini menyebabkan kerusakan yang tidak bisa diperbaiki.¹⁰⁸

Hal ini bukan berarti bahwa seluruh pengeluaran peradilan pidana “tradisional” tidak efektif. Sebuah analisis komparatif di 26 negara bagian Brasil menunjukkan bahwa peningkatan 1 persen dalam pengeluaran untuk polisi akan menghasilkan penurunan insiden pembunuhan sebesar 0,4 persen.¹⁰⁹ Tetapi penelitian yang sama menunjukkan bahwa sumber daya tambahan kemungkinan besar akan meningkatkan keselamatan jika disertai dengan langkah-langkah untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas, dan jika diarahkan pada strategi-strategi pencegahan jelas targetnya “berdasarkan bukti-bukti dampaknya secara ilmiah – dengan preferensi pada perhitungan manfaat-biaya (cost-benefit) – bukan intuisi.”¹¹⁰ Di Amerika Serikat, ada lebih dari setengah juta orang di penjara yang dapat dibebaskan dengan risiko bahaya yang kecil terhadap keselamatan publik. Kebijakan ini dapat menghemat pengeluaran negara sebesar \$ 20 miliar per tahun.¹¹¹

Sementara itu, upaya-upaya pencegahan proaktif yang menargetkan “tempat, orang, dan perilaku berisiko tinggi” terbukti berhasil



Populasi penghuni penjara secara global telah meningkat menjadi sepuluh juta – dan menyerap porsi anggaran keadilan secara terus meningkat.

mengurangi kejahatan.¹¹² Pengadilan-pengadilan khusus, seperti pengadilan narkoba, mengurangi pengulangan pelanggaran dan menghemat biaya sistem peradilan pidana ribuan dolar per kasus.¹¹³ Pendekatan-pendekatan peradilan restoratif menghasilkan kepuasan yang lebih tinggi di antara para korban, mengurangi pelanggaran berulang, dan berbiaya efektif ketika berbagai manfaat yang diperoleh korban dan masyarakat diperhitungkan.¹¹⁴ Program-program reinvestasi keadilan – di mana hasil penghematan dari pengurangan pengeluaran untuk biaya pemenjaraan digunakan dalam kegiatan kemitraan dengan komunitas-komunitas lokal – dapat membantu memulihkan kepercayaan di antara para aktor keadilan dan masyarakat, yang berdampak positif pada pencegahan kejahatan.¹¹⁵

Lebih banyak masalah perdata dan administrasi akan dapat diselesaikan jika sumber-sumber daya dialihkan dari prosedur-prosedur yang bersifat permusuhan (adversarial) yang tidak perlu ke pendekatan-pendekatan yang memecahkan masalah dengan ukuran yang tepat dan proporsional. Model-model penyelesaian perselisihan alternatif, seperti mediasi, akan lebih cepat dan lebih berbiaya efektif daripada penyelesaian melalui litigasi. Biaya rata-rata per kasus yang berhasil diselesaikan pada program mediasi berbasis masyarakat di Nepal adalah sebesar 28 persen lebih rendah daripada kasus-kasus yang diselesaikan melalui sektor peradilan formal.¹¹⁶ Di Kanada dan AS, kasus-kasus perdata yang dimediasi membutuhkan waktu lima bulan lebih singkat untuk diselesaikan, dan biaya per kasusnya \$ 16.000 lebih murah.¹¹⁷

Membawa keadilan lebih dekat dengan masyarakat akan efektif secara biaya, memungkinkan dapat dilakukan intervensi dini, serta pencegahan atau pengurangan sengketa yang lebih efektif. Sebuah studi tentang program yang memperluas akses ke pengadilan desa di Bangladesh menemukan rasio manfaat-biaya antara 16:1 dan 18:1, tergantung pada besarnya diskon yang diberikan.¹¹⁸ Pada tahun 2017, layanan Citizen Advice di Inggris dan Wales membantu lebih dari dua juta orang yang memiliki masalah keadilan, melalui tatap muka atau dukungan secara daring.¹¹⁹ Tujuh puluh persen dari para penggunanya berhasil memecahkan masalah mereka, dan 80 persen dari mereka mengatakan bahwa saran-saran yang diberikan meningkatkan kualitas kehidupan mereka. Untuk setiap dolar AS yang diinvestasikan, Citizen Advice menghasilkan \$ 2,40 dalam bentuk tabungan untuk pemerintah, dan \$ 14,50 berupa manfaat sosial dan ekonomi yang lebih luas.

Dampak terbesar dari investasi keadilan yang berpusat pada rakyat dirasakan oleh anggota masyarakat yang paling miskin dan paling tidak beruntung. Para petugas penasihat komunitas yang bekerja di komunitas-komunitas yang terpinggirkan secara historis di Afrika Selatan memberikan keuntungan sebesar \$ 6 untuk setiap dolar

“ Dampak terbesar dari investasi keadilan yang berpusat pada rakyat dirasakan oleh anggota masyarakat yang paling miskin dan paling tidak beruntung. ”

yang diinvestasikan.¹²⁰ Menyediakan penasihat hukum bagi rakyat dengan pendapatan rendah yang berisiko kehilangan tempat tinggal membuat kota New York berhemat \$ 320 juta per tahun.¹²¹ Di Australia, pusat-pusat hukum komunitas yang menyediakan nasihat dan layanan hukum kepada kelompok-kelompok yang kurang beruntung, memberikan rasio manfaat-biaya 18:1.¹²²

Membebaskan potensi ekonomi masyarakat yang lebih adil

Analisis kami tentang kesenjangan keadilan menyoroti potensi manusia yang hilang akibat tidak punya identitas hukum yang mencukupi, dokumentasi yang tidak memadai, atau tidak adanya perlindungan hukum lainnya.

Sistem pencatatan sipil yang berfungsi dengan baik akan merekam data kelahiran, kematian, perkawinan, dan statistik vital lainnya.¹²³ Akta lahir merupakan komponen dasar identitas hukum, tetapi identitas tetap dapat dibuat untuk orang dewasa yang kelahirannya tidak terdaftar.¹²⁴ Kepemilikan dokumen identitas yang sah telah terbukti meningkatkan kesehatan rakyat.¹²⁵ Hal ini juga memungkinkan pemerintah untuk menyesuaikan layanan kepada mereka yang membutuhkan, menargetkan transfer tunai dan program perlindungan sosial lainnya secara lebih efektif, memungut pajak, membasmi korupsi, dan mengevaluasi dampak kebijakan.¹²⁶

Memperkuat dan memperjelas hak atas tanah sangat penting untuk mencegah konflik, sekaligus juga membuka potensi ekonomi masyarakat. Sertifikasi tanah memberikan rasa aman kepada rakyat di rumah mereka atau di tempat kerja mereka, dan hal ini membantu mereka untuk bisa mendapatkan pinjaman dan membangun atau mengembangkan usaha. Sejumlah besar penelitian telah menunjukkan dampak positif dari penguatan hak properti pada pertumbuhan ekonomi.¹²⁸ Metode-metode inovatif, seperti penggunaan teknologi seluler dan GPS untuk memetakan batas-batas dan memberikan kesepakatan kepemilikan dengan masyarakat, dengan cepat mengurangi biaya pencatatan hak atas tanah.¹²⁹

Sebuah kajian terhadap 13 proyek sertifikasi tanah di Eropa dan Asia Tengah yang didanai oleh Bank Dunia menemukan hasil tingkat pengembalian investasi sebesar 122 persen.¹³⁰ Diperkirakan bahwa “manfaat jangka pendek dan jangka panjang terhadap ekonomi dari satu pencatatan tanah adalah sebesar US \$ 16. Dengan kata lain, pendaftaran atas satu juta properti di sebuah wilayah akan membawa pada manfaat ekonomi yang diperkirakan sebesar lebih dari US \$ 16 juta di negara tersebut. ”Sementara itu, di Tanzania, kaum perempuan memperoleh pendapatan lebih dari empat kali lipat jika mereka tinggal di daerah yang menyediakan mereka hak atas tanah.¹³¹



Prakarsa-prakarsa untuk mendorong bisnis informal berkembang menjadi bisnis formal mendapatkan hasil yang beragam. Untuk perusahaan, perubahan menjadi bisnis formal akan memberikan manfaat berupa akses ke keuangan, formalisasi kontrak komersial, pembatasan kewajiban, peningkatan keamanan fisik, dan akses ke subsidi pemerintah dan program pelatihan. Bagi pemerintah, manfaatnya antara lain peningkatan pendapatan perpajakan, pengurangan biaya pemolisian, peningkatan informasi untuk kebijakan ekonomi, dan kemampuan untuk mengukur kinerja ekonomi secara lebih akurat. Sebuah studi di Vietnam menemukan bahwa perusahaan yang pindah ke sektor formal mengalami peningkatan laba yang signifikan.¹³² Program pemerintah Brasil untuk mendorong formalisasi melalui pengurangan dan penyederhanaan pajak telah menambah jumlah perusahaan yang terdaftar, dan sangat meningkatkan laba perusahaan tersebut.¹³³

Namun di banyak negara upaya untuk menekan bisnis informal agar bersedia pindah ke jalur formal dilakukan dengan paksaan. Upaya-upaya ini seringkali berdampak buruk, terutama pada rakyat miskin. Pendekatan inkremental mungkin lebih efektif, di mana bisnis informal mengambil langkah-langkah kecil menuju formalisasi penuh melalui insentif yang diberikan di setiap tahap – misalnya, dimulai dengan memperoleh lisensi dan izin, dan bergerak seiring dengan pertumbuhan perusahaan menuju pembayaran pajak penjualan, pendaftaran perusahaan, dan akhirnya membayar pajak penghasilan.¹³⁴ Pembuat kebijakan harus responsif terhadap konteks yang dihadapi, melacak apakah suatu pendekatan baru akan memberikan hasil berupa peningkatan peluang dan peningkatan keadilan.

Pembiayaan Keadilan bagi Semua

Dalam bab ini telah diuraikan dan ditunjukkan argumen yang kuat untuk investasi di sektor keadilan, berupa pengurangan biaya akibat ketidakadilan dan peningkatan keuntungan dari pencapaian keadilan bagi semua.

Tetapi berapa biaya untuk mengatasi kesenjangan keadilan di atas – untuk memenuhi kebutuhan keadilan sehari-hari rakyat dengan cara yang mudah diakses dan terjangkau?

Biaya keadilan bagi semua

Untuk menjawab pertanyaan ini, Satuan Tugas Keadilan menugaskan Overseas Development Institute (ODI) untuk

membuat prakiraan awal pembiayaan yang diperlukan untuk dapat menyediakan akses keadilan tingkat dasar.¹³⁵

Analisis ini didasarkan pada metodologi-metodologi yang digunakan ketika menghitung biaya penyediaan layanan dasar awal sektor kesehatan dan pendidikan selama era Tujuan Pembangunan Milenium (MDG). Seperti yang sampaikan ODI dalam laporan yang dipersiapkannya untuk Satuan Tugas, "Jika ingin mencapai TPB16.3, maka sektor keadilan sekarang perlu mengejar ketinggalannya dari sektor-sektor pemberian layanan lainnya dalam hal ambisi, skala, dan pendekatan."¹³⁶

Ini adalah perkiraan pertama mengenai biaya yang diperlukan untuk dapat mencapai TPB16.3. Perkiraan untuk kebutuhan pembiayaan pendidikan dan kesehatan telah diperkuat dari waktu ke waktu. Dengan cara yang sama, angka-angka awal untuk keadilan ini harus dibangun di atas hasil-hasil dari penelitian dan analisis lebih lanjut yang akan dilakukan. ODI mencakup komponen-komponen penyediaan keadilan garis depan dasar sebagai berikut:

- Nasihat hukum, bantuan dan pemberdayaan, yang disediakan untuk masyarakat oleh paralegal, pengacara, pusat nasihat hukum, serikat pekerja atau kelompok-kelompok advokasi.
- Lembaga-lembaga peradilan formal yang memainkan peran garis depan dalam menyelesaikan konflik, perselisihan dan keluhan, termasuk pengadilan tingkat bawah, polisi komunitas, dan rantai peradilan pidana.
- Mekanisme-mekanisme alternatif untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum, konflik, perselisihan dan keluhan, seperti mediasi masyarakat, pengadilan tradisional, dan ombudsman.
- Mekanisme yang meningkatkan akuntabilitas sistem peradilan terhadap layanan yang mereka berikan kepada rakyat dan masyarakat, dan yang mampu mengatasi korupsi dan penyalahgunaan.

Kami memperkirakan bahwa di negara-negara berpenghasilan rendah, untuk dapat memberikan akses ke layanan keadilan dasar bagi setiap orang dibutuhkan biaya \$ 20 per tahun. Di negara-negara berpenghasilan menengah akan membutuhkan biaya \$ 64 dan di negara-negara berpenghasilan tinggi akan membutuhkan biaya \$ 190.

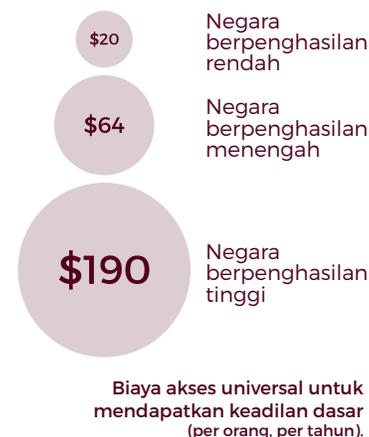
Untuk memasukkan angka-angka ini ke dalam konteks, penyediaan pendidikan dasar dan menengah universal di negara-negara berpenghasilan rendah membutuhkan biaya sebesar \$ 41 per orang per tahun, sementara untuk menyediakan perawatan kesehatan esensial universal setidaknya membutuhkan biaya \$ 76 per orang setiap tahunnya.¹³⁷

Lembaga-lembaga peradilan formal akan bertanggung jawab atas sebagian besar dari biaya ini. Ini menggarisbawahi bahwa menyediakan nilai yang sepadan dengan biaya (value for money) merupakan hal penting dalam sistem peradilan formal, yang dilakukan dengan peningkatan efisiensi, pengurangan korupsi, dan pengalihan sumber-sumber daya ke pendekatan-pendekatan yang berbasis bukti.

Pemberdayaan hukum dan pendekatan-pendekatan non-formal lebih hemat biaya. Meskipun perlu ada penelitian lebih lanjut di bidang ini, mereka nampaknya hanya menyumbang kurang dari 10 persen total biaya di seluruh negara dengan berbagai tingkat pendapatan. Di negara berpenghasilan rendah, kami memperkirakan bahwa untuk memenuhi kebutuhan minimum dalam pendekatan ini diperlukan biaya \$ 1 per orang. Ini konsisten dengan pesan sentral dari laporan ini – bahwa, mengingat besarnya kesenjangan keadilan, negara-negara perlu melakukan investasi dengan pendekatan-pendekatan alternatif yang dapat menyediakan akses keadilan secara efektif dan efisien sesuai kebutuhan.

Meningkatkan akuntabilitas di sektor peradilan tentunya tidak mudah. Tetapi selama ada kemauan politik untuk melakukannya, mekanisme untuk memajukan akuntabilitas juga menawarkan nilai yang sepadan dengan biaya yang dikeluarkan. Upaya-upaya tersebut diperkirakan akan membutuhkan biaya sebesar \$ 1,50 di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah, dan hanya sedikit lebih tinggi di negara-negara kaya. Mekanisme semacam itu akan mendorong sektor formal untuk memberikan nilai yang sepadan dengan biaya. Upaya-upaya tersebut juga dapat membantu menaikkan standar dan memastikan konsistensi dalam penggunaan pendekatan alternatif, serta menyediakan jembatan antara sistem peradilan formal dan informal.

Analisis ini juga memperhitungkan biaya yang harus dikeluarkan rakyat dari kantong mereka sendiri ketika mereka mencari keadilan, yang diperoleh dari survei HiiL. Di negara-negara berpenghasilan rendah, pada lima kebutuhan hukum teratas, pengeluaran per orang per tahun adalah sebesar \$ 5, sementara untuk negara berpenghasilan menengah sebesar \$ 10, dan untuk negara berpenghasilan tinggi sebesar \$ 20. Biaya-biaya ini merupakan seperempat dari anggaran keadilan di negara-negara berpenghasilan rendah (dan sekitar 10 persen untuk negara-negara berpenghasilan tinggi).¹³⁸ Jika ketersediaan anggaran publik terbatas, maka bantuan hukum dan layanan lainnya harus ditargetkan dengan ketat untuk membantu mereka yang paling tidak mampu mendapatkan keadilan.¹³⁹ Mekanisme akuntabilitas yang kuat akan dibutuhkan untuk memastikan rakyat memperoleh nilai yang sepadan dengan uang yang mereka keluarkan.



Apakah keadilan bagi semua akan terjangkau?

Sulit untuk memastikan keterjangkauan keadilan karena kelangkaan data dan perbedaan dalam cara menghitung anggaran keadilan. Tidak ada satu sumber informasi tunggal yang merinci total anggaran keadilan di berbagai negara. Meskipun kita tahu bahwa pengeluaran untuk keamanan biasanya mengambil sebagian besar anggaran nasional, tetap sulit untuk memilah alokasi yang relatif kecil yang dibelanjakan untuk pendekatan-pendekatan keadilan yang berpusat pada rakyat yang direkomendasikan dalam laporan ini.¹⁴⁰

Data internasional yang terkonsolidasi telah tersedia untuk pengeluaran pada sistem peradilan pidana, tetapi sudah berumur dua dekade. Jika disetarakan dengan harga yang berlaku saat ini, pada tahun 1997 dunia membelanjakan sebesar dengan \$ 570 miliar untuk sistem peradilan pidana.¹⁴¹ Di mana 62 persen dari pengeluaran ini adalah untuk kepolisian, 18 persen untuk pengadilan, 17 persen untuk penjara, dan 3 persen untuk penuntutan. Memasuki abad 21, UNODC memperkirakan bahwa pemerintah-pemerintah membelanjakan 1 persen dari PDB mereka untuk kepolisian, tetapi beberapa negara membelanjakan empat kali lipat dari nilai itu.¹⁴²

Sebuah kajian baru-baru ini oleh Inter-American Development Bank memberikan wawasan tentang pola pengeluaran di Amerika Latin. Negara-negara di kawasan ini menghabiskan rata-rata 5,4 persen dari anggaran pemerintah untuk keamanan dan keadilan.¹⁴⁴ Pengeluaran per kapita pada tahun 2015 berkisar antara \$ 32 hingga \$ 583. Pengeluaran di tahun 2008 sampai dengan 2015 meningkat sepertiga, di mana di beberapa negara peningkatannya mencapai dua kali lipat. Peningkatan ini sebagian besar merupakan akibat dari tekanan politik untuk mengambil pendekatan yang lebih punitif, dan karena pemerintah-pemerintah mengadopsi taktik gamblang untuk menunjukkan bahwa mereka "keras terhadap kejahatan." Bagi mereka yang percaya akan adanya cara yang lebih cerdas dalam mengalokasikan anggaran keadilan, tantangan pentingnya adalah membuat cara cerdas ini terlihat lebih menarik secara politik.

Komisi Eropa untuk Efisiensi Keadilan melacak biaya sistem peradilan di negara anggotanya, yang mencakup pengeluaran peradilan (pengadilan, penuntutan, dan bantuan hukum) serta komponen-komponen lainnya, seperti penjara dan layanan masa percobaan, notaris, lembaga forensik, dan layanan khusus untuk remaja atau pengungsi dan pencari suaka.¹⁴⁵ Anggaran sistem peradilan tidak siap untuk diperbandingkan, karena banyaknya variasi di antara negara-negara mengenai apa saja yang dimasukkan dalam anggaran mereka.



Komisi Eropa menemukan bahwa pengeluaran-pengeluaran bervariasi mulai dari 0,3 persen hingga 4,3 persen dari PDB. Ini berarti pengeluaran-pengeluaran tersebut bervariasi mulai dari di bawah \$ 15 hingga hampir \$ 900 per kapita tergantung pada negaranya. Secara rata-rata, belanja untuk sistem peradilan di negara-negara yang termasuk dalam analisis sebesar 2,1 persen dari pengeluaran publik.

Untuk negara-negara berpenghasilan rendah, hanya tersedia sedikit data tentang pengeluaran untuk keadilan, tetapi berdasarkan kajian PBB-Bank Dunia atas beberapa negara diketahui bahwa pengeluaran-pengeluaran tersebut bisa jadi sangat rendah.

Somalia, misalnya, memiliki anggaran tahunan sebesar \$ 10,5 juta untuk sistem peradilan, atau \$ 1,50 per kapita.¹⁴⁶ Angka yang sangat kecil jika dibandingkan dengan belanja keamanan yang mencapai \$ 44 juta, atau dengan bantuan internasional untuk pemeliharaan perdamaian di wilayah tersebut yang nilainya \$ 1,5 miliar. Individu memikul beban berat untuk biaya mendapatkan keadilan – di wilayah Somalia yang mencakup Mogadishu, sebuah kasus perselisihan tanah biasa menelan biaya sebesar \$ 150 untuk mengajukan gugatan.

Di Liberia, ada ketimpangan sumber daya yang serupa. Dana sebesar \$ 1,5 juta diinvestasikan dalam Peace Huts, sebuah program berbiaya murah di mana kaum perempuan memediasi perselisihan lokal, dibandingkan dengan anggaran nasional sebesar \$ 95 juta untuk sektor keadilan dan \$ 10 miliar untuk pemeliharaan perdamaian dan bantuan asing.¹⁴⁷

Analisis yang dilakukan oleh ODI untuk Satuan Tugas mendukung pendapat bahwa banyak negara miskin akan mengalami masalah keterjangkauan finansial. Hal ini juga mengacu pada hasil penelitian Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) yang memperkirakan sumber daya maksimum dari perpajakan yang kemungkinan bisa didapatkan oleh suatu negara. Tolak ukur yang digunakan dalam analisis ini adalah 4 persen total pengeluaran publik digunakan untuk sistem peradilan, berdasarkan pola historis yang ada di negara-negara OECD.

Berdasarkan tolok ukur ini, negara-negara berpenghasilan tinggi dengan mudah dapat menutupi pengeluaran yang disarankan sebesar \$ 190 per orang untuk keadilan dasar, karena angka ini setara dengan hanya 2 persen dari pendapatan saat ini. Pada saat ini negara-negara tersebut rata-rata mengalokasikan 4,6 persen dari pendapatannya untuk sistem peradilan secara keseluruhan (yang juga mencakup pengadilan tingkat tinggi dan aspek-aspek lain yang tidak diperhitungkan dalam perhitungan biaya ODI mengenai akses untuk keadilan dasar). Namun, bagi

“ Dua miliar orang tinggal di negara-negara yang bahkan tidak mampu membayar setengah dari biaya layanan dasar. Ini termasuk semua negara berpenghasilan rendah dan 40 persen dari negara-negara berpenghasilan menengah ke bawah ”

negara-negara berpenghasilan menengah hal ini akan dirasakan sebagai suatu hal yang jauh lebih menantang. Mereka harus mengalokasikan 6,2 persen dari pendapatan pajak mereka hanya untuk penyediaan keadilan dasar, jauh di atas tolok ukur yang sebesar 4 persen.

Di sisi lain, negara-negara berpenghasilan rendah, akan perlu membelanjakan 20 persen dari total pendapatan mereka saat ini. Sekalipun mereka memaksimalkan kenaikan pendapatan pajak sesuai yang disarankan dalam penelitian IMF dan Bank Dunia, biaya keadilan dasar tetap akan sebesar 17 persen dari pendapatan mereka.

Tingkat pengeluaran semacam itu tidak layak karena akan menekan pengeluaran untuk prioritas nasional lainnya yang memiliki legitimasi, seperti untuk kesehatan dan pendidikan. ODI menyimpulkan bahwa ada dua miliar orang yang tinggal di negara-negara yang bahkan untuk membayar setengah dari biaya layanan dasar pun tidak mampu, jika pengeluaran penyediaan keadilan dasar tetap dijaga di bawah 4 persen. Termasuk di sini adalah semua negara berpenghasilan rendah dan 40 persen dari negara-negara berpenghasilan menengah ke bawah.

Identitas hukum merupakan area di mana biayanya kita pahami dengan relatif baik. Bank Dunia memperkirakan bahwa akan diperlukan biaya sebesar \$ 3,8 miliar untuk meningkatkan sistem Registrasi Sipil dan Statistik Vital (CRVS) di 73 negara berkembang.¹⁴⁸ Ini tidak akan bisa terjangkau dari pendapatan pajak domestik, ditambah lagi dengan kebutuhan pembiayaan tahunan sebesar \$ 199 juta dari sumber-sumber internasional.

Namun demikian biaya untuk mendapatkan identitas hukum telah turun banyak karena ketersediaan teknologi digital, sehingga meningkatkan keterjangkauan. Biaya satuan identitas hukum di negara berkembang hanya sebesar \$ 5, jauh di bawah skema biaya serupa di negara-negara kaya.¹⁴⁹

Strategi apa yang dapat meningkatkan keterjangkauan?

Meningkatkan keterjangkauan layanan keadilan dasar bergantung pada tiga strategi utama.

Pertama, negara-negara membutuhkan data yang lebih baik tentang alokasi sumber-sumber daya yang tersedia saat ini untuk kemudian menargetkan pengeluaran pada kebutuhan-kebutuhan keadilan yang paling mendesak dan pada rakyat yang paling tidak mampu mengakses keadilan.¹⁵⁰

Panduan PBB-Bank Dunia baru-baru ini menunjukkan bagaimana kajian-kajian mengenai pengeluaran publik untuk keamanan

dan keadilan dapat diarahkan alokasi sumber dayanya untuk pembiayaan “lembaga-lembaga yang efektif, profesional, modern, dan bertanggung jawab, yang menyediakan keamanan dan keadilan bagi warga negara.”¹⁵¹

Strategi kedua adalah mengarahkan sumber daya yang ada kepada pendekatan-pendekatan berbiaya rendah yang potensial mewujudkan keadilan sejumlah yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Bab ini menyoroti berbagai model alternatif – yang diterapkan oleh negara atau masyarakat sipil – yang lebih hemat biaya daripada pendekatan tradisional yang diatur oleh pengacara. Inovasi juga dapat membantu mengurangi biaya, seperti dalam contoh teknologi digital yang menekan biaya untuk memperoleh identitas hukum di negara berpenghasilan rendah. Kita kembali ke pertanyaan tentang model pembiayaan yang lebih cerdas di bab 5.

Strategi ketiga untuk mengatasi tantangan keterjangkauan adalah dengan melakukan diversifikasi sumber-sumber pendanaan. Untuk negara-negara miskin, bantuan donor adalah penting. Tetapi dukungan internasional untuk melakukan investasi keadilan saat ini lemah dan turun 40 persen sejak dari tahun 2014 sampai dengan 2018.¹⁵² Di negara-negara yang rapuh dan terkena dampak konflik, hanya 1,5 persen dari bantuan pembangunan dibelanjakan untuk keadilan.¹⁵³

Kaum reformis di sektor keadilan harus terus memperkuat bukti dan argumen bagi investasi keadilan, dan bahwa memperkuat sistem peradilan akan menghasilkan manfaat untuk pengurangan kemiskinan, untuk mengatasi konflik dan ketidakamanan, dan untuk pembangunan berkelanjutan.

Para filantropi, investor dampak, dan perusahaan sektor swasta juga harus didorong untuk meningkatkan investasi mereka di bidang keadilan. Sementara beberapa yayasan telah membantu sektor peradilan, mereka tidak membiayakan dalam skala yang terlihat dalam sektor pendidikan dan kesehatan. Keadilan juga tidak masuk dalam sepuluh sektor teratas untuk investasi dampak.¹⁵⁴ Investasi sektor swasta sebagian besar terfokus pada inovasi-inovasi bagi firma hukum besar dan perusahaan-perusahaan besar, bukan pada layanan untuk publik dan bisnis kecil. Para penyandang dana ini sering terhambat oleh batasan-batasan peraturan atau oleh hambatan-hambatan politik. Kita akan kembali pada perlunya sistem peradilan agar lebih terbuka pada kemitraan-kemitraan baru di Bab 5.

Menjangkau yang jauh tertinggal di belakang terlebih dahulu

Keadilan untuk perempuan, untuk anak-anak, dan untuk kelompok-kelompok masyarakat yang terkecualikan

Agenda tahun 2030 berkomitmen untuk mencakup semua orang, terlepas dari usia, jenis kelamin, disabilitas, ras, etnis, asal usul, agama, kekayaan, atau status lainnya. Masalah keadilan tidak terdistribusi secara acak. Di semua negara, beberapa kelompok lebih mungkin mengalami ketidakadilan daripada yang lain atau memiliki kebutuhan tersendiri ketika mereka mencari keadilan.

Dengan memberdayakan mereka yang berada pada posisi yang kurang beruntung dan dengan menemukan cara-cara baru untuk memecahkan masalah keadilan yang paling sulit, maka negara-negara akan dapat menjangkau yang jauh tertinggal di belakang terlebih dahulu.

Keadilan bagi perempuan

The High-level Group on Justice for Women bekerja dengan Satuan Tugas untuk mengeksplorasi kebutuhan keadilan bagi perempuan dan lebih memahami apa yang diperlukan untuk membuat sistem peradilan menjadi responsif gender. Mereka menemukan bahwa “bagi mayoritas perempuan, kesenjangan selalu hadir di antara janji keadilan dan kenyataan di lapangan, di tempat kerja, di komunitas dan di rumah.”¹⁵⁵

Survei menunjukkan bahwa perempuan dan laki-laki kurang lebih memiliki kesamaan jumlah kebutuhan keadilan yang tidak terpenuhi, tetapi sifat dari kebutuhan ini mencerminkan pengalaman perempuan dalam hal kekerasan, diskriminasi, ketidakberuntungan, dan pengucilan. Perempuan termiskin menghadapi hambatan tertinggi di bidang keadilan, seperti halnya mereka yang tinggal di negara-negara di mana kondisi perempuan secara keseluruhan lebih buruk.

Laporan The High-level Group on Justice for Women mengidentifikasi lima pendekatan yang menjanjikan untuk meningkatkan keadilan bagi perempuan:¹⁵⁶

- **Hilangkan diskriminasi hukum terhadap perempuan** dengan mencabut undang-undang diskriminatif yang membatasi keadilan bagi perempuan, dan mengadopsi hukum yang memberdayakan perempuan serta memberi sinyal bahwa jenis perilaku tertentu tidak dapat diterima.
- **Cegah dan tanggap kekerasan kepada pasangan intim** dengan mengadopsi reformasi hukum dan memberikan dukungan khusus dari sistem peradilan sebagai bagian dari respons multi-sektoral yang lebih luas.
- **Mengatasi ketidakberuntungan bagi perempuan miskin dan terpinggirkan** dengan memberikan akses terhadap bantuan hukum dan layanan paralegal, meningkatkan literasi hukum, dan mengatasi hambatan kemiskinan.
- **Memberdayakan perempuan, secara ekonomi dan sebagai pemegang hak** dengan mengaktifkan identitas hukum, memperkuat hak-hak perempuan atas tanah, dan menggunakan tindakan kolektif sebagai katalisator terhadap perubahan.
- **Masukkan perempuan sebagai pengambil keputusan** dengan memastikan keterwakilan perempuan yang setara dalam pengambilan keputusan di semua tingkatan di sektor peradilan.

Keadilan untuk anak-anak

Anak-anak dan remaja sangat bergantung pada sistem peradilan untuk melindungi dan memperkuat hak-hak mereka. Survei kebutuhan hukum dan viktimisasi tidak dirancang untuk menangkap kebutuhan keadilan mereka, tetapi bukti lain menunjukkan bahwa mereka menghadapi kesenjangan keadilan yang lebih luas dibandingkan orang dewasa.

Setengah dari anak-anak dunia menjadi korban kekerasan setiap tahun.¹⁵⁷ Ketika dibiarkan tanpa perlindungan, maka anak-anak sangat rentan terhadap eksploitasi, pelecehan, dan penelantaran. Dua dari setiap lima budak modern atau kerja paksa adalah anak-anak.¹⁵⁸ Sistem peradilan gagal berfungsi bagi anak-anak ketika mereka menjadi korban ketidakadilan. Mereka sering kali tidak dapat mengakses lembaga peradilan atau kekurangan dukungan untuk berpartisipasi dalam proses peradilan. Proses peradilan juga mengecewakan anak-anak ketika mereka berhadapan dengan hukum. Orang-orang muda lebih rentan terhadap dampak psikologis negatif dari tindakan hukuman yang keras.¹⁵⁹ Mereka sering kali kurang memiliki pengetahuan dan kepercayaan diri dibandingkan orang dewasa untuk mengklaim hak mereka dan mendapatkan ganti rugi.

Kelompok kerja Keadilan untuk Anak-anak dari Satuan Tugas berpendapat bahwa sistem peradilan perlu menciptakan pendekatan yang khusus dan ramah anak jika anak-anak diharapkan dapat mewujudkan hak-hak mereka dan memenuhi potensi mereka. Seruannya untuk bertindak menyoroti tiga prioritas untuk memperkuat keadilan bagi anak-anak:

- **Memajukan keadilan sebagai faktor yang bisa mendukung perkembangan anak** dengan memberikan akses dan dukungan yang setara kepada semua anak yang membutuhkan layanan sistem peradilan, mencegah kontak yang tidak perlu dengan sistem peradilan termasuk melalui pendekatan informal, dan memastikan hak atas identitas hukum untuk semua anak.
- **Mempercepat tindakan melalui saluran implementasi** yang mencegah semua bentuk kekerasan terhadap anak-anak, melindungi hak-hak anak yang dilakukan oleh kelompok-kelompok bersenjata atau kelompok kriminal lainnya, serta membatasi perampasan kebebasan anak-anak atas keadaan luar biasa.
- **Membangun dan mempertahankan fondasi untuk perubahan** dengan mengadopsi pendekatan multi-sektoral untuk perlindungan anak, meningkatkan partisipasi anak-anak dalam keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka, mengamankan komitmen politik berkelanjutan untuk keadilan berkualitas tinggi bagi anak-anak, dan memastikan respons didasarkan pada standar internasional dan kebijakan berbasis bukti.

Keadilan bagi semua

Kelompok lain yang tertinggal oleh sistem keadilan meliputi:

- **Orang-orang penyandang disabilitas**, yang menghadapi diskriminasi di tempat kerja, di tangan pihak berwenang, di komunitas mereka, dan di rumah mereka. Survei di Australia, misalnya, telah menemukan bahwa mereka yang menyandang disabilitas memiliki kebutuhan keadilan terbesar dibandingkan dengan kelompok yang kurang beruntung lainnya.¹⁶⁰
- **Orang-orang dari etnis minoritas**, yang menghadapi ketidakadilan sistemik di semua negara, termasuk di tangan lembaga-lembaga keadilan. Pelapor Khusus PBB untuk bentuk-bentuk rasisme kontemporer telah menemukan penggunaan profil etnis dan ras secara gigih dan meluas oleh lembaga-lembaga keadilan di negara-negara di seluruh dunia, merusak "hubungan yang sudah lemah antara lembaga penegak hukum dan komunitas minoritas."¹⁶¹
- **Migran, pengungsi, dan orang-orang tanpa kewarganegaraan**, yang menghadapi hukum diskriminatif dan seringkali memiliki sedikit akses yang memadai terhadap layanan keadilan, meskipun memiliki kebutuhan keadilan yang mendesak dan kompleks. Banyak pengungsi yang tidak mendapat perlakuan adil terkait perumahan dan pekerjaan. Mendapatkan dokumentasi hukum seringkali merupakan tantangan besar.¹⁶²
- **Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender/Transeksual dan Interseks (LGBTI+)** menghadapi tingkat ketidakadilan yang tidak proporsional. Di beberapa negara, mereka menghadapi risiko kekerasan yang begitu tinggi di tangan keluarga, komunitas, dan pihak berwenang sehingga untuk melakukan penelitian atas kebutuhan keadilan mereka menjadi tidak mungkin.



Membangun Masyarakat yang Adil

Untuk membangun masyarakat yang adil, kita harus menyelesaikan masalah-masalah keadilan, mencegah agar tidak terjadi ketidakadilan, dan menggunakan sistem peradilan untuk menciptakan peluang bagi masyarakat.

Bab 3

Memecahkan Masalah-masalah Keadilan

Di masa lalu, reformasi peradilan terutama berfokus pada bangunan, proses dan lembaga, tetapi pendekatan ini gagal untuk mengatasi kesenjangan keadilan bagi miliaran orang.

Pendekatan yang berpusat pada orang pada reformasi peradilan dimulai dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dan bertujuan untuk menyelesaikan masalah-masalah keadilan yang paling berarti bagi mereka.

Keadilan yang berpusat pada orang memberdayakan orang untuk mencari solusi dan menyediakan bagi mereka layanan berkualitas sepanjang proses perjalanan keadilan mereka.

Kita dapat membantu lebih banyak orang untuk mencapai suatu tujuan jika mereka yakin bahwa masalah mereka diselesaikan secara adil.

Mentransformasi Keadilan

Agar efektif dan kredibel, sistem peradilan harus membantu orang memecahkan masalah keadilan mereka. Satuan Tugas telah menunjukkan bahwa sistem peradilan saat ini tidak memenuhi tugas ini.

Bahwa ada 1,5 miliar orang yang memiliki masalah keadilan yang belum terselesaikan sudah semestinya mendorong kita untuk mengambil tindakan. Ketika sebagian besar dari anak-anak tidak bersekolah atau bahkan tidak mempelajari hal-hal yang mendasar ketika mereka bersekolah, para pemimpin pendidikan dunia secara tepat menyerukan panggilan untuk mengambil tindakan mengatasi “krisis pembelajaran global.”¹⁶³ Ketika prevalensi penyakit seperti diabetes telah berkembang empat kali lipat, para pemimpin di bidang kesehatan bekerja untuk membangun konsensus mengenai intervensi-intervensi yang paling mungkin dilakukan untuk membalikkan kecenderungan ini.

Kita juga membutuhkan komitmen serupa untuk perubahan transformatif di sektor keadilan. Saat ini, sebagian besar masalah keadilan tidak terselesaikan. Bagaimana kita bisa mulai memecahkan proporsi masalah yang jauh lebih penting bagi orang?

Memahami Masalah-masalah Keadilan

Terlepas dari perbedaan-perbedaan di antara negara-negara dan keragaman sistem hukum, survei-survei memberitahu kita bahwa orang-orang di seluruh dunia mengalami banyak jenis masalah keadilan yang sama.

Hal ini tidak mengejutkan. Kebutuhan akan keadilan mencerminkan hubungan-hubungan orang dengan keluarga dan komunitas mereka. Kebutuhan akan keadilan ini dibentuk oleh perilaku bisnis dan pemerintah mereka. Dan hal itu dipengaruhi oleh perbedaan kesempatan, kekayaan, dan kekuasaan.

Analisis data survei dari seluruh dunia menunjukkan kepada kita bahwa ada enam area yang bertanggung jawab atas sebagian besar dari masalah-masalah keadilan.¹⁶⁴

1. Sekitar satu dari lima orang memiliki masalah terkait dengan kekerasan dan kejahatan.¹⁶⁵

Mereka yang menjadi korban kekerasan dan kejahatan serius memiliki kebutuhan paling mendesak akan keadilan. Kekerasan berkisar dari pelecehan yang terlihat sangat jelas – misalnya, ketika kejahatan terorganisir menyerang sebuah komunitas – hingga sebagian besar kekerasan yang tersembunyi, seperti kekerasan dalam rumah tangga dan anak. Seringkali kekerasan tidak dilaporkan, sehingga angka ini cenderung dianggap remeh.

2. Hampir seperempat dari orang-orang terlibat dalam perselisihan berkenaan dengan rumah, tanah atau tetangga.

Di banyak negara, perselisihan tentang batas-batas atau hak guna tanah merupakan bagian terbesar dari masalah-masalah ini. Di tempat lain, konflik dengan tetangga tentang kebisingan, sampah, tempat parkir atau ternak mendominasi. Sengketa antara pemilik-penyewa, sementara itu, sering terjadi bahkan di negara-negara di mana hukum yang mengatur kontrak dibuat dengan baik.

3. Hampir sepertiga dari orang-orang memiliki masalah hukum terkait dengan uang dan hutang, atau sebagai konsumen.

Mereka mengalami kesulitan membayar uang yang terhutang atau mengembalikan uang yang dipinjamkan. Mereka menjual produk atau jasa tetapi tidak menerima pembayaran untuk itu. Mereka harus berjuang sehubungan dengan gangguan pasokan

listrik atau air, atau sehubungan dengan sambungan telepon mereka. Atau mereka harus berjuang untuk bisa mendapatkan pemulihan karena penyediaan jasa atau barang konsumsi yang buruk atau tidak berfungsi.

4. Satu dari lima orang memiliki masalah terkait akses untuk mendapatkan layanan publik.

Banyak yang tidak dapat menerima layanan kesehatan, pendidikan, air, sanitasi, listrik, dan pembayaran tunjangan. Banyak juga yang tidak dapat memperoleh akta kelahiran untuk anak-anak mereka, kartu identitas untuk diri mereka sendiri, atau dokumentasi lain yang diperlukan untuk membuktikan kewarganegaraan, kependudukan atau status imigrasi, dan untuk mengakses layanan yang mereka butuhkan.

5. Hampir satu dari 11 orang terlibat dalam perselisihan keluarga.

Masalah-masalah hukum mereka terkait dengan perceraian dan pemisahan, pembayaran tunjangan anak, konflik atas surat wasiat, dan kekerasan dalam rumah tangga. Beberapa dari perselisihan ini hanya melibatkan dalam lingkungan satu rumah tangga itu saja; sementara yang lain meluas hingga melibatkan keluarga-keluarga lainnya dalam keluarga besarnya. Perempuan dan anak-anak menderita secara tidak proporsional dari masalah-masalah ini, dan ketidakberdayaan mereka dapat membuat mereka lebih sulit untuk pulih dari dampaknya.

6. Satu dari 12 orang memiliki kebutuhan hukum terkait dengan pekerjaan atau bisnis mereka.

Mereka tidak menerima upah atau tunjangan, pemutusan hubungan kerja secara tidak adil, atau mengalami pelecehan – secara seksual atau lainnya – atau terpapar risiko kesehatan dan keselamatan di tempat kerja. Yang lainnya menghadapi masalah pelecehan atau suap oleh pihak berwenang, atau menghadapi kesulitan mendapatkan izin kerja atau masalah yang terkait dengan pekerjaan di sektor informal.

Tingkat pentingnya masalah-masalah ini relatif dan berbeda antar negara, tentu saja. Ketika tingkat kejahatan tinggi, orang sangat membutuhkan perlindungan dari kekerasan. Sifat dan frekuensi pertikaian keluarga berbeda dari satu budaya ke budaya lain. Situasinya sangat dipengaruhi oleh norma gender dan oleh pemberdayaan perempuan dan anak-anak. Banyak perselisihan terbentuk oleh sifat kehidupan ekonomi. Di lingkungan masyarakat yang hidup dengan bertani, misalnya, ada lebih banyak perselisihan mengenai tanah.¹⁶⁶ Saat negara-negara tumbuh

Individu

Kekerasan dan kejahatan, di ruang publik, di tempat kerja, dan di rumah

Seorang ibu melihat pembunuh putranya di jalan setiap hari, namun ia tidak dihukum

Sengketa atas rumah atau tanah, atau konflik dengan tetangga

Sebuah keluarga diusir dari rumah mereka dan tidak punya tempat lain untuk bernaung

Perselisihan keluarga, misalnya seputar perceraian dan warisan

Perceraian pasangan berakhir dengan pertengkaran sengit dan anak-anak mereka terperangkap di tengah pertengkaran

Masalah di tempat kerja, baik sebagai karyawan atau pemilik usaha

Seorang perempuan muda tidak dipromosikan setelah dia menolak proposal "romantis" dari bosnya

Masalah dengan uang dan hutang, atau masalah konsumen

Seorang lelaki tua dilecehkan oleh penagih hutang untuk perjanjian yang tidak dia ingat telah ditandatangani olehnya

Kesulitan terkait dengan akses dan kualitas layanan publik

Sebuah keluarga tidak dapat memiliki sambungan jaringan listrik tanpa membayar suap

Struktural

Konflik kekerasan, rasa tidak aman, dan kejahatan terorganisir

Orang tidak berani meninggalkan rumah mereka di malam hari karena geng mengendalikan lingkungan mereka

Perampasan tanah dan perselisihan atas pemanfaatan sumber daya alam

Anak-anak sakit karena pencemaran yang bersumber dari pabrik setempat

Diskriminasi terhadap perempuan atau terhadap kelompok rentan

Seorang perempuan tidak dapat mendaftarkan usahanya karena hukum mensyaratkan izin dari suaminya

Kondisi kerja yang tidak aman atau kasar

Sebuah pabrik yang melanggar peraturan bangunan runtuh, menyebabkan korban mati dan melukai banyak pekerja

Pelanggaran oleh perusahaan dan kegagalan regulasi pasar

Sebuah perusahaan mendistribusikan obat-obatan palsu melalui klinik setempat

Diskriminasi dalam penyediaan layanan publik

Seorang anak lelaki dan anak perempuan bersaudara tidak dapat mendaftar ke sekolah karena mereka termasuk dalam kelompok minoritas

Masalah-masalah keadilan yang paling umum dilaporkan

perekonomiannya menjadi lebih banyak transaksi ekonomi, perselisihan terkait dengan masalah-masalah konsumen menjadi lebih umum.

Beban ketidakadilan juga sangat bervariasi di dalam setiap negara. Mexico City memiliki lebih dari 2.000 kotamadya, tetapi seperempat dari semua kejahatan terjadi hanya di empat di antaranya.¹⁶⁷ Di Bogotá, Kolombia, 99 persen pembunuhan terjadi hanya di 1 persen jalan-jalannya.¹⁶⁸ Di Minneapolis di AS, setengah dari panggilan permintaan bantuan ke polisi datang dari hanya 3 persen dari lingkungan-lingkungannya.¹⁶⁹

Dalam menyelesaikan masalah-masalah keadilan, negara-negara menggunakan tradisi hukum yang berbeda. Seperti yang kita lihat di bagian pertama laporan ini, negara-negara miskin memiliki kendala sumber daya yang signifikan, sementara negara-negara yang terkena dampak konflik harus mulai merekonstruksi kapasitas mereka untuk dapat memberikan layanan keadilan dasar.

Konteks, dengan kata lain, sangat berarti. Tetapi dengan memulai dengan jenis-jenis masalah yang paling umum, kita dapat melacak perjalanan yang saat ini diambil oleh para pencari keadilan dan mengembangkan strategi-strategi untuk memperbaikinya. Kita juga dapat mengidentifikasi apa yang saja juga menjadi masalah di berbagai negara dan di berbagai jenis masalah keadilan, dan menyeroi di mana solusi-solusi khusus diperlukan.

› Untuk indeks dari semua contoh yang dikutip dalam laporan ini, lihat "Apa yang Berhasil di Seluruh Dunia"

Perjalanan Keadilan yang Lebih Baik

Ketika orang-orang ditanya bagaimana mereka ingin masalah-masalah keadilan ini diselesaikan, maka akan muncul tema umum.

Para korban kekerasan dan kejahatan ingin didengarkan ketika mereka membuat laporan, dan agar kasus mereka ditangani dengan lebih peka¹⁷⁰ Mereka menginginkan penyelidikan yang layak dan mendapatkan informasi mengenai perkembangannya selama proses berlangsung.¹⁷¹ Yang paling utama, mereka menginginkan penyelesaian dan – dalam banyak kasus – rekonsiliasi yang memungkinkan mereka untuk melanjutkan hidup mereka dan merasa aman di tengah-tengah komunitas mereka.¹⁷² Para korban kekerasan dan kejahatan tidak selalu tertarik pada pendekatan dengan pemberian hukuman. Bukti menunjukkan bahwa banyak yang lebih suka melihat investasi yang lebih besar berupa upaya pencegahan kejahatan dan rehabilitasi pelanggar daripada peningkatan pengeluaran untuk penjara.¹⁷³

Para korban konflik, kekejaman massal, dan pelanggaran hak asasi manusia berskala besar lainnya mengungkapkan keinginan yang sama.¹⁷⁴ Sebuah penelitian di Nepal di antara keluarga-keluarga orang yang hilang selama konflik negara itu menemukan bahwa sekitar dua per tiga dari keluarga-keluarga menempatkan adalah sangat penting untuk mengetahui kebenaran mengenai apa yang telah terjadi pada kerabat mereka.¹⁷⁵ Proporsi serupa menginginkan dukungan ekonomi atau bentuk-bentuk bantuan lainnya untuk melanjutkan kehidupan mereka. Kurang dari sepertiga responden menyatakan bahwa hukuman bagi para pelaku penghilangan paksa sebagai prioritas. Di Kamboja, sementara beberapa korban rezim Khmer Merah menginginkan hukuman, banyak yang lainnya ingin menceritakan kisah mereka, diakui, mendapatkan perbaikan, menjadi bagian dari proses rekonsiliasi, dan memberitahukan kepada dunia mengenai apa yang telah terjadi (lihat spotlight 2).¹⁷⁶

Bagi mereka yang memiliki perselisihan perdata atau administrasi, survei-survei kebutuhan hukum menunjukkan bahwa orang-orang pada umumnya kurang tertarik pada penghakiman yang menitikberatkan pada kesalahan daripada upaya-upaya untuk menemukan solusi kooperatif.¹⁷⁷ Dalam sengketa mengenai layanan publik, misalnya, mereka ingin mendapatkan akses ke layanan kesehatan yang selama ini menolak mereka atau permintaan maaf untuk hal-hal yang salah. Ketika terjadi perselisihan antara masyarakat setempat dan perusahaan pertambangan, mereka menginginkan solusi yang adil dan dapat

menggunakan hak mereka atas tanah di masa depan.¹⁷⁸ Bahkan dalam perceraian yang gagal mencapai kesepakatan, biasanya tetap demi kepentingan terbaik mereka – dan tentunya demi kepentingan terbaik setiap anak – untuk membantu semua pihak bekerja sama untuk “membuat hukum keadilan mereka sendiri.”¹⁷⁹ Orang-orang juga ingin diperlakukan secara adil ketika mereka mencari keadilan, melalui proses yang terjangkau, dapat dimengerti, dapat diakses, dan semulus mungkin.¹⁸⁰

Pencari keadilan mendapat manfaat dari pendekatan-pendekatan yang disesuaikan dengan kategori-kategori utama masalah yang kita bahas di bagian sebelumnya.

Dukungan untuk mereka yang selamat dari kekerasan seksual, misalnya, dapat membantu membangun “layanan peradilan pidana yang cocok untuk para korban.”¹⁸¹ Pengadilan keluarga Kolkata telah memungkinkan kaum perempuan untuk “menyelesaikan perselisihan perkawinan melalui mediasi daripada menjadi terasing dalam proses hukum dengan bahasa hukum yang tidak mereka pahami jika mereka berdiri di sisi yang lain.”¹⁸² Layanan keadilan yang ramah bagi anak-anak dapat membantu memenuhi kebutuhan anak-anak baik sebagai pencari keadilan maupun ketika mereka melakukan perilaku yang melanggar hukum.¹⁸³ Prosedur untuk klaim-klaim ringan melindungi para konsumen dengan memungkinkan penyelesaian sengketa yang cepat dan murah dalam perkara bisnis.¹⁸⁴ Sistem peradilan informal seringkali dapat lebih mudah mencapai konsensus dalam sengketa tanah, memberikan saran solusi restoratif, dan mendorong tercapainya rekonsiliasi.¹⁸⁵

Ketika kita menganggap masalah-masalah keadilan orang sebagai titik awal, kita didorong untuk memikirkan bagaimana merancang perjalanan yang lebih baik berangkat dari masalah itu hingga sampai ke penyelesaiannya. Bagian yang penting adalah tujuannya (apakah pencari keadilan mencapai penyelesaian yang memuaskan?) Dan perjalanan itu sendiri (apakah pencari keadilan diperlakukan dengan adil di sepanjang perjalanan?).

Gagasan tentang suatu perjalanan keadilan mendorong kita untuk memikirkan kembali pemahaman kita tentang sistem peradilan. Jika mengambil lembaga-lembaga yang ada saat ini sebagai titik awal, kita hanya akan membatasi berbagai aktor yang dapat membantu memecahkan masalah-masalah keadilan dan mempersempit ruang lingkup solusi yang tersedia. Perjalanan menuju keadilan dapat mengambil banyak jalur jalan yang bisa ditempuh. Seorang pencari keadilan dapat mengandalkan bantuan dari luar sektor keadilan. Organisasi-organisasi masyarakat sipil mungkin bisa menjadi pilihan yang lebih baik daripada

layanan keadilan publik yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Solusi-solusi yang paling tepat mungkin datang bukan dari pengadilan tetapi bisa dari penyedia keadilan informal atau alternatif.

Jika ada lebih banyak mitra yang berperan dalam menyediakan keadilan, maka akan ada lebih banyak masalah yang bisa diselesaikan. Kepemimpinan yang inspirasional, standar dan regulasi yang jelas, dan mekanisme akuntabilitas yang efektif dapat memungkinkan sistem keadilan yang lebih beragam untuk mencapai potensi penuhnya.

Untuk lebih memahami perjalanan keadilan, kita memecahnya menjadi tiga tahap:

1. Masyarakat dan komunitas-komunitas **diberdayakan** sehingga mereka dapat bertindak ketika muncul kebutuhan hukum.
2. Mereka memiliki **akses** untuk mendapatkan layanan peradilan yang berpusat pada orang yang responsif terhadap kebutuhan mereka.
3. Mereka dapat mencapai **penyelesaian yang adil** atas masalah-masalah mereka, sehingga mendapatkan keadilan yang telah meningkat secara berarti dan terukur.

Dengan mengambil masalah keadilan rakyat sebagai titik awal, maka negara dapat merancang perjalanan keadilan yang lebih baik yang membantu lebih banyak orang mencapai tujuan di mana mereka yakin masalah mereka telah diselesaikan secara adil.

Memberdayakan orang dan komunitas

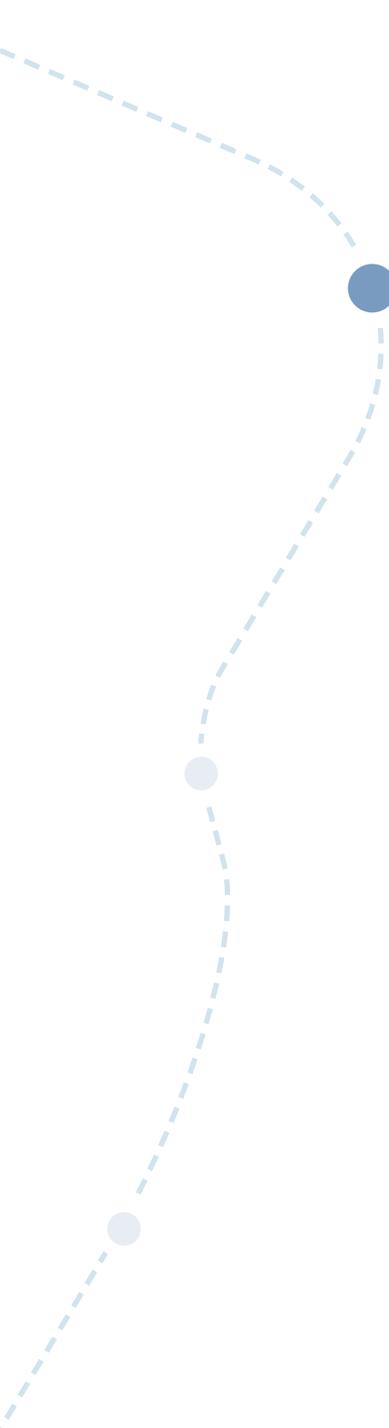
- Membantu orang-orang memahami hukum
- Mendukung orang-orang untuk mencari solusi
- Investasi bantuan hukum untuk mereka yang paling rentan
- Meningkatkan partisipasi di bidang keadilan

Akses untuk mendapatkan layanan keadilan yang berpusat pada orang

- Mempercepat dan menyederhanakan proses
 - Mendukung jalur-jalur alternatif menuju keadilan
 - Menyediakan layanan satu atap
 - Menyesuaikan layanan sesuai dengan kebutuhan keadilan

Hasil yang adil Hasil yang adil

- Memenuhi standar-standar hak asasi manusia
 - Menawarkan pemulihan yang tepat
- Mengumpulkan dan menyebarkan data hasil-hasil
- Membangun mekanisme pengaduan yang efektif



Memberdayakan orang dan komunitas

Perjalanan keadilan dimulai dengan memberdayakan orang-orang sehingga mereka dapat menyelesaikan masalah-masalah keadilan mereka untuk diri mereka sendiri, keluarga mereka, dan komunitas mereka.

Pemberdayaan hukum membantu orang-orang memahami dan menggunakan hukum.¹⁸⁶ Ini memungkinkan mereka untuk mengenali masalah-masalah hukum ketika masalah-masalah tersebut muncul dan melengkapi diri mereka dengan keterampilan dan kepercayaan diri untuk mengambil tindakan.¹⁸⁷

Informasi yang mudah diakses dan nasihat yang baik adalah penting, tetapi pemberdayaan lebih dari sekadar memperbaiki kekurangan dalam hal memiliki pengetahuan tentang hukum. Mereka yang membutuhkan keadilan sering berada di bawah tekanan besar dan bergulat dengan kebutuhan yang mendesak dan tumpang tindih. Orang-orang yang rentan sangat membutuhkan bantuan dan dukungan secara substansial jika mereka ingin melindungi hak-hak mereka.

Model pemberdayaan hukum yang lebih dinamis melakukan investasi dalam bentuk organisasi-organisasi yang mengakar di masyarakat dan cukup dekat dengan orang-orang untuk memahami kebutuhan-kebutuhan hukum mereka dan konteksnya di mana kebutuhan-kebutuhan tersebut muncul. Model pemberdayaan ini menantang lembaga-lembaga peradilan untuk menjadi lebih terbuka dan responsif terhadap warga dan masyarakat saat mereka memiliki kebutuhan mencari keadilan. Dan juga secara aktif memajukan inklusi dengan memasukkan kelompok-kelompok yang secara historis memiliki akses paling kecil untuk bisa mendapatkan keadilan.

Satuan Tugas telah mengidentifikasi empat prioritas untuk dapat meningkatkan pemberdayaan:

1. Membantu orang-orang memahami hukum
2. Mendukung orang-orang untuk mencari solusi
3. Investasi bantuan hukum bagi mereka yang paling rentan
4. Meningkatkan partisipasi dalam keadilan

Membantu orang-orang memahami hukum

Orang-orang akan menjadi lebih diberdayakan ketika mereka mengetahui apa yang menjadi hak-hak mereka dan merasa mampu untuk menindaklanjutinya. Nasihat independen dapat disediakan oleh berbagai aktor, termasuk mereka yang bekerja di luar sektor peradilan formal. Paralegal beroperasi dalam komunitas dan menawarkan bantuan yang sangat efektif secara biaya.¹⁸⁸ Layanan dan saluran bantuan nasihat untuk warga dapat menggunakan algoritme dan “alat-alat pilihan” lainnya untuk menyediakan nasihat yang konsisten kepada lebih banyak orang. Serikat pekerja membantu mencegah perselisihan di tempat kerja harus diselesaikan di pengadilan. Layanan spesialis memiliki keahlian untuk mendukung kelompok-kelompok rentan untuk membuat keputusan-keputusan yang efektif.¹⁸⁹

Paralegal dengan mengendarai sepeda motor di pedesaan Liberia telah memberikan dukungan sehingga dapat menjangkau 160 desa. Mereka melakukan sesi-sesi pendidikan masyarakat dan membantu penduduk desa untuk menyelesaikan perselisihan-perselisihan.¹⁹⁰

Investasi bantuan hukum untuk mereka yang paling rentan

Para pihak yang berperkara yang rentan untuk memiliki kebutuhan hukum yang serius biasanya juga akan membutuhkan dukungan keuangan.¹⁹⁷ Bantuan hukum sangat penting bagi mereka yang menghadapi penuntutan pidana sementara mereka tidak mampu membayar pembelaan untuk diri mereka sendiri. Orang-orang yang berperkara dan paling miskin juga membutuhkan bantuan hukum untuk kasus-kasus perdata yang serius, terutama yang melibatkan anak-anak atau perempuan yang berisiko mengalami kerugian. Program-program bantuan hukum yang dirancang dengan baik akan memberikan insentif untuk dapat mengatasi masalah yang mendasarinya. Program-program bantuan tersebut akan mendapatkan penggantian biaya melalui manfaat-manfaat yang mencakup pengurangan waktu di pengadilan atau penjara dan peningkatan kualitas hasil kehidupan yang dihasilkan dari penyelesaian kasus secara lebih cepat.¹⁹⁸

Klinik bantuan hukum didirikan di Ekuador untuk memberikan bantuan kepada kaum perempuan berpenghasilan rendah dan anak-anak. Pekerjaan yang telah mereka lakukan ini berhasil mengurangi kekerasan dalam rumah tangga sebesar 17 persen setelah perceraian dan meningkatkan kemungkinan klien perempuan akan menerima tunjangan anak sebesar 10 persen.¹⁹⁹

Mendukung orang-orang untuk mencari solusi

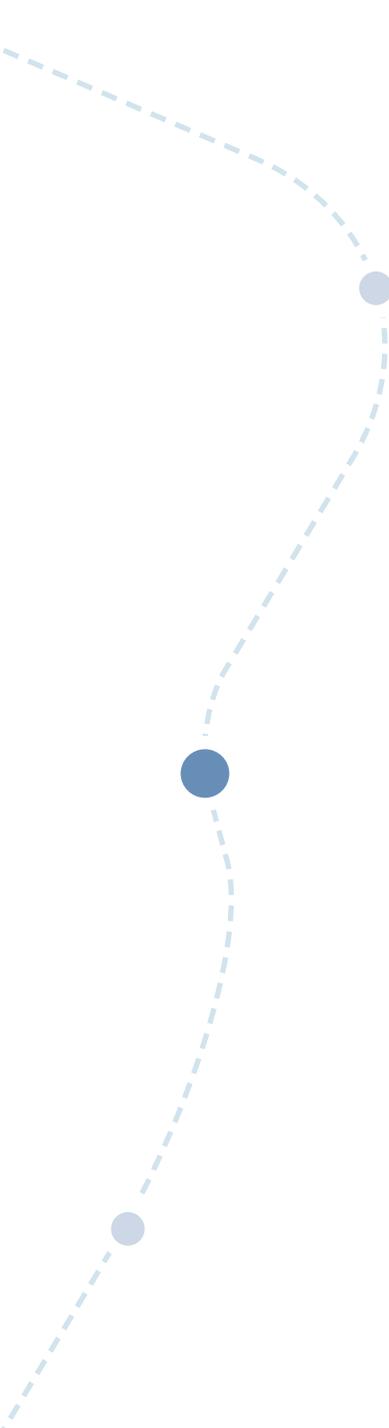
Sementara banyak perselisihan dapat diselesaikan tanpa dukungan pihak ketiga, orang-orang yang memiliki masalah yang lebih rumit perlu navigator untuk memandu mereka dalam menjalani proses mencapai keadilan. Ini adalah peran tradisional para pengacara, tetapi nasihat dari pengacara terlalu mahal bagi sebagian besar orang.¹⁹¹ Sebagai alternatif paralegal dapat berperan sebagai navigator,¹⁹² untuk memberikan layanan dukungan korban dan saksi,¹⁹³ dan layanan panduan bagi para pihak yang terlibat perkara yang tidak terwakili melalui kasus pengadilan.¹⁹⁴ rogram-program pemantauan dapat mendukung orang-orang dari kelompok-kelompok berisiko yang melakukan tindakan pelanggaran hukum, tidak hanya selama dalam proses hukum tetapi juga selama berada dalam penjara dan selama dalam proses masuk kembali ke masyarakat.¹⁹⁵

Di Nuevo León, Meksiko, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos memberikan dukungan hukum kepada para tahanan dan keluarga mereka, membantu dalam kasus-kasus pengadilan dan mendidik para tahanan tentang hukum dan prosedur yang relevan. Organisasi ini juga melakukan pemantauan atas hak asasi manusia di dalam penjara, dan bekerja dengan keluarga dan para tahanan untuk mengidentifikasi dan mengatasi pelanggaran.¹⁹⁶

Meningkatkan partisipasi di bidang keadilan

Orang-orang lebih cenderung merasa diberdayakan ketika sistem peradilan lebih representatif dan beragam. Partisipasi luas meningkatkan harapan masyarakat bahwa mereka akan diperlakukan secara adil dan dapat membangun dukungan untuk supremasi hukum di antara masyarakat.²⁰⁰ Kebijakan ketenagakerjaan yang inklusif diperlukan untuk meningkatkan keragaman di lembaga-lembaga peradilan, tetapi ada peran-peran lain yang memberi orang peran dalam penyediaan keadilan – sebagai aktivis dan paralegal, mediator komunitas, juri sukarela atau hakim, dan sebagainya.

Para relawan berbasis komunitas dari LSM RENEW di Bhutan bekerja dengan para tetua setempat dan polisi untuk menanggapi laporan kekerasan dalam rumah tangga. Korban sering merasa lebih nyaman melaporkan kepada relawan masyarakat daripada kepada pihak berwenang. Para sukarelawan ini dilatih untuk menjadi pemecah masalah fasilitatif “berdasarkan gender”. Mereka menggunakan pendekatan pembangunan konsensus untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan.²⁰¹



Akses untuk mendapatkan layanan keadilan yang berpusat pada orang

Keadilan merupakan layanan publik yang penting, tetapi secara tradisional tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat dengan cara yang ramah pengguna. Lembaga-lembaga peradilan seringkali berbiaya mahal, tidak dapat diakses secara fisik, atau mengintimidasi secara psikologis dan budaya. Beberapa di antaranya merupakan gabungan dari semuanya. Kondisi ini menghalangi para warga yang sebenarnya berdaya secara hukum untuk mengakses layanan yang mereka butuhkan.

Sistem peradilan yang lebih responsif akan memberikan layanan yang didasarkan pada kebutuhan-kebutuhan orang sesuai apa yang mereka ungkapkan. Sistem peradilan yang responsif akan bersifat terbuka, dapat diakses, dan menyambut semua kelompok, termasuk mereka yang paling rentan. Sistem ini akan memastikan bahwa orang-orang diberikan informasi tentang opsi-opsi yang mereka miliki pada setiap tahap perjalanan keadilan, dan akan menggunakan triase dan penunjuk arah untuk mengarahkan mereka ke bagian sistem yang paling tepat di setiap tahapnya. Dan sistem ini juga akan menggunakan teknologi untuk menjangkau lebih banyak orang dan memperlancar proses peradilan.

Pemerintah harus mendukung peningkatan keragaman penyediaan layanan. Untuk keperluan keragaman ini mungkin harus mengakhiri monopoli, dan membuka penyediaan layanan oleh paralegal atau mediator berbiaya rendah lainnya, atau ke generasi baru layanan hukum digital. Mekanisme-mekanisme baru akan sering dibutuhkan untuk membiayai dan mendukung para penyedia layanan non-tradisional yang secara signifikan dapat meningkatkan akses.

Empat langkah mendasar untuk meningkatkan akses untuk mendapatkan layanan yang sesuai:

1. Mempercepat dan menyederhanakan proses
2. Mendukung jalur alternatif menuju keadilan
3. Menyediakan layanan satu atap
4. Menyesuaikan layanan dengan kebutuhan keadilan

Mempercepat dan menyederhanakan proses

Intervensi awal untuk menyelesaikan suatu masalah dapat menghasilkan penghematan besar dalam segi waktu dan biaya. Proses yang lebih sederhana dan bahasa yang lugas membuat proses keadilan lebih mudah dipahami, dan sekaligus juga mendukung keputusan-keputusan yang lebih baik sepanjang perjalanan keadilan. Data diperlukan untuk melacak aliran kasus melalui sistem peradilan, mengidentifikasi kemacetan-kemacetan dan faktor-faktor pendorong keruwetan yang tidak perlu.²⁰² Alternatif-alternatif dibutuhkan untuk mencapai terwujudnya keadilan yang lebih cepat bagi tiga juta orang yang berada di penjara menunggu persidangan mereka.²⁰³ Pemerintah-pemerintah juga harus menghadapi masalah penyelewengan insentif keuangan yang mengakibatkan proses-proses menjadi berkepanjangan dan suram.

Sistem abunzi berbasis masyarakat di Rwanda memanfaatkan sukarelawan lokal terlatih untuk menengahi perselisihan, yang sebagian besar terkait dengan tanah. Hanya seperempat dari perselisihan yang diadilinya kemudian dilanjutkan ke sistem peradilan formal.²⁰⁴

Menyediakan layanan satu atap

Pusat-pusat peradilan masyarakat menyediakan berbagai layanan peradilan di bawah satu atap. Pusat-pusat tersebut juga sering memberikan jenis-jenis dukungan lainnya, memberikan nasihat kepada kaum perempuan yang rentan mengenai manfaat-manfaat yang disediakan oleh pemerintah, misalnya, atau membantu mereka mengatasi trauma. Menyediakan berbagai layanan di satu tempat memberdayakan orang untuk memulai perjalanan keadilan mereka, dan membuatnya lebih mungkin bagi mereka untuk akan dapat menemukan solusi karena layanan ini mengatasi masalah-masalah mendasar yang mereka alami. Pusat-pusat dengan multidisiplin ini dapat secara independen ditempatkan atau diselenggarakan di dalam suatu pengadilan atau lembaga lainnya yang ada seperti rumah sakit atau klinik kesehatan. Layanan tatap muka dapat dilengkapi dengan telepon atau saran online.

90 Centros de Acceso a la Justicia di Argentina (Akses ke Pusat-pusat Keadilan) menyediakan layanan hukum dan komunitas yang komprehensif bagi komunitas setempat. Setiap pusat memiliki tim pengacara, psikolog, pekerja sosial, dan mediator komunitas yang menawarkan respons holistik terhadap masalah-masalah terkait keadilan dengan menyediakan layanan-layanan tambahan.²¹⁰

Mendukung jalur-jalur alternatif menuju keadilan

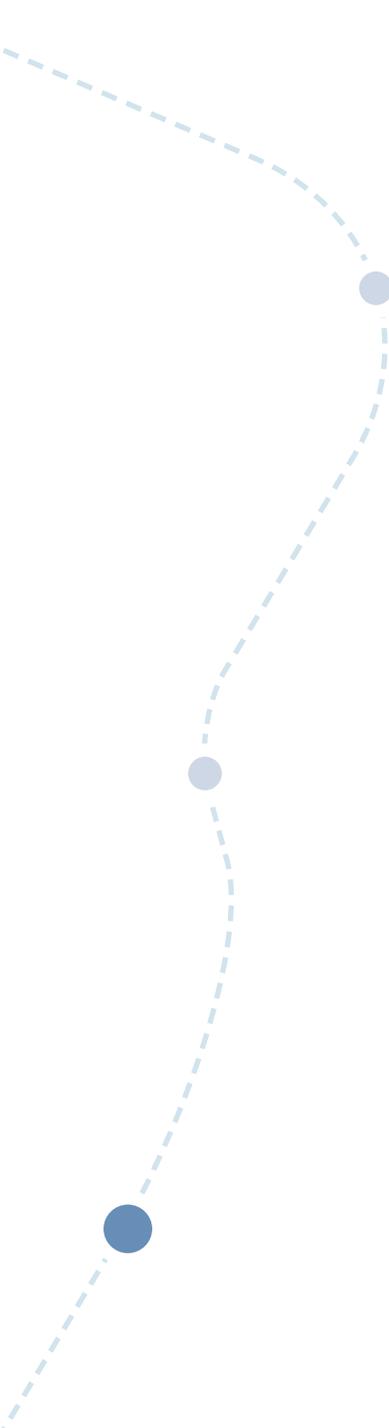
Pendekatan-pendekatan adversarial yang menghadirkan argumentasi dari dua pihak yang berselisih dalam keadilan malah akan meningkatkan perselisihan daripada menyelesaikannya, yang sementara itu juga meningkatkan stres yang dialami oleh mereka yang terlibat. Metode-metode alternatif penyelesaian sengketa akan memberikan lebih banyak keadilan kepada orang-orang dengan biaya yang lebih rendah, yang sementara itu juga menghemat biaya pengadilan untuk kasus-kasus paling serius. Metode-metode alternatif juga meningkatkan tingkat kepuasan.²⁰⁵ Skema keadilan restoratif, misalnya, memiliki efek positif dalam membatasi tingkat pengulangan, memberikan rasa kepuasan dan keadilan kepada para korban, dan mengurangi gejala stres pasca-trauma.²⁰⁶ Keputusan siding peradilan yang bersifat pengalihan juga dapat mengurangi pengulangan, serta penggunaan narkoba dan perilaku merugikan lainnya.²⁰⁷ Sementara itu, polisi dapat memainkan peran penting pengurangan eskalasi di dalam masyarakat jika mereka memiliki keterampilan yang tepat.²⁰⁸

Di Australia, program keputusan sidang peradilan yang bersifat pengalihan diberikan untuk mendorong para terdakwa yang memiliki masalah narkoba untuk menjalani perawatan sebelum persidangan mereka (dengan penyelesaian pengobatan yang berhasil diperhitungkan sebagai bagian dari masa hukuman) telah mengurangi penggunaan narkoba dan tingkat pengulangan kembali.²⁰⁹

Menyesuaikan layanan sesuai dengan kebutuhan keadilan

Layanan-layanan khusus memberikan kecocokan yang lebih baik untuk masalah-masalah keadilan masyarakat dan lebih mungkin dapat memenuhi kebutuhan mereka. Layanan-layanan khusus dapat disesuaikan dengan jenis utama masalah-masalah keadilan – ketenagakerjaan atau tanah, misalnya – atau dapat memberikan layanan yang lebih berkualitas dan lebih sensitif untuk kelompok-kelompok sasaran (seperti anak-anak, atau perempuan yang menderita pelecehan dalam rumah tangga). Karena kasus-kasus memiliki fitur yang sama, para penyedia layanan akan lebih memahami masalah-masalah struktural serta pola-pola psikologis yang terkait dengan kebutuhan khusus. Layanan-layanan spesialis dapat mengembangkan protokol dan pedoman berbasis bukti untuk para penyedia layanan, membuat proses-proses menjadi lebih konsisten dan efektif, sekaligus juga membuatnya terlihat jelas bagi para pencari keadilan mengenai apa yang dapat mereka harapkan.²¹¹

Pusat Humura Burundi untuk Kekerasan Berbasis Gender memberikan kepada mereka yang selamat dengan perawatan medis, dukungan psikososial, dan polisi serta nasihat hukum. Layanan ini mampu memproses kasus-kasus rata-rata lima kali lebih cepat daripada kasus-kasus yang ditangani di tempat lain melalui sistem peradilan²¹²



Hasil yang adil

Pada akhirnya, sistem peradilan harus dinilai berdasarkan apakah sistem tersebut mampu memberikan kemajuan yang berarti menuju keadilan bagi semua.

Untuk individu-individu, ini berarti penyelesaian yang memuaskan untuk suatu masalah. Orang-orang yang ada dalam perjalanan proses keadilan memberi nilai tinggi pada kualitas perlakuan yang mereka terima.²¹³ Sistem peradilan akan sering menerima penilaian yang sebaliknya jika mereka merasa telah didengarkan, dipahami, dan diperlakukan dengan adil.²¹⁴ Memahami harapan-harapan, pengalaman-pengalaman, dan perasaan-perasaan emosi individu-individu, merancang layanan berkenaan dengan kehidupan masyarakat, dan kemudian melacak apakah hasil-hasil positif yang dicapai sangat penting untuk meningkatkan sistem peradilan.²¹⁵

Hasil-hasil yang lebih adil bagi individu-individu akan diterjemahkan sebagai manfaat-manfaat sosial dan ekonomi yang lebih luas bagi komunitas dan masyarakat, yang sekaligus juga berkontribusi untuk inklusi yang lebih besar dan mengurangi ketidaksetaraan. Jika hasil-hasil yang adil dapat dicapai, ini akan mengarah pada pengurangan kekerasan dan terciptanya komunitas yang lebih damai.

Penting untuk mengukur kemajuan menuju pencapaian hasil-hasil yang adil. Sistem peradilan membutuhkan rasa tanggung jawab baru atas orang-orang yang mereka layani. Pendekatan berbasis bukti yang mengajukan pertanyaan kepada mereka yang terlibat dalam proses peradilan mengenai persepsi mereka tentang kewajaran perlakuan dan pengalaman mereka dalam proses peradilan diperlukan untuk mempertahankan agar para penyedia layanan memperhitungkan dan memberi mereka umpan balik mengenai layanan yang mereka berikan.

Satuan Tugas merekomendasikan empat langkah untuk meningkatkan kewajaran perlakuan.

1. Memenuhi standar-standar hak asasi manusia
2. Menawarkan pemulihan yang tepat
3. Mengumpulkan dan menyebarkan data hasil-hasil
4. Membangun mekanisme pengaduan yang efektif

Memenuhi standar-standar hak asasi manusia

Memastikan bahwa layanan yang mereka berikan memenuhi standar-standar internasional mengenai hak asasi manusia yang fundamental selama proses perjalanan keadilan adalah sangat penting bagi para penyedia keadilan. Semua negara harus memperkuat hak-hak atas kebebasan dan rasa aman, dan atas persidangan yang adil berdasarkan praduga tidak bersalah dan standar-standar yang mendukung penyajian suatu pembelaan.²¹⁶ Memastikan bahwa penegakan hukum konsisten dengan hak asasi manusia merupakan prioritas penting selanjutnya. Organisasi-organisasi hak asasi manusia dan pembela keadilan masyarakat sipil lainnya dapat memainkan peran dalam menekan untuk tercapainya hasil-hasil yang adil dalam hal di mana keputusan-keputusan tidak sesuai dengan standar-standar hak internasional. Selain itu, dengan menghubungkan para penyedia peradilan formal dan informal, hak asasi manusia dapat menjadi lebih bermakna di tingkat lokal, dan jangkauan serta dampaknya meningkat.

Amnesti Internasional telah mengembangkan daftar sepuluh standar hak asasi manusia dasar yang harus diikuti oleh para petugas penegak hukum.²¹⁷

Mengumpulkan dan menyebarkan data hasil-hasil

Untuk menciptakan insentif yang tepat bagi sistem peradilan agar dapat memberikan hasil-hasil yang adil, data tentang efektivitas peradilan harus dikumpulkan dan tersedia untuk publik. Bukti bahwa keadilan meningkat mungkin terletak pada pengurangan pengulangan (karena kejengkelan terhadap perlakuan tidak adil dapat menjadi pendorong utama kejahatan), dalam mengurangi insiden kebutuhan hukum yang tidak terpenuhi, atau dalam hal tingkat stres yang berkurang dan peningkatan kesehatan mental di antara para pengadu dan terdakwa. Data tentang persepsi publik juga penting dalam menilai apakah sistem peradilan memberikan hasil-hasil yang adil.²²² Analisis mengenai manfaat dan biaya, sementara itu, dapat membantu dalam menentukan apakah masyarakat secara keseluruhan menerima pengembalian yang adil dari investasi mereka di bidang keadilan.²²³

Di Ohio, pergeseran pemberian jaminan sebagai perhitungan atas risiko yang ditimbulkan oleh para tahanan, daripada kemampuan mereka membayar surat jaminan, telah membuat hampir dua kali lipat jumlah terdakwa yang dibebaskan sebelum persidangan tanpa jaminan, dan mengurangi separuh jumlah yang ditahan kembali setelah dibebaskan.²²⁴

Menawarkan pemulihan yang tepat

Keputusan-keputusan yang ditetapkan dalam sidang peradilan harus didasarkan pada bukti tentang pengaruh hukuman dalam mengurangi tingkat pengulangan, mencegah kejahatan, dan mengakui dampak merugikan terhadap para korban. Ada banyak bukti yang menunjukkan bahwa keputusan alternatif lainnya dari pada hukuman penjara lebih efektif dalam banyak kasus, dan bahwa alternatif ini didukung atau bahkan lebih dipilih oleh para korban.²¹⁸ Keputusan alternatif tersebut termasuk denda, penahanan di rumah, hukuman berbasis masyarakat, pemulihan antara pelaku dan korban, dan skema rehabilitasi.²¹⁹ Dalam kasus-kasus perdata, orang-orang kurang tertarik untuk membagi-bagi kesalahan daripada upaya mencapai kesepakatan yang memungkinkan mereka menjalani kehidupan normal mereka.²²⁰ Pemulihan yang terbaik adalah membangun kembali hubungan dan memulihkan harmoni dalam suatu komunitas.

Sebuah survei pada tahun 2016 terhadap para korban kejahatan di AS menemukan bahwa bahkan di antara para korban kejahatan dengan kekerasan, mayoritas besar memilih para penjahat dimintai pertanggungjawaban melalui "berbagai pilihan di luar penjara".²²¹

Membangun mekanisme pengaduan yang efektif

Berlawanan dengan apa yang dipercayai pada umumnya, orang-orang dapat merasa puas dengan hasil suatu kasus, dan melihat suatu hasil sebagai adil, bahkan sekalipun jika mereka kalah. Elemen-elemen kunci dalam menentukan kepuasan mereka termasuk persepsi independensi lembaga-lembaga peradilan dan sejauh mana kasus-kasus mereka ditangani secara serius. Penyedia keadilan harus menetapkan dan memenuhi standar-standar dasar yang terkait dengan kualitas proses, berdasarkan umpan balik masyarakat. Selain prosedur banding atas keputusan-keputusan hukum, mekanisme pengaduan yang efektif dan independen diperlukan untuk menangani pengaduan. Meningkatkan transparansi pengambilan keputusan – misalnya, dengan membuat rekaman video proses pengadilan atau menerbitkan dokumen "rute sampai pada putusan" – akan memfasilitasi proses pengaduan.

Standar-standar sebagaimana tercantum dalam Kerangka Internasional untuk Keunggulan Pengadilan dapat membantu sistem-sistem peradilan nasional dalam meningkatkan keadilan dan aspek kinerja lainnya, dan untuk membuat tolok ukur kemajuan terhadap yurisdiksi-yurisdiksi lain.²²⁵

Bab 4

Mencegah Ketidakadilan

Mengingat besarnya kesenjangan keadilan, kita harus mencegah masalah-masalah keadilan serta berupaya menyelesaikan masalah-masalah keadilan yang sudah terjadi.

Pencegahan akan mengurangi kerugian yang diderita orang dan sangat akan efektif secara biaya.

Pergeseran ke arah pencegahan memerlukan transformasi dalam sistem-sistem peradilan, karena peradilan berkolaborasi dengan sektor-sektor lain untuk mengatasi akar penyebab perselisihan dan mencegah kekerasan, konflik, dan pelanggaran hak asasi manusia.

Strategi-strategi pencegahan harus bertujuan untuk menciptakan sistem peradilan yang dapat dipercaya, mengatasi ketidakadilan struktural, dan menggunakan hukum untuk mengurangi risiko-risiko ketidakadilan.

Pergeseran ke Pencegahan

Kesenjangan keadilan sangat besar sehingga tidak bisa diatasi cukup hanya dengan menyelesaikannya setelah masalah-masalah tersebut terjadi. Kita juga harus bertindak untuk mencegah terjadinya masalah-masalah keadilan.

Pencegahan akan mengurangi jumlah orang yang menderita kerugian, dan akan memungkinkan sumber-sumber daya yang langka untuk didedikasikan untuk mampu memberikan tanggapan terhadap masalah-masalah keadilan yang paling serius dan sulit dipecahkan.

Pergeseran ini akan mendorong fokus yang baru pada akar penyebab ketidakadilan – “kesenjangan kesempatan, kekayaan, dan kekuasaan” yang disorot dalam Agenda 2030 sebagai hambatan-hambatan dalam mencapai visinya untuk pembangunan berkelanjutan.²²⁶

Tetapi pencegahan adalah lebih dari sekedar pengurangan kerugian. Dengan memberikan perlakuan yang adil bagi semua, sistem peradilan yang efektif akan menyediakan kondisi-kondisi bagi masyarakat untuk berkembang secara berkelanjutan.

Masyarakat yang damai dan aman lebih akan memungkinkannya untuk dapat tumbuh berkembang. Ketika ada lebih sedikit perselisihan, orang-orang dapat berinteraksi satu sama lain dengan cara yang lebih positif. Dan ketika semua anggota masyarakat memiliki perlindungan hukum yang tepat, mereka lebih siap untuk memenuhi potensi mereka dan berpartisipasi penuh dalam membangun masa depan yang lebih baik.

Mengapa Pencegahan?

Sebuah dongeng kuno mengajukan pertanyaan mengapa, ketika orang-orang masih ada yang terus-menerus terjatuh dari tebing yang berbahaya, kita membelanjakan uang tidak untuk memasang pagar di sepanjang tepi tebing tetapi untuk menempatkan ambulans di lembah.

Sistem peradilan dunia secara tradisional memainkan peran ambulans. Polisi bereaksi terhadap laporan kejahatan. Pengacara menunggu klien untuk datang mencari bantuan dari mereka – yang seringkali berada dalam kesulitan pada saat mereka berpaling kepada mereka. Pengadilan menjatuhkan putusan hukuman atas kasus-kasus yang muncul di hadapan mereka.

Di bidang kesehatan masyarakat, telah lama diakui bahwa pendekatan ini salah. Konstitusi Organisasi Kesehatan Dunia tahun 1948 mendefinisikan kesehatan sebagai “keadaan fisik, mental dan sosial yang lengkap, dan bukan sekadar tidak adanya penyakit atau kelemahan.”²²⁷ Memajukan bidang kesehatan dianggap lebih efektif daripada mengobati penyakit sebagai cara untuk meningkatkan kesejahteraan.

Sektor keadilan perlu berpikir dengan cara yang sama, belajar bagaimana cara membangun pagar dan menemukan cara-cara lain untuk membuat sehingga puncak tebing tersebut aman. Ini adalah pergeseran dari bereaksi terhadap peristiwa-peristiwa negatif menjadi mengadopsi pendekatan positif, dengan sistem peradilan secara aktif memajukan bidang keadilan, perdamaian, kohesi sosial, dan kemakmuran.

Pencegahan adalah masuk akal karena empat alasan yang saling melengkapi.

Pertama, kesenjangan keadilan tidak dapat dijawab dengan pendekatan-pendekatan dan alat-alat tradisional. Bahkan jika negara-negara melakukan investasi dalam semua pendekatan yang direkomendasikan dalam bab di atas, mereka akan perlu berjuang untuk memberikan tanggapan terhadap skala permintaan keadilan yang belum terpenuhi. Mencegah masalah-masalah keadilan akan memberikan kontribusi yang penting untuk setiap jalur yang layak dari semula keadilan hanya tersedia bagi segelintir orang ke keadilan bagi semua.

Kedua, keadilan dibutuhkan untuk komunitas dan masyarakat, bukan hanya untuk individu. Dengan menganalisis kasus-kasus yang paling umum dan yang muncul di hadapan mereka, para penyedia keadilan dapat melihat pola-polanya seperti jenis-jenis perselisihan tertentu yang berulang. Mungkin ada orang-orang berulang kali mengalami pengusiran karena hak sewa mereka tidak terjamin aman, misalnya. Atau regulasi yang lemah membuat mereka rentan terhadap pinjaman predator. Atau mungkin kesehatan seluruh komunitas terganggu karena operasi penambangan dengan banyak penyalahgunaan. Pencegahan, yang mengatasi akar penyebab ketidakadilan, adalah cara terbaik untuk mengatasi faktor-faktor struktural dan sistemik yang menopang tetap adanya masalah-masalah keadilan umum sebagaimana disebutkan dalam bab di atas.

“ Pencegahan itu hemat biaya. Kesenjangan keadilan tidak dapat dijawab dengan pendekatan dan alat tradisional, sementara keadilan dibutuhkan untuk komunitas dan masyarakat, bukan hanya individu. ”



Ketiga, sistem peradilan memainkan peran dalam pencegahan ketika bertindak sebagai platform bagi orang-orang untuk mengambil peluang dan berpartisipasi penuh di dalam masyarakat mereka. Sebagaimana ditunjukkan pada Bab 1, identitas hukum, dokumentasi dasar, dan perlindungan hukum lainnya bertindak sebagai pintu gerbang untuk pembangunan sosial dan ekonomi. Secara lebih luas, sistem-sistem dan lembaga-lembaga peradilan dapat membantu meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap berbagai risiko, mengatasi pengucilan, menanggapi keluhan, dan memberikan “perubahan positif yang dihasilkan dari kontestasi damai.”²²⁸

Akhirnya, pencegahan berbiaya efektif. Lebih sedikit masalah keadilan berarti lebih sedikit biaya untuk orang-orang, untuk masyarakat, dan untuk sistem peradilan itu sendiri. Sebagaimana telah kita bahas dalam Bab 2, selain itu, investasi di bidang keadilan dapat menuai manfaat-manfaat besar dalam hal peningkatan kesehatan dan kesejahteraan, masyarakat yang lebih damai, hasil-hasil ekonomi yang lebih baik bagi para individu dan masyarakat, dan peningkatan pengembalian investasi pemerintah.

Pencegahan Seperti Apa?

Bab ini diambil dari makalah latar belakang yang disiapkan untuk Satuan Tugas oleh Pusat Kerjasama Internasional Universitas New York. Makalah tersebut menemukan bahwa “pencegahan berjalan melawan arus pada sistem peradilan yang ‘disambungkan’ untuk menanggapi masalah-masalah” dan bahwa sementara pendekatan-pendekatan reaktif dapat terlihat dengan jelas oleh para politisi dan publik, “hasil-hasil dari pencegahan dapat tersebar dan sulit dilacak.”²²⁹

Penelitian ini juga menemukan bahwa pendekatan-pendekatan inovatif untuk pencegahan telah berkembang dalam sistem-sistem peradilan di seluruh dunia. Ada semakin banyak bukti tentang apa yang berhasil dalam mencegah masalah-masalah keadilan, dan peningkatan keinginan untuk memahami dan mengatasi akar permasalahan, mengatasi ketidakadilan sistemik, dan membangun lembaga-lembaga keadilan yang dapat memainkan peran strategis dalam pencegahan.

Upaya-upaya ini berfokus pada empat bidang:

1. Mencegah dan mengurangi eskalasi perselisihan di dunia di mana 1,5 miliar orang memiliki masalah keadilan yang belum terselesaikan.
2. Mencegah kekerasan kriminal, terorganisir, dan interpersonal, terutama kekerasan terhadap kaum perempuan, anak-anak, dan kelompok-kelompok rentan lainnya.
3. Menggunakan sistem-sistem peradilan untuk membantu membangun masyarakat yang lebih damai, dengan mencegah konflik dan ketidakstabilan.
4. Mempromosikan inklusi dan memajukan hak asasi manusia, pada saat terdapat tingkat eksklusi dan ketidakpercayaan yang tinggi.

Mencegah dan mengurangi eskalasi perselisihan

Penyedia peradilan dapat bekerja secara proaktif dengan orang-orang untuk melakukan tindakan sebelumnya dan mencegah perselisihan, atau untuk menghentikannya sehingga tidak berkembang menjadi lebih serius.²³⁰

Pendekatan-pendekatan preventif semakin sering digunakan oleh sektor bisnis, karena dapat mencegah perselisihan – atas suatu kontrak besar, misalnya – sehingga dapat menghemat biaya dalam jumlah substansial dibandingkan jika harus mengeluarkan biaya dengan tindakan hukum.

Pencegahan perselisihan memiliki manfaat-manfaat yang serupa bagi individu-individu.²³² Platform online bermunculan yang bertujuan untuk “mendemokratisasikan hukum” dengan memberikan kepada orang alat-alat yang mereka butuhkan untuk membuat perjanjian-perjanjian yang mengikat secara hukum.²³³ Alat-alat ini mengurangi risiko kemungkinan timbulnya perselisihan di masa depan.²³⁴ GPemberdayaan akar rumput juga banyak mengalami keberhasilan di bidang ini. Banyak orang, seorang paralegal Afrika Selatan melaporkan, “jangan mengadakan perjanjian formal, dan membuat hubungan-hubungan tidak berjalan baik.”²³⁵ Paralegal telah mengatasi masalah ini dengan membantu masyarakat membuat perjanjian formal yang melindungi hak-hak mereka.²³⁶

Pendekatan-pendekatan terkait meningkatkan ketersediaan dan aksesibilitas dokumentasi hukum. Layanan do-it-yourself membuat orang lebih mudah untuk membuat surat wasiat, mengurangi risiko sengketa warisan. Ini sangat penting pada khususnya untuk melindungi hak-hak kaum perempuan dan anak-anak. Layanan-layanan yang membuat lebih mudah dan lebih murah untuk mengajukan pendaftaran badan usaha akan sangat membantu kelompok-kelompok yang kurang beruntung untuk dapat mendirikan perusahaan, sehingga meningkatkan perekonomian mereka. Portal-portal online memungkinkan para pedagang untuk lebih mudah mematuhi kewajiban memiliki perizinan dan persyaratan-persyaratan peraturan lainnya, melindungi mereka dari penyalahgunaan wewenang oleh

› Kontrak dalam bentuk visual dapat membuat perjanjian menjadi lebih mudah diakses. “Kontrak-kontrak komik” pertama kali digunakan di Afrika Selatan untuk kontrak kerja bagi para pemetik buah.²³¹

› Platform di Sauti memungkinkan para pedagang lintas batas di Afrika Timur untuk mengakses pasar dan informasi terkait perdagangan resmi lainnya dengan menggunakan ponsel mereka. Informasi terkini ini membantu melindungi mereka dari pelecehan dan pemerasan oleh para pejabat perbatasan.²³⁷

otoritas. Perantara seperti serikat pekerja, masyarakat koperasi, dan asosiasi masyarakat lainnya memainkan peran penting dalam membantu orang-orang sehingga dapat menggunakan hukum untuk memperkuat ketahanan mereka.

Pemerintah-pemerintah dapat mengidentifikasi daerah-daerah mana yang menghasilkan banyak perselisihan dan menggunakan hukum dan peraturan secara preventif.²³⁸ Regulasi pasar yang lebih baik dan penguatan perlindungan bagi warga negara akan membantu mengurangi jumlah dan keseriusan hutang konsumen, perumahan, dan perselisihan ketenagakerjaan. Perkuatan komitmen terhadap keadilan dalam penyediaan layanan publik, dikombinasikan dengan peningkatan peluang untuk partisipasi warga negara, akan mengurangi jumlah perselisihan antara warga negara dan pemerintah. Undang-undang yang melindungi hak-hak kaum perempuan dan anak-anak dapat mengarahkan pada tingkat konflik yang lebih rendah dan hasil-hasil yang lebih adil ketika hubungan-hubungan rusak. Di AS, misalnya, peralihan meninggalkan cara penyelesaian kasus perceraian berbasis kesalahan telah berhasil membuat penurunan bunuh diri pada pihak perempuan dan kekerasan dalam rumah tangga secara terukur.²³⁹

Pemerintah-pemerintah juga dapat mencegah kerugian pada sisi “hilir” dari sistem peradilan melalui rancangan undang-undang, peraturan, dan kebijakan yang lebih baik.²⁴⁰ Perubahan-perubahan dalam jaminan sosial dan undang-undang ketenagakerjaan, misalnya, atau dalam perlindungan yang disediakan untuk para penyewa, memiliki dampak-dampak yang dapat diprediksi berkenaan dengan jumlah masalah keadilan dan permintaan selanjutnya untuk layanan keadilan.²⁴¹ Beberapa negara sekarang tengah melakukan penilaian dampak keadilan untuk mengukur dan menghitung pengaruh dari proposal-proposal kebijakan baru mengenai sistem peradilan perdata dan pidana.²⁴² Penilaian ini “membantu para pembuat kebijakan di seluruh pemerintahan dapat menemukan cara terbaik untuk mencapai tujuan-tujuan kebijakan mereka yang sekaligus juga meminimalkan dampaknya pada sistem peradilan.”²⁴³

Dengan cara yang sama, pendekatan-pendekatan pemberdayaan hukum dapat mencegah perselisihan melalui pergeseran dari berurusan dengan kasus-kasus individual ke penanganan akar penyebab ketidakadilan kolektif. Para pembela keadilan dapat membantu masyarakat menggunakan hukum untuk menantang tumbuhnya bisnis yang kuat dan kepentingan negara, dengan menangani pelanggaran-pelanggaran oleh perusahaan pertambangan, pertanian atau penebangan kayu, misalnya, atau oleh para pejabat yang korup.²⁴⁴ Menyelesaikan perselisihan dengan cara semacam ini menguntungkan semua anggota masyarakat, namun juga sekaligus memberdayakan masyarakat untuk “mengetahui, menggunakan, dan membentuk hukum” dengan cara yang melindunginya dari eksploitasi di masa depan.²⁴⁵

Kampanye dan advokasi juga memiliki peran. Ombudsman, organisasi konsumen, dan mekanisme pengaduan lainnya dapat mengubah wawasan

“ Kami menggunakan bukti tak tertandingi dari orang-orang yang kami bantu untuk mencoba dan memperbaiki penyebab utama masalah masyarakat ”

dari semula hanya dilihat sebagai kasus per kasus menjadi perbaikan secara struktural.²⁴⁶ Di Inggris, layanan Citizens Advice dapat mengidentifikasi kecenderungan yang ada di masyarakat melalui analisis data jutaan orang yang dibantu olehnya. Layanan tersebut menggunakan “bukti tak tertandingi yang berasal dari orang-orang yang kita bantu untuk mencoba dan memperbaiki penyebab-penyebab yang mendasari timbulnya masalah-masalah yang dialami oleh orang-orang” ini.²⁴⁷ Dalam identifikasi suatu masalah umum – sebagai contoh, ditemukan ketika perusahaan-perusahaan pemberi pinjaman gaji memberikan persyaratan yang tidak adil bagi para pelanggan – organisasi menggunakannya sebagai bukti dalam kampanye untuk reformasi kebijakan.

Pendekatan-pendekatan pencegahan ini tak terelakan akan bersifat multi-sektoral. Kementerian Kehakiman harus bekerja bersama dengan departemen-departemen pemerintah lainnya, menyoroiti bagaimana keadilan dapat membantu untuk mencapai sasaran-sasaran di bidang kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, dan bidang-bidang lainnya, yang sekaligus juga meminimalkan dampak-dampak negatif dari keputusan-keputusan pemerintah terhadap sistem peradilan. Para penyedia keadilan hanya dapat sepenuhnya memainkan peran pencegahan dengan bekerja dalam kemitraan dengan mereka yang menyediakan layanan untuk komunitas, kesehatan, dan layanan lainnya. Komite Aksi Nasional Kanada tentang Akses untuk mendapatkan Keadilan dalam Masalah Sipil dan Keluarga telah menekankan pentingnya “barisan depan” dari sistem peradilan, yang membantu orang-orang mengembangkan “seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan sikap preventif, sebelum masalah-masalah hukum tertentu dihadapi.”²⁴⁸ Sistem semacam itu akan melibatkan berbagai perantara, termasuk kelompok-kelompok perempuan dan komunitas, sekolah dan organisasi pemuda, kelompok agama, saluran bantuan, dan perpustakaan.

Mencegah kekerasan

IPada akhir abad ke-18, ahli hukum Inggris Sir William Blackstone berpendapat bahwa “keadilan preventif berada di atas setiap prinsip, atas alasan, atas kemanusiaan, dan atas kebijakan yang sehat, lebih dipilih dalam segala hal daripada mencapai keadilan dengan cara menghukum.”²⁴⁹

Dua ratus lima puluh tahun kemudian, kita memiliki bukti kuat untuk menunjukkan kebijaksanaan yang termuat dalam pernyataan ini.

Cara tradisional untuk mencegah kekerasan dilakukan melalui pendekatan-pendekatan yang sulit untuk pencegahan, “gagasan bahwa jika nilai sanksi yang dikenakan negara cukup berat, keinginan berbuat jahat akan dipatahkan, setidaknya untuk beberapa.”²⁵⁰ Namun, sejumlah bukti yang kuat menunjukkan bahwa putusan hukuman penjara yang lama hanya memiliki efek jera terbatas.²⁵¹ Pendekatan-pendekatan dengan pemberian hukuman sering terbukti kontra produktif. Strategi-

“ Dengan demikian kita sekarang tahu apa yang tidak berhasil untuk mencegah kekerasan dalam kejahatan, dan kita memiliki dasar bukti yang sangat kuat – terdiri dari lebih dari 100 kajian sistematis – untuk menunjukkan apa yang berhasil. ”

strategi tangguh di atas kejahatan telah secara luas digunakan di Amerika Latin, tetapi strategi-strategi tersebut ternyata malah mengarah pada peningkatan daripada penurunan kejahatan dengan kekerasan, pada penguatan geng-geng yang melakukannya, dan pada krisis yang dialami oleh sistem-sistem penjara yang terlalu terbebani.²⁵²

Sementara kita sekarang tahu apa yang tidak berhasil untuk mencegah kekerasan dalam kejahatan, kita memiliki dasar bukti yang sangat kuat – terdiri dari lebih dari 100 kajian sistematis – untuk menunjukkan apa yang berhasil.²⁵³

Polisi ada – atau seharusnya – berada di garis depan untuk mencegah terjadinya kekerasan dan kejahatan. Dalam beberapa tahun terakhir telah terjadi perubahan global yang mencolok dari semula kepolisian yang bersifat reaktif menuju model-model penyelesaian masalah yang bertujuan untuk menargetkan risiko-risiko di masyarakat yang dilayani polisi. Alih-alih bereaksi terhadap kejahatan setelah ada laporan, data dan bukti lebih digunakan untuk menetapkan sasaran sumber-sumber daya kepolisian ke tempat dimana mereka paling dibutuhkan.²⁵⁴ Sementara putusan hukuman penjara yang lama merupakan cara penghalang yang buruk untuk mencegah terjadinya kejahatan, pengetahuan bahwa seseorang mungkin akan ditangkap membuat orang menjadi lebih sedikit kemungkinannya untuk melakukan kejahatan atau melakukan tindakan kekerasan.²⁵⁵ Pemolisian yang lebih efektif dan terlihat dapat membantu mencegah calon pembuat onar dan membuat masyarakat lebih aman. Melatih polisi untuk merespon perilaku orang dan memperhitungkan emosi mereka membantu mereka untuk mampu mengelola konflik di tempat dan mengurangi risiko kekerasan.²⁵⁶

Untuk memainkan peran pencegahan sepenuhnya, polisi harus bekerja dalam kemitraan yang erat dengan masyarakat setempat, terutama mereka yang mengalami tingkat kekerasan tertinggi.²⁵⁷ Dengan meningkatkan hubungan-hubungan di antara masyarakat, layanan sosial, polisi, dan jaksa penuntut langkah ini memfokuskan pencegahan terhadap mereka yang melakukan kekerasan terburuk dan sekaligus juga memperkuat kemampuan komunitas itu sendiri untuk dapat mencegah kekerasan.²⁵⁸ Hal ini dapat mengarahkan pada penurunan secara dramatis dalam hal bentuk-bentuk kekerasan terburuk, yang sekaligus juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk bergerak ke arah pola-pola pembangunan yang lebih tangguh.

Bagian-bagian lain dari sistem peradilan dapat memainkan peran pencegahan yang sama pentingnya. Pengadilan untuk penyelesaian masalah “menempatkan para hakim di pusat rehabilitasi,” menangani kecanduan, penyakit mental, dan pendorong lainnya untuk melakukan pelanggaran kembali.²⁶¹ Program-program keadilan restoratif memberikan kepada para pelaku kesempatan untuk memperbaiki kerusakan yang telah disebabkan olehnya. Langkah-langkah ini dapat meningkatkan hasil-hasil bagi para korban dan mengurangi tingkat kejahatan dengan kekerasan.²⁶² Sementara

› Di Ukraina, dalam patroli polisi bekerja sama dengan Kelompok-kelompok Penasihat Warga untuk mengembangkan strategi-strategi pencegahan secara terpadu.²⁵⁹

› Di Lebanon, polisi kota bergeser “dari model penegakan hukum ke kepolisian yang berorientasi pada masyarakat.”²⁶⁰

itu, para korban kekerasan dalam rumah tangga dapat dilindungi dari bahaya di masa depan melalui perintah penahanan, program-program pendukung, dan program-program yang menantang perilaku pasangan mereka.²⁶³

Funtuk anak-anak, pendekatan-pendekatan intervensi awal memberikan dukungan kepada mereka yang memiliki risiko terbesar untuk mengalami tindak kekerasan, penelantaran, perampasan, atau pengalaman buruk lainnya seperti menyaksikan kekerasan.²⁶⁴ Langkah ini mengurangi risiko viktimisasi dan pelanggaran dan memutus pola-pola pelecehan antar generasi, tetapi hanya jika para aktor keadilan bekerja dalam kemitraan dengan layanan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.²⁶⁵ Anak-anak yang berhubungan dengan masalah hukum – sebagai pelanggar, korban atau saksi – juga akan mendapat manfaat dari intervensi awal dan perawatan khusus, yang dapat membantu reintegrasi ke masyarakat dan mencegah trauma yang mungkin memiliki konsekuensi jangka panjang.

Sektor keadilan dapat memberikan kontribusi yang penting bagi strategi-strategi pencegahan multisektoral dengan memperkuat kerangka legislatif untuk mencegah kekerasan. Langkah ini harus mencakup implementasi perlindungan khusus untuk kaum perempuan, anak-anak, dan kelompok-kelompok rentan lainnya.²⁶⁶ Undang-undang yang melarang semua bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak menggarisbawahi bahwa bentuk-bentuk kekerasan ini tidak dapat diterima.²⁶⁷ Namun, undang-undang semacam itu masih jauh dari dapat berlaku secara luas. Sementara 80 persen negara telah memiliki “kerangka kerja legislatif untuk pencegahan kekerasan”, hanya 57 persen yang mengatakan bahwa undang-undang ini sepenuhnya dilaksanakan dan ditegakkan.²⁶⁸

Perubahan-perubahan legislatif dengan target terbukti efektif. Peraturan dan perundang-undangan yang mengurangi ketersediaan senjata dan penggunaan alkohol yang merugikan adalah bagian dari enam strategi “pembelian terbaik” untuk pencegahan kekerasan yang diidentifikasi oleh Organisasi Kesehatan Dunia.²⁶⁹ TPemberlakukan Undang-Undang Pengendalian Senjata Api Afrika Selatan diikuti oleh pengurangan tahunan 14 persen dalam kasus pembunuhan terkait senjata api di lima kota (pembunuhan lainnya turun jauh lebih lambat). Sebuah kajian tentang efektivitas undang-undang ini memperkirakan bahwa 4.585 nyawa dapat diselamatkan selama lima tahun.²⁷⁰ Ketika diberlakukan secara efektif, undang-undang tersebut memiliki dampak signifikan pada tingkat kekerasan.²⁷¹

Seperti halnya dalam bidang peradilan perdata sebagaimana dibahas di atas, peningkatan perlindungan hukum terhadap kekerasan dapat berjalan paling efektif ketika upaya tersebut berjalan seiring dengan advokasi yang menantang norma-norma yang mendukung perilaku kekerasan.²⁷² Undang-undang sering kalidisahkan sebagai hasil dari advokasi. Implementasinya dapat bertindak sebagai pengarah fokus untuk kampanye lebih lanjut, menciptakan siklus yang baik antara aktivisme dan

perlindungan hukum. Munculnya gerakan-gerakan baru dengan kehadiran jalur media online terutama, seperti kampanye #MeToo melawan pelecehan seksual dan pemerkosaan, berpotensi menambah dorongan lebih lanjut pada siklus-siklus semacam itu.

Mencegah konflik dan ketidakstabilan

Keadilan memainkan peran yang tidak tergantikan dalam melindungi masyarakat dari rasa tidak aman dan konflik.

Menurut Pathways for Peace, laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Bank Dunia tentang pencegahan, sebuah sistem keadilan “dapat menyelesaikan perselisihan secara damai, memastikan akuntabilitas kekuasaan, mendorong penghormatan terhadap hak asasi manusia, memerangi korupsi... dan memastikan checks and balances.”²⁷³

Namun, laporan itu juga memperingatkan bahwa, “Kerusakan sistem peradilan dan supremasi hukum pada umumnya dapat memperparah ketidakpuasan yang memungkinkan untuk dimobilisasi menjadi konflik, dan menciptakan insentif untuk perilaku kekerasan.”²⁷⁴

Pencegahan yang efektif jelas sangat penting bagi negara-negara yang terkena dampak konflik, terutama bagi rakyat yang hidup dalam kondisi ketidakadilan yang ekstrem. Tetapi dengan meningkatnya kebutuhan akses keadilan saat terjadi perubahan sosial yang cepat, masyarakat yang tampaknya stabil bahkan akan berubah menjadi rentan jika sistem peradilan gagal merespons aspirasi warga.

Agar sistem peradilan dapat memainkan peran pencegahan, mereka harus memenuhi kriteria dasar berupa independensi dan proses yang adil, baik di atas kertas maupun dalam praktik. Hakim harus dapat memutuskan kasus-kasus secara bebas dari campur tangan pihak luar. Kemandirian jaksa juga sangat penting.²⁷⁵ Proses yang adil dan penghormatan terhadap hak-hak prosedural merupakan prasyarat untuk terselenggaranya peradilan yang adil. Jika sistem-sistem peradilan tidak dianggap adil, mereka tidak akan dapat memenuhi fungsi inti mereka untuk mempromosikan penyelesaian sengketa dan konflik secara damai.

Di negara-negara di mana telah terjadi kerusakan kelembagaan secara menyeluruh, fungsi-fungsi keadilan inti perlu untuk dibangun.²⁷⁶ Hal ini memberi peluang bagi negara – di mana alih-alih meniru sistem lama yang telah gagal, mereka dapat membangun sistem baru yang lebih responsif yang di jantungnya terdapat kebutuhan keadilan rakyat.

Rekonstruksi dan reformasi sistem peradilan harus dimulai dari pemahaman tentang apa yang sudah dilakukan masyarakat untuk menyelesaikan masalah keadilan mereka.²⁷⁸ Bahkan komunitas yang paling terisolasi dan kurang beruntung pun memiliki strategi-strategi untuk mengurangi risiko konflik. Dalam situasi-situasi di mana sistem negara tidak ada, rakyat dipaksa untuk berjuang sendiri dan beralih ke mekanisme

› Dewan Kemitraan Polisi Lokal Sierra Leone memiliki anggota dari kalangan polisi dan sipil. Selain memainkan peran penting dalam pencegahan ketika suatu konflik di tingkat lokal mengancam akan memicu kekerasan berskala besar, mereka juga menyusun strategi-strategi pencegahan jangka panjang dengan mengidentifikasi titik-titik sumber kejahatan untuk mendapatkan perhatian yang lebih besar dari pihak kepolisian.²⁷⁷

sosial baik yang lama, baru atau yang diciptakan kembali untuk mengelola konflik. Hal ini bisa berhasil atau malah bermasalah, tetapi keberadaannya tidak boleh diabaikan saat melakukan rekonstruksi sistem peradilan negara.

Sistem peradilan dapat secara langsung menangani risiko-risiko di wilayah-wilayah persaingan seperti tanah, sumber daya alam, pemberian layanan, dan akses ke “tuas kuasa” masyarakat. Undang-undang yang mencakup hak guna tanah misalnya, menyediakan kerangka kerja yang dapat mengurangi ketidakpuasan dan memajukan hubungan-hubungan damai di antara masyarakat, tetapi hanya jika UU tersebut disetujui melalui proses yang inklusif. Mekanisme penyelesaian perselisihan masyarakat nantinya dapat membantu mengurangi ketegangan-ketegangan di antara kelompok-kelompok yang bersaing dalam penggunaan tanah, atau untuk melindungi hak-hak masyarakat dalam menghadapi kekuatan kepentingan-kepentingan komersial. Standar hak asasi manusia juga memiliki peran penting. Asas di mana persetujuan harus bebas, dilakukan sebelumnya dan harus dimaklumkan, telah membantu melindungi hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam.²⁸⁰ Kemitraan internasional dapat mendukung upaya-upaya nasional untuk memperkuat perlindungan hukum. Di Filipina, misalnya, Prakarsa Transparansi Industri Ekstraktif telah mendukung kontrak di sektor sumber daya alam yang dapat dibaca mesin dan dapat ditelusuri.²⁸¹

Mengingat kapasitas yang rendah di area yang dipengaruhi konflik, reformasi akan lebih bisa berkelanjutan jika dilakukan secara inkremental. Seperti yang dicatat dalam Laporan Pembangunan Dunia tahun 2011, “Ketika tingkat kepercayaan rendah, orang tidak akan percaya bahwa rencana-rencana besar untuk reformasi akan berhasil.”²⁸³ Laporan tersebut merekomendasikan bahwa reformasi keadilan harus dimulai dengan memperkuat fungsi-fungsi dasar, tetapi mereka harus melakukannya dengan cara-cara sedemikian rupa sehingga “melampaui reformasi di atas kertas dan menjangkau komunitas lokal.”²⁸⁴ Pendekatan inkremental tidak perlu mencoba untuk membuat kemajuan di semua bidang pada saat yang bersamaan, tetapi harus memastikan bahwa seiring dengan berjalannya waktu semua faktor yang relevan akan tercakup.²⁸⁵ Prioritas harus ditetapkan berdasarkan pada pemahaman tentang kebutuhan hukum dari berbagai kelompok orang yang berbeda.

Langkah pertama dapat berupa upaya untuk menjamin terselenggaranya standar-standar layanan minimum, suatu pendekatan yang telah digunakan dalam sektor kesehatan dan pendidikan. Standar layanan minimum ini menegaskan apa yang dapat diharapkan oleh pengguna, dan akan sangat membantu dalam membangun kepercayaan dan dukungan publik dengan menunjukkan kemampuan yang semakin besar dalam memenuhi kebutuhan rakyat. Di Afghanistan, paket standar layanan minimum telah dikembangkan untuk penyediaan layanan sosial dasar yang dibutuhkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam perekonomian.²⁸⁶ Pendekatan “piagam warga” dalam sektor keadilan akan berfokus pada para penyedia layanan di garis depan seperti polisi dan pengadilan tingkat bawah.

› Peace Huts Liberia, yang didirikan sebagai forum bagi kaum perempuan untuk membahas pengalaman-pengalaman mereka tentang perang saudara, telah berevolusi untuk memajukan pembangunan sosial ekonomi di antara para anggotanya dan untuk melakukan kampanye advokasi, yang salah satu keberhasilannya antara lain adalah menyingkirkan para politisi korup dari jabatannya.²⁷⁹

› Kantor Ombudsman Peru merupakan lembaga mediasi yang telah mengelola konflik-konflik sumber daya alam dan memberdayakan warga negara untuk mendesak dilaksanakannya reformasi yang lebih luas.²⁸²

Pendekatan ini dapat membantu mendorong tersedianya standar-standar yang konsisten di seluruh ketentuan peradilan formal dan informal.

Seperti halnya di wilayah peradilan perdata dan pencegahan kekerasan, advokasi memainkan peran penting. Studi empiris menemukan korelasi yang kuat antara “masyarakat sipil yang kuat dan otonom dengan indikator-indikator hak asasi manusia yang positif.”²⁸⁷ Kampanye tanpa kekerasan, seperti yang dilakukan oleh Martin Luther King dan membuatnya terkenal, sangat efektif dalam mengatasi akar penyebab konflik.²⁸⁸ Kampanye-kampanye tersebut terbukti dua kali lebih besar kemungkinannya untuk berhasil daripada perlawanan dengan kekerasan.²⁸⁹ Sistem peradilan dapat melindungi ruang masyarakat sipil dengan mendorong dihormatinya hak-hak untuk berkumpul dan kebebasan berbicara.²⁹⁰ Para pemimpin politik – termasuk mereka yang berada di dalam sistem peradilan – memiliki tanggung jawab untuk memoderasi retorika mereka, menghindari penggunaan ucapan yang dapat memancing kekerasan dan mendorong tindakan-tindakan yang merupakan langkah afirmatif bagi toleransi dan inklusi.

Organisasi-organisasi advokasi akar rumput seperti Madres de la Plaza de Mayo di Argentina, Vicaria de la Solidaridad di Chile, dan Centre for Human Rights Legal Action di Guatemala telah secara aktif berkampanye untuk perdamaian di masyarakat mereka.²⁹¹

Mempromosikan inklusi dan melindungi hak-hak

Mempromosikan hak dan inklusi adalah pesan inti dari laporan ini. Akses terhadap keadilan itu sendiri merupakan hak asasi manusia, tetapi keadilan juga sangat penting untuk melindungi hak-hak lainnya. Pendekatan keadilan berbasis hak menempatkan rakyat beserta masalah keadilan dan aspirasi mereka sebagai pusat dari upaya-upaya reformasi.

Pesan-pesan ini merupakan poin-poin yang digarisbawahi ketika kita berpikir tentang peran keadilan dalam pencegahan. Pencegahan yang bertujuan untuk melindungi hak dan mempromosikan inklusi dapat berfokus pada kebutuhan-kebutuhan mereka yang memiliki banyak masalah keadilan, untuk memutus siklus di mana suatu masalah akan mengarah ke lebih banyak masalah lainnya. Hal ini dapat membangun kembali hubungan di antara polisi dan para aktor keadilan lainnya serta masyarakat, terutama mereka yang paling terkena dampak kekerasan. Dan hal ini dapat mempromosikan pendekatan-pendekatan inklusif untuk pencegahan konflik, mengakui dan melibatkan orang-orang yang selama ini telah dikecualikan dari layanan, dan menangani keluhan yang berasal dari pengecualian ini.

Sayangnya, dalam banyak kasus lembaga-lembaga peradilan malah melakukan eksklusi dan mengabaikan hak, di mana ini berlawanan dengan upaya pencegahan. Penyelewengan yang dilakukan para aktor keamanan dan peradilan memiliki keterkaitan dengan peningkatan risiko dan/atau keparahan konflik. Penyelewengan juga memicu ekstremisme dengan kekerasan, di mana komunitas-komunitas di beberapa daerah “lebih takut pada pasukan keamanan negara daripada kelompok-kelompok ekstremis.”²⁹²

Dalam melindungi hak dibutuhkan penyediaan ketrampilan, alat, dan pendekatan baru bagi lembaga-lembaga peradilan. Misalnya, rekaman audio atau video dari proses investigasi yang terbukti dapat mengurangi insiden penyiksaan, seperti halnya juga aturan dan prosedur untuk segera melindungi tahanan setelah mereka ditahan.²⁹³ Melatih polisi dalam hal keterampilan wawancara investigasi daripada mengandalkan pengakuan untuk mendapatkan bukti juga akan memperkecil kemungkinan terjadinya penyiksaan.²⁹⁴

Demikian pula penguatan independensi dan imparialitas yudisial akan dapat membangun atau membangun kembali kredibilitas.²⁹⁵ Proses penyaringan aktor peradilan akan membantu dalam membangun kembali kepercayaan kepada lembaga-lembaga, mempromosikan legitimasi dan kemampuan mereka untuk memerangi penyelewengan di masa depan. Reformasi di Kenya di bawah konstitusi negara tahun 2010, misalnya, melibatkan kriteria yang jelas untuk memilih para anggota Komisi Layanan Yudisial, audiensi publik selama proses seleksi, dan ketentuan untuk perwakilan yang berimbang dari perempuan dan semua kelompok etnis Kenya.²⁹⁶

Mekanisme untuk akuntabilitas dan transparansi juga dapat membantu sistem peradilan untuk mencegah, alih-alih memperburuk pelanggaran HAM. Memberikan akses ke data tentang hasil-hasil sistem peradilan kepada para korban, badan-badan kemasyarakatan, dan pihak-pihak masyarakat sipil yang tertarik akan memungkinkan mereka untuk memantau penegakan hukum dan mengungkap penyelewengan.²⁹⁷ Pengawasan lebih baik dari parlemen akan meningkatkan akuntabilitas para aktor keamanan dan keadilan, yang sekaligus juga meningkatkan kesadaran yang dapat mengarah pada perbaikan kerangka legislatif untuk pencegahan pelanggaran HAM.²⁹⁸ Terbukanya sistem untuk pengawasan independen dan publikasi hasil pengawasan tersebut akan mengurangi kemungkinan sistem peradilan itu sendiri menjadi sumber ketidakadilan.²⁹⁹

Akhirnya, sebagaimana dibahas dalam bab 1, mempromosikan hak kunci rakyat dapat menjadi langkah transformatif bagi mereka yang selama ini telah dikecualikan partisipasi penuhnya di masyarakat, politik dan ekonomi. Meskipun mereka yang membutuhkan dukungan jumlahnya besar, namun perubahan di area ini dapat terjadi dengan cepat.

Selama ada kemauan politik, dan dengan bantuan organisasi-organisasi masyarakat sipil dan penempatan teknologi-teknologi baru yang terjangkau, negara dapat membangun sistem yang menawarkan identitas hukum kepada masyarakat, hak atas tanah, akses yang lebih baik ke kontrak, dan dokumentasi lain yang memungkinkan mereka untuk peran penuh mereka dalam masyarakat.³⁰² Pakistan, misalnya, telah meluncurkan sistem identitas biometrik dan melaksanakan pendaftaran terhadap 90 juta orang dalam waktu kurang dari satu dekade.³⁰³ Sistem ini kemudian digunakan sebagai dasar untuk sistem perlindungan sosial terarah yang hanya memberikan sumber daya secara langsung ke penerima manfaat (kebanyakan penerima manfaat adalah ibu-ibu miskin).³⁰⁴ Rwanda dengan

“Strategi pencegahan bergerak melampaui pemadaman kebakaran dan masalah keadilan individu. Mereka menggunakan data untuk menetapkan prioritas, menguji intervensi secara ketat, dan mengevaluasi apakah keadilan telah ditingkatkan untuk populasi sasaran.”

› Di Georgia setelah Revolusi Mawar, dilakukan perekrutan Polisi Patroli baru, yang menghasilkan perbaikan dramatis kepercayaan publik dan peningkatan kesediaan warga untuk melaporkan perilaku korup.³⁰⁰ Negara ini juga membangun “kantor polisi dari kaca” – yang berlaku sebagai simbol transparansi dan sebagai pendekatan praktis untuk menghilangkan sudut-sudut gelap di mana penyelewengan dapat terjadi.³⁰¹

cepat dapat melaksanakan pendaftaran atas sepuluh juta bidang tanah ke dalam catatan pendaftaran tanah baru, mencakup lebih dari tujuh juta pemilik tanah – mayoritas dari mereka adalah kaum perempuan – yang sertifikatnya akan bisa diambil dalam lima tahun ke depan.

Membuat Pergeseran ke Pencegahan

Pergeseran ke arah pencegahan ketidakadilan serupa dengan perubahan fokus dari pemberian obat ke kesehatan masyarakat – dari mengobati penyakit ke meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan.³⁰⁵

Penyelarasan ke arah pencegahan membutuhkan penyesuaian dalam misi, strategi, dan operasi sistem peradilan serta lembaga-lembaga yang ada di dalam sistem tersebut. Daripada hanya mempertimbangkan masalah-masalah keadilan individual, para aktor keadilan harus mencari cara untuk dapat mempengaruhi bagaimana suatu populasi mengalami keadilan dan ketidakadilan, mempelajari cara bagaimana “menyusun strategi di luar pendekatan pemadam kebakaran di kasus-kasus individual.”³⁰⁶ Upaya pencegahan berupaya memahami bagaimana hukum, peraturan, dan kebijakan dapat mengatasi ketidakseimbangan sistemik, mempromosikan inklusi, mengurangi risiko, dan meningkatkan ketahanan.

Langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi hasil-hasil yang diinginkan oleh komunitas, masyarakat, dan oleh sistem peradilan itu sendiri. Untuk komunitas, hasil-hasil pencegahan akan mencakup berkurangnya jumlah atau tingkat keseriusan sengketa, risiko kekerasan yang lebih rendah, dan berkurangnya risiko pelanggaran terhadap hak-hak. Untuk masyarakat, hasilnya akan mencakup penurunan risiko konflik kekerasan, manajemen perselisihan yang lebih damai, pengurangan biaya-biaya transaksi ekonomi, dan peningkatan kepercayaan terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga. Dan untuk sistem peradilan, hasilnya akan mencakup peningkatan kepercayaan bahwa sistem tersebut adil, kerja sama yang lebih produktif dengan sektor-sektor lainnya, dan peningkatan kapasitas untuk mencurahkan sumber-sumber daya yang langka untuk merespons risiko dan penyelewengan yang paling serius.

Strategi-strategi pencegahan yang efektif dimulai dengan suatu hasil yang diinginkan dan “memutar pita ke belakang” untuk menemukan cara-cara untuk dapat mengatasi sekelompok permasalahan.³⁰⁷ Mereka menggunakan data untuk menetapkan prioritas dan menargetkan sumber-sumber daya, dikombinasikan dengan pengujian intervensi-intervensi yang ketat untuk memahami apa yang berhasil dan apa yang tidak berhasil. Dan mereka memantau apa yang didapatkan dan mengevaluasi apa yang didapatkan tersebut untuk memahami apakah akan dapat memenuhi hasil-hasil yang diinginkan. Kajian terhadap bukti tentang pencegahan menunjukkan perlunya mengadopsi tiga strategi menyeluruh.

Meningkatkan kepercayaan terhadap sistem peradilan

Sistem peradilan kemungkinan besar dapat memainkan peran preventif ketika rakyat memiliki harapan sewajarnya bahwa hak-hak mereka akan dilindungi, masalah-masalah mereka akan diselesaikan secara efektif, bahwa perselisihan-perselisihan akan dikelola secara damai, dan bahwa mereka akan dilindungi dari penyalahgunaan kekuasaan.³⁰⁸ Ketika sistem peradilan menawarkan kepastian dan keadilan, sistem tersebut memiliki kerangka kerja untuk terciptanya interaksi positif di antara rakyat, dan di antara rakyat dengan bisnis dan negara.³⁰⁹

Laporan ini menekankan perlunya berinvestasi dalam sistem peradilan yang bekerja untuk rakyat dan yang memungkinkan mereka untuk dapat menyelesaikan masalah-masalah keadilan mereka. Meningkatkan kepercayaan terhadap sistem-sistem peradilan membutuhkan pengembangan prosedur yang jelas dan transparan, mendukung independensi hakim dan jaksa penuntut, memberantas korupsi, dan menjangkau kelompok-kelompok yang terpinggirkan dari sistem peradilan.

Sistem peradilan inklusif membutuhkan perkuatan kerjasama di antara para aktor peradilan di garis depan dan masyarakat, dengan tujuan memberi peralatan bagi komunitas untuk mampu mencegah terjadinya ketidakadilan. Organisasi-organisasi masyarakat sipil memiliki peran yang penting membantu membangun kepercayaan terhadap sistem-sistem peradilan, dengan membawa keadilan lebih dekat kepada rakyat dan memastikan bahwa kebutuhan rakyat tetap berada di garis depan reformasi.

Mengatasi akar penyebab ketidakadilan

Sebagaimana ditunjukkan dalam bab ini, sistem peradilan memiliki potensi yang belum dimanfaatkan untuk mengatasi ketidakadilan sistemik dan struktural dengan cara-cara yang dapat mengurangi jumlah masalah keadilan.

Dengan menawarkan akses ke berbagai “hak kunci” seperti identitas hukum universal dan akses untuk mendapatkan dokumen, pemerintah memungkinkan partisipasi penuh dalam masyarakat, politik, dan ekonomi, sekaligus melindungi kelompok-kelompok yang terpinggirkan dari pelanggaran atas hak-hak mereka. Penggunaan teknologi secara lebih baik dapat membuat orang lebih mudah menyusun dan merekam perjanjian-perjanjian, melindungi mereka dari perselisihan-perselisihan di masa depan.³¹⁰

Pencegahan yang efektif juga menuntut lembaga-lembaga peradilan untuk memperketat fokus mereka pada populasi yang rentan, memutus siklus kekerasan dan bentuk-bentuk ketidakadilan lainnya. Bab ini telah menggarisbawahi sifat multi-sektoral dari pencegahan, dengan para aktor peradilan bekerja sama dengan sektor-sektor lainnya untuk melakukan intervensi lebih awal, dan dengan cara-cara yang mengatasi penyebabnya daripada gejalanya. Hal ini juga menyoroti potensi pembela keadilan akar rumput untuk mengatasi ketidakadilan struktural, memberdayakan masyarakat yang rentan untuk memanfaatkan hukum secara strategis.

Menggunakan hukum untuk mengurangi risiko

Akhirnya, hukum dapat digunakan secara terarah untuk mengatasi risiko bagi komunitas dan masyarakat.

Penguatan kerangka kerja legislatif akan menjadi bagian penting dari pendekatan multi-sektoral untuk pencegahan kekerasan. Undang-undang secara langsung melindungi rakyat dari kekerasan, tetapi juga dapat memiliki dampak yang lebih luas. Misalnya, sebuah penelitian di lebih dari 80 negara menemukan bahwa remaja pria 69 persen lebih kecil kemungkinannya untuk berkelahi di sekolah jika mereka tinggal di negara yang melarang hukuman fisik.³¹¹ Bab ini juga menyoroti dampak positif pencegahan dari hukum dan peraturan yang mengurangi ketersediaan senjata dan penggunaan alkohol yang merugikan.

Hukum dan peraturan juga dapat digunakan untuk memperkecil kemungkinan timbulnya perselisihan, atau untuk mengatasi keluhan yang dapat memicu konflik. Misalnya, jika orang menghadapi masalah penggusuran biasa, sebagian solusinya ada di tangan sistem peradilan. Hal yang sama berlaku jika ada ketegangan yang meningkat di seputar penggunaan sumber-sumber daya alam. Dan apabila penahanan, denda, dan hukuman lainnya alih-alih melindungi masyarakat dari bahaya malah meningkatkan risiko, maka sistem peradilan sendiri perlu mengubah kebijakan mereka.³¹²

Menanggapi pelanggaran massal hak asasi manusia

Keadilan transisi dan transisi keadilan

Keadilan transisional mengacu pada bagaimana masyarakat merespons pelanggaran serius dan masif terhadap HAM.³¹³ Ini digunakan baik untuk memulihkan pelanggaran massal maupun untuk mengidentifikasi cara mengatasi akar penyebab dan pendorong struktural kekerasan dan penindasan.

Kelompok Kerja tentang Keadilan Transisi dari Satuan Tugas menghimpun para ahli dan organisasi yang bekerja di bidang keadilan transisi untuk menganalisis bagaimana keadilan transisional membantu membangun masyarakat yang damai, adil dan inklusif.

Sementara keadilan transisional mencakup pertanggungjawaban pidana, baik secara lokal maupun melalui lembaga-lembaga seperti Mahkamah Pidana Internasional, keadilan transisional ditopang oleh **pemahaman yang lebih luas** tentang kebutuhan para korban dan masyarakat. Mekanisme keadilan transisional mencakup inisiatif pencarian kebenaran, rekonsiliasi komunitas, program reparasi, reformasi kelembagaan dan hukum, dan penuntutan pidana.

Proses-proses ini telah digunakan di beragam negara seperti Argentina, Bosnia dan Herzegovina, Rwanda, Sierra Leone, Afrika Selatan, Timor-Leste, dan Tunisia. Dengan memberikan kepada para korban perasaan bahwa mereka telah diperlakukan secara adil, dan dengan menyadarkan para pelaku atas ketidak-adilan/kerugian yang mereka timbulkan, keadilan transisional telah membantu memperkuat perdamaian di masyarakat di mana konflik telah pecah atau memanas selama beberapa dekade.

Pelanggaran hak asasi manusia bukan hanya akibat dari konflik dan penindasan dengan kekerasan – pelanggaran-pelanggaran ini juga dapat meningkatkan kemungkinan timbulnya atau terulangnya kekerasan dan penindasan. Karena itu, **mencegah pengulangan** adalah tujuan utama dari setiap proses keadilan transisional.

Keadilan transisional berkontribusi pada pencegahan bentuk-bentuk ketidakadilan lainnya dan membantu memberikan akses terhadap keadilan bagi semua. Hal ini meningkatkan kepercayaan pada pemerintah dan masyarakat, mengurangi kemauan lembaga pemerintah untuk menggunakan pelanggaran hak asasi manusia sebagai alat politik, mengurangi keluhan, menangani diskriminasi dan pengucilan struktural, serta memutus siklus kekerasan dan ketidakadilan.

Beberapa kajian telah menghubungkan mekanisme keadilan transisi dengan pengurangan pelanggaran hak asasi manusia, penindasan, kekerasan pidana, dan kemungkinan terulangnya perang saudara.³¹⁴

Mengatasi akar penyebab pelanggaran hak asasi manusia juga memberikan landasan bagi pembangunan ekonomi dan sosial, mengurangi ketidaksetaraan dan diskriminasi, memberantas korupsi, dan membongkar penyebab struktural kekerasan dalam masyarakat.³¹⁵ Mengatasi pelanggaran terhadap perempuan, misalnya, dapat menjadi bagian dari upaya yang lebih luas untuk menghilangkan sikap dan perilaku yang adil secara gender. Upaya untuk menjangkau yang paling rentan dapat melibatkan mereka tidak hanya dalam proses peradilan tetapi juga dalam upaya pembangunan secara keseluruhan.

Jika keadilan transisional ingin berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan, maka harus **spesifik-konteks**. Para korban, masyarakat yang terkena dampak, pembela hak asasi manusia dan keadilan, pemuda, dan masyarakat sipil - termasuk kelompok-kelompok agama, pendidikan, perempuan, dan budaya - memerlukan ruang politik dan dukungan teknis untuk melakukan advokasi, membentuk, dan berpartisipasi secara bermakna dalam proses keadilan transisi.

Pelajaran untuk reformasi sektor keadilan

Banyak yang bisa dipelajari dari keadilan transisi. Pelajaran utama adalah:

1. Keadilan transisional berpusat pada rakyat.

Keadilan transisional menempatkan korban, bukan penyedia layanan, sebagai jantungnya. Kebutuhan para korban menentukan bagaimana pencarian kebenaran dilakukan, bagaimana dan oleh siapa pelaku dibawa ke pengadilan, jenis dan ukuran rehabilitasi, dan bagaimana langkah-langkah dapat dikembangkan untuk mencegah pelanggaran di masa depan. Kebutuhan dari kelompok masyarakat yang paling rentan adalah mendapatkan prioritas, dimulai dengan perempuan, yang sering mengalami pelanggaran terburuk jika terjadi konflik. Media dan organisasi masyarakat sipil diminta untuk membantu mewakili pendapat warga dalam proses reformasi dan untuk membangun dan menyebarkan narasi perubahan.

2. Pencegahan adalah inti dari keadilan transisional.

Hakim, pengadilan, atau penjara yang tersedia, tidak akan pernah cukup untuk membawa sejumlah besar pelaku ke pengadilan, sebagaimana yang sering diperlukan setelah terjadi pelanggaran HAM berat. Sebaliknya, keadilan transisional menggunakan sumber daya secara efisien dengan menggunakan pendekatan penghukuman bagi pelaku pelanggaran terburuk saja. Ini akan membawa pada mekanisme reparasi alternatif untuk sebagian besar dari mereka yang terlibat. Menanyakan kepada para korban, reparasi seperti apa yang mereka inginkan merupakan inti dari pendekatan semacam itu. Seringkali, para korban, yang harus terus hidup dengan mereka yang melakukan pelanggaran, lebih memilih rekonsiliasi daripada hukuman berat. Rekonsiliasi membantu korban mengakhiri atau menutup kasus dan pelaku berintegrasi kembali ke komunitas mereka, memperkuat stabilitas dan mengurangi risiko pengulangan.

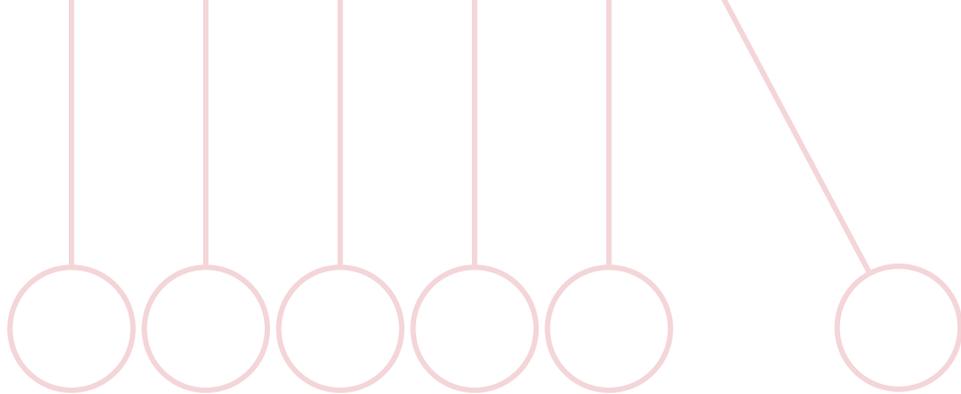
3. Supaya berhasil, keadilan transisi harus bersifat multidisiplin.³¹⁶

Program-program bertujuan untuk mengubah polisi dan militer menjadi organ yang melayani, alih-alih menindas warga. Mereka mengintegrasikan kembali mantan kombatan/pejuang ke dalam masyarakat, dan membantu para korban untuk membangun kembali kehidupan mereka secara sosial dan ekonomi. Mereka mereformasi hukum dan institusi peradilan sesuai dengan standar HAM internasional.³¹⁷ Dan mereka terlibat dengan sistem keadilan informal, sistem keadilan komunitas yang seringkali lebih dekat dan lebih relevan bagi warga daripada lembaga peradilan formal.



Pemandu Keadilan

Satuan Tugas telah mengembangkan agenda aksi yang akan membantu mencapai target-target TPB yang menjanjikan keadilan bagi semua.



Bab 5

Memimpin Perubahan

Pergeseran ke arah keadilan bagi semua membutuhkan fokus baru untuk memberikan hasil yang nyata bagi rakyat.

Para reformis di seluruh dunia mulai mengubah sistem peradilan mereka, dan menyediakan bahan pelajaran bagi yang lain.

Meskipun ada sejumlah hambatan untuk berubah, namun juga selalu tersedia banyak peluang. Momentum global sedang tumbuh untuk reformasi keadilan. Para pemimpin keadilan tidak perlu melakukannya sendiri.

Empat tuas yang membangun momentum untuk perubahan: menjalankan reformasi berdasarkan pada data dan bukti, mendorong inovasi, mengembangkan strategi pembiayaan yang lebih cerdas, dan meningkatkan keragaman sistem peradilan.

Menuju Keadilan bagi Semua

Visi Satuan Tugas Keadilan adalah pergeseran dari *keadilan bagi segelintir orang ke keadilan bagi semua*.

Visi tersebut menuntut transformasi besar dalam cara kerja sistem peradilan. Tujuan kita adalah untuk mengubah pengharapan mengenai apa yang dapat dicapai – dan untuk membangun konsensus baru bahwa masyarakat dapat dan harus mewujudkan keadilan bagi semua.

Untuk mencapai tujuan ini, negara-negara harus mengembangkan dan menerapkan strategi-strategi yang membawa layanan keadilan lebih dekat ke rakyat yang paling membutuhkannya.

Mewujudkan keadilan bagi semua akan perlu berlawanan dengan hambatan-hambatan politik yang menghalangi perubahan, dan membangun kepercayaan di antara para pemimpin keadilan bahwa dengan kebijakan dan investasi yang tepat, mereka dapat mewujudkan peningkatan keadilan secara substansial.

Mewujudkan keadilan bagi semua akan perlu berlawanan dengan hambatan-hambatan politik yang menghalangi perubahan, dan membangun kepercayaan di antara para pemimpin keadilan bahwa dengan kebijakan dan investasi yang tepat, mereka dapat mewujudkan peningkatan keadilan secara substansial.

Jalan Menuju Keadilan bagi Semua

Sebagai bagian dari Laporan Pembangunan Dunia tahun 2017, Bank Dunia mengajukan pertanyaan kepada ilmuwan politik Francis Fukuyama mengenai apa yang telah dilakukan negara-negara untuk membangun sistem peradilan yang memungkinkan mereka untuk dapat mewujudkan secara penuh potensi sosial dan ekonomi mereka.

Jawabannya adalah bahwa, “Secara mengejutkan hanya ada sejumlah kecil pekerjaan sistematis yang telah dilakukan untuk melakukan transisi ke supremasi hukum modern.”³¹⁸ Laporan tersebut juga mengutip sebuah sindiran dari mantan Perdana Menteri Inggris Gordon Brown, “Dalam menegakkan supremasi hukum, lima abad pertama selalu yang paling sulit.” Bukti sejarah mendukung hal ini, menunjukkan bahwa diperlukan beberapa dekade untuk membangun lembaga-lembaga peradilan yang efektif.³¹⁹

Tetapi nada dari Laporan Pembangunan Dunia bersifat pragmatis, menunjukkan bahwa yang penting bukanlah lembaga sebagai sesuatu yang abstrak, tetapi bagaimana lembaga-lembaga ini dapat terus meningkatkan kapasitas mereka untuk melahirkan “hasil-hasil yang meningkatkan kehidupan.”³²⁰

Ini sejalan dengan pesan utama dari laporan ini – bahwa reformasi peradilan harus bertujuan untuk memberikan hasil-hasil nyata bagi rakyat. Hal ini juga sesuai dengan data yang kami sajikan mengenai kesenjangan keadilan. Membangun sistem peradilan yang efektif bukanlah suatu proses linier di mana negara bergerak dari buruk menjadi baik. Semua negara memiliki pekerjaan yang harus dilakukan untuk merespons kebutuhan keadilan yang belum terpenuhi.

Model-model perubahan

Di seluruh dunia, sistem-sistem peradilan sedang menjajaki cara-cara baru untuk mengutamakan rakyat dan kebutuhannya. Upaya-upaya tersebut menyediakan model-model bagi para reformis di tempat lain.

Access to Justice Centers di Argentina memenuhi kebutuhan keadilan bagi komunitas yang paling membutuhkannya.³²¹ Menjangkau hampir setengah juta orang per tahun, pendekatan yang mereka lakukan bersifat multidisiplin, yang melibatkan para pengacara, pekerja sosial, dan psikolog yang bekerja di bawah satu atap. “Sering kali orang datang kepada kami dengan satu masalah hukum,” demikian penjelasan yang diterima oleh Satuan Tugas dari seorang profesional muda yang bekerja di salah satu pusat keadilan, “tetapi ketika kami berbicara dengan mereka, menjadi jelas bahwa mereka juga memiliki masalah-masalah lain, misalnya masalah terkait dengan tidak memiliki dokumen personal yang diperlukan, atau masalah sosial yang berkaitan dengan perumahan atau uang, atau masalah-masalah psikologis yang timbul dari atau yang memperburuk kesulitan-kesulitan lainnya.”³²²

Di Kanada, sebuah komite aksi menggunakan data survei kebutuhan hukum untuk mengembangkan visi sistem peradilan keluarga dan perdata yang memprioritaskan publik.³²³ Upaya ini menciptakan seperangkat Tujuan Pengembangan Keadilan untuk meningkatkan kapasitas sistem dalam mengatasi dan mencegah timbulnya masalah-masalah hukum sehari-hari, memicu tumbuhnya kerja sama, dan membuat lembaga-lembaga peradilan lebih berperan merepresentasikan masyarakat Kanada. Dewan Hukum Australia juga membuat kajiannya terhadap sistem peradilan dengan berdasarkan pada data.³²⁴ Dewan ini menyerukan agar sumber-sumber daya dialihkan dari kebijakan-kebijakan yang bersifat koersif menuju ke kebijakan-kebijakan yang “membuat sistem peradilan benar-benar adil.”

Pemberdayaan menjadi fokus penting dari sistem peradilan di banyak negara. Strategi nasional Indonesia tentang akses untuk mendapatkan keadilan memberikan pengakuan resmi terhadap paralegal untuk pertama kalinya.³²⁶ Indonesia memiliki hingga 6.000 pembela keadilan di akar rumput yang membantu upaya-upaya untuk memberdayakan masyarakat di tingkat lokal. Para pembela keadilan ini dapat bekerja secara efektif karena mereka memiliki jaringan yang terhubung dengan organisasi-organisasi lokal lain seperti serikat-serikat pekerja dan universitas-universitas, dan karena mereka juga dapat meminta dukungan dari para pengacara ketika diperlukan. Keberhasilan mereka mencerminkan kesediaan paralegal untuk “mencari jalan penyelesaian di mana pun”, mencarinya tidak hanya di pengadilan namun juga ke “lembaga-lembaga administrasi, pemerintah daerah, badan-badan akuntabilitas seperti ombudsman dan komisi-komisi hak asasi manusia, parlemen, lembaga peradilan adat, dan lain-lain.”³²⁷

Pemberdayaan dari bawah pun tetap dapat didukung dari atas. Laporan Pembangunan Dunia tahun 2017 menyoroti meningkatnya independensi para hakim di Amerika Latin. Laporan ini mencatat bagaimana pengadilan telah mengalami perubahan dari “lembaga yang lemah, tergantung, tidak efektif” menjadi aktor independen yang membantu warga negara menggunakan konstitusi untuk melindungi hak-hak mereka.³²⁸ Di India, Mahkamah Agung juga meminta pemerintah untuk bertanggung jawab atas masalah-masalah seperti hak atas pendidikan, polusi lingkungan, non-diskriminasi, dan pekerja anak serta buruh utang.³²⁹

Negara-negara juga membuka sistem peradilan mereka terhadap inovasi. Reformasi yang dijalankan di Bahama telah membuat teknologi lebih banyak lagi digunakan untuk merampingkan proses, yang meningkatkan penyelesaian kasus-kasus pidana serius hingga 39 persen.³³⁰ IDi Dubai, prosedur baru untuk klaim-klaim kecil telah memberikan akses lebih cepat dan lebih murah ke pengadilan untuk kasus-kasus yang kurang serius, menyelesaikan sebagian besar perkara dalam waktu empat minggu, dan membuat pengadilan-pengadilan utama dapat fokus pada kasus-kasus yang paling sulit.³³¹ Inggris merupakan pemimpin dalam hal inovasi regulasi, dengan Undang-Undang Layanan Hukum yang menciptakan

“ Kita perlu membangun pemahaman bersama mengenai seperti apa akses terhadap keadilan akan terlihat di dalam komunitas kita, dan mengenai seperti apa masyarakat kita akan terlihat sebagai masyarakat yang adil. ”

Dewan Hukum Australia³²⁵



ruang bagi para penyedia layanan alternatif. Dengan begitu, badan-badan hukum sekarang jadi mewakili kepentingan rakyat serta usaha-usaha kecil, seiring dengan kemampuan mereka mengakses layanan hukum.³³²

Terakhir, beberapa negara telah melakukan langkah-langkah memperkuat kerangka hukum untuk secara langsung meningkatkan keadilan bagi penduduk mereka. Pada 1979, hanya Swedia yang melarang hukuman fisik untuk anak-anak.³³³ Sekarang, lebih dari 50 negara telah menetapkan larangan yang sama secara komprehensif.³³⁴ Telah terjadi pertumbuhan serupa dalam pelarangan kekerasan terhadap perempuan. Sejumlah 144 negara saat ini memiliki undang-undang yang menentang kekerasan dalam rumah tangga.³³⁵ Sebagaimana dibahas sebelumnya, jumlah orang yang memiliki identitas legalitas telah meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir, sementara negara-negara seperti Rwanda telah membuat kemajuan cepat dalam menyediakan sertifikat tanah bagi kaum laki-laki dan perempuan, yang berkontribusi pada pemberdayaan hukum bagi kaum perempuan.³³⁶

Kita juga bisa mengambil pelajaran dari sektor-sektor lain. Di masa lalu, pendidikan menjadi alat pelestarian kaum elite, tetapi di masa sekarang negara-negara telah menyasar penyediaan sekolah yang berkualitas bagi semua dan menawarkan peluang-peluang untuk belajar seumur hidup. Bidang kesehatan juga telah mengalami transformasi serupa. Pada tahun 1978, Deklarasi Alma-Ata menyerukan agar layanan perawatan kesehatan dapat disediakan “sedekat mungkin dengan tempat orang tinggal dan bekerja.”³³⁷ Pada tahun-tahun berikutnya, harapan hidup telah meningkat tajam di semua wilayah dunia.

Perjuangan panjang untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan kaum perempuan dan anak perempuan memberikan pelajaran berharga, menunjukkan pentingnya membangun norma-norma baru dan mendobrak pola-pola diskriminasi. Dalam kampanyenya gerakan kaum perempuan menyorotkan tuntutan akan hak-hak mereka, dan secara meyakinkan mereka juga telah menunjukkan manfaat-manfaat ekonomi dan sosial yang dihasilkan dari tersedianya akses yang setara bagi kaum perempuan untuk mendapatkan peluang-peluang.³³⁸ Bukti dan argumen di bidang keadilan merupakan gabungan dari unsur-unsur normatif dan praktek yang serupa.

Hambatan dan peluang untuk reformasi

Dalam memetakan jalan menuju keadilan, pemahaman tentang hambatan-hambatan dan peluang-peluang politik berkontribusi dalam merancang strategi-strategi reformasi yang lebih baik.

Sistem hukum dan keadilan menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah saat terkait dengan kekuasaan politik, sosial, dan ekonomi. Para elite mendapat manfaat dari akses yang tidak proporsional ke pengadilan maupun pengacara, dan ini melemahkan motivasi mereka untuk mendukung reformasi. Mereka mungkin enggan menangani

situasi ketidakadilan yang menguntungkan bagi mereka, seperti korupsi, kekebalan hukum, ataupun penolakan atas hak-hak yang dimiliki oleh mereka yang kurang beruntung. Ini berimplikasi pada kurangnya kepercayaan pada sistem. Para pemimpin bisnis di lebih dari 100 negara mengatakan bahwa sistem peradilan di negara mereka tidak terlepas dari pengaruh pemerintah, individu-individu yang berkuasa, atau bisnis.³³⁹

Perlawanan terhadap perubahan juga bisa datang dari dalam sistem peradilan sendiri. Praktisi hukum sering mendapat manfaat dari status quo. Mereka bisa saja merasa terancam oleh reformasi yang membuka sistem peradilan bagi para pemain baru, atau oleh strategi-strategi yang mengarahkan investasi ke pendekatan-pendekatan yang lebih efektif.³⁴⁰ Korupsi menggerogoti dukungan publik untuk meningkatkan pendanaan lembaga-lembaga peradilan. Secara global, sepertiga orang percaya bahwa polisi di negara mereka korup dan 30 persen berpikir bahwa para hakim dan pejabat pengadilan juga korup.³⁴¹

Kendala lain terletak pada fragmentasi lembaga-lembaga peradilan. Kesenjangan keadilan tidak dapat dijembatani hanya oleh satu organisasi atau kementerian, sementara ada banyak solusi untuk ketidakadilan yang dapat ditemukan di luar sistem peradilan formal. Tetapi hal ini menciptakan masalah tentang siapa yang akan memegang kepemimpinan dalam reformasi. Menteri Kehakiman, Jaksa Agung, dan pemimpin peradilan lainnya mungkin memiliki kekuasaan terbatas untuk mendorong arah baru. Mereka juga sering kali harus menghadapi para kolega menteri yang lebih kuat ketika berargumentasi untuk peningkatan alokasi anggaran.

Namun selain ada hambatan-hambatan, selalu juga ada peluang-peluang untuk perubahan. Ketika ekonomi tumbuh cepat, banyak pemerintah memahami bahwa penguatan sistem peradilan sangat penting untuk mendukung tahap perkembangan selanjutnya.³⁴³ Ada pula negara yang memahami adanya risiko terhadap stabilitas politik akibat ketidakadilan, dan melihat sistem peradilan sebagai cara untuk mengatasi keluhan-keluhan. Pemerintah-pemerintah juga menjadi semakin sadar akan manfaat melakukan investasi di bidang keadilan, melalui inisiatif seperti yang dimiliki OECD berupa argumentasi bagi bisnis untuk berinvestasi di sektor keadilan.³⁴⁴

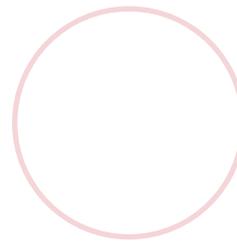
Bahkan ketika suatu pemerintah memiliki sedikit keinginan untuk menjalankan reformasi peradilan secara ambisius, akan selalu ada individu-individu di dalam sistem yang memperjuangkan untuk perubahan.³⁴⁵

Lembaga-lembaga peradilan secara historis memainkan peran transformatif di banyak masyarakat. Para pengacara juga merupakan pendorong kuat perubahan sosial, terutama ketika bekerja dengan para pembela keadilan di akar rumput dan kelompok-kelompok masyarakat sipil lainnya. Masyarakat sipil memainkan peran dalam kampanye, dan melakukan tekanan bagi pemerintah untuk mengambil tindakan. Tetapi juga menyediakan giat kepemimpinan – dengan memelopori model dan pendekatan baru yang menunjukkan bagaimana rakyat dapat berperan serta dalam mengatasi kesenjangan keadilan.

“ Bekerja di lingkungan yang kompleks dengan banyak pemangku kepentingan, banyak kepentingan pribadi, dan banyak tekanan waktu, dan selalu ada kritik dan penentang. ”

Banyak Menteri Kehakiman yang merasa sendirian dalam pekerjaan mereka.³⁴²

> Di Kolombia, Kamar Dagang Bogotá bekerja untuk membangun masyarakat yang lebih damai. Mereka membantu mengintegrasikan kembali mantan kombatan dan bekerja sama dengan Kepolisian Nasional untuk mencoba alat baru, misalnya mediasi polisi. Ini juga melatih sektor usaha untuk mengambil peran aktif dalam proses perdamaian.³⁴⁶



Sektor swasta di banyak negara mendapatkan insentif untuk memobilisasi perbaikan-perbaikan di lingkungan hukum. Roda usaha bergantung pada supremasi hukum dan lembaga-lembaga peradilan yang responsif. Perusahaan-perusahaan yang lebih besar mungkin tertarik dengan kebutuhan keadilan para karyawan dan pelanggan mereka, mengakui perlunya membangun kepercayaan di pasar, serta potensi perluasan inklusi hukum agar dapat menciptakan peluang-peluang bisnis baru. Bisnis-bisnis individual hanya memiliki sedikit insentif untuk mengatasi ketidakadilan sistemik secara sendirian, tetapi Kamar Dagang dan badan-badan perwakilan lainnya dapat melakukan perlawanan terhadap korupsi dan impunitas ketika hal tersebut mengancam pasar atau menciptakan risiko-risiko ketidakstabilan politik yang tidak dapat diterima.

Organisasi-organisasi sektor swasta juga dapat memberikan respons langsung terhadap kekerasan. Di kota Ciudad Juárez di Meksiko, meningkatnya tingkat kekerasan menyebabkan ribuan usaha tutup.³⁴⁷ Sebagai respons terhadap hal itu, sebuah organisasi nirlaba dibentuk dengan pembiayaan yang berasal dari tambahan pajak sukarela sebesar 5 persen atas pajak penghasilan perusahaan, dan diambil dari lebih dari 38.000 pemilik usaha di seluruh negara bagian. Organisasi ini telah bekerja untuk memperkuat pencegahan kejahatan, keamanan, dan keadilan melalui keterlibatan warga. Partisipasi sektor swasta membantu menurunkan tingkat kekerasan, dan pada saat yang sama menciptakan tekanan pada pemerintah dan lembaga-lembaga peradilan lokal untuk mengambil tindakan.

Momentum global untuk keadilan

Agenda 2030 menciptakan momentum baru untuk keadilan yang membantu para reformator nasional. TPB adalah platform bagi negara-negara untuk berbagi pengalaman reformasi keadilan dan untuk mengeksplorasi model-model inovatif yang dibahas di dalam laporan ini.

Kerangka kerja hak asasi manusia internasional juga mendukung upaya-upaya reformasi.³⁴⁸ Pendekatan berbasis hak mendorong pemerintah-pemerintah untuk mencapai tersedianya hak dasar, misalnya dengan memperkuat jaminan konstitusional yang melindungi independensi peradilan.³⁴⁹ Hal ini juga dapat membantu mereka yang paling rentan. Sebagai contoh, Kajian Berkala Universal dapat digunakan untuk memantau apakah sistem peradilan melindungi hak-hak anak, dengan demikian meningkatkan standar-standar untuk anak-anak yang berkonflik dengan hukum.³⁵⁰

Para pemimpin keadilan semakin banyak mengadakan pertemuan di tingkat internasional. Pada tahun 2019, 22 menteri dan wakilnya menandatangani Deklarasi Den Haag, membuat komitmen “untuk mengambil langkah-

› Pada tanggal 7 Februari 2019, para menteri dan perwakilan tingkat tinggi dari negara-negara dan organisasi internasional menandatangani Deklarasi Den Haag tentang Kesetaraan Akses Keadilan bagi Semua pada tahun 2030, dan menyoroti peluang-peluang untuk memperkuat dukungan dan komitmen untuk keadilan menjelang Forum Politik Tingkat Tinggi dan SDG Summit pada tahun 2019.

langkah konkret dalam upaya meningkatkan tersedianya akses terhadap keadilan, dan untuk meyakinkan pihak-pihak lainnya agar melakukan hal yang sama.”³⁵¹ Seperti yang telah kita lihat dari sektor-sektor lain seperti kesehatan, para menteri dapat diberdayakan di negara mereka ketika mereka mulai bekerja sama dengan rekan-rekan mereka dari negara lain.

Kemitraan-kemitraan global dan regional mendukung reformasi keadilan. Open Government Partnership memberikan contoh mengenai suatu platform untuk mempercepat upaya-upaya dalam memperkuat layanan keadilan. Platform ini mengundang pemerintah dan masyarakat sipil di 79 negara yang berpartisipasi di OGP untuk membuat dan memenuhi komitmen-komitmen atas keadilan.³⁵² Jaringan-jaringan profesional memainkan peran lintas negara yang semakin berpengaruh, misalnya dengan berbagi pelajaran tentang pemolisian berbasis bukti.

Mungkin yang paling penting adalah meningkatnya tuntutan untuk perubahan dari rakyat di seluruh dunia. “Justice” adalah kata paling populer dalam kamus online Merriam-Webster di tahun 2018, ketika para pengunjung berbondong-bondong mengunjungi situsnya untuk mencari kata tersebut.³⁵³ Banyak masyarakat yang menghadapi gerakan protes atau ketidakstabilan politik serta konflik yang berakar dari eksklusi dan ketidakadilan. Gerakan #MeToo, NiUnaMenos, dan SheDecides adalah beberapa kampanye yang mencerminkan menguatnya kemarahan terhadap tingginya impunitas dalam kasus kekerasan seksual.³⁵⁴ Korupsi telah memotivasi para pegiat di semakin banyak negara untuk turun ke jalan, termasuk yang terbaru di Sudan dan Aljazair.³⁵⁵ Para pegiat kampanye seperti mereka yang terlibat dalam Arab Spring telah membidik penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan oleh polisi dan pasukan keamanan.³⁵⁶ Selain menyingkirkan ketidakadilan, gerakan-gerakan ini membantu menciptakan lingkungan yang mendukung perubahan.

Tuas Reformasi Keadilan

Empat tuas dapat membantu para reformis nasional dalam upaya mencapai keadilan bagi semua.

Menggunakan data dan bukti untuk mengarahkan reformasi

Sepanjang laporan ini, Satuan Tugas telah menekankan pentingnya menggunakan data dan bukti untuk memotivasi dan memandu reformasi.

Meningkatnya kesadaran akan kesenjangan keadilan di setiap negara dan argumen bagi investasi di sektor keadilan telah menciptakan insentif untuk melakukan tindakan. Peningkatan kesadaran ini dapat membantu untuk menyertakan para pemangku kepentingan baru, dan membujuk seorang menteri dengan tanggung jawab atas tanah atau perumahan, misalnya, bahwa keadilan dapat membantu untuk memberikan hasil-hasil di sektornya. Menteri keuangan dan perencanaan pembangunan

akan terpengaruh oleh usulan-usulan untuk mengalokasikan sumber daya dengan pendekatan yang lebih hemat dan berbasis bukti. Tersedianya akses yang terbuka ke data keadilan memfasilitasi kerja sama antar sektor dan antara aktor-aktor negara dan non-negara.³⁵⁷ Open Government Partnership mencakup keterbukaan data dan pembuatan kebijakan partisipatif di sektor keadilan. Ini menjadi alat untuk mempromosikan reformasi keadilan berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi atau akuntabilitas.³⁵⁸ Data yang terbuka dan independen adalah alat untuk akuntabilitas dan memungkinkan warga untuk mengajukan tuntutan perubahan.

Pembuat kebijakan harus mempertimbangkan untuk melakukan survei secara rutin yang menanyakan kebutuhan keadilan yang ada pada rakyat, baik sebagai survei yang berdiri sendiri ataupun sebagai modul dalam survei yang ada. OECD dan Open Society Justice Initiative telah mengembangkan panduan untuk survei kebutuhan hukum.³⁵⁹ Manual tentang survei viktimisasi tersedia dari UNODC dan Komisi Ekonomi PBB untuk Eropa.³⁶⁰

Untuk mendapatkan bukti mengenai apa yang dapat berjalan dengan baik, cara paling efektif adalah melalui kerja sama antar negara. Campbell Collaboration mengelola sebuah jaringan internasional yang menerbitkan tinjauan sistematis terhadap penelitian peradilan pidana terbaik. Data yang menunjukkan manfaat pemolisian berbasis bukti juga telah dibagikan secara internasional.³⁶¹ Tempat pengumpulan bukti yang serupa dapat dibuat untuk peradilan perdata.

TPB memberikan daya dorong baru untuk kerja sama internasional di bidang data keadilan. Ini semestinya membantu merangsang peningkatan standarisasi di seluruh negara, misalnya mengenai survei-survei kebutuhan hukum. Indikator terpisah untuk akses ke peradilan perdata, yang saat ini sedang dikembangkan oleh sekelompok negara dan organisasi, akan memungkinkan pelaporan yang akurat tentang TPB16.3.

Membuka kekuatan transformatif inovasi

Inovasi bertindak sebagai tuas reformasi dengan membawa para pemain baru ke sektor keadilan.

Dalam laporannya, Kelompok Inovasi yang dibentuk oleh Satuan Tugas menyoroti teknologi dan pendekatan yang menjanjikan untuk penyediaan layanan keadilan yang dapat memenuhi kebutuhan.³⁶² Hal ini termasuk layanan yang memfasilitasi penyelesaian perselisihan, teknologi baru yang mendukung kontrak-kontrak yang ramah pengguna, dan penyedia hukum sektor swasta alternatif yang bertujuan untuk membantu sejumlah besar individu dan bisnis kecil untuk dapat memanfaatkan hukum dengan baik.

Jika negara-negara ingin mendapatkan manfaat dari inovasi keadilan, mereka perlu membuka ruang bagi terjadinya inovasi. Inovasi-inovasi terbaik mengacu pada ide dan perspektif para psikolog, ilmuwan sosial, analis data, desainer, ahli saraf, pekerja sosial, administrator publik dan bisnis, berbagai pelaku sektor swasta, dan – yang paling penting – para

› Portal keadilan terbuka di Argentina membuat data keadilan tersedia untuk umum. Program Justicia 2020 adalah platform daring di mana para warga dapat berperan serta dalam mengembangkan, mengimplementasikan, dan memantau kebijakan-kebijakan keadilan.

pengguna sistem peradilan. Para inovator di sektor publik dan swasta membutuhkan ruang di semua tahapan proses untuk berkolaborasi dan mendukung inovasi, mulai dari meneliti kebutuhan-kebutuhan dan mengembangkan respons, hingga memantau dampaknya.

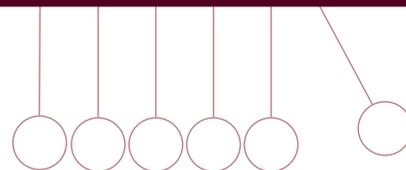
Jaringan internasional dapat mendukung inovasi di tingkat nasional. The HiiL Justice Accelerator membantu para pembuat kebijakan untuk bekerja sama dengan para inovator keadilan terkemuka dunia untuk mengatasi masalah-masalah keadilan yang paling mendesak di suatu negara.³⁶³ Accelerator Labs UNDP yang baru dibentuk dapat diminta untuk memasukkan keadilan sebagai bagian dari misi mereka untuk menemukan cara baru dalam membawa TPB agar mencapai tujuannya.³⁶⁴ Lembaga-lembaga nasional juga menyediakan dukungan struktural bagi para inovator. Banyak pemerintah telah memiliki laboratorium inovasi lintas sektor yang disiapkan untuk menghadapi tantangan-tantangan keadilan.³⁶⁵ Uni Emirat Arab memiliki *Chief Innovation Officer* di Kementerian Kehakiman, dengan pangkat asisten menteri, yang menyediakan suatu model bagi pemerintah yang ingin membawa inovasi sebagai arus utama sistem peradilan mereka.³⁶⁶

Inovasi membutuhkan lingkungan peraturan yang kondusif. Ini bisa diartikan sebagai perlunya mengubah aturan tentang siapa yang dapat memberikan nasihat hukum, memungkinkan masyarakat sipil dan para inovator sektor swasta untuk memainkan peran yang lebih besar. Kementerian Kehakiman juga dapat menetapkan kriteria untuk mengukur efektivitas inovasi, dengan didukung oleh penelitian empiris dan penilaian independen apakah kriteria-kriteria tersebut terpenuhi.

> Kantor Perdana Menteri Uni Emirat Arab mengharuskan setiap kementerian untuk mengalokasikan 1 persen dari anggarannya untuk inovasi. Alokasi ini mungkin akan meningkat hingga 5 persen di masa depan.

Menggunakan data dan bukti untuk mengarahkan reformasi

Data dan bukti menciptakan kesadaran akan skala masalah, sambil mendemonstrasikan bagaimana solusi bisa hemat biaya.



Membuka kekuatan transformatif inovasi

Inovasi membawa pemain baru ke dalam sektor keadilan dan mengembangkan pendekatan yang dapat memberikan keadilan dalam skala besar.

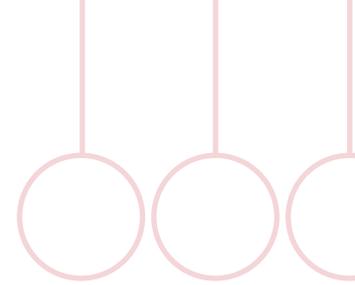
Menerapkan strategi-strategi untuk pembiayaan keadilan yang lebih cerdas

Strategi pembiayaan yang lebih cerdas mengalihkan sumber daya dari pendekatan yang tidak efektif dan menuju apa yang berhasil. Mereka juga menarik keuangan dari sektor lain dan dari investor non-tradisional.

Membangun sistem peradilan yang lebih koheren dan inklusif

Model tata kelola baru dan standar bersama meningkatkan koherensi dalam sistem peradilan, memungkinkan keragaman mitra yang lebih besar untuk bekerja sama menuju hasil bersama.

Tuas Reformasi Keadilan



Menerapkan strategi-strategi untuk pembiayaan keadilan yang lebih cerdas

Di sektor di mana keputusan investasi secara tradisional “didasarkan pada analisis dari mulut ke mulut daripada analisis formal,” pembiayaan yang lebih cerdas akan menciptakan insentif bagi reformasi.³⁶⁷ Lebih lanjut, reformasi hanya akan berjalan berkelanjutan jika negara mengumpulkan bukti yang menunjukkan bahwa peningkatan pengeluaran berimplikasi pada hasil-hasil yang terukur.

Langkah pertama adalah membangun atas dasar bukti dan argumen untuk investasi sebagaimana ditetapkan dalam Bab 2 laporan ini. Bank Dunia akan bekerja sama dengan para mitra untuk mengeksplorasi lebih lanjut tentang bagaimana peningkatan pembiayaan keadilan bagi semua dapat berkontribusi pada pengurangan kemiskinan, kemakmuran bersama, dan pencegahan kekerasan, ketidakstabilan, dan konflik. OECD akan terus menyebarkan argumentasi bisnisnya kepada para anggota dan mitranya. Prioritas langkah yang diambil adalah membawa analisis ini ke tingkat nasional, membantu para pembuat kebijakan memahami biaya-biaya dan manfaat-manfaatnya di negara-negara dengan beragam kebutuhan keadilan, kendala pembiayaan dan kapasitas. Elaborasi lebih lanjut mengenai perhitungan biaya ODI untuk layanan keadilan dasar – disajikan dalam Bab 2 laporan ini – juga akan memberikan informasi mengenai peta jalan nasional untuk pembiayaan keadilan bagi semua.

Para reformis nasional harus mengeksplorasi model-model pembiayaan baru. Prioritas pentingnya adalah meningkatkan ketersediaan sumber daya bagi model-model berbiaya rendah namun mampu merespons secara optimal kebutuhan keadilan yang tidak terpenuhi. Organisasi-organisasi di akar rumput sering kali menjadi pilihan paling tepat untuk memainkan peran ini, tetapi untuk memastikan bahwa dukungan semacam ini tidak membahayakan kemampuan mereka untuk bekerja dengan bebas dari pengaruh politik maka diperlukan pengawasan independen terhadap saluran-saluran pendanaan semacam ini.³⁶⁸ Pemerintah mungkin dapat mengalokasikan sebagian dari anggaran keadilan nasional untuk membiayai inovasi teknologi tinggi dan rendah, dan dapat pula mengeksplorasi model-model pembiayaan campuran di mana dana mereka digunakan untuk menarik investasi lainnya.³⁶⁹ Program reinvestasi keadilan dapat mendaur ulang penghematan yang berasal dari intervensi dan pencegahan awal, serta menggunakan uang hasil penghematan untuk upaya-upaya mengurangi jumlah populasi di penjara.³⁷⁰

Para reformis keadilan juga harus membina sumber-sumber pendanaan baru. Kemitraan dengan sektor-sektor lain seperti kesehatan, perumahan, pendidikan, dan lingkungan dapat memperluas kolam pendanaan untuk keadilan serta memastikan kebijakan yang saling melengkapi.³⁷¹ Investasi swasta dan filantropi akan diperlukan ketika inovasi-inovasi memerlukan dukungan dan ditempatkan dengan tepat untuk pendanaan di tingkat akar rumput. Donor-donor internasional juga harus meningkatkan dukungan

mereka untuk keadilan, menargetkan pembiayaan pada negara, masyarakat, dan rakyat yang kemungkinan besar akan tertinggal.³⁷² Investasi bukan hanya tentang uang. Layanan *pro bono* dapat menyediakan akses ke pengacara dan mahasiswa hukum bagi mereka yang tidak mampu membayar mereka, dengan dan dampaknya akan optimal ketika ada aturan tentang layanan *pro bono*. Relawan dari luar profesi hukum juga memainkan peran penting dalam menyediakan akses untuk mendapatkan keadilan, di mana organisasi-organisasi semacam ini membutuhkan pendanaan untuk melakukan pengawasan, pelatihan, dan untuk menyediakan akses layanan berbayar ketika membantu kasus-kasus yang lebih serius.

Membangun sistem peradilan yang lebih koheren dan inklusif

Di semua negara, sistem peradilannya beragam. Dari mekanisme peradilan adat, pengadilan agama, hingga layanan nasihat warga, paralegal dan ombudsman, banyak penyelesaian perselisihan telah dilaksanakan di luar sistem pengadilan formal. Selain itu, laporan ini telah menyoroti peran yang dimainkan oleh organisasi-organisasi dari luar sektor peradilan: mulai dari serikat pekerja hingga perpustakaan, dari pekerja sosial hingga sesepuh komunitas.

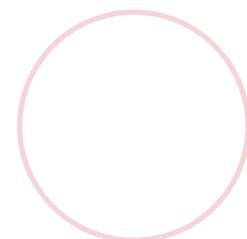
Namun, para penyedia layanan ini jarang dianggap atau diperlakukan sebagai bagian dari suatu sistem yang bekerja secara kohesif untuk memperkuat keadilan. Para aktor peradilan negara sering bekerja secara independen satu sama lain dan terkadang dilarang untuk berkolaborasi.³⁷⁴ Oleh karena itu tidak mengherankan bila perjalanan memperoleh keadilan sering terfragmentasi, atau strategi-strategi pencegahan dianggap tidak pernah ada.

Kita tidak menyerukan perlunya bermitra bukan hanya sekedar demi kemitraan semata, tetapi untuk menyatukan para mitra dalam mencegah dan menyelesaikan masalah-masalah keadilan dan untuk menciptakan peluang-peluang bagi rakyat dan masyarakat.

Tuas lainnya yang diidentifikasi dalam bab ini – data dan bukti, inovasi, dan pembiayaan cerdas – menciptakan infrastruktur untuk kemitraan yang produktif, namun tetap ada tiga ramuan yang hilang. *Pertama*, negara-negara perlu menyadari potensi dari semua yang bekerja untuk mewujudkan keadilan bagi semua, melindungi para pembela keadilan dari bahaya, melatih para profesional untuk memberikan keadilan yang berpusat pada rakyat, dan membuat lembaga-lembaga peradilan lebih berperan sebagai representasi dari komunitas-komunitas yang mereka layani (lihat *spotlight 3*).

Kedua, diperlukan model-model tata kelola baru di semua tingkatan untuk menyatukan para mitra dan membantu mereka mengidentifikasi dan menangani prioritas-prioritas strategis. Di AS, White House Legal Aid Interagency Roundtable menyatukan departemen-departemen dan lembaga-lembaga untuk “berkolaborasi, berbagi praktik terbaik, dan mempertimbangkan dampak layanan hukum terhadap keberhasilan

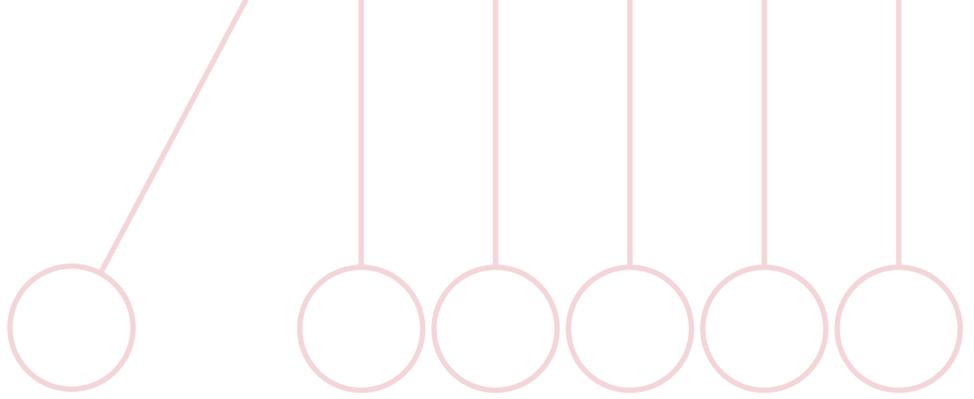
> Kementerian Kesehatan Mozambik mendanai paralegal dari Namati untuk bermitra dengan para petugas kesehatan setempat untuk meningkatkan kualitas, akses, dan penggunaan layanan bagi mereka yang menderita HIV.³⁷³ Lebih dari 3000 pelanggaran telah diselesaikan, dan meningkatkan layanan kesehatan untuk 180.000 orang.



program mereka.³⁷⁵ Para aktor peradilan formal dan informal di Mali mengadakan pertemuan setiap bulan untuk mendiskusikan strategi-strategi.³⁷⁶ Belanda telah membangun “rantai peradilan pidana yang secara proaktif melibatkan organisasi-organisasi publik lainnya untuk memerangi kejahatan” yang didorong melalui kebijakan.³⁷⁷

Ketiga, standar-standar bersama untuk membantu peningkatan kohesi dan kualitas. Perlindungan konstitusional dapat melanggengkan hak-hak dasar dan membantu mendefinisikan peran-peran polisi, militer, dan layanan intelijen dengan cara-cara yang memajukan keadilan yang ramah rakyat.³⁷⁸ Sistem-sistem peradilan formal dan informal dapat dihubungkan, yang akan memungkinkan rujukan, banding, dan langkah-langkah yang melindungi hak-hak kaum perempuan dan anak-anak.³⁷⁹ Bab 4 menggarisbawahi pentingnya pemantau independen untuk mempertahankan standar-standar dan menangani pengaduan-pengaduan. Pada akhirnya, standar-standar harus menjadi bagian dari budaya sistem peradilan. Di Tunisia misalnya, para hakim berkumpul untuk memikirkan kembali apa arti *sesungguhnya* dari kemerdekaan, bukan sebagai prinsip abstrak, tetapi sebagai bagian dari cara mereka melayani publik.³⁸⁰

> Aktor-aktor keadilan di Mali mengadakan pertemuan setiap bulan dalam forum regional “cadres de concertation” (forum konsultasi). Forum-forum tersebut dihadiri oleh aparat polisi, administrator pengadilan, masyarakat sipil, jaksa, pemimpin agama, petugas koreksi, dan pemangku kepentingan lainnya. Mereka membahas strategi dan aksi keadilan yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah-masalah keadilan.³⁸¹



Bab 6

Agenda Aksi

Implementasi harus menempatkan rakyat di pusat sistem peradilan dan keadilan di jantung pembangunan berkelanjutan.

Satuan Tugas membuat tiga perangkat rekomendasi untuk aksi nasional untuk mempercepat kemajuan menuju keadilan bagi semua:

Menyelesaikan masalah-masalah keadilan yang paling berarti bagi rakyat.

Mencegah masalah-masalah keadilan dan menciptakan peluang-peluang bagi rakyat untuk berperan serta sepenuhnya di dalam masyarakat dan perekonomian mereka.

Investasi ke dalam sistem dan lembaga peradilan yang bekerja untuk rakyat dan yang diperlengkapi agar mampu menanggapi kebutuhan mereka akan keadilan.

Implementasi nasional harus didukung dengan kerja sama internasional yang intensif dan kemitraan-kemitraan yang telah direvitalisasi untuk keadilan.

Visi Baru Keadilan bagi Semua

Satuan Tugas Keadilan telah menetapkan visi baru untuk menyediakan akses yang setara untuk keadilan bagi semua, sejalan dengan komitmen Agenda 2030 untuk memerangi ketidakadilan dan membangun masyarakat yang adil.

Visi ini didasarkan pada hak atas keadilan dan hak-hak fundamental lainnya – dan janji untuk mencapai terlebih dahulu mereka yang tertinggal terjauh di belakang – dengan data dan bukti yang memandu implementasi.

Mengatasi kesenjangan keadilan membutuhkan transformasi ambisi – berupa upaya-upaya berkelanjutan untuk menyediakan akses keadilan bagi miliaran orang lagi.

Untuk dapat mencapai terwujudnya TPB16.3 dan target-target terkait untuk keadilan, negara harus menyelesaikan masalah-masalah keadilan rakyat, mencegah ketidakadilan baik besar ataupun kecil agar tidak terjadi, dan menciptakan peluang-peluang bagi rakyat untuk berperan serta sepenuhnya dalam masyarakat dan perekonomian mereka.

Menurut Agenda 2030, setiap negara memiliki tanggung jawab utama untuk mengembangkan strategi-strategi untuk dapat mencapai terwujudnya TPB, tetapi keterlibatan global yang intensif dapat mendukung implementasi nasional.

Satuan Tugas menyerukan kepada pemerintah, para profesional peradilan, masyarakat sipil, sektor swasta, organisasi-organisasi internasional dan regional, yayasan-yayasan dan filantropi – dan juga rakyat – untuk bekerja sama untuk mencapai keadilan bagi semua.

Agenda Aksi Nasional

Implementasi nasional harus menempatkan rakyat di pusat sistem peradilan dan keadilan di jantung pembangunan berkelanjutan.

1. Menyelesaikan masalah-masalah keadilan yang paling berarti bagi rakyat

- Memahami masalah-masalah keadilan melalui survei yang dilaksanakan secara teratur dan yang mengacu pada standar dan pedoman internasional, serta meningkatkan ketersediaan dan kualitas data tentang kebutuhan kaum perempuan, anak-anak, dan kelompok rentan.
- Memberdayakan rakyat dan masyarakat untuk mencari keadilan, mengenali para pembela keadilan di akar rumput, membiayai mereka dengan cara-cara yang menghormati independensi mereka, dan melindungi mereka dari kekerasan dan paksaan.
- Menyediakan akses ke layanan keadilan yang berpusat pada rakyat yang menggunakan bukti terbaik tentang apa yang berhasil, yang sekaligus juga membuat para penyedia keadilan bertanggung jawab untuk memberikan hasil-hasil yang adil yang membantu mengatasi kesenjangan keadilan.
- Menggunakan alternatif-alternatif yang efektif secara biaya untuk membantu rakyat menyelesaikan perselisihan dan mendapatkan pemulihan ketika mereka menjadi korban kekerasan dan kejahatan, serta mencadangkan penggunaan hukuman dan proses pengadilan formal untuk kasus-kasus paling serius saja.

2. Mencegah masalah-masalah keadilan dan menciptakan peluang-peluang bagi rakyat untuk berperan serta sepenuhnya di dalam masyarakat dan perekonomian mereka

- Melakukan pergeseran ke pencegahan melalui strategi-strategi yang meningkatkan keadilan bagi komunitas dan masyarakat, dan diimplementasikan dalam kemitraan antara sistem peradilan dan sektor-sektor lainnya.
- Meningkatkan kepercayaan pada sistem-sistem peradilan dengan meningkatkan independensi, imparialitas, dan integritas, menerapkan strategi-strategi untuk memerangi korupsi dan penyelewengan, dan memastikan pengawasan independen.
- Mengatasi akar penyebab ketidakadilan, menggunakan data dari kasus-kasus individual untuk mengatasi ketidakadilan struktural, menyediakan akses universal untuk mendapatkan identitas dan dokumen-dokumen hukum, dan membantu rakyat membuat dan mendaftarkan perjanjian-perjanjian hukum.



- Menggunakan undang-undang untuk mengurangi risiko, dengan memperkuat kerangka kerja perundangan untuk pencegahan kekerasan dan non-diskriminasi, dan melalui undang-undang dan regulasi yang menangani keluhan atau memperkecil kemungkinan timbulnya perselisihan.

3. Investasi di sistem dan lembaga peradilan yang bekerja untuk rakyat dan yang diperlengkapi untuk merespons kebutuhan mereka akan keadilan

- Menggunakan data dan bukti untuk mengarahkan reformasi peradilan, meningkatkan kesadaran akan kebutuhan yang tidak terpenuhi, menyediakan akses terbuka ke data sebagai platform untuk kemitraan dan akuntabilitas, dan menginformasikan kebijakan-kebijakan dan program-program dengan bukti tentang apa yang berhasil.
- Membuka kekuatan transformatif inovasi, membuka sistem peradilan bagi aktor dan ide-ide baru, menciptakan lingkungan peraturan yang kondusif, dan melakukan penilaian terhadap dampak dari inovasi dalam mengatasi kesejangan keadilan.
- Menerapkan strategi-strategi untuk pembiayaan peradilan yang lebih cerdas, membawa bukti dan argumen investasi keadilan ke tingkat nasional, mengembangkan peta jalan nasional untuk membiayai keadilan bagi semua, dan mengakses sumber-sumber pendanaan baru.
- Membangun sistem-sistem peradilan yang lebih koheren dan inklusif, dengan mendukung orang-orang yang menyediakan keadilan, meningkatkan keragaman dan representasi kaum perempuan di semua tingkatan, dan mengeksplorasi model-model tata kelola baru, dan mempromosikan standar-standar bersama untuk semua bagian dari sistem.

Agenda Aksi Internasional

Komitmen Agenda 2030 untuk mencapai keadilan bagi semua membutuhkan kerja sama internasional yang intensif dan kemitraan-kemitraan yang telah direvitalisasi untuk keadilan.

- Di dalam Pathfinders for Peaceful, Just and Inclusive Societies, berkumpul sekelompok negara yang berkomitmen untuk mengarah pada keadilan bagi semua.
- Mendorong negara-negara dan para mitra dari semua sektor agar mendaftarkan komitmen sukarela untuk mengimplementasikan TPB16.3.
- Mendukung pemerintah-pemerintah untuk mengembangkan strategi-strategi yang kredibel, realistis, dan didanai untuk mengimplementasikan komitmen-komitmen ini.



- Mengadakan pertemuan-pertemuan dua tahunan Menteri Kehakiman, Jaksa Agung, dan para pemimpin peradilan lainnya sebagai platform bagi negara-negara untuk berbagi pengalaman, mengeksplorasi rekomendasi, dan memperkuat kerja sama untuk keadilan.
- Mencapai kesepakatan mengenai indikator baru TPB16.3 yang mengukur kemajuan di peradilan perdata, melengkapi indikator-indikator yang ada tentang penahanan pra-persidangan dan pelaporan kejahatan dengan kekerasan, dengan uji coba nasional secara sukarela menjelang integrasinya ke dalam kerangka indikator global.
- Membentuk aliansi mitra keadilan internasional dan regional untuk meningkatkan kolaborasi dan koherensi.
- Mengembangkan agenda penelitian bersama di sektor keadilan untuk meningkatkan ketersediaan data untuk mengukur kemajuan, memperkuat bukti keberhasilan, menyesuaikan bukti ini dengan konteks-konteks negara yang berbeda, dan untuk mengkomunikasikan data dan bukti kepada para pembuat kebijakan.
- Membentuk kolaborasi para penyandang dana untuk memperkuat bukti dan argumen untuk investasi keadilan bagi semua dan mengadvokasi peningkatan proporsi pembiayaan internasional yang mengalir ke sektor keadilan.
- Memperkuat tuntutan perubahan melalui gerakan global, nasional, dan lokal yang mengkampanyekan keadilan bagi semua.

Seruan untuk bertindak

Untuk mempercepat tercapainya kemajuan, Satuan Tugas menyerukan kepada pemerintah, para profesional keadilan, masyarakat sipil, dan organisasi-organisasi internasional untuk bersatu dalam upaya global dan berkelanjutan untuk mencapai keadilan bagi semua pada tahun 2030.

Pemerintah-pemerintah harus menjadikan keadilan sebagai prioritas politik dan memberikan mandat dan sumber-sumber daya kepada menteri kehakiman untuk menyelesaikan masalah-masalah yang paling berarti bagi rakyat. Kami meminta para Menteri Kehakiman, Jaksa Agung, dan pemimpin peradilan lainnya di seluruh pemerintahan untuk mengembangkan strategi-strategi dan memelihara kemitraan-kemitraan yang dapat mencapai terwujudnya keadilan bagi semua.



Para profesional keadilan harus bekerja sama dengan pemerintah dalam mengarahkan gerakan keadilan bagi semua. Para hakim, jaksa penuntut, pengacara, paralegal, polisi, dan petugas penjara dan masa percobaan, dan para profesional lainnya memiliki peran mereka masing-masing dalam reformasi.

Sektor-sektor lain, seperti kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, pekerjaan, dan pendidikan, adalah mitra penting untuk penyediaan keadilan yang berpusat pada rakyat. Peningkatan keadilan adalah sangat penting untuk mewujudkan aspirasi-aspirasi Agenda 2030 untuk rakyat, planet, kemakmuran, dan perdamaian.

Masyarakat sipil memberdayakan rakyat untuk menyelesaikan masalah-masalah keadilan mereka dan membantu masyarakat mengatasi ketidakadilan struktural. Hal ini menjangkau bagian-bagian dari masyarakat yang paling berisiko mengalami ketidakadilan dan meminta pertanggungjawaban pemerintah atas implementasi reformasi. Agar efektif, para pembela keadilan membutuhkan pendanaan dan perlindungan independen.

Sektor swasta dapat mendukung gerakan keadilan bagi semua dalam kemitraan dengan pemerintah dan masyarakat sipil. Firma-firma hukum dapat membentuk lebih banyak pendekatan untuk mencapai keadilan yang berpusat pada rakyat melalui kerja pro bono dan advokasi mereka. Sebagai inovator dan investor dampak, sektor swasta dapat mengembangkan cara-cara baru untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat akan keadilan dengan biaya rendah. Kamar Dagang dapat mengadvokasi supremasi hukum dan untuk akses yang lebih besar untuk mendapatkan keadilan.

Organisasi-organisasi internasional dan regional harus memberikan dukungan yang lebih koheren untuk implementasi nasional atas target-target TPB untuk keadilan. Mereka harus mengalokasikan lebih banyak pembiayaan untuk keadilan dan membantu menarik investasi dampak dan sektor swasta. Platform-platform internasional dan regional diperlukan untuk memfasilitasi sehingga dapat berbagi pengetahuan dan membangun konsensus seputar solusi dan strategi.

Yayasan dan filantropis memainkan peran penting dalam meningkatkan keadilan bagi semua. Mereka dapat mempengaruhi ditingkatkannya fokus pada keadilan yang berpusat pada rakyat dan memajukan prioritas-prioritas yang muncul seperti peran keadilan dalam pencegahan. Mengingat besarnya kebutuhan akan keadilan yang belum terpenuhi, diperlukan dukungan dari yayasan-yayasan yang lebih beragam.

Akhirnya, seruan untuk bertindak dari Satuan Tugas juga ditujukan kepada rakyat itu sendiri, sebagai pencari keadilan, sukarelawan, dan pendukung sistem peradilan. Mereka harus diberdayakan untuk memainkan peran sentral dalam penciptaan dunia yang lebih adil.



Sorotan 3

Orang-orang yang memberikan keadilan

Menyadari potensi tenaga kerja keadilan

Menempatkan rakyat sebagai pusat keadilan berarti memikirkan orang-orang yang memberikan keadilan, sebagaimana halnya orang-orang yang mencarinya.

Laporan ini telah menekankan pentingnya sistem peradilan yang beragam dan inklusif yang mengacu pada kekuatan “tenaga kerja” keadilan profesional, informal, dan sukarela - dari sektor keadilan tradisional serta di luarnya.

- **Para pemimpin keadilan** – Para Menteri Kehakiman dan semua orang yang membantu membentuk sistem peradilan.
- **Profesional Peradilan** – hakim, jaksa, pengacara, asosiasi pengacara, polisi, dan staf penjara, yang mengoperasikan sistem peradilan formal.
- **Penyedia layanan formal lainnya** – termasuk layanan nasihat dan informasi, saluran bantuan, badan pengawas, dan lembaga ombudsman dan pihak lain yang menangani pengaduan.
- **Aktor peradilan informal atau sukarela** – termasuk hakim non-profesional, paralegal komunitas, penasihat utang-piutang atau lainnya, pemimpin agama, kepala adat, sesepuh masyarakat, serikat pekerja, dan mediator lainnya.
- **Sektor lain** – orang yang bekerja di bidang kesehatan, pendidikan, perumahan, imigrasi, dan perlindungan lingkungan yang berperan dalam memajukan dan menyediakan keadilan.
- **Inovator keadilan** – termasuk wirausahawan sosial, investor dampak sosial, dan inovator startup teknologi dari sektor swasta.
- **Pembela keadilan** – aktivis akar rumput yang memberdayakan rakyat dan komunitas, menyediakan layanan keadilan, dan memperkuat permintaan untuk perubahan melalui advokasi dan pembangunan gerakan.

Membela Para Pembela Keadilan

Mereka yang bekerja dalam sistem peradilan menghadapi ancaman baik yang tertuju pada kemampuan mereka untuk melakukan pekerjaan maupun pada keselamatan mereka.

JHakim, jaksa penuntut, dan pengacara menjadi target dari orang-orang yang ingin memengaruhi keputusan atau mencegah mereka melakukan pekerjaannya.³⁸² Banyak dari mereka yang kehilangan nyawanya, meskipun kematian mereka tidak dilacak secara global seperti halnya para jurnalis.³⁸³

Pembela keadilan akar rumput menghadapi risiko terbesar. Front Line Defenders, sebuah kelompok advokasi, menerima laporan 312 kematian pada tahun 2017.³⁸⁴ Dua pertiga dari mereka yang tewas membela hak atas tanah, lingkungan, dan masyarakat adat. Dan 84 persen dari mereka telah menerima ancaman sebelumnya namun tidak juga mendapatkan perlindungan dari polisi.

Anggota Global Legal Empowerment Network (Jaringan Pemberdayaan Hukum Global) juga melaporkan adanya gangguan/pelecehan yang terjadi secara berkala, dengan 68 persen mengatakan mereka atau organisasi mereka telah diancam karena melakukan kerja-kerja pemberdayaan hukum.³⁸⁵

Perjanjian Escazu adalah sebuah contoh. Perjanjian ini menetapkan perlindungan untuk hak-hak akses terhadap informasi, partisipasi publik, dan akses terhadap keadilan dalam masalah lingkungan.³⁸⁶

Kita harus waspada dalam menghadapi ancaman-ancaman ini, dan Satuan Tugas mendukung tuntutan kampanye *Justice for All* bahwa “mereka yang diamanatkan untuk melayani kebutuhan keadilan komunitas harus mampu bekerja di lingkungan yang bebas dari kekerasan dan ancaman fisik lainnya.”³⁸⁷

Dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari mereka, beberapa aktor harus beroperasi secara terpisah dari yang lain untuk menghormati mekanisme check and balances, dan menjamin independensi yang disyaratkan oleh undang-undang. Tetapi para pemimpin keadilan dapat mempromosikan kolaborasi lintas sistem peradilan dengan cara:

1. Memupuk budaya data, bukti, dan pembelajaran

Semua penyedia layanan keadilan membutuhkan keterampilan untuk memahami dan belajar dari data tentang masalah keadilan dan bukti tentang apa yang berhasil, sambil memunculkan dan menanggapi umpan balik dari pengguna, serta bertanggung jawab atas kualitas prosedur dan kewajaran hasil peradilan.

2. Melakukan pendekatan strategis

Pesan utama dari laporan ini adalah bahwa penyedia keadilan perlu beralih dari peran seperti pemadam kebakaran ke model di mana mereka mengembangkan strategi untuk mencapai tujuan jangka panjang. Ini membutuhkan kepemimpinan dari atas dan ruang bagi orang-orang dari lembaga peradilan untuk berpikir dan berencana secara kolaboratif.³⁸⁸

3. Meningkatkan keragaman

Sistem peradilan akan lebih efektif jika “terlihat seperti” komunitas yang mereka layani. Representasi perempuan yang lebih besar sangat penting.³⁸⁹ Diperlukan langkah-langkah untuk meningkatkan transparansi rekrutmen dan promosi, menargetkan kelompok-kelompok yang terpinggirkan, dan memberikan bimbingan dan pelatihan bagi orang-orang yang secara historis telah terkecualikan untuk bekerja di bidang sistem peradilan.

4. Mengadopsi metode pelatihan baru

Keadilan yang berpusat pada orang membutuhkan perubahan dari pelatihan yang hanya berfokus pada pengetahuan hukum ke pelatihan yang menekankan pada penyelesaian masalah. Keterampilan penting termasuk mendengarkan secara aktif, manajemen konflik, dan negosiasi, serta layanan pelanggan dan pengumpulan data.

5. Mengembangkan jaringan profesional

Jaringan internasional dan nasional membantu para profesional belajar satu sama lain dan mempercepat penyebaran ide-ide dan pendekatan baru. Aparat polisi dapat mengeksplorasi cara menggunakan pendekatan berbasis bukti, misalnya, atau hakim dapat memeriksa teknik untuk mengurangi pemenjaraan.³⁹⁰ Jaringan juga dapat menyatukan berbagai penyedia layanan lokal untuk mengatasi masalah keadilan yang paling mendesak.

6. Membangun hubungan dengan rakyat dan komunitas

Keadilan untuk semua tergantung pada hubungan erat antara penyedia keadilan dan komunitas tempat mereka bekerja dan hidup. Banyak lembaga peradilan akan membutuhkan kultur kolaborasi baru, keterbukaan, dan daya tanggapnya terhadap rakyat beserta kebutuhan mereka. Semua orang yang memajukan dan membela keadilan membutuhkan lingkungan kerja yang aman dan terjamin (lihat kotak).

Lampiran 1

Metodologi

Satuan Tugas untuk Keadilan (Task Force on Justice)

Satuan Tugas untuk Keadilan telah mengadakan tiga pertemuan untuk memandu penelitian dan membahas temuan-temuan, pada bulan Februari 2018 di Buenos Aires, Argentina; pada bulan Oktober 2018 di Freetown, Sierra Leone; dan pada bulan Februari 2019, di Den Haag, Belanda.

Penelitian ini dilakukan dalam tiga alur kerja yang diselenggarakan di sekitar pertanyaan kunci yang ingin dijawab oleh Satuan Tugas: yakni besaran kesenjangan keadilan; kasus untuk investasi; dan apa yang berhasil untuk meningkatkan keadilan bagi semua. Kontribusi besar untuk pekerjaan tersebut diberikan oleh para mitra keadilan. Orang-orang dan organisasi-organisasi yang berkontribusi disebutkan namanya pada awal laporan.

Satuan Tugas untuk Keadilan menyajikan sintesis global pertama tentang skala dan sifat kesenjangan keadilan, masalah keadilan paling umum yang dihadapi orang secara global, dan perkiraan pertama biaya untuk menyediakan akses universal ke layanan keadilan dasar.

Kesenjangan keadilan global

Untuk memperkirakan kesenjangan keadilan global, maka Kelompok Kerja Kesenjangan Keadilan telah mengembangkan kerangka kerja konseptual yang komprehensif dan berpusat pada rakyat. Kerangka kerja ini mengandalkan rakyat, bukan lembaga, sebagai lensa dalam memahami kebutuhan keadilan, sejauh mana saat ini kebutuhan keadilan tersebut terpenuhi, dan pengucilan yang dialami rakyat.

Kelompok ini mengoperasionalkan kerangka kerja tersebut untuk mengidentifikasi kategori-kategori kebutuhan keadilan yang tidak terpenuhi serta pertanyaan pengukurannya yang menempatkan rakyat sebagai unit analisis dan yang terkait dengan kerangka kerja SDG, baik secara konseptual atau sebagai bagian dari indikator resmi yang disusun oleh Inter-Agency and Expert Group on SDG Indicators (IAEG-SDGs).

The World Justice Project memimpin audit terhadap lebih dari 600 sumber data potensial yang disarankan oleh anggota Kelompok Kerja, termasuk himpunan data tingkat global dan nasional serta sumber-sumber data administratif, berbasis survei, dan kualitatif.

Sumber-sumber data akhirnya dipilih berdasarkan tiga pertimbangan:

1. **Cakupan negara.** Menggunakan sebanyak mungkin sumber data global, asalkan mereka memiliki cakupan tingkat negara yang memadai, memastikan metodologi pengumpulan data yang sebanding dan angka kesenjangan keadilan di seluruh negara.
2. **Pengakuan resmi.** Menggunakan sumber data resmi, seperti yang disediakan oleh UNODC, ILO, dan Bank Dunia, mengupayakan penerimaan yang lebih luas dari sumber data terpilih dan memastikan konsistensinya dengan metodologi indikator kesenjangan keadilan yang sudah dimasukkan ke dalam kerangka kerja indikator resmi SDG.

3. Data publik dan metodologi pengukuran. Untuk menghasilkan penilaian di tingkat negara, mengaitkannya dengan estimasi untuk negara-negara yang tidak memiliki data, dan menggambarkan distribusi ketidakadilan di populasi rentan, penilaian kesenjangan keadilan hampir secara eksklusif mengandalkan pada data yang tersedia untuk umum.

WJP (World Justice Project) mengisi angka untuk masing-masing pertanyaan pengukuran serta sumber data terkait di tingkat negara, serta menetapkan metode untuk mengekstrapolasi perkiraannya terhadap negara-negara yang tidak tercakup oleh masing-masing sumber data. Untuk negara-negara di mana estimasi tidak tersedia dalam suatu himpunan data, mereka membuat estimasi berdasarkan nilai rata-rata regional serta negara-negara yang memiliki pendapatan sama. WJP menggunakan klasifikasi geografis PBB dan klasifikasi pendapatan dari Bank Dunia untuk membentuk pengelompokan regional dan pendapatan yang menjadi dasar ekstrapolasi ini.

WJP mencurahkan perhatian khusus untuk mengembangkan langkah-langkah untuk memperkirakan jumlah orang yang tidak terpenuhi kebutuhan keadilan perdata dan administrasinya, serta korban kejahatan dengan kekerasan maupun tanpa-kekerasan yang belum melaporkan insiden yang telah mereka alami kepada otoritas yang berwenang. Untuk kebutuhan keadilan di sektor perdata dan administrasi, pengukuran yang dikembangkan bersifat multidimensi dan berbasis survei. WJP melakukan pengukuran kapabilitas legal, akses terhadap bantuan yang memadai, proses penyelesaian, dan hasilnya, terhadap orang-orang yang mengalami masalah hukum perdata atau administrasi. Untuk kejahatan kekerasan dan non-kekerasan, WJP menggunakan data survei viktimisasi yang dikumpulkan oleh kantor statistik nasional di lebih dari 60 negara untuk menghasilkan perkiraan berdasarkan metodologi untuk indikator SDG 16.3.1. Untuk negara-negara di mana hanya data administrasi yang tersedia, maka WJP mengembangkan metode untuk menyesuaikan tingkat viktimisasi kejahatan dan menghitung angka gelap (yaitu kejahatan yang tidak dilaporkan atau kejahatan yang belum ketahuan).

Hasil perkiraan kesenjangan keadilan global tersebut kemudian disesuaikan dengan mempertimbangkan adanya penghitungan ganda terhadap orang-orang masuk ke lebih dari satu dimensi kesenjangan keadilan (misalnya korban kekerasan yang juga tidak memiliki identitas hukum, atau orang-orang yang tidak dapat memperoleh keadilan di wilayah pidana dan perdata sekaligus). Penghitungan ganda diatasi sebagian dengan cara menghapus data populasi di negara-negara dengan tingkat ketidakamanan yang tinggi dan tidak ada aturan hukum dari dimensi kesenjangan keadilan lainnya. Untuk masalah tumpang tindih lainnya, WJP menggunakan pengukuran proksi yang diambil dari dari Jajak Pendapat Umum WJP 2018 untuk

memperkirakan tingkat tumpang tindih antara orang-orang yang tidak terpenuhi kebutuhan keadilan perdata atau administrasinya, korban kejahatan kekerasan dan non-kekerasan yang tidak melapor, dan orang-orang yang tidak memiliki identitas hukum, perjanjian kerja formal, dan kepemilikan tanah atau perumahan. Hal ini memungkinkan WJP untuk menyesuaikan penghitungan ganda di seluruh kerangka kesenjangan keadilan maupun dalam kategori kebutuhan keadilan yang tidak terpenuhi.

Untuk menentukan masalah keadilan paling umum yang dihadapi rakyat, digunakan data dari 78 survei yang berbeda, yaitu 63 survei nasional korban kejahatan, survei global kebutuhan hukum WJP, dan 14 survei nasional kebutuhan hukum oleh HiIL.

Informasi tambahan lebih rinci tentang metodologi yang digunakan dalam memperoleh perkiraan kesenjangan keadilan yang dibahas dalam laporan ini, silakan merujuk ke: World Justice Project, *Measuring the Justice Gap: A People-Centered Assessment of Unmet Justice Needs Around the World*. (Task Force on Justice, background paper, April 2019)

Biaya SDG16.3

Satuan Tugas untuk Keadilan menugaskan Overseas Development Institute (ODI), sebuah lembaga think tank global independen, untuk menghasilkan untuk pertama kalinya estimasi awal tentang berapa biaya untuk mencapai SDG16.3; biaya untuk menyediakan akses universal ke layanan keadilan dasar di negara-negara di seluruh dunia. Laporan penelitian cepat ini juga memperkirakan kesenjangan pembiayaan yang dihadapi oleh negara-negara dalam mencapai SDG16.3. Tujuannya adalah untuk memastikan upaya ini akan dikembangkan lebih lanjut dengan skala lebih besar dan lebih panjang. Karena salah satu tujuan dari upaya penghitungan biaya ini adalah untuk menilai kesenjangan pembiayaan, upaya ini terutama berfokus pada negara-negara berpenghasilan rendah di mana keterjangkauan merupakan faktor yang mungkin paling menantang.

Setelah diskusi awal dengan berbagai pemangku kepentingan, ODI melakukan pendekatan yang berpusat pada rakyat, berfokus pada apa yang mereka butuhkan untuk mengatasi masalah keadilan “sehari-hari” rakyat di komunitas mereka. Penghitungan biaya didasarkan pada gagasan bahwa untuk mencapai SDG16.3, layanan keadilan dasar harus tersedia secara universal. Karena keadilan dasar universal belum merupakan istilah yang didefinisikan, maka ODI telah mengembangkan definisi kerja berikut: sebuah sistem yang menangani kebutuhan keadilan sehari-hari rakyat, yang disampaikan melalui mekanisme formal dan kurang formal yang sering membutuhkan transformasi, dan yang tersedia secara universal – yakni mudah diakses dan terjangkau untuk semua.

Analisis ini mencakup 201 negara dan menghitung biaya sistem keadilan dasar di tingkat lokal, baik mekanisme yang relatif informal (tradisional, agama, dan masyarakat sipil), maupun organisasi formal garis depan seperti polisi dan pengadilan setempat. Analisis ini juga memperhitungkan apa saja yang rakyat keluarkan dari kantong mereka sendiri ketika mereka mencari keadilan.

Secara lebih khusus lagi, analisis ODI memasukkan komponen-komponen layanan keadilan dasar berikut ini:

- Nasihat, bantuan, dan pemberdayaan hukum, yang disediakan di komunitas oleh paralegal, pengacara, pusat nasihat hukum, serikat pekerja atau kelompok advokasi.
- Lembaga keadilan formal yang memainkan peran garis depan dalam menyelesaikan konflik, perselisihan, dan pengaduan, termasuk pengadilan tingkat bawah, polisi setempat, dan rantai peradilan pidana
- Mekanisme alternatif untuk menyelesaikan masalah hukum, konflik, perselisihan/sengketa, dan keluhan, seperti mediasi masyarakat, pengadilan tradisional atau penyelesaian hukum secara adat, dan ombudsman.
- Mekanisme yang meningkatkan akuntabilitas sistem peradilan dalam layanan yang mereka berikan kepada rakyat dan masyarakat, yang sekaligus pula mengatasi korupsi dan penyalahgunaan.

Karena fokusnya adalah pada keadilan dasar untuk kebutuhan sehari-hari rakyat, maka aspek-aspek tertentu dari ketentuan standar tidak dimasukkan, misalnya pengadilan tingkat tinggi/banding. Kebutuhan dalam konteks spesifik seperti keadilan transisional juga tidak dimasukkan karena ini sudah secara khusus dicakup oleh kelompok kerja khusus lainnya dari Satuan Tugas.

Pendekatan ODI didasarkan pada metodologi yang telah dikembangkan selama bertahun-tahun untuk membiayai pengadaan pendidikan dan kesehatan SDG, oleh UNESCO, WHO, dan Bank Dunia. Sebagaimana halnya di sektor-sektor tersebut, penetapan biaya keadilan dibuat untuk penyediaan layanan tingkat dasar dan berlandaskan pada standar model layanan, dengan tetap mengakui bahwa sistem yang berkembang akan dapat lebih efisien.

Sumber data utama adalah UNODC; World Prison Brief; data survei global dari HiIL tentang pengeluaran sendiri dan biaya awal untuk bantuan hukum yang telah dikembangkan penulis The Law & Development Partnership (LDP), yang didanai oleh IDRC Kanada dan Open Society Foundations. Data dasar makroekonomi dan populasi diambil dari Indikator Pembangunan Bank Dunia dan PBB. Asumsi kunci tentang pendorong biaya utama - staf garis depan - didasarkan pada target yang disepakati PBB (jika tersedia) dan diperiksa silang terhadap sampel terbatas dari anggaran nasional negara-negara berpenghasilan rendah dan OECD yang memungkinkan untuk dilakukan dalam lingkup kerja penelitian cepat ini.

Informasi tambahan tentang metodologi yang digunakan dalam memperkirakan biaya penyediaan keadilan bagi semua yang dibahas dalam laporan ini, silakan merujuk ke: Marcus Manuel, Clare Manuel dan Harsh Desai, Universal access to basic justice: costing SDG 16.3 ODI Working Paper 554. (London: Overseas Development Institute, 2019). Makalah yang disiapkan untuk Satuan Tugas Keadilan. Dataset lengkap tersedia berdasarkan permintaan dari penulis.

Catatan Akhir

Angka dalam kurung kotak merujuk ke dokumen di perpustakaan elektronik Satuan Tugas. Akses ke peneliti tersedia berdasarkan permintaan.

- 1 United Nations, *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. (New York: United Nations, 2015). [1]
- 2 Charles E Clark and Emma Corstvet, "The Lawyer and the Public: An A.A.L.S. Survey," *Yale Law Journal*, Volume 47, Issue 8, Article 2, 1938. [1674]
- 3 United Nations Office on Drugs and Crime and United Nations Economic Commission for Europe, *Manual on Victimization Surveys*. (Geneva: United Nations, 2010). [358]
- 4 Pascoe Pleasence and Nigel J. Balmer, "Justice & the Capability to Function in Society," *Daedalus*, 148 (1), Winter 2019. [1629]
- 5 OECD and Open Society Justice Initiative, *Legal Needs Surveys and Access to Justice - launch copy*. (Paris and New York: OECD/OSF, 2018). [1492]; Open Society Justice Initiative, *Strengthening access to civil justice with legal needs surveys. Briefing paper*. (New York: Open Society Foundations, 2018). [1476]; OECD and Open Society Justice Initiative, *Legal Needs Surveys and Access to Justice - launch copy*. (Paris and New York: OECD/OSF, 2018). [1492]; World Health Organization, London School of Hygiene & Tropical Medicine, and South African Medical Research Council, *Global and regional estimates of violence against women: prevalence and health effects of intimate partner violence and nonpartner sexual violence*. (Geneva: WHO, 2013). [105]; Susan Hillis, James Mercy, Adaugo Amobi, and Howard Kress, "Global Prevalence of Past year Violence Against Children: A Systematic Review and Minimum Estimates," *Pediatrics*. 2016;137(3):e20154079; accessed December 20, 2018. <http://pediatrics.aappublications.org/content/pediatrics/137/3/e20154079.full.pdf> [102]
- 6 Nelson Mandela, "Statement of the President of the African National Congress Nelson Rolihlahla Mandela at His Inauguration as President of the Democratic Republic of South Africa," (1994), footnote 697 in Jabulani C. Buthelezi, *Rolihlahla Dalibhunga Nelson Mandela: An Ecological Study*. (Victoria, Canada: Trafford Publishing, 2002).
- 7 See: United Nations, "Nelson Mandela International Day 18 July," accessed March 20, 2019. http://www.un.org/en/events/mandeladay/court_statement_1962.shtml
- 8 Nelson Mandela, *Long Walk to Freedom: The Autobiography of Nelson Mandela*. (London: Little Brown, 1994), pp139-140.
- 9 The Reconstruction and Development Programme, *The Reconstruction and Development Programme (RDP) - A Policy Framework*. (Marshalltown: The Reconstruction and Development Programme, 1994); accessed March 20, 2019. https://www.sahistory.org.za/sites/default/files/the_reconstruction_and_development_programm_1994.pdf [1757]
- 10 United Nations Department of Public Information, *Nelson Mandela In His Words - Excerpts from Speeches 1961 - 2008*. (New York: United Nations, 2018); accessed March 20, 2019. <http://www.un.org/en/events/mandeladay/assets/pdf/mandela100-booklet.pdf> [1758]
- 11 United Nations, *Report of the World Summit for Social Development (Copenhagen, 6-12 March 1995)*, UN Doc A/CONF.166/9 (April 19, 1995); accessed December 20, 2018. <https://www.un.org/documents/ga/conf166/aconf166-9.htm> [1552]
- 12 United Nations, *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. (New York: United Nations, 2015). [1]
- 13 OECD, *States of Fragility 2018*. (Paris: OECD Publishing, 2018). [1222]
- 14 Ashley Jackson, *Life under the Taliban shadow government*. (London: Overseas Development Institute, 2018). [1553]
- 15 Mikael Ekman (ed), *ILAC Rule of Law Assessment Report: Syria 2017*. (Solna: International Legal Assistance Consortium, 2017). [1759]
- 16 UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), *Convention relating to the status of stateless persons*. (Geneva: UNHCR, 2014). [1550]
- 17 UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), "UNHCR Global Trends 2014: World at War," June 18, 2015; accessed March 26, 2019. <https://www.refworld.org/docid/558292924.html>
- 18 Open Society Justice Initiative, "Human Rights and Legal Identity: Approaches to Combating Statelessness and Arbitrary Deprivation of Nationality" (Thematic Conference Paper, May 2006); accessed March 27, 2019. https://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/identity_20060501.pdf
- 19 International Labour Office (ILO), *Global estimates of modern slavery: Forced labour and forced marriage*. (Geneva: ILO and Walk Free Foundation, 2017). [1477]
- 20 Walk Free Foundation, *The Global Slavery Index 2018*. (Broadway Nedlands: Walk Free Foundation, 2018), chapter 3: Global Findings. [1683]
- 21 Walk Free Foundation, *The Global Slavery Index 2018*. (Broadway Nedlands: Walk Free Foundation, 2018), chapter 3: Global Findings. [1683]
- 22 Rebecca L Sandefur, "Access to What?" *Daedalus*, 148 (1), Winter 2019. [1616]

- 23 United Nations Office on Drugs and Crime and United Nations Economic Commission for Europe, *Manual on Victimization Surveys*. (Geneva: United Nations, 2010). [358]. OECD and Open Society Justice Initiative, *Legal Needs Surveys and Access to Justice - launch copy*. (Paris and New York: OECD/OSF, 2018). [1492]
- 24 Rebecca L Sandefur, "Access to What?" *Daedalus*, 148 (1), Winter 2019. [1616]
- 25 World Justice Project, "Measuring the Justice Gap: A People-Centered Assessment of Unmet Justice Needs Around the World" (Task Force on Justice, background paper, April 2019).
- 26 Jan van Dijk, John van Kesteren and Paul Smit, *Criminal Victimization in International Perspective: Key findings from the 2004-2005 ICVS and EU ICS*. (Den Haag: Wetenschappelijk Onderzoeken Documentatiecentrum, 2007). [1685]
- 27 Tanzania: United Nations Children's Fund, U.S. Centers for Disease Control and Prevention, and Muhimbili University of Health and Allied Sciences, *Violence Against Children in Tanzania - Findings from a National Survey 2009*. (Dar es Salaam: United Republic of Tanzania, 2011), p59 [1760]; Kenya: United Nations Children's Fund, U.S. Centers for Disease Control and Prevention, and Kenya National Bureau of Statistics, *Violence against Children in Kenya: Findings from a 2010 National Survey. Summary Report on the Prevalence of Sexual, Physical and Emotional Violence, Context of Sexual Violence, and Health and Behavioral Consequences of Violence Experienced in Childhood*. (Nairobi, Kenya: United Nations Children's Fund Kenya Country Office, Division of Violence Prevention, National Center for Injury Prevention and Control, U.S. Centers for Disease Control and Prevention, and the Kenya National Bureau of Statistics, 2012), p61 [1761]; Haiti: Centers for Disease Control and Prevention, Interuniversity Institute for Research and Development, and Comité de Coordination, *Violence against Children in Haiti: Findings from a National Survey, 2012*. (Port-au-Prince, Haiti: Centers for Disease Control and Prevention, 2014), p77 [1762]; Laos: National Commission for Mothers and Children, Lao Statistics Bureau and UNICEF Lao PDR, *National Violence against Children Survey in Lao PDR. Preliminary Report*. (Lao PDR: National Commission for Mothers and Children, 2016), p69 [1763]; Uganda: Ministry of Gender, Labour and Social Development, *Uganda Violence Against Children Survey - Findings from a National Survey 2015*. (Kampala: Ministry of Gender, Labour and Social Development, 2015), p22 [1324]; Zambia: Ministry of Youth, Sport and Child Development, Ministry of Community Development and Social Services, University of Zambia, United Nations Children's Fund, Save the Children International, United States Centers for Disease Control and Prevention, *Violence against Children in Zambia: Findings from a national survey, 2014*. (Lusaka: Ministry of Youth, Sport and Child Development, 2018), p25 [1764]; Cambodia: Ministry of Women's Affairs, UNICEF Cambodia, US Centers for Disease Control and Prevention, *Findings from Cambodia's Violence Against Children Survey 2013*. (Cambodia: Ministry of Women's Affairs, 2014), p89 [1765]; Malawi: Ministry of Gender, Children, Disability and Social Welfare of the Republic of Malawi, United Nations Children's Fund, The Center for Social Research at the University of Malawi, and the Centers for Disease Control and Prevention, *Violence against Children and Young Women in Malawi: Findings from a National Survey, 2013*. (Lilongwe, Malawi: Government of Malawi, 2014), p78 [1766]; Nigeria: National Population Commission of Nigeria, UNICEF Nigeria, and the US Centers for Disease Control and Prevention, *Violence Against Children in Nigeria: Findings from a National Survey, 2014*. (Abuja, Nigeria: UNICEF, 2016), p32 [1767]; Eswatini, Swaziland: UNICEF Swaziland, *A National Study on Violence Against Children and Young Women in Swaziland*. (Eswatini: UNICEF, 2007), p20 [1768]
- 28 Crime Survey for England and Wales, Office for National Statistics, "Reasons for not reporting incidents of crime to the police, year ending March 2017," (Excel spreadsheet from CSEW, 2017); accessed March 20, 2019, <https://www.ons.gov.uk/file?uri=/peoplepopulationandcommunity/crimeandjustice/adhocs/007750reasonsfornotreportingcrimetothepolice2016to2017crimesurveyforenglandandwales/reasonsfornotreportingtothepolice201617csew.xls> [1687]
- 29 Action Aid, "Women say reporting sexual harassment is 'pointless'," March 8, 2018; accessed March 20, 2019, <https://www.actionaid.org.uk/latest-news/women-say-reporting-sexual-harassment-is-pointless>
- 30 FBI, "2017 Crime in the United States - Clearances," accessed November 12, 2018, <https://ucr.fbi.gov/crime-in-the-u.s/2017/crime-in-the-u.s.-2017/topic-pages/clearances>
- 31 Matar en México, "Esclarecer un Homicidio en México es una excepción y no la regla: tomaría 124 años resolver los casos impunes," accessed March 20, 2019, <https://www.animalpolitico.com/muertos-mexico-homicidios-impunidad/homicidios-impunes-mexico.php>
- 32 World Justice Project, "Measuring the Justice Gap: A People-Centered Assessment of Unmet Justice Needs Around the World" (Task Force on Justice, background paper, April 2019).
- 33 Only 10 percent of sexual assaults are recorded. Studies demonstrate conviction rates of below 10 percent for rape in the following countries: UK (<https://www.cps.gov.uk/sites/default/files/documents/publications/vawg-2017-2018-tables.xlsx>); South Africa (<https://africacheck.org/factsheets/south-africas-crime-statistics-201617/>); Australia (Karen Gelb, "The attrition of sexual assaults through the criminal justice system, Australia, 2005 7," accessed November 12, 2018, https://www.researchgate.net/figure/The-attrition-of-sexual-assaults-through-the-criminal-justice-system-Australia-2005-7_fig2_252406192).
- 34 World Justice Project, "Measuring the Justice Gap: A People-Centered Assessment of Unmet Justice Needs Around the World" (Task Force on Justice, background paper, April 2019).
- 35 Hiil, *Understanding Justice Needs - The Elephant in the Courtroom*. (The Hague: Hiil, 2018). [1562]
- 36 Hiil, *Understanding Justice Needs - The Elephant in the Courtroom*. (The Hague: Hiil, 2018). [1562]
- 37 Action Committee on Access to Justice in Civil and Family Matters, *Prevention, Triage and Referral Working Group - Final Report: Responding Early, Responding Well: Access to Justice through the Early Resolution Services Sector*. (Ottawa: Action Committee on Access to Justice in Civil and Family Matters, 2013). [1313]
- 38 Law Council of Australia, *The Justice Project Final Report - Overarching Themes*. (Canberra: Law Council of Australia, 2018). [1496]
- 39 Gillian Hadfield, *Rules for a Flat World*. (Oxford, Oxford University Press, 2016).

- 40 Commission on Legal Empowerment of the Poor and United Nations Development Programme, *Making the Law Work for Everyone - Volume 1: Report of the Commission on Legal Empowerment of the Poor*. (New York: Commission on Legal Empowerment of the Poor and United Nations Development Programme, 2008). [66]
- 41 United Nations Children's Fund, *Every Child's Birth Right: Inequities and trends in birth registration*. (New York: UNICEF, 2013). [127]
- 42 David E Phillips, Carla AbouZahr, Alan D Lopez, Lene Mikkelsen, Don de Savigny, Rafael Lozano, John Wilmoth and Philip W Setel, "Are well functioning civil registration and vital statistics systems associated with better health outcomes?", *The Lancet*, Vol. 386, No. 10001, pp1386-1394; accessed December 12, 2018, [http://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736\(15\)60172-6.pdf](http://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(15)60172-6.pdf) [77]
- 43 Vyjayanti T Desai, "The global identification challenge: Who are the 1 billion people without proof of identity?" *Voices Perspective on Development*, April 25, 2018; accessed March 20, 2019, <https://blogs.worldbank.org/voices/global-identification-challenge-who-are-1-billion-people-without-proof-identity>
- 44 Vyjayanti T Desai, Matthias Witt, Kamya Chandra, and Jonathan Marskell "Counting the uncounted: 1.1 billion people without IDs," *World Bank*, June 6, 2017; accessed March 20, 2019, <http://blogs.worldbank.org/ic4d/counting-invisible-11-billion-people-without-proof-legal-id>
- 45 The World Bank, "Why Secure Land Rights Matter," March 24, 2017; accessed December 20, 2018, <http://www.worldbank.org/en/news/feature/2017/03/24/why-secure-land-rights-matter>
- 46 High-level Group on Justice for Women, *Justice for Women - High-level Group Report*. (New York: UN Women, IDLO, World Bank and Task Force on Justice, 2019).[1814]; The World Bank, "Why Secure Land Rights Matter," March 24, 2017; accessed December 20, 2018, <http://www.worldbank.org/en/news/feature/2017/03/24/why-secure-land-rights-matter>
- 47 United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division, "World Urbanization Prospects: The 2018 Revision," custom data acquired via website, March 20, 2019; and Yongyang Cai, Harris Selod, and Jevgenijs Steinbuks, *Urbanization and property rights (English)*. Policy Research working paper; no. WPS 7486. (Washington DC: World Bank Group, 2015); accessed March 20, 2019, <http://documents.worldbank.org/curated/en/827371467999377785/Urbanization-and-property-rights>
- 48 International Labour Office, *Women and Men in the Informal Economy: A Statistical Picture*. (Geneva: ILO, 2018). [1483]
- 49 International Labour Office, *Women and Men in the Informal Economy: A Statistical Picture*. (Geneva: ILO, 2018). [1483]
- 50 Vivek Maru and Varun Gauri (eds), *Community Paralegals and the Pursuit of Justice*. (Cambridge: Cambridge University Press, 2018), chapter 2. [1230]
- 51 Juan Antonio Le Clercq Ortega and Gerardo Rodriguez Sanchez Lara, *Global Impunity Dimensions - GII-2017 Global Impunity Index*. (Puebla: Fundación Universidad de las Américas, 2017). [1660]
- 52 See: United Nations Human Rights Office of the High Commissioner, "Convention on the rights of the child," accessed April 7, 2019, <https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx>
- 53 See: World Health Organization, "Universal health coverage," accessed March 27, 2019, [https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/universal-health-coverage-\(uhc\)](https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/universal-health-coverage-(uhc))
- 54 United Nations General Assembly, "Declaration of the High-level Meeting of the General Assembly on the Rule of Law at the National and International Levels," UN Doc: A/RES/67/1, 2012. [766]
- 55 United Nations and World Bank, *Pathways for Peace: Inclusive Approaches to Preventing Violent Conflict*. (Washington DC: World Bank, 2018), p20. [1255]
- 56 See World Bank, "Data - Tunisia," accessed March 27, 2019, <https://data.worldbank.org/country/tunisia>
- 57 UNDP, *Human Development Report 2010: The Real Wealth of Nations: Pathways to Human Development*. (New York: United Nations Development Programme, 2010). [1802]; United Nations, "'There Is a Straight Line from the Human Development Report to the Millennium Development Goals,' Says Secretary-General at Launch of 2010 Report," November 4, 2010; accessed April 7, 2019, <https://www.un.org/press/en/2010/sgsm13229.doc.htm>
- 58 HiIL, "HiIL Launches Justice Data Report on Tunisia," May 11, 2017; accessed March 27, 2019, <https://www.hiil.org/news/hiil-launches-justice-data-report-on-tunisia/>
- 59 Peter Beaumont, "Mohammed Bouazizi: the dutiful son whose death changed Tunisia's fate," *The Guardian*, January 20, 2011; accessed March 27, 2019, <https://www.theguardian.com/world/2011/jan/20/tunisian-fruit-seller-mohammed-bouazizi>
- 60 OECD, "Building a Business Case for Access to Justice," *OECD White Paper Preliminary draft*, 2018. [1501]
- 61 OECD, "Building a Business Case for Access to Justice," *OECD White Paper Preliminary draft*, 2018. [1501]
- 62 OECD, "Building a Business Case for Access to Justice," *OECD White Paper Preliminary draft*, 2018. [1501]
- 63 Trevor C W Farrow, Ab Currie, Nicole Aylwin, Les Jacobs, David Northrup and Lisa Moore, *Everyday Legal Problems and the Cost of Justice in Canada: Overview report*. (Toronto: Canadian Forum on Civil Justice, 2016). [506]
- 64 OECD, "Building a Business Case for Access to Justice," *OECD White Paper Preliminary draft*, 2018. [1501]
- 65 World Health Organization, *Global Status Report On Violence Prevention 2014*. (Geneva: WHO, 2014). [55]
- 66 Susan Hillis, James Mercy, Adaugo Amobi, and Howard Kress, "Global Prevalence of Past year Violence Against Children: A Systematic Review and Minimum Estimates," *Pediatrics*. 2016;137(3):e20154079. [102]
- 67 Know Violence in Childhood, *Ending Violence in Childhood. Global Report 2017*. (New Delhi: Know Violence in Childhood, 2017). [1352]
- 68 World Health Organization, London School of Hygiene & Tropical Medicine, and South African Medical Research Council, *Global and regional estimates of violence against women: prevalence and health effects of intimate partner violence and nonpartner sexual violence*. (Geneva: WHO, 2013). [105]

- 69 Seema Vyas, *Estimating the Association between Women's Earnings and Partner Violence: Evidence from the 2008–2009 Tanzania National Panel Survey* (Washington, DC: World Bank, 2013).
- 70 Klaus Deininger and Raffaella Castagnini, "Incidence and impact of land conflict in Uganda," *World Bank Policy Research Working Paper 3248*, March 2004; accessed December 21, 2018, <http://web.worldbank.org/archive/website01066/WEB/IMAGES/I09509-2.PDF> [1564]
- 71 HiiL, *Justice Needs and Satisfaction in Nigeria 2018: Legal problems in daily life*. (The Hague: HiiL, 2018). [1481]
- 72 Citizens Advice, *A Debt Effect? How is unmanageable debt related to other problems in people's lives?* (London: Citizens Advice, 2016). [1563]
- 73 Lester Coleman and Fiona Glenn, *When couples part: Understanding the consequences for adults and children*. (London: One Plus One, undated). [1330]; Center on International Cooperation, "Challenge paper: Justice as Prevention," (Background paper for the Task Force on Justice, Discussion Draft, December 14, 2018).
- 74 Trevor C W Farrow, Ab Currie, Nicole Aylwin, Les Jacobs, David Northrup and Lisa Moore, *Everyday Legal Problems and the Cost of Justice in Canada: Overview report*. (Toronto: Canadian Forum on Civil Justice, 2016), p18. [506]
- 75 HiiL, *Justice Needs and Satisfaction in Nigeria 2018: Legal problems in daily life*. (The Hague: HiiL, 2018). [1481]
- 76 United Nations and World Bank, *Pathways for Peace: Inclusive Approaches to Preventing Violent Conflict*. (Washington DC: World Bank, 2018), p168. [1255]
- 77 United Nations and World Bank, *Pathways for Peace: Inclusive Approaches to Preventing Violent Conflict*. (Washington DC: World Bank, 2018). [1255]
- 78 World Bank, *World Development Report 2011 - Conflict, Security and Development*. (Washington DC: World Bank, 2011), pp82-83. [58]
- 79 Paul Collier, "The Market for Civil War," *Foreign Policy*, November 2, 2009; accessed March 27, 2019, <https://foreignpolicy.com/2009/11/02/the-market-for-civil-war/>
- 80 High-Level Group on Justice for Women, "Justice for Women – High Level Group Report," (High-Level Group on Justice for Women, 2019).
- 81 Paulo R. A. Loureiro and Emilson Caputo Delfino Silva, "Does Violence Deter Investment and Hinder Economic Growth?" *Brazilian Review of Econometrics*, v. 30, no 1, pp53–67 May 2010; accessed December 31, 2018, <https://pdfs.semanticscholar.org/fd24/efb5b26e198e389db548c7dc6186f208332e.pdf> [1605]
- 82 CEIC, "Tunisia Real GDP Growth," accessed March 27, 2019, <https://www.ceicdata.com/en/indicator/tunisia/real-gdp-growth>
- 83 Institute for Economics & Peace, *Mexico Peace Index 2018 - Mapping the Evolution of Peace and its Drivers*. (Sydney: Institute for Economics & Peace, 2018). [1795]
- 84 Institute for Economics & Peace, *Global Peace Index 2018 - Measuring Peace in a Complex World*. (Sydney: Institute for Economics and Peace, 2018). [1607]
- 85 High-Level Group on Justice for Women, "Justice for Women – High Level Group Report," (High-Level Group on Justice for Women, 2018, in draft)
- 86 Vanya Slavchevska et al. "Beyond Ownership: Tracking Progress on Women's Land Rights in Sub-Saharan Africa" (FAO Working Paper No. 15. Rome, 2016); accessed March 27, 2019, <http://gsars.org/wp-content/uploads/2017/01/WP-14.12.2016-Beyond-Ownership.pdf>; Annamaria Milazzo and Markus Goldstein, "Governance and Women's Economic and Political Participation: Power Inequalities, Formal Constraints and Norms," (Background paper for the 2017 World Development Report on Governance and the Law, June 13, 2017). [1794]
- 87 Q Wodon, C Male, A Nayihouba, A Onagoruwa, A Savadogo, A Yedan, J Edmeades, A Kes, N John, L Murithi, M Steinhaus, and S Petroni, *Economic Impacts of Child Marriage: Global Synthesis Brief*. (Washington DC: The World Bank and International Center for Research on Women, 2017). [1787]
- 88 L Sherr, I S Hensels, S Skeen, M Tomlinson, K J Roberts and A Macedo, "Exposure to violence predicts poor educational outcomes in young children in South Africa and Malawi," *Int Health* 2016; 8: 36–43, doi:10.1093/inthealth/ihv070, Advance Access, publication December 17, 2015; accessed December 31, 2018, <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4716801/pdf/ihv070.pdf> [1604]; and Lester Coleman and Fiona Glenn, *When couples part: Understanding the consequences for adults and children*. (London: One Plus One, undated). [1330]; Q Wodon, C Male, A Nayihouba, A Onagoruwa, A Savadogo, A Yedan, J Edmeades, A Kes, N John, L Murithi, M Steinhaus, and S Petroni, *Economic Impacts of Child Marriage: Global Synthesis Brief*. (Washington DC: The World Bank and International Center for Research on Women, 2017). [1787]
- 89 Sasha Reed, Stephen Roe, James Grimshaw and Rhys Oliver, *The economic and social costs of modern slavery*. Research Report 100 (London: The Home Office, 2018). [1771]
- 90 Trevor C W Farrow, Ab Currie, Nicole Aylwin, Les Jacobs, David Northrup and Lisa Moore, *Everyday Legal Problems and the Cost of Justice in Canada: Overview report*. (Toronto: Canadian Forum on Civil Justice, 2016). [506]
- 91 OECD and World Justice Project, "Building a Business Case for Access to Justice - An OECD White Paper in collaboration with the World Justice Project: Preliminary draft," 2018. [1755]
- 92 OECD and World Justice Project, "Building a Business Case for Access to Justice - An OECD White Paper in collaboration with the World Justice Project: Preliminary draft," 2018. [1755]
- 93 Commission on Legal Empowerment of the Poor and United Nations Development Programme, *Making the Law Work for Everyone - Volume 1: Report of the Commission on Legal Empowerment of the Poor*. (New York: Commission on Legal Empowerment of the Poor and United Nations Development Programme, 2008).[66]
- 94 Anne L. Buffardi and Kwan Men Yon, *Realising the right to legal identity - A case study as part of an evaluation of the Australia Indonesia Partnership for Justice*. (London: Overseas Development Institute, 2016). [1769]; World Bank Group, *The State of Identification Systems in Africa - A Synthesis of Country Assessments*. (Washington DC: International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank, 2017). [1770]

- 95 International Labour Organization, "More than 60 per cent of the world's employed population are in the informal economy," April 30, 2018; accessed March 27, 2019, https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_627189/lang-en/index.htm
- 96 See: The World Bank, "Doing Business – Enforcing Contracts: Why it Matters," accessed December 31, 2018, <http://www.doingbusiness.org/en/data/exploretopics/enforcing-contracts/why-matters>
- 97 United Nations and World Bank, *Pathways for Peace: Inclusive Approaches to Preventing Violent Conflict*. (Washington DC: World Bank, 2018), p2. [1255]
- 98 United Nations and World Bank, *Pathways for Peace: Inclusive Approaches to Preventing Violent Conflict*. (Washington DC: World Bank, 2018). [1255]
- 99 United Nations and World Bank, *Pathways for Peace: Inclusive Approaches to Preventing Violent Conflict*. (Washington DC: World Bank, 2018). [1255]
- 100 United Nations and State of Guatemala, *Agreement between the United Nations and State of Guatemala on the establishment of an International Commission Against Impunity in Guatemala (CICIG)*; accessed October 29, 2018, http://www.cicig.org/uploads/documents/mandato/cicig_acuerdo_en.pdf [1252]
- 101 Kelly-Ann Tsai, "The business case for addressing modern slavery in supply chains," *Transparency-One*, October 18, 2019; accessed March 27, 2019, <https://www.transparency-one.com/business-case-addressing-modern-slavery/>
- 102 Extractive Industries Transparency Initiative, *The EITI Standard 2016*. (Oslo: The EITI International Secretariat, 2016).
- 103 Ethical Trading Initiative and Ergon Associates, *Managing Risks Associated with Modern Slavery - A Good Practice Note for the Private Sector*, (London: Ethical Trading Initiative and Ergon Associates, undated). [1813]
- 104 Anthony Petrosino, Carolyn Turpin-Petrosino, Meghan E. Hollis-Peel, and Julia G. Lavenberg, "Scared Straight and Other Juvenile Awareness Programs for Preventing Juvenile Delinquency: A Systematic Review," *Campbell Systematic Reviews* 2013:5, DOI: 10.4073/csr.2013.5. [1774]
- 105 Thailand Institute of Justice and Penal Reform International, *Global Prison Trends 2018 – Special Focus Pull-Out section: the rehabilitation and reintegration of offenders in the era of sustainable development*. (London/Bangkok: Penal Reform International/Thailand Institute of Justice, 2018); accessed March 27, 2019, https://cdn.penalreform.org/wp-content/uploads/2018/04/PR1_Global-Prison-Trends-2018_EN_WEB.pdf
- 106 David Roodman, "The impacts of incarceration on crime," September 2017; accessed March 27, 2019, https://www.openphilanthropy.org/files/Focus_Areas/Criminal_Justice_Reform/The_impacts_of_incarceration_on_crime_10.pdf
- 107 UNICEF, *Progress for Children - A Report Card on Child Protection, Number 8, September 2009*. (New York: United Nations Children's Fund, 2009). [1601]
- 108 Centre for Human Rights & Humanitarian Law, *Protecting Children Against Torture in Detention: Global Solutions for a Global Problem*. (Washington DC: Washington College of Law, American University, 2017). [1788]
- 109 Alejandro Izquierdo, Carola Pessino, and Guillermo Vuletin (eds), *Better Spending for Better Lives - How Latin America and the Caribbean Can Do More with Less*. (Washington DC: Inter-American Development Bank, 2018). [1775]
- 110 Alejandro Izquierdo, Carola Pessino, and Guillermo Vuletin (eds), *Better Spending for Better Lives - How Latin America and the Caribbean Can Do More with Less*. (Washington DC: Inter-American Development Bank, 2018), p217. [1775]
- 111 Dr. James Austin and Lauren-Brooke Eisen with James Cullen and Jonathan Frank, *How Many Americans Are Unnecessarily Incarcerated?* (New York: Brennan Center for Justice, NYU School of Law, 2016). [1602]
- 112 OECD and World Justice Project, "Building a Business Case for Access to Justice - An OECD White Paper in collaboration with the World Justice Project: Preliminary draft," 2018. [1755]
- 113 Aubrey Fox and Robert V. Wolf, *The Future of Drug Courts - How States are Mainstreaming the Drug Court Model*. (New York: Centre for Court Innovation, 2004). [1796]; see, NYCourts.gov, "Drug Treatment Courts," accessed January 28, 2019, http://www.nycourts.gov/courts/problem_solving/drugcourts/index.shtml
- 114 Heather Strang, Lawrence W Sherman, Evan Mayo-Wilson, Daniel Woods, and Barak Ariel, "Restorative Justice Conferencing (RJC) Using Face-to-Face Meetings of Offenders and Victims: Effects on Offender Recidivism and Victim Satisfaction. A Systematic Review," *Campbell Systematic Reviews* 2013:12, DOI: 10.4073/csr.2013.12. [1356]
- 115 Lawrence W Sherman, *The Rise of Evidence-Based Policing: Targeting, Testing, and Tracking*. (Chicago IL: University of Chicago, 2013); accessed October 29, 2018, <https://cebcp.org/wp-content/evidence-based-policing/Sherman-TripleT.pdf>, p7. [1274]; Rob Allen and Vivien Stern (eds), *Justice Reinvestment – A New Approach to Crime and Justice*. (London: International Centre for Prison Studies, 2007). [1780]
- 116 Stephen Golub, "Grassroots Justice: The Roles and Impacts of Paralegals," forthcoming
- 117 A Lawrence, J Nugent and C Scarfone, *The Effectiveness of Using Mediation in Selected Civil Law Disputes: A Meta-Analysis*. (Ottawa: Department of Justice Canada, 2007). [1579]
- 118 Shanawez Hossain and Nabila Zaman, *Cost-Benefit Study on Implementing [sic] Village Courts in Union Parishads of Bangladesh*. (Copenhagen: Copenhagen Consensus Center, 2016). [644]
- 119 Citizens Advice, *How we make a difference: Our impact in 2017/18*. (London: Citizens Advice, 2018). [1460]
- 120 Trevor C W Farrow, Ab Currie, Nicole Aylwin, Les Jacobs, David Northrup, and Lisa Moore, *Everyday Legal Problems and the Cost of Justice in Canada: Overview report*. (Toronto: Canadian Forum on Civil Justice, 2016). [506]
- 121 Stout Risius Ross Inc, "The Financial Cost and Benefits of Establishing a Right to Counsel in Eviction Proceedings Under Intro 214-A," (Paper Presented for: Pro Bono and Legal Services Committee of the New York City Bar Association, March 16, 2016). [1502]
- 122 J Stubbs and Associates, "Economic Cost Benefit Analysis of Community Legal Centres," (paper prepared by the National Association of Community Legal Centres Inc, 2012).

- 123 Carla AbouZahr, Don de Savigny, Lene Mikkelsen, Philip W Setel, Rafael Lozano, Erin Nichols, Francis Notzon and Alan D Lopez, "Civil registration and vital statistics: progress in the data revolution for counting and accountability," *The Lancet*, Vol. 386, No. 10001, pp1373-1385; accessed March 27, 2019, [http://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736\(15\)60173-8.pdf](http://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(15)60173-8.pdf)
- 124 ID4D, "Identification for Development - Strategic Framework," 2016; accessed April 7, 2019, <http://pubdocs.worldbank.org/en/21571460567481655/April-2016-ID4D-Strategic-RoadmapID4D.pdf> [516]
- 125 David E Phillips, Carla AbouZahr, Alan D Lopez, Lene Mikkelsen, Don de Savigny, Rafael Lozano, John Wilmoth and Philip W Setel, "Are well functioning civil registration and vital statistics systems associated with better health outcomes?" *The Lancet*, Vol. 386, No. 10001, pp1386-139. [77]
- 126 World Bank Group and WHO, "Global Civil Registration and Vital Statistics - Scaling up Investment Plan 2015-2024," accessed March 27, 2019, http://www.who.int/healthinfo/civil_registration/WB-WHO_ScalingUp_InvestmentPlan_2015_2024.pdf?ua=1
- 127 Alan Gelb and Julia Clark, "Identification for Development: The Biometrics Revolution," *Working Paper 315*, January 2015 (Washington DC: Center for Global Development, 2015) accessed March 27, 2019, http://www.cgdev.org/sites/default/files/1426862_file_Biometric_ID_for_Development.pdf; BBC, "Q&A: Identity cards," *BBC News Online*, July 2, 2009; accessed April 7, 2019, http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/3127696.stm
- 128 Mika-Petteri Törhönen, Aanchal Anand and Gavin Adlington, "Economic Impact of 20 Years of ECA Land Registration Projects" (Paper prepared for presentation at the Annual World Bank Conference on Land and Poverty, The World Bank - Washington DC, March 24-27, 2014); accessed March 27, 2019, <http://pubdocs.worldbank.org/en/448801496163447316/Economic-Impact-of-20-Years-of-ECA-land-registration-projects-FINAL.pdf> [1781]
- 129 Linus Pott, "Securing land tenure with smartphones," The World Bank, November 14, 2018; accessed March 27, 2019, <https://blogs.worldbank.org/sustainablecities/securing-land-tenure-smartphones>
- 130 Mika-Petteri Törhönen, Aanchal Anand and Gavin Adlington, "Economic Impact of 20 Years of ECA Land Registration Projects" (Paper prepared for presentation at the Annual World Bank Conference on Land and Poverty, The World Bank - Washington DC, March 24-27, 2014); accessed March 27, 2019, <http://pubdocs.worldbank.org/en/448801496163447316/Economic-Impact-of-20-Years-of-ECA-land-registration-projects-FINAL.pdf> [1781]
- 131 High-Level Group on Justice for Women, "Justice for Women – High Level Group Report," (High-Level Group on Justice for Women, 2018, in draft).
- 132 John Rand and Nina Torm, "The Benefits of Formalization: Evidence from Vietnamese Manufacturing SMEs," *World Development*, Volume 40, Issue 5, May 2012, pp 983-998; accessed March 27, 2019, <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305750X11002269>
- 133 Melanie Khamis, "Formalization of jobs and firms in emerging market economies through registration reform," *IZA World of Labor* 2014: 67 doi: 10.15185/izawol.67
- 134 Amolo Ng'weno and David Porteous, "Let's Be Real: The Informal Sector and the Gig Economy are the Future, and the Present, of Work in Africa," Center for Global Development, October 15, 2018; accessed March 27, 2019, <https://www.cgdev.org/publication/lets-be-real-informal-sector-and-gig-economy-are-future-and-present-work-africa>; Najj Benhassine, David McKenzie, Victor Pouliquen and Massimiliano Santini, "Finding a Path to Formalization in Benin - Early Results after the Introduction of the Entrepreneur Legal Status," *Policy Research Working Paper 7510*. (Washington DC: World Bank, 2015); accessed March 27, 2019, <https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/23472/Finding0a0path0prenant0legal0status.pdf?sequence=5&isAllowed=y> [1782]
- 135 Marcus Manuel, Clare Manuel and Harsh Desai, *Universal access to basic justice: costing SDG 16.3*. (London: Overseas Development Institute, 2019). Paper prepared for the Task Force on Justice.
- 136 Marcus Manuel, Clare Manuel and Harsh Desai, *Universal access to basic justice: costing SDG 16.3*. (London: Overseas Development Institute, 2019). Paper prepared for the Task Force on Justice.
- 137 Marcus Manuel, Clare Manuel and Harsh Desai, *Universal access to basic justice: costing SDG 16.3*. (London: Overseas Development Institute, 2019). Paper prepared for the Task Force on Justice.
- 138 For further details see: Marcus Manuel, Clare Manuel and Harsh Desai, *Universal access to basic justice: costing SDG 16.3*. (London: Overseas Development Institute, 2019), Annex C. Paper prepared for the Task Force on Justice.
- 139 UNODC/UNDP, *Global Study on Legal Aid - Global Report*. (New York/Vienna: UNDP/UNODC, 2016). [722]
- 140 Bernard Harborne, William Dorotinsky, and Paul M Bisca (eds), *Securing Development: Public Finance and the Security Sector*. (Washington DC: World Bank, 2017). [1807]
- 141 Graham Farrell and Ken Clark, *What does the world spend on criminal justice?* (Helsinki: European Institute for Crime Prevention and Control, affiliated with the UN, 2004). [1556]
- 142 Mark Shaw, Jan van Dijk and Wolfgang Rhomberg, "Determining Trends in Global Crime and Justice: An Overview of Results From the United Nations Surveys of Crime Trends and Operations of Criminal Justice Systems," *Forum on Crime and Society*, vol. 3, Nos. 1 and 2, December 2003. [1809]
- 143 Dean T Jamison et al, "Universal health coverage and intersectoral action for health: key messages from Disease Control Priorities, 3rd edition," *Lancet*. 2018 March 17; 391(10125): 1108-1120. doi:10.1016/S0140-6736(17)32906-9; accessed March 27, 2019, <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5996988/pdf/nihms972816.pdf> [1783]
- 144 Alejandro Izquierdo, Carola Pessino, and Guillermo Vuletin (eds), *Better Spending for Better Lives - How Latin America and the Caribbean Can Do More with Less*. (Washington DC: Inter-American Development Bank, 2018). [1775]
- 145 Calculated using data from: European Commission for the Efficiency of Justice, "European judicial systems - Efficiency and quality of justice," *CEPEJ Studies* No. 26, 2018 Edition (2016 Data) (Strasbourg: Council of Europe, 2018). [1695]
- 146 United Nations Assistance Mission in Somalia and the World Bank, *Federal Republic of Somalia - Somalia Security and Justice Sector Public Expenditure Review*. (Washington DC: World Bank, 2017). [1808]

- 147 United Nations and World Bank, *Pathways for Peace: Inclusive Approaches to Preventing Violent Conflict*. (Washington DC: World Bank, 2018), Box 6.4. [1255]
- 148 World Bank Group and WHO, *Global Civil Registration and Vital Statistics - Scaling up Investment Plan 2015-2024*. (Washington DC: World Bank Group, 2014). [453]
- 149 Alan Gelb and Julia Clark, "Identification for Development: The Biometrics Revolution," *Working Paper 315*, January 2015 (Washington DC: Center for Global Development, 2015) accessed March 27, 2019, http://www.cgdev.org/sites/default/files/1426862_file_Biometric_ID_for_Development.pdf
- 150 OECD and World Justice Project, "Building a Business Case for Access to Justice - An OECD White Paper in collaboration with the World Justice Project: Preliminary draft," 2018. [1755]
- 151 Bernard Harborne, William Dorotinsky, and Paul M Bisca (eds), *Securing Development: Public Finance and the Security Sector*. (Washington DC: World Bank, 2017). [1807]
- 152 Marcus Manuel and Clare Manuel, "Achieving equal access to justice for all by 2030: lessons from global funds," *Working Paper 537*. (London: Overseas Development Institute, 2018); accessed December 21, 2018 <https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/resource-documents/12307.pdf> [1225]
- 153 OECD, *States of Fragility 2018*. (Paris: OECD Publishing, 2018). [1173]
- 154 Abhilash Mudaliar, Rachel Bass, and Hannah Dithrich, *2018 Annual Impact Investor Survey*. (New York: Global Impact Investing Network, 2018). [1810]
- 155 High-Level Group on Justice for Women, "Justice for Women - High Level Group Report - Executive Summary," (High-Level Group on Justice for Women, 2018, in draft).
- 156 High-level Group on Justice for Women, *Justice for Women - High-level Group Report*. (New York: UN Women, IDLO, World Bank and Task Force on Justice, 2019). [1814]
- 157 Susan Hillis, James Mercy, Adaugo Amobi, and Howard Kress, "Global Prevalence of Past year Violence Against Children: A Systematic Review and Minimum Estimates," *Pediatrics*. 2016;137(3):e20154079, accessed November 12, 2018, <http://pediatrics.aappublications.org/content/pediatrics/137/3/e20154079.full.pdf> [102]
- 158 International Labour Office, *Global estimates of modern slavery: Forced labour and forced marriage*. (Geneva: ILO and Walk Free Foundation, 2017). [1477]
- 159 Centre for Human Rights & Humanitarian Law, *Protecting Children Against Torture in Detention: Global Solutions for a Global Problem*. (Washington DC: Washington College of Law, American University, 2017). [1788]
- 160 Law Council of Australia, *The Justice Project Final Report*. (Sydney: The Law Council of Australia, 2018). [1236]
- 161 United Nations General Assembly, "Report of the Special Rapporteur on contemporary forms of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance, Mutuma Ruteere," UN Doc. A/HRC/29/46 (April 20, 2015); accessed January 28, 2019, <https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Racism/A-HRC-29-46.pdf> [1663]
- 162 HiiL, *Justice Needs and Satisfaction in Jordan 2017 - Legal problems in daily life*. (The Hague: HiiL, 2017). [1486]
- 163 UNESCO, *Education for All Global Monitoring Report 2013-2014 - Teaching and learning: achieving quality for all*. (Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 2014).
- 164 World Justice Project, "Measuring the Justice Gap: A People-Centered Assessment of Unmet Justice Needs Around the World" (Task Force on Justice, background paper, April 2019).
- 165 National Statistical Office crime victimization survey data published on UNODC-INEGI's *Atlas of Victimization Surveys*; accessed by the World Justice Project January 2019, <http://www.cdeunodc.inegi.org.mx/index.php/mapa/>
- 166 Pascoe Pleasence and Nigel J Balmer, "Justice & the Capability to Function in Society," *Daedalus*, 148 (1) Winter 2019. [1629]
- 167 Robert Muggah and Katherine Aguirre Tobón, "Reducing Latin America's violent hot spots," *Aggression and Violent Behavior*. In press, corrected proof, available online October 5, 2018; accessed March 27, 2019, <https://doi.org/10.1016/j.avb.2018.09.003> [1776]
- 168 Robert Muggah and Katherine Aguirre Tobón, "Reducing Latin America's violent hot spots," *Aggression and Violent Behavior*. In press, corrected proof, available online October 5, 2018; accessed March 27, 2019, <https://doi.org/10.1016/j.avb.2018.09.003> [1776]
- 169 Lawrence W Sherman, Patrick R Gartin, and Michael E Buerger, "Hot Spots of Predatory Crime: Routine Activities and the Criminology of Place," *Criminology*, Volume 27, Issue 1, February 1989, pp27-56; accessed March 27, 2019, <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1745-9125.1989.tb00862.x>
- 170 Alliance for Safety and Justice, *Crime survivors speak: the first-ever national survey of victims' views on safety and justice*. (San Francisco: Alliance for Safety and Justice, 2016). [1472]
- 171 Lawrence W Sherman, Heather Strang, Caroline Angel, Daniel Woods, Geoffrey C Barnes, Sarah Bennett, and Nova Inkpen, "Effects of face-to-face restorative justice on victims of crime in four randomized, controlled trials," *Journal of Experimental Criminology* (2005) 1: 367-395. [1469]
- 172 Lawrence W Sherman, Heather Strang, Caroline Angel, Daniel Woods, Geoffrey C Barnes, Sarah Bennett, and Nova Inkpen, "Effects of face-to-face restorative justice on victims of crime in four randomized, controlled trials," *Journal of Experimental Criminology* (2005) 1: 367-395. [1469]
- 173 Alliance for Safety and Justice, *Crime survivors speak: the first-ever national survey of victims' views on safety and justice*. (San Francisco: Alliance for Safety and Justice, 2016). [1472]
- 174 United Nations General Assembly, *Report of the Special Rapporteur on the promotion of truth, justice, reparation and guarantees of non-recurrence, Pablo de Greiff*, UN Doc: A/HRC/21/46 (August 9, 2012). [1805]
- 175 Simon Robins, "Towards Victim-Centred Transitional Justice: Understanding the Needs of Families of the Disappeared in Postconflict Nepal," *The International Journal of Transitional Justice*, Vol. 5, 2011, 75-98, doi:10.1093/ijtj/ijq027. [1804]

- 176 Impunity Watch, "Victim Participation and Transitional Justice in Cambodia: the case of the Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia (ECCC)," accessed April 7, 2019, [https://www.impunitywatch.org/docs/IW_Report_Victim_Participation_in_Cambodia_\(April_2016\).pdf](https://www.impunitywatch.org/docs/IW_Report_Victim_Participation_in_Cambodia_(April_2016).pdf) [1122]
- 177 Hiil, *Understanding Justice Needs - The Elephant in the Courtroom*. (The Hague: Hiil, 2018). [1562]
- 178 Vivek Maru and Varun Gauri (eds), *Community Paralegals and the Pursuit of Justice*. (Cambridge: Cambridge University Press, 2018), chapter on Sierra Leone. [1230]
- 179 Lori Anne Shaw, "Divorce Mediation Outcome Research: A Meta-Analysis," *Conflict Resolution Quarterly*, vol. 27, no. 4, Summer 2010. [1358]
- 180 American Bar Association, *Guide to Resolving Legal Disputes: Inside and Outside the Courtroom*. (London: Random House Reference, 2007), Chapter 5. [1812]
- 181 Keir Starmer, "Britain's criminal justice system fails the vulnerable. We need a Victims' Law," *The Guardian*, February 3, 2014; accessed April 7, 2019, <https://www.theguardian.com/commentisfree/2014/feb/03/britain-criminal-justice-system-victims-law-public-prosecutions>
- 182 Srimati Basu, "Judges of Normality: Mediating Marriage in the Family Courts of Kolkata, India," *Signs*, Vol. 37, No. 2, Unfinished Revolutions. A special issue edited by Phillip Rothwell (January 2012), pp469-492; accessed November 23, 2019, <https://www.jstor.org/stable/10.1086/661712> [1357]
- 183 ACPF and DCI, *Achieving Child Friendly Justice in Africa*. (Addis Ababa and Geneva: The African Child Policy Forum/Defence for Children International Secretariat, 2002). [1811]
- 184 American Bar Association, *Guide to Resolving Legal Disputes: Inside and Outside the Courtroom*. (London: Random House Reference, 2007), Chapter 5. [1812]
- 185 IDLO, *Policy and Issue Brief - Navigating Complex Pathways to Justice: Engagement with Customary and Informal Justice Systems*. (Rome: International Law Development Organization, 2019). [1786]
- 186 See: Vivek Maru, "How to put the power of law in people's hands," TEDGlobal 2017; accessed December 12, 2018, https://www.ted.com/talks/vivek_maru_how_to_put_the_power_of_law_in_people_s_hands?language=en
- 187 OECD and Open Society Foundations, *Leveraging the SDGs for Inclusive Growth: Delivering Access to Justice for All*. (Paris and New York: OECD and Open Society Foundations, 2016). [1063]
- 188 The Law & Development Partnership, *Developing a portfolio of financially sustainable, scalable basic legal service models - Briefing paper*. (London: The Law & Development Partnership, 2016). [168]
- 189 Mental Welfare Commission for Scotland, *Supported Decision-Making: Good Practice Guide*. (Edinburgh: Mental Welfare Commission for Scotland, 2016). [1459]
- 190 Justin Sandefur and Bilal Siddiqui, "Delivering Justice to the Poor: Theory and Experimental Evidence from Liberia," March 15, 2015; accessed December 12, 2018, <https://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/Event/DEC/ABCDE/ABCDE-2015/191.%20Bilal%20Murtaza%20Siddiqi.pdf> [1233]
- 191 Hiil, "Just Understandings: The Elephant in the Courtroom - draft report," (The Hague: Hiil, 2018). [1237]
- 192 Rebecca L Sandefur and Thomas M Clarke, "Roles beyond Lawyers: Summary, Recommendations, and Research Report of an Evaluation of the New York City Court Navigators Program and Its Three Pilot Projects," December 8, 2016; accessed December 12, 2018, <https://ssrn.com/abstract=2949038>. [1453]; Justin Sandefur and Bilal Siddiqui, "Delivering Justice to the Poor: Theory and Experimental Evidence from Liberia," March 15, 2015; accessed December 12, 2018, <https://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/Event/DEC/ABCDE/ABCDE-2015/191.%20Bilal%20Murtaza%20Siddiqi.pdf> [1233]
- 193 Anna Wilczynski, Maria Karras, and Suzie Forell, "The outcomes of community legal education: a systematic review," *Justice Issues Paper 18*. Law and Justice Foundation of New South Wales, December 2014; accessed December 12, 2018, [http://www.lawfoundation.net.au/ljf/site/articleIDs/18C587ECBD959D50CA257A91001F76F0/\\$file/J118_Outcomes_of_CLE_FINAL_web.pdf](http://www.lawfoundation.net.au/ljf/site/articleIDs/18C587ECBD959D50CA257A91001F76F0/$file/J118_Outcomes_of_CLE_FINAL_web.pdf) [1461]
- 194 Rebecca L Sandefur and Thomas M Clarke, "Roles beyond Lawyers: Summary, Recommendations, and Research Report of an Evaluation of the New York City Court Navigators Program and Its Three Pilot Projects," December 8, 2016; accessed December 12, 2018, <https://ssrn.com/abstract=2949038> [1453]
- 195 Stephanie A Duriez, Carrie Sullivan, Christopher J Sullivan, Sarah M Manchak, and Edward J Latessa, *Mentoring Best Practices Research: Effectiveness of Juvenile Mentoring Programs on Recidivism*. (Cincinnati: University of Cincinnati, 2017). [1462]
- 196 Laura Goodwin and Vivek Maru, *What do we know about legal empowerment? Mapping the Evidence*. (Washington DC: Namati, 2014), p26 [139]; and see: CADHAC, "Qué hacemos," accessed April 7, 2019, <http://cadhac.org/que-hacemos/>
- 197 UNODC/UNDP, *Global Study on Legal Aid - Global Report*. (New York/Vienna: UNDP/UNODC, 2016). [722]
- 198 USAID and United Nations Peacekeeping, *Assessment of Legal Aid in Haiti: Lessons Learned*. (Washington DC: USAID, 2017). [1464]
- 199 World Bank Group, *Women, Business and the Law 2018*. (Washington DC: International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank, 2018), p18. [1316]
- 200 Gillian Hadfield, *Rules for a Flat World*. (Oxford, Oxford University Press, 2016).
- 201 High-level Group on Justice for Women, *Justice for Women - High-level Group Report*. (New York: UN Women, IDLO, World Bank and Task Force on Justice, 2019), p60 [1814]
- 202 Richard Zorza, "Some First Key Thoughts on Court Simplification: the key to civil access and justice transformation," *Drake Law Review*, Vol 61, 2013, pp 845-881; accessed December 12, 2018, <https://www.srln.org/system/files/attachments/Zorza%20Simplification%202013.pdf> [1466]
- 203 Olivia Rope and Frances Sheahan, *Global Prison Trends 2018*. (London: Penal Reform International/Thailand Institute of Justice, 2018). [1433]

- 204 Martha Mutisi, "Local conflict resolution in Rwanda: The case of abunzi mediators," in Martha Mutisi et al eds., *Integrating Traditional and Modern Conflict Resolution: Experiences from selected cases in Eastern and the Horn of Africa*. (Durban: Accord, 2012).
- 205 Lorig Charkoudian, Deborah Thompson Eisenberg, and Jamie Walter, "What Difference Does ADR Make? Comparison of ADR and Trial Outcomes in Small Claims Court," *Conflict Resolution Quarterly*. Vol 5, Issue 1. Fall 2017: 7-45 [1467]; Scottish Civil Justice Council, *Access to justice literature review: Alternative dispute resolution in Scotland and other jurisdictions*. (Edinburgh: Scottish Civil Justice Council, 2014). [468]; J Shapland, G Robinson and A Sorsby, *Restorative Justice in Practice: Evaluating What Works for Victims and Offenders*. (London and New York: Routledge, 2011); Lawrence W Sherman, Heather Strang, Caroline Angel, Daniel Woods, Geoffrey C Barnes, Sarah Bennett, and Nova Inkpen, "Effects of face-to-face restorative justice on victims of crime in four randomized, controlled trials," *Journal of Experimental Criminology*, 1:367-395, 2005; accessed December 12, 2018, <https://link-springer-com.proxy.library.nyu.edu/content/pdf/10.1007%2Fs11292-005-8126-y.pdf> [1469]
- 206 Heather Strang, Lawrence W Sherman, Evan Mayo-Wilson, Daniel Woods, and Barak Ariel, "Restorative Justice Conferencing (RJC) Using Face-to-Face Meetings of Offenders and Victims: Effects on Offender Recidivism and Victim Satisfaction. A Systematic Review," *Campbell Systematic Reviews* 2013:12. [1356]
- 207 Mark VA Howard and Kristy A Martire, "Magistrates Early Referral into Treatment: An overview of the MERIT program as at June 2011," *Crime Prevention Issues* (Parramatta: NSW Government Crime Prevention Division, 2012). [1448]
- 208 Duane Wolf, "5 tips from Force Science on de-escalation tactics," *Policeone.com*. November 8, 2017; accessed December 4, 2018, <https://www.policeone.com/Officer-Safety/articles/457122006-5-tips-from-Force-Science-on-de-escalation-tactics/>; See also Australian Human Rights Commission, *Australian Study Tour Report: Visit of the UN Special Rapporteur on violence against women*. (Sydney: Australian Human Rights Commission, 2012). [1470]; Lawrence Sherman and Heather Strang, *Restorative Justice: The Evidence*. (London: The Smith Institute, 2007). [1471]
- 209 Mark VA Howard and Kristy A Martire, "Magistrates Early Referral into Treatment: An overview of the MERIT program as at June 2011," *Crime Prevention Issues* (Parramatta: NSW Government Crime Prevention Division, 2012). [1448]
- 210 Pathfinders for Peaceful, Just and Inclusive Societies, "The Argentinians who Bring Justice to the People who Need it Most," March 1, 2019; accessed April 7, 2019, <https://medium.com/sdg16plus/the-argentinians-who-bring-justice-to-the-people-who-need-it-most-efee671c0043>
- 211 HiiL, "Just Understandings: The Elephant in the Courtroom - draft report," (The Hague: HiiL, 2018). [1237]
- 212 United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *Global study on legal aid. Global Report*. (Vienna: UNODC, 2016), p25. [722]
- 213 Tom R Tyler, *Why People Obey the Law* (New Haven and London: Yale University Press, 1990).
- 214 HiiL, "Just Understandings: The Elephant in the Courtroom - draft report," (The Hague: HiiL, 2018). [1237]
- 215 Katherine Vaughan, Imogen Parker and Laura Bunt, *Responsive Justice: How citizens experience the justice system*. (London: Citizens Advice, 2015). [1437]
- 216 United Nations, "Universal Declaration of Human Rights," accessed December 12, 2018, <http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/>
- 217 Amnesty International, *10 Basic Human Rights Standards for Law Enforcement Officials*. (London: Amnesty International, 1998); accessed December 12, 2018, <https://www.amnesty.org/download/Documents/156000/pol300041998en.pdf>
- 218 Alliance for Safety and Justice, *Crime survivors speak: the first-ever national survey of victims' views on safety and justice*. (San Francisco: Alliance for Safety and Justice, 2016). [1472]
- 219 Heather Strang, Lawrence W Sherman, Evan Mayo-Wilson, Daniel Woods, and Barak Ariel, "Restorative Justice Conferencing (RJC) Using Face-to-Face Meetings of Offenders and Victims: Effects on Offender Recidivism and Victim Satisfaction. A Systematic Review," *Campbell Systematic Reviews* 2013:12, DOI: 10.4073/csr.2013.12. [1356]; Mark VA Howard and Kristy A Martire, "Magistrates Early Referral into Treatment: An overview of the MERIT program as at June 2011," *Crime Prevention Issues* (Parramatta: NSW Government Crime Prevention Division, 2012). [1448]; Nancy Kerry and Susan Pennell, *San Diego Homeless Court Program: a process and impact evaluation*. (San Diego: San Diego Association of Governments, 2001). [1473]
- 220 HiiL, *Understanding Justice Needs - The Elephant in the Courtroom*. (The Hague: HiiL, 2018). [1562]
- 221 Alliance for Safety and Justice, *Crime survivors speak: the first-ever national survey of victims' views on safety and justice*. (San Francisco: Alliance for Safety and Justice, 2016). [1472]
- 222 Rebecca L Sandefur and Thomas M Clarke, "Roles beyond Lawyers: Summary, Recommendations, and Research Report of an Evaluation of the New York City Court Navigators Program and Its Three Pilot Projects," December 8, 2016; accessed December 12, 2018, <https://ssrn.com/abstract=2949038> [1453]; Justin Sandefur and Bilal Siddiqui, "Delivering Justice to the Poor: Theory and Experimental Evidence from Liberia," March 15, 2015; accessed December 12, 2018, <https://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/Event/DEC/ABCDE/ABCDE-2015/191.%20Bilal%20Murtaza%20Siddiqui.pdf> [1233]
- 223 Jay Wiggan and Colin Talbot, *The Benefits of Welfare Rights Advice: A Review of the Literature*. (Manchester: National Association of Welfare Rights Advisors, 2006), pp6-7. [1474]; See: Citizens Advice website: <https://www.citizensadvice.org.uk/>; Citizens Advice, *How we make a difference: Our impact in 2017/18*. (London: Citizens Advice, 2018).[1460]
- 224 Stuart Rabner, "Bail Reform in New Jersey," in Deborah W Smith, Charles F Campbell and Blake P Kavanagh (eds), *2017 Trends in State Courts - Fines, Fees and Bail Practices: Challenges and Opportunities*. (Williamsburg VA: National Center for State Courts, 2017). [1475]
- 225 See: International Consortium for Court Excellence, "The International Framework for Court Excellence," accessed December 12, 2018, <http://www.courtexcellence.com/>
- 226 United Nations, *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. (New York: United Nations, 2015). [1]
- 227 Preamble to the Constitution of WHO as adopted by the International Health Conference, New York, 19 June - 22 July 1946; signed on 22 July 1946 by the representatives of 61 States (World Health Organization, "Official Records of the World Health

- Organization No. 2.” accessed March 27, 2019, https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/85573/Official_record2_eng.pdf?sequence=1, p. 100) and entered into force on 7 April 1948. The definition has not been amended since 1948.
- 228 United Nations and World Bank, *Pathways for Peace: Inclusive Approaches to Preventing Violent Conflict*. (Washington DC: World Bank, 2018). [1255]
- 229 Center on International Cooperation, “Challenge paper: Justice as Prevention,” (Background paper for the Task Force on Justice, Discussion Draft, December 14, 2018).
- 230 Thomas D Barton, “Preventive Law for Three-Dimensional Lawyers,” *19 Preventive L. Rep.* 29 (2001). [1223]
- 231 Andrew Hutchison, “How contracts drawn up as comic strips are being put to use in South Africa,” *The Conversation*, August 8, 2018; accessed November 23, 2018, <https://theconversation.com/how-contracts-drawn-up-as-comic-strips-are-being-put-to-use-in-south-africa-100835>
- 232 Thomas D Barton, “Preventive Law for Three-Dimensional Lawyers,” *19 Preventive L. Rep.* 29 (2001). [1223]; Thomas D Barton, *Preventive Law and Problem Solving: Lawyering for the Future*, 2009, p361. [1245]; Melissa Lorenzo-Hervé, “Innovative Alternative Dispute Prevention and Early Resolution Techniques (Practical Law Company),” *International Institute for Conflict Prevention & Resolution*; accessed October 29, 2018, <https://www.cpradr.org/news-publications/articles/2012-01-17-innovative-alternative-dispute-prevention-and-early-resolution-techniques-practical-law-company> [1295]
- 233 Clause Inc, “LegalZoom to Offer Smart Legal Contracts With Clause,” *PRNewswire*, September 17, 2018; accessed November 23, 2018, <https://www.prnewswire.com/news-releases/legalzoom-to-offer-smart-legal-contracts-with-clause-300713717.html>
- 234 HiiL, “Just Understandings – the Elephant in the Courtroom” (paper presented at Task Force on Justice Innovation Working Group meeting, Ottawa, October 31, 2018), p56. [1237]
- 235 Vivek Maru and Varun Gauri (eds), *Community Paralegals and the Pursuit of Justice*. (Cambridge: Cambridge University Press, 2018). South Africa chapter. [1230]
- 236 Vivek Maru and Varun Gauri (eds), *Community Paralegals and the Pursuit of Justice*. (Cambridge: Cambridge University Press, 2018). South Africa chapter. [1230]
- 237 For more information, see: <http://sautiafrica.org/>
- 238 See, for example: HiiL, *Understanding Justice Needs - The Elephant in the Courtroom*. (The Hague: HiiL, 2018). [1562]; Action Committee on Access to Justice in Civil and Family Matters, *Prevention, Triage and Referral Working Group - Final Report: Responding Early, Responding Well: Access to Justice through the Early Resolution Services Sector*. (Ottawa: Action Committee on Access to Justice in Civil and Family Matters, 2013). [1313]; Law Council of Australia, *The Justice Project Final Report*. (Sydney: Law Council of Australia, 2018). [1236]
- 239 Betsey Stevenson and Justin Wolfers, “Bargaining in the Shadows of the Law: Divorce Laws and Family Distress,” *The Quarterly Journal of Economics*, February 2006, President and Fellows of Harvard College and the Massachusetts Institute of Technology. [1315]
- 240 Law Council of Australia, *The Justice Project Final Report*. (Sydney: Law Council of Australia, 2018). [1236]
- 241 Law Council of Australia, *The Justice Project Final Report*. (Sydney: Law Council of Australia, 2018). [1236]
- 242 Ministry of Justice, *Justice Impact Test – Guidance*. (London: Ministry of Justice, 2018). [1608]
- 243 Ministry of Justice, *Justice Impact Test – Guidance*. (London: Ministry of Justice, 2018). [1608]
- 244 Vivek Maru and Varun Gauri (eds), *Community Paralegals and the Pursuit of Justice*. (Cambridge: Cambridge University Press, 2018), Sierra Leone chapter. [1230]
- 245 Vivek Maru, “Only the Law Can Restrain Trump,” *Foreign Policy*, March 9, 2017; accessed April 7, 2019, <https://foreignpolicy.com/2017/03/09/only-the-law-can-restrain-trump-legal-aid-barefoot-lawyers/> [1029]
- 246 See: Matthew Burnett and Tom Walker, “How Small Data Can Improve Access to Justice for the Poor,” May 2, 2018; accessed April 7, 2019, <https://www.opensocietyfoundations.org/voices/how-small-data-can-improve-access-justice-poor>; and Maaik de Langen, “Strategies to Increase Justice: The Goldmine of Individual Cases,” June 7, 2018; accessed April 7, 2019, <https://medium.com/sdg16plus/strategies-to-increase-justice-the-goldmine-of-individual-cases-756e0e8a8d1c>
- 247 See: Citizens Advice Bureau, “Our campaigns,” accessed March 27, 2019, <https://www.citizensadvice.org.uk/about-us/our-campaigns/>
- 248 Action Committee on Access to Justice in Civil and Family Matters, *Prevention, Triage and Referral Working Group - Final Report: Responding Early, Responding Well: Access to Justice through the Early Resolution Services Sector*. (Ottawa: Action Committee on Access to Justice in Civil and Family Matters, 2013). [1313]
- 249 William Blackstone, “Book the Fourth - Chapter the Eighteenth: Of the Means of Preventing Offences” in *Commentaries on the Laws of England*. (Oxford: Clarendon Press, 1765-1769); accessed October 29, 2018, http://avalon.law.yale.edu/18th_century/blackstone_bk4ch18.asp
- 250 Daniel Nagin, “Deterrence in the Twenty-First Century,” *Crime and Justice*, Vol. 42, No. 1, Crime and Justice in America 1975-2025 (August 2013), pp199-263; accessed October 27, 2018, <https://www.jstor.org/stable/10.1086/670398> p206. [1263]
- 251 Daniel Nagin, “Deterrence in the Twenty-First Century,” *Crime and Justice*, Vol. 42, No. 1, Crime and Justice in America 1975-2025 (August 2013), pp199-263; accessed October 27, 2018, <https://www.jstor.org/stable/10.1086/670398> p206. [1263]
- 252 Gaëlle Rivard Piché, “La Mano Dura: Lessons from El Salvador’s Security Sector Reform,” *Political Violence at a Glance*, May 31, 2016; accessed October 29, 2018, <http://politicalviolenceataglance.org/2016/05/31/la-mano-dura-lessons-from-el-salvadors-security-sector-reform/> [1267]
- 253 David Weisburd, David P Farrington Charlotte Gill (eds), *What Works in Crime Prevention and Rehabilitation - lessons from systematic reviews*. (New York: Springer, 2016), chapter 1. [1248]
- 254 Center for Evidence-Based Crime Policy, “Problem-Oriented Policing,” accessed October 29, 2018, <https://cebcp.org/evidence-based-policing/what-works-in-policing/research-evidence-review/problem-oriented-policing/>
- 255 National Institute of Justice, *Five Things about Deterrence*. (Washington DC: US Department of Justice, 2016). [1272]

- 256 Natalie Todak and Lois James, "A Systematic Social Observation Study of Police De-Escalation Tactics," *Police Quarterly*, Vol 21, Issue 4, 2018; accessed March 27, 2019, <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1098611118784007?journalCode=pqxa>
- 257 Simon Mackenzie and Alistair Henry, *Community Policing: a Review of the Evidence*. (Edinburgh: Scottish Government Social Research, 2009). [1360]
- 258 National Network for Safe Communities, "Proven strategies for reducing violence and strengthening communities," (New York: John Jay College of Criminal Justice, undated). [1275]
- 259 "Nationwide EUAM programme results in 385 new Community Policing trainers," *Unian Information Agency*, June 24, 2017; accessed November 23, 2018, <https://www.unian.info/society/1993999-nationwide-euam-programme-results-in-385-new-community-policing-trainers.html>
- 260 "Nationwide EUAM programme results in 385 new Community Policing trainers," *Unian Information Agency*, June 24, 2017; accessed November 23, 2018, <https://www.unian.info/society/1993999-nationwide-euam-programme-results-in-385-new-community-policing-trainers.html>
- 261 Phil Bowen and Stephen Whitehead, *Problem-solving courts: An evidence review*. (London: Centre for Justice Innovation, 2015). [1784]
- 262 Heather Strang, Lawrence W Sherman, Evan Mayo-Wilson, Daniel Woods, and Barak Ariel, "Restorative Justice Conferencing (RJC) Using Face-to-Face Meetings of Offenders and Victims: Effects on Offender Recidivism and Victim Satisfaction. A Systematic Review," *Campbell Systematic Reviews* 2013:12 DOI: 10.4073/csr.2013.12. [1356]
- 263 British Columbia Centre of Excellence for Women's Health, *Review of Interventions to Identify, Prevent, Reduce and Respond to Domestic Violence*. (London: NICE, 2013). [1289]
- 264 House of Commons Science and Technology Committee, "Evidence-based early years intervention - Eleventh Report of Session 2017-19," accessed March 27, 2019, <https://publications.parliament.uk/pa/cm201719/cmselect/cmsctech/506/506.pdf>
- 265 This is drawn from suggestions by the Technical Working Group on Justice for Children
- 266 WHO, CDC, End Violence Against Children, PAHO, PEPFAR, Together for Girls, UNICEF, UNODC, USAID, and World Bank, *INSPIRE - Seven Strategies for Ending Violence Against Children*. (Geneva: WHO, 2016). [478]; Julian Santaella-Tenorio, Magdalena Cerdá, Andrés Villaveces, and Sandro Galea, "What Do We Know About the Association Between Firearm Legislation and Firearm-Related Injuries?," *Epidemiologic Reviews*, Vol. 38, 2016. [1280]
- 267 UN Women, *A Framework to Underpin Action to Prevent Violence Against Women*. (New York: UN Women, 2015). [385]
- 268 World Health Organization, *Global Status Report On Violence Prevention 2014*. (Geneva: WHO, 2014), see discussion on p47. [55]
- 269 World Health Organization, *Global Status Report On Violence Prevention 2014*. (Geneva: WHO, 2014). [55]
- 270 Richard G Matzopoulos, Mary Lou Thompson, and Jonathan E Myers, "Firearm and Nonfirearm Homicide in 5 South African Cities: A Retrospective Population-Based Study," *American Journal of Public Health*, March 2014, Vol 104, No. 3. [1281]
- 271 WHO, CDC, End Violence Against Children, PAHO, PEPFAR, Together for Girls, UNICEF, UNODC, USAID, and World Bank, *INSPIRE - Seven Strategies for Ending Violence Against Children*. (Geneva: WHO, 2016). [478]
- 272 World Bank Group, *World Development Report 2017 - Governance and the Law*. (Washington DC: The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank, 2017). [848]
- 273 United Nations; World Bank, *Pathways for Peace: Inclusive Approaches to Preventing Violent Conflict*. (Washington, DC: World Bank, 2018), p166. [1255]
- 274 United Nations; World Bank, *Pathways for Peace: Inclusive Approaches to Preventing Violent Conflict*. (Washington, DC: World Bank, 2018), p166. [1255]
- 275 Open Society Institute Sofia, *Promoting Prosecutorial Accountability, Independence and Effectiveness - Comparative Research*. (Sofia: Open Society Institute Sofia, 2008). [1779]
- 276 United Nations and World Bank, *(Re)Building Core Government Functions in Fragile and Conflict Affected Settings - Joint Principles for Assessing Key Issues and Priorities*. (New York and Washington DC: United Nations/World Bank, 2017). [1754]
- 277 Peter Albrecht, Olushegu Garber, Ade Gibson, and Sophy Thomas, *Community Policing in Sierra Leone - Local Policing Partnership Boards*. (Copenhagen: Danish Institute for International Studies, 2014). [1363]
- 278 United Nations; World Bank, *Pathways for Peace: Inclusive Approaches to Preventing Violent Conflict*. (Washington, DC: World Bank, 2018), p167. [1255]
- 279 Lesley Connolly and Laura Powers (eds), *Local Networks for Peace: Lessons from Community-Led Peacebuilding*. (New York: International Peace Institute, 2018). [1790]
- 280 United Nations Human Rights Office of the High Commissioner, "Free, Prior and Informed Consent of Indigenous Peoples," September 2013; accessed December 12, 2018, <https://www.ohchr.org/Documents/Issues/ipeoples/freepriorandinformedconsent.pdf> [1510]
- 281 Extractive Industries Transparency Initiative, *Progress Report 2018*. (Oslo: EITI, 2018). [1259]
- 282 United Nations; World Bank, *Pathways for Peace: Inclusive Approaches to Preventing Violent Conflict*. (Washington, DC: World Bank, 2018), Box 54. [1255]; World Bank Institute, "Advocacy by the Office of the Ombudsman: Enabling Water Reforms Based on Citizens' Feedback in Peru," *Social Accountability Notes*, January 2010; accessed October 29, 2018, http://siteresources.worldbank.org/INTSOCACCEDEMSIDEGOV/Resources/2871813-1200515311988/4577172-1271445400159/notes02_peru.pdf [1258]
- 283 World Bank, *World Development Report 2011 - Conflict, Security and Development*. (Washington DC: World Bank, 2011), p248. [58]

- 284 World Bank, *World Development Report 2011 - Conflict, Security and Development*. (Washington DC: World Bank, 2011), p257. [58]
- 285 United Nations, *Promotion of truth, justice, reparation and guarantees of non-recurrence - Note by the Secretary-General*. UN Doc A/72/523 (2017). [1242]
- 286 World Bank, "International Development Association Project Appraisal Document on a Proposed Grant in the amount of SDR 71.8 Million (US\$ 100 Million equivalent) and a Proposed Grant from the Afghanistan Reconstruction Trust Fund in the amount of US\$ 400 Million to the Islamic Republic of Afghanistan for a Citizens' Charter Afghanistan Project (P160567) (Report No: PAD2019, October 6, 2016). [1693]
- 287 United Nations, "Promotion of truth, justice, reparation and guarantees of non-recurrence - Note by the Secretary-General: Report of the Special Rapporteur on the promotion of truth, justice, reparation and guarantees of non-recurrence," UN Doc: A/72/523, 2017. [1242]
- 288 Martin Luther King, "Nonviolence and Racial Justice," *The Martin Luther King, Jr. Papers Project*, February 6, 1957; accessed March 27, 2019, http://okra.stanford.edu/transcription/document_images/Vol104Scans/118_6-Feb-1957_Nonviolence%20and%20Racial%20Justice.pdf
- 289 Maria J Stephan and Erica Chenoweth, "Why Civil Resistance Works - The Strategic Logic of Nonviolent Conflict," *International Security*, Vol. 33, No. 1 (Summer 2008), pp7-44. [1789]
- 290 See: Civicus, "2018 State of Civil Society Report," accessed April 7, 2019, <https://www.civicus.org/index.php/state-of-civil-society-report-2018>
- 291 Office of the High Commissioner, United Nations Human Rights, "Report of the Special Rapporteur on the promotion of truth, justice, reparation and guarantees of non-recurrence, Pablo de Greiff," UN Doc: A/HRC/30/42 (September 7, 2015). [482]
- 292 United Nations Development Programme, *Journey to Extremism in Africa: Drivers, Incentives and the Tipping Point for Recruitment*. (New York: UNDP, 2017). [1364]
- 293 Richard Carver and Lisa Handley, *Does Torture Prevention Work?* (Liverpool: Liverpool University Press, 2016). [399]
- 294 Association for the Prevention of Torture, "Yes, Torture Prevention Works" - *Insights from a global research study on 30 years of torture prevention*. (Geneva: Association for the Prevention of Torture, 2016), p21. [1671]
- 295 J van Zyl Smit, *Judicial Independence in Latin America - The implications of tenure and appointment processes*. (London: Bingham Centre for The Rule of Law, 2016). [1337]
- 296 Hugh Corder and Jan van Zyl Smit (eds), *Securing Judicial Independence: The Role of Commissions in Selecting Judges in the Commonwealth*. (Cape Town: Siber Ink, 2017). [1791]
- 297 Graeme Simpson, "'From the Normative to the Transformative': Defining and Promoting Justice and Human Rights as Part of Violent Conflict Prevention and Peacebuilding," *Journal of Human Rights Practice*, 9, 2017, 379-400 doi:10.1093/jhuman/hux030, 2017. [1347]
- 298 DCAF (Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces), *The Contribution and Role of SSR in the Prevention of Violent Conflict*. (Geneva: DCAF, 2017), p7. [1361]
- 299 Open Society Justice Initiative, "Against the Odds: CICIG in Guatemala," accessed October 29, 2018, <https://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/against-odds-cicig-guatemala-20160321.pdf>, p87 [1253]
- 300 Lili di Puppo, "Police reform in Georgia - Cracks in an anti-corruption success story," *U4 Practice Insight 2010:2*; accessed November 12, 2018, <https://www.u4.no/publications/police-reform-in-georgia-cracks-in-an-anti-corruption-success-story.pdf> [1341]
- 301 Molly Corso, "Georgia: How Transparent Are Law Enforcement Agencies?" *eurasianet*, May 22, 2012; accessed November 12, 2018, <https://eurasianet.org/georgia-how-transparent-are-law-enforcement-agencies>
- 302 Julinda Beqiraj and Lawrence McNamara, *International Access to Justice: Barriers and Solutions (Bingham Centre for the Rule of Law Report 02/2014)*. (London: International Bar Association, 2014). [887]
- 303 Danish Kayani and Faran Rafi, *Pakistan Votes*. (Islamabad: Coffee Communications, 2013).
- 304 World Bank Group, *G20 Digital Identity Onboarding*. (Washington DC: World Bank Group, 2018). [1816]
- 305 H V Fineberg, "Public Health and Medicine: Where the Twain shall meet," *American Journal of Preventive Medicine*. Volume 41, Issue 4, Supplement 3, ppS149-S151, 2011; accessed January 28, 2019, [https://www.ajpmonline.org/article/S0749-3797\(11\)00514-9/fulltext](https://www.ajpmonline.org/article/S0749-3797(11)00514-9/fulltext) [1585]
- 306 Jackie Dugard and Katherine Drage, "'To whom do the people take their issues?': The Contribution of Community-Based Paralegals to Access to Justice in South Africa," chapter in Vivek Maru and Varun Gauri (eds), *Community Paralegals and the Pursuit of Justice*. (Cambridge, Cambridge University Press, 2018). [1230]
- 307 Thomas D Barton, "Preventive Law and Problem Solving: Lawyering for the Future," 2009, p361. [1245]
- 308 World Bank Group, *World Development Report 2017 - Governance and the Law*. (Washington DC: The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank, 2017). [848]
- 309 Paul Heinrich Neuhaus, "Legal Certainty versus Equity in the Conflict of Laws," 28 *Law and Contemporary Problems* 795-807 (Fall 1963); accessed April 7, 2019, <https://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2981&context=lcp>
- 310 Andrew Hutchison, "How contracts drawn up as comic strips are being put to use in South Africa," *The Conversation*, August 8, 2018; accessed November 23, 2018, <https://theconversation.com/how-contracts-drawn-up-as-comic-strips-are-being-put-to-use-in-south-africa-100835>; Gerlinde Berger-Walliser, Robert C Bird, and Helena Haapio, "Promoting Business Success

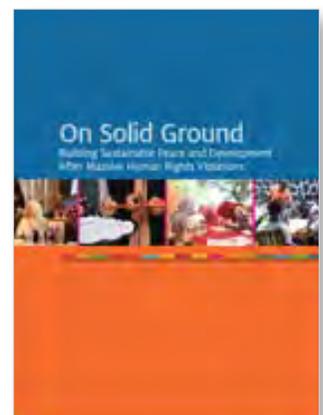
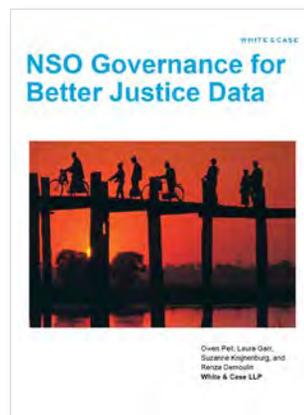
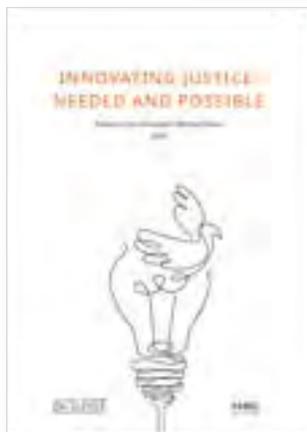
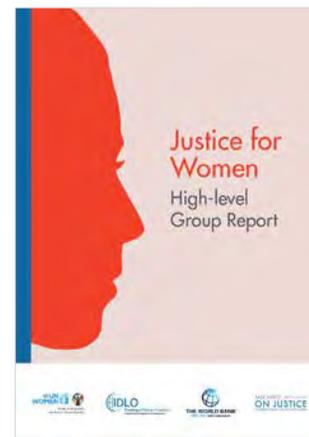
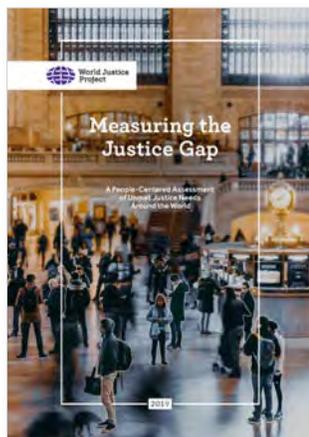
- Through Contract Visualization," *Journal of Law, Business, and Ethics* (2011), vol 17; accessed November 23, 2018, <http://ssrn.com/abstract=1744096> [1353]
- 311 Frank J Elgar, Peter D Donnelly, Valerie Michaelson, Geneviève Gariépy, Kira E Riehm, Sophie D Walsh, and William Pickett, "Corporal punishment bans and physical fighting in adolescents: an ecological study of 88 countries," *BMJ Open* 2018;8:e021616. doi: 10.1136/bmjopen-2018-021616; accessed October 29, 2018, <https://bmjopen.bmj.com/content/8/9/e021616> [1294]
- 312 Paul Heinrich Neuhaus, "Legal Certainty versus Equity in the Conflict of Laws," 28 *Law and Contemporary Problems* 795-807 (Fall 1963); accessed April 7, 2019, <https://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2981&context=lcp>
- 313 United Nations Security Council, "The rule of law and transitional justice in conflict and post-conflict societies - Report of the Secretary-General," UN Doc. S/2004/616", August 23, 2004; accessed January 28, 2019, <https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/PCS%20S%202004%20616.pdf> [1664]
- 314 Tricia D Olsen, Leigh A Payne, and Andrew G Reiter, *Transitional Justice in Balance: Comparing Processes, Weighing Efficacy* (Washington, DC: United States Institute of Peace Press, 2010); Hunjoon Kim and Kathryn Sikkink, "Explaining the Deterrence Effect of Human Rights Prosecutions for Transitional Countries," *International Studies Quarterly* 54, 4 (2010): 939-963; Guillermo Trejo, Juan Albarracin, and Lucia Tiscornia, "Breaking State Impunity in Post-Authoritarian Regimes: Why Transitional Justice Processes Deter Criminal Violence in New Democracies," *Journal of Peace Research* 55, 6 (2018), 787-809; Tove Grete Lie, Helga Malmin Binningsbo, and Scott Gates, "Post-Conflict Justice and Sustainable Peace" World Bank Policy Research Working Paper 4191 (Washington, DC: World Bank, 2007), 17-18; Leigh Payne, Andy Reiter, Chris Mahoney, and Laura Bernal-Bermudez, "Conflict Prevention and Guarantees of Non-Recurrence," Background Paper for UN-World Bank Pathways for Peace study (Washington, DC: World Bank, 2017); Mariam Salehi and Timothy Williams, "Beyond Peace vs. Justice: Assessing Transitional Justice's Impact on Enduring Peace Using Qualitative Comparative Analysis," *Transitional Justice Review* 1, 4 (2016), 96-123.
- 315 See, for example, Tricia D Olsen, Leigh A Payne, and Andrew G Reiter, *Transitional Justice in Balance: Comparing Processes, Weighing Efficacy* (Washington, DC: United States Institute of Peace Press, 2010); Hunjoon Kim and Kathryn Sikkink, "Explaining the Deterrence Effect of Human Rights Prosecutions for Transitional Countries," *International Studies Quarterly* 54, 4 (2010): 939-963; Guillermo Trejo, Juan Albarracin, and Lucia Tiscornia, "Breaking State Impunity in Post-Authoritarian Regimes: Why Transitional Justice Processes Deter Criminal Violence in New Democracies," *Journal of Peace Research* 55, 6 (2018), 787-809 and Transitional Justice Working Group, "Report on Transitional Justice and SDG16+," (Task Force on Justice, background paper, March 2019)
- 316 International Center for Transitional Justice, "What is Transitional Justice?" (New York: ICTJ, 2009); accessed April 7, 2019, <https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Global-Transitional-Justice-2009-English.pdf>
- 317 Transitional Justice Working Group, "Report on Transitional Justice and SDG16+," (Task Force on Justice, background paper, March 2019)
- 318 World Bank Group, *World Development Report 2017 - Governance and the Law*. (Washington DC: The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank, 2017), Box xx. [848]
- 319 Lant Pritchett, Michael Woolcock and Matt Andrews, "Looking Like a State: Techniques of Persistent Failure in State Capability for Implementation," *The Journal of Development Studies*, 49:1, 1-18, DOI: 10.1080/00220388.2012.709614, p9. [1818]
- 320 World Bank Group, *World Development Report 2017 - Governance and the Law*. (Washington DC: The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank, 2017), pxiii. [848]
- 321 Innovation Group, "Innovating justice: needed and possible," (Background paper for the Task Force on Justice, February 4, 2019)
- 322 Pathfinders for Peaceful, Just and Inclusive Societies, "The Argentinians who Bring Justice to the People who Need it Most," March 1, 2019; accessed April 7, 2019, <https://medium.com/sdg16plus/the-argentinians-who-bring-justice-to-the-people-who-need-it-most-efee671c0043>
- 323 Action Committee on Access to Justice in Civil and Family Matters, *Access to Civil & Family Justice - A Roadmap for Change*. (Ottawa: Action Committee on Access to Justice in Civil and Family Matters, 2013). [1311]
- 324 Law Council of Australia, *The Justice Project Final Report*. (Sydney: Law Council of Australia, 2018). [1236]
- 325 Law Council of Australia, *The Justice Project Final Report*. (Sydney: Law Council of Australia, 2018). [1236]
- 326 Vivek Maru and Varun Gauri (eds), *Community Paralegals and the Pursuit of Justice*. (Cambridge: Cambridge University Press, 2018), Indonesia chapter. [1230]
- 327 Vivek Maru and Varun Gauri (eds), *Community Paralegals and the Pursuit of Justice*. (Cambridge: Cambridge University Press, 2018), Introduction. [1230]
- 328 World Bank Group, *World Development Report 2017 - Governance and the Law*. (Washington DC: The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank, 2017). [848]
- 329 World Bank Group, *World Development Report 2017 - Governance and the Law*. (Washington DC: The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank, 2017). [848]
- 330 Pathfinders for Peaceful, Just and Inclusive Societies, "The Argentinians who Bring Justice to the People who Need it Most," March 1, 2019; accessed April 7, 2019, <https://medium.com/sdg16plus/the-argentinians-who-bring-justice-to-the-people-who-need-it-most-efee671c0043>
- 331 Mark Hughes-Morgan, *Building the reputation of Dubai International Financial Centre (DIFC) Courts - Said Business School Cases*. (Oxford: University of Oxford, 2015). [1346]
- 332 Gillian K Hadfield, "More Markets, More Justice," *Daedalus*, 148 (1), Winter 2019. [1615]
- 333 Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children, *Ending legalised violence against children - global progress to December 2017*. (London: Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children, 2017); accessed October 29, 2018, <http://endcorporalpunishment.org/wp-content/uploads/global/Global-report-2017-singles.pdf> [1291]

- 334 Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children, *Ending legalised violence against children - global progress to December 2017*. (London: Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children, 2017); accessed October 29, 2018, <http://endcorporalpunishment.org/wp-content/uploads/global/Global-report-2017-singles.pdf> [1291]
- 335 High-level Group on Justice for Women, *Justice for Women - High-level Group Report*. (New York: UN Women, IDLO, World Bank and Task Force on Justice, 2019), p23. [1814]
- 336 Daniel Ayalew Ali, et al. "Empowering Women through Land Tenure Regularization: Evidence from the Impact Evaluation of the National Program in Rwanda (English)," Development research group case study. (Washington DC: World Bank, 2015)
- 337 World Health Organization, "Declaration of Alma-Ata: International Conference on Primary Health Care, Alma-Ata, USSR, 6-12 September 1978," accessed January 28, 2019, https://www.who.int/publications/almaata_declaration_en.pdf
- 338 International Finance Corporation, *Investing in Women: New Evidence for the Business Case*. (Washington DC: International Finance Corporation, 2017). [1641]
- 339 World Economic Forum, *The Global Competitiveness Report 2017-2018*. (Geneva: World Economic Forum, 2018), Appendix C, Table 1.06.
- 340 Gillian K Hadfield, "More Markets, More Justice," *Daedalus*, 148 (1), Winter 2019. [1615]
- 341 Transparency International, *People and Corruption: Citizens' Voices from Around the World*. (Berlin: Transparency International, 2017). [1820]
- 342 See: Justice Leadership Group, accessed April 7, 2019, <http://justiceleaders.org/leadership/>
- 343 World Bank Group, *World Development Report 2017 - Governance and the Law*. (Washington DC: The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank, 2017). [848]
- 344 OECD and World Justice Project, "Building a Business Case for Access to Justice - An OECD White Paper in collaboration with the World Justice Project: Preliminary draft," 2018. [1755]
- 345 Tim Williamson, *Change in Challenging Contexts: How does it happen? - Executive Summary*. (London: Overseas Development Institute, 2015). [1642]
- 346 Cámara de Comercio de Bogotá. *Scope of the peace strategy*. Accessed April 15, 2019. <http://www.ccb.org.co/en/Transformar-Bogota/Peace/Scope-of-the-peace-strategy>
- 347 FICOSEC, "Transforming Chihuahua into Mexico's Safest State," (Presentation, undated). [1821]
- 348 Pathfinders for Peaceful, Just and Inclusive Societies, *The Roadmap for Peaceful, Just and Inclusive Societies - A Call to Action to Change our World*. (New York: Center on International Cooperation, 2017), p41.
- 349 Center on International Cooperation. "Challenge paper: Justice as Prevention," (Background paper for the Task Force on Justice, Discussion Draft 14 December 2018).
- 350 International Bar Association, *The Role of the Universal Periodic Review in Advancing Children's Rights in Juvenile Justice*. (London: International Bar Association, 2018). [1793]
- 351 "Declaration on Equal Access to Justice for All by 2030," Adopted at the Ministerial Roundtable on Access to Justice, in the Peace Palace in The Hague on February 7, 2019. [1822]
- 352 Peter Chapman, Sandra Elena, Surya Khanna, and Open Government Partnership, "Opening justice: Access to justice, open judiciaries, and legal empowerment through the Open Government Partnership - working draft," accessed April 7, 2019, https://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/opening_justice_working_draft_public_version.pdf [1636]
- 353 See: Merriam Webster, "Merriam-Webster's Words of the Year 2018," accessed January 28, 2019, <https://www.merriam-webster.com/words-at-play/word-of-the-year-2018-justice>
- 354 Eliza Ennis and Lauren Wolfe, *#MeToo - The Women's Media Center Report*. (Washington DC: Women's Media Center, 2018). [1643]; accessed June 7, 2019, http://www.womensmediacenter.com/assets/site/reports/media-and-metoo-how-a-movement-affected-press-coverage-of-sexual-assault/Media_and_MeToo_Womens_Media_Center_report.pdf; Andrew Morrison, "La aportación de la economía en la era de #NiUnaMenos," *El País*, November 24, 2018; accessed June 7, 2019, https://elpais.com/elpais/2018/11/22/planeta_futuro/1542890933_480822.html; Liz Ford, "A gift to feminists: how Trump's 'gag rule' inspired a worldwide movement," *The Guardian*, December 28, 2018; accessed June 7, 2019, <https://www.theguardian.com/global-development/2018/dec/26/how-trump-gag-rule-inspired-worldwide-movement-shedecides>
- 355 Nicholas Zaremba and Tabatha Thompson, "Effectively Fighting Corruption Without Violence; Sudanese Learn How to Safely Organize for Civil Resistance," *United States Institute for Peace*, August 30, 2017; accessed January 28, 2019, <https://www.usip.org/publications/2017/08/effectively-fighting-corruption-without-violence>
- 356 "The Arab Spring: A Year of Revolution," *NPR*, December 17, 2011; accessed January 28, 2019, <https://www.npr.org/2011/12/17/143897126/the-arab-sprin-a-year-of-revolution>
- 357 Open Government Partnership, "Exploring Open Justice, a New Frontier in Open Government Reform," May 21, 2018; accessed January 28, 2019, <https://www.opengovpartnership.org/stories/exploring-open-justice-new-frontier-open-government-reform>
- 358 Sandra Elena, "Open Justice: An Innovation-Driven Agenda for Inclusive Societies," *Biblioteca Digital*; accessed June 19, 2019, <http://www.biblioteca digital.gov.ar/items/show/2569>, p.32
- 359 OECD and Open Society Justice Initiative, *Legal Needs Surveys and Access to Justice - launch copy*. (Paris and New York: OECD/OSF, 2018). [1492]; United Nations Office on Drugs and Crime and United Nations Economic Commission for Europe, *Manual on Victimization Surveys*. (Geneva: United Nations, 2010). [358]
- 360 Ministry of Justice, *Justice Impact Test - Guidance*. (London: Ministry of Justice, 2018). [1608]
- 361 Lawrence W Sherman, *The Rise of Evidence-Based Policing: Targeting, Testing, and Tracking*. (Chicago IL: University of Chicago, 2013). [1274]

- 362 Innovation Group, "Innovating justice: needed and possible," (Background paper for the Task Force on Justice, February 4, 2019)
- 363 See: Hiil, "Justice Accelerator: for Partners," accessed April 7, 2019, <https://www.hiil.org/what-we-do/the-justice-accelerator/partners/>
- 364 See: UNDP, "Accelerator Labs," accessed April 7, 2019, <https://acceleratorlabs.undp.org/>
- 365 See: apolitical, "Mapped: The innovation labs transforming government – and how to get in touch," accessed April 7, 2019, <https://apolitical.co/government-innovation-lab-directory/>
- 366 Hiil, "The Chief Innovation Officer of a Ministry of Justice," July 24, 2018; accessed April 7, 2019, <https://www.hiil.org/news/the-chief-innovation-officer-of-a-ministry-of-justice/>
- 367 Jules Verdone and Carl Matthies, *Cost-Benefit Analysis and Public Safety Technology: A Roundtable Discussion*. (New York: Vera Institute of Justice, 2014).[777]
- 368 Abigail Moy, Stacey Cram, and Vivek Maru, "The Case to Fund and Protect Grassroots Justice Defenders: Policy Brief," *Justice for All*, January 20, 2019; accessed March 27, 2019, <https://www.justiceforall2030.org/tools/case-to-fund-protect-grassroots-justice-defenders/> [1640]
- 369 OECD, *Making Blended Finance Work for the Sustainable Development Goals*. (Paris: OECD, 2018).
- 370 M Willis and M Kapira, *Justice Reinvestment in Australia: A Review of the Literature*. (Canberra: Australian Institute of Criminology, 2018).
- 371 Abigail Moy, Stacey Cram, and Vivek Maru, "The Case to Fund and Protect Grassroots Justice Defenders: Policy Brief," *Justice for All*, January 20, 2019; accessed April 7, 2019, <https://www.justiceforall2030.org/tools/case-to-fund-protect-grassroots-justice-defenders/> [1640]
- 372 Pathfinders for Peaceful, Just and Inclusive Societies, *The Roadmap for Peaceful, Just and Inclusive Societies – A Call to Action to Change our World*. (New York: Center on International Cooperation, 2017).
- 373 Andrew Green, "HIV in Mozambique: starting, and staying on, treatment," *The Lancet*, vol 387, January 30, 2016; accessed April 7, 2019, [https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736\(16\)00213-0/fulltext](https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(16)00213-0/fulltext) [1823] and Namati. "Realizing the Right to Health," accessed April 15, 2019, <https://namati.org/ourwork/health/>
- 374 Stavros Zouridis, "From Justice Archipelago to Security and Justice Chain: Strategy-Organisation Configurations in the Dutch Criminal Justice System," Chapter 6 in A. Hondeghem et al. (eds.), "Modernisation of the Criminal Justice Chain and the Judicial System," *Ius Gentium: Comparative Perspectives on Law and Justice* 50, DOI 10.1007/978-3-319-25802-7_6[1542]
- 375 United States Department of Justice, "Presidential Memorandum – Memorandum for the Heads of Executive Departments and Agencies," October 24, 2018; accessed April 7, 2019, <https://www.justice.gov/olp/presidential-memorandum>
- 376 IDLO, "Justice from the Ground Up: Strengthening Mali's Justice Chain," June 29, 2017; accessed December 21, 2018, <https://www.idlo.int/news/highlights/justice-ground-strengthening-malis-justice-chain>
- 377 Stavros Zouridis, "From Justice Archipelago to Security and Justice Chain: Strategy-Organisation Configurations in the Dutch Criminal Justice System," Chapter 6 in A. Hondeghem et al. (eds.), "Modernisation of the Criminal Justice Chain and the Judicial System," *Ius Gentium: Comparative Perspectives on Law and Justice* 50, DOI 10.1007/978-3-319-25802-7_6[1542]
- 378 UNICEF, *Justice for Children: Detention as a Last Resort - Innovative Initiatives in the East Asia and Pacific Region*. (Bangkok: United Nation's Children Fund, undated). [1824]
- 379 UNDP, UNICEF and UN Women, *Informal Justice Systems - Charting a course for human-rights based engagement*. (New York: UNDP, UNICEF and UN Women, undated). [1506]
- 380 Rhodri Williams, *Judges as Peacebuilders: How Justice Sector Reform Can Support Prevention in Transitional Settings*. (Solna: International Legal Assistance Consortium, 2018). [1164]
- 381 IDLO, "Justice from the Ground Up: Strengthening Mali's Justice Chain," June 29, 2017; accessed December 21, 2018, <https://www.idlo.int/news/highlights/justice-ground-strengthening-malis-justice-chain>
- 382 OSCE and ODIHR, "Strengthening Judicial Independence and Public Access to Justice - Consolidated Summary," (paper prepared for OSCE Human Dimension Seminar, Warsaw, 17-19 May 2010); accessed January 28, 2019, <https://www.osce.org/odihr/70836?download=true> [1644]
- 383 See: UNESCO, "UNESCO observatory of killed journalists," accessed January 28, 2019, <https://en.unesco.org/themes/safety-journalists/observatory>
- 384 Front Line Defenders, *Annual Report on Human Rights Defenders At Risk in 2017*. (Blackrock, Co Dublin: Front Line, the International Foundation for the Protection of Human Rights Defenders, 2017) [1645]
- 385 See: Namati "2017 Annual Network Survey Results," accessed January 28, 2019, <https://namati.org/wp-content/uploads/2018/06/2017-Annual-Network-Survey.pdf> [1646]
- 386 "Americas: Historic environmental and human rights treaty gains momentum as 12 countries sign," *Amnesty International*, September 27, 2018; accessed June 7, 2019, <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/09/americas-12-countries-sign-historic-environmental-treaty/>
- 387 Abigail Moy, Stacey Cram, and Vivek Maru, "The Case to Fund and Protect Grassroots Justice Defenders: Policy Brief," *Justice for All*, January 20, 2019; accessed January 28, 2018, <https://www.justiceforall2030.org/tools/case-to-fund-protect-grassroots-justice-defenders/> [1640]
- 388 Action Committee on Access to Justice in Civil and Family Matters, *Access to Civil & Family Justice - A Roadmap for Change*. (Ottawa: Action Committee on Access to Justice in Civil and Family Matters, 2013).
- 389 IDLO, *Women Delivering Justice: Contributions, Barriers, Pathways*. (Rome: IDLO, 2018).
- 390 See, for example: https://e-justice.europa.eu/content_legal_professions_and_justice_networks-20-en.do; and <https://whatworks.college.police.uk/Support/Pages/epc.aspx>



Laporan Keadilan bagi Semua (Justice for All) tersedia dalam bahasa Inggris, Spanyol, dan Prancis. Laporan ini dikembangkan berdasarkan serangkaian laporan dari kelompok kerja dan penelitian lain yang disusun. Laporan ini dan bahan-bahan lain dapat diunduh dari: www.justice.sdg16.plus/report



Satuan Tugas Keadilan adalah inisiatif dari Pathfinders for Peaceful, Just, and Inclusive Societies, kemitraan multi-pemangku kepentingan yang menyatukan negara-negara anggota PBB, organisasi internasional, masyarakat sipil, dan sektor swasta untuk mempercepat pencapaian target TPB untuk perdamaian, keadilan dan penyertaan atau inklusi.

Satuan Tugas ini diketuai oleh menteri dari Argentina, Belanda, dan Sierra Leone, dan oleh the Elders.

TASK FORCE 
ON JUSTICE
PATHFINDERS FOR PEACEFUL, JUST AND INCLUSIVE SOCIETIES

